



BANK INDONESIA  
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN PEREKONOMIAN Provinsi Jawa Timur

AGUSTUS 2025





Publikasi ini dapat diakses secara *online* pada:

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Jawa-Timur-Agustus-2025.aspx>

Salinan publikasi ini juga dapat diperoleh dengan menghubungi:

**Kelompok Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi**

**Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur**

Jl. Pahlawan No.105 Surabaya, 60175 Indonesia

[Email] KPwJatim-KPKP@bi.go.id



## **VISION** **Bank Indonesia**

Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia Maju



## **MISSION** **Bank Indonesia**

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia; dan
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur Agustus 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan perekonomian triwulanan ini disusun sebagai pemenuhan akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia sekaligus sebagai upaya memenuhi kebutuhan informasi bagi mitra utama dan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Laporan ini mencakup mengenai perkembangan ekonomi makroregional, keuangan pemerintah, inflasi daerah, pembiayaan daerah dan pengembangan akses keuangan serta UMKM, penyelenggaraan sistem pembayaran, ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat, serta prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi Jawa Timur.

Perekonomian Jawa Timur pada triwulan II 2025 terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, kinerja ekonomi Jawa Timur tercatat tumbuh 5,23% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2025 yang tumbuh sebesar 5,00% (yoy). Dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan ekonomi didorong oleh lebih tingginya kinerja investasi, serta ekspor barang dan jasa. Kendati mengalami moderasi, konsumsi rumah tangga (RT) yang tetap tumbuh positif turut mendukung solidnya kinerja ekonomi pada triwulan laporan. Dari sisi lapangan usaha (LU) utama, kinerja LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, LU Konstruksi, serta LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menopang peningkatan pertumbuhan ekonomi, di tengah perlambatan pertumbuhan LU Pertanian seiring pergeseran masa panen raya padi di triwulan I 2025.

Inflasi Provinsi Jawa Timur pada akhir triwulan II 2025 tercatat sebesar 2,02% (yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan I 2025 (0,77%; yoy). Peningkatan inflasi tersebut utamanya pasokan yang tertahan karena berakhirnya musim panen raya dan kondisi cuaca kemarau basah yang menyebabkan budidaya tanaman hortikultura kurang kondusif. Kendati demikian, inflasi masih berada di dalam rentang sasaran target inflasi. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID se-Jawa Timur melalui sinergi upaya menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kestabilan harga, dan komunikasi efektif (4K).

Ketahanan sektor korporasi dan rumah tangga Jawa Timur pada triwulan II 2025 terpantau tetap solid. Hal ini tecermin dari penyaluran kredit yang melanjutkan pertumbuhan positif, disertai dengan kualitas kredit yang terjaga. Lebih lanjut, risiko kredit terpantau masih terjaga dalam batas aman, tecermin dari rasio *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 3,26%. Dari sisi permodalan, tingkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terpantau meningkat ke level 29,12%, menunjukkan bahwa bank memiliki ketahanan yang baik dalam menghadapi potensi risiko ke depan di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Pada tahun 2025, perekonomian Jawa Timur diprakirakan tetap kuat dengan tumbuh di kisaran 4,7-5,5% (yoy), ditopang investasi, serta permintaan eksternal yang tetap tumbuh positif sejalan dengan prospek perekonomian mitra dagang utama Jawa Timur. Sementara itu, tingkat inflasi Provinsi Jawa Timur diprakirakan tetap terjaga di kisaran sasaran inflasi 2,5%±1% (yoy), didukung oleh upaya TPID Provinsi Jawa Timur untuk menjaga kestabilan inflasi melalui a.l. GNPIP.

Dalam penyusunan laporan ini, Bank Indonesia memanfaatkan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak antara lain BPS Provinsi Jawa Timur, OJK Provinsi Jawa Timur, Perbankan, OPD Pemprov Jawa Timur, dan asosiasi pelaku usaha di wilayah Jawa Timur. Atas bantuan dan kerja sama tersebut, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Harapan kami, hubungan kemitraan yang terjalin baik selama ini dapat dijaga dan lebih ditingkatkan di masa mendatang. Kami juga mengharapkan masukan dan saran untuk lebih meningkatkan kualitas laporan ini agar dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita semua dalam menjalankan tugas-tugas kita masing-masing untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi Provinsi Jawa Timur, serta bangsa dan negara

Surabaya, Agustus 2025  
**Kepala Perwakilan Bank Indonesia  
Provinsi Jawa Timur**

ttd.

**Ibrahim**  
Direktur Eksekutif

## DAFTAR ISI

ii	Visi dan Misi Bank Indonesia
iii	Kata Pengantar
iv	Daftar Isi
vi	Daftar Grafik
xii	Daftar Tabel
xiv	Ringkasan Eksekutif
xx	Tabel Indikator Ekonomi

## 01 Perkembangan Ekonomi Makro Regional

1.1.	Kondisi Umum Perekonomian Jawa Timur	2
1.2.	PDRB Sisi Pengeluaran	4
1.2.1.	Konsumsi	4
1.2.2.	Investasi	7
1.2.3.	Ekspor – Impor	8
1.3.	PDRB Sisi Lapangan Usaha	11
1.3.1.	Industri Pengolahan	11
1.3.2.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12
1.3.3.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13
1.3.4.	Konstruksi	14
1.3.5.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15

## 02 Keuangan Pemerintah

2.1.	Gambaran Umum	30
2.2.	APBN di Provinsi Jawa Timur Tahun 2025	30
2.3.	APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025	33
2.3.1.	Pendapatan Daerah APBD Provinsi Jawa Timur	33
2.3.2.	Belanja Daerah APBD Provinsi Jawa Timur	36
2.4.	APBD 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur	38
2.4.1.	Pendapatan Daerah APBD Kabupaten/Kota	38
2.4.2.	Belanja Daerah APBD Gabungan Kabupaten/Kota	41

## 03 Perkembangan Inflasi

3.1.	Kondisi Umum	48
3.2.	Kinerja Inflasi Jawa Timur	48
3.2.1.	Perkembangan Inflasi Triwulan II 2025	48
3.2.2.	Analisis Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa	49
3.3.	Analisis Inflasi Spasial Jawa Timur	54
3.4.	Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	55
3.5.	Tracking Inflasi Triwulan III 2025	56



## 04 Pembiayaan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

4.1.	Kondisi Umum	68
4.2.	Pembiayaan Daerah di Jawa Timur	68
4.2.1.	Dana Pihak Ketiga	68
4.2.2.	Penyaluran Kredit	70
4.2.3.	<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	71
4.3.	Perkembangan Kinerja Korporasi	71
4.3.1.	Kinerja Umum Korporasi	71
4.3.2.	Eksposur Perbankan pada Sektor Korporasi	71
4.4.	Perkembangan Kinerja Rumah Tangga	73
4.4.1.	Kinerja Umum Rumah Tangga	73
4.4.2.	Eksposur Perbankan pada Rumah Tangga	74
4.5.	Perkembangan Akses Keuangan dan UMKM	76
4.5.1.	Eksposur Perbankan pada UMKM	76
4.5.2.	Perkembangan Program Akses Keuangan dan UMKM	78

## 05 Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

5.1.	Kondisi Umum	88
5.2.	Perkembangan Sistem Pembayaran di Jawa Timur	88
5.2.1.	Sistem Pembayaran Tunai	88
5.2.2.	Sistem Pembayaran	89
5.3.	Upaya Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran	95
5.3.1.	Penanganan Uang Palsu	95
5.3.2.	Penyediaan Uang Rupiah	95
5.3.3.	Pengembangan Layanan Keuangan Nontunai	96

## 06 Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

6.1.	Gambaran Umum	102
6.2.	Kesejahteraan	102
6.2.1.	Perkembangan Ketenagakerjaan Jawa Timur	102
6.3.	Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan	104
6.3.1.	Kesejahteraan Petani	104
6.3.2.	Kesejahteraan Nelayan	106
6.3.3.	Kesejahteraan Peternak	106
6.4.	Ketenagakerjaan	107
6.4.1.	Perkembangan Ketenagakerjaan Jawa Timur	107

## 07 Prospek Perekonomian Daerah

7.1.	Prospek Ekonomi Jawa Timur Tahun 2025	116
7.1.1.	Sisi Pengeluaran	117
7.1.2.	Sisi Lapangan Usaha	118
7.2.	Prospek Inflasi Jawa Timur Tahun 2025	120

## BOKS

Boks 1.	Mengakselerasi Pertumbuhan Inklusif melalui Pemerataan Daya Saing Jawa Timur	17
Boks 2.	Perkembangan Kebijakan Tarif Resiproskal AS: Menakar Risiko dan Peluang Perekonomian Jawa Timur	19
Boks 3.	<i>High Level Meeting</i> Forum Investasi dan <i>East Java Investment Dialogue</i> : Langkah Strategis Dukungan Investasi Provinsi Jawa Timur	24
Boks 4.	EJAVEC: Mendorong Perekonomian Jawa Timur Melalui Kajian yang Terstruktur	58
Boks 5.	Penguatan Hilirisasi Agro Jawa Timur: Integrasi Pertanian dan Industri Agro dalam Rantai Nilai Lokal melalui Pendekatan Spasial dan Identifikasi Wilayah Potensial	61
Boks 6.	Pelaksanaan <i>Road to KKI</i> Jawa Timur 2025: Sinergi dan Kolaborasi dalam Upaya Mendorong Inovasi pada UMKM untuk Menembus Pasar Global dan Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.	82
Boks 7.	Strategi Integrasi untuk Daya Saing Ekonomi: Sinergi Industri Padat Modal & Padat Karya di Jawa Timur	110
Boks 8.	Menjembatani Wilayah, Mendorong Ekonomi: Pengaruh Jalan Tol Trans Jawa terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur	124



# Grafik



Grafik 1.1	Perekonomian Jawa Timur, Jawa, Nasional	2	Grafik 1.18	Neraca Perdagangan Jawa Timur	8
Grafik 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Jawa	2	Grafik 1.19	Pertumbuhan Ekspor Jawa Timur berdasarkan Negara Tujuan Utama	9
Grafik 1.3	Pertumbuhan Konsumsi Swasta, Rumah Tangga dan LNPRT	4	Grafik 1.20	Pertumbuhan Ekspor Jawa Timur berdasarkan Negara Tujuan Utama (Swiss)	9
Grafik 1.4	Keyakinan Konsumen dan Konsumsi Barang Tahan Lama	4	Grafik 1.21	Pertumbuhan Ekspor Jawa Timur berdasarkan Komoditas Utama	9
Grafik 1.5	Penjualan Kendaraan Sepeda Motor	5	Grafik 1.22	Pertumbuhan Barang Muat Bandara Juanda dan Pelabuhan Tanjung Perak	10
Grafik 1.6	Konsumsi Listrik Rumah Tangga	5	Grafik 1.23	Pertumbuhan Impor LN Jawa Timur	10
Grafik 1.7	Pertumbuhan Transaksi APMK	5	Grafik 1.24	Pertumbuhan Komoditas Utama Impor LN Jawa Timur	10
Grafik 1.8	Sumber Pembiayaan Konsumsi Rumah Tangga	5	Grafik 1.25	Pertumbuhan Barang Bongkar Bandara Juanda	10
Grafik 1.9	Pertumbuhan DPK Perbankan Sektor Rumah Tangga Berdasarkan Komponen, Triwulan I 2025 – Triwulan II 2025	6	Grafik 1.26	Kondisi Usaha LU Industri Pengolahan dan <i>Prompt Manufacturing Index (PMI) Jawa Timur</i>	11
Grafik 1.10	Pertumbuhan DPK Perbankan Sektor Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Nilai, Triwulan I 2025 – Triwulan II 2025	6	Grafik 1.27	<i>Prompt Manufacturing Index (PMI) Sub LU Industri Pengolahan Jawa Timur</i>	11
Grafik 1.11	Perkembangan Realisasi Belanja Operasi, Pegawai, dan Barang Jasa APBD Provinsi dan Kab/Kota Jawa Timur	6	Grafik 1.28	Perkembangan Konsumsi Listrik Industri	11
Grafik 1.12	Perkembangan Realisasi Belanja Bansos APBN di Jawa Timur dan APBD Prov. Jawa Timur	6	Grafik 1.29	Perkembangan Ekspor Industri Pengolahan [Makanan, Kimia, Kayu]	11
Grafik 1.13	Pertumbuhan Investasi Jawa Timur	7	Grafik 1.30	Perkembangan Ekspor Industri Pengolahan [Logam, Lainnya]	12
Grafik 1.14	Kondisi Investasi Dunia Usaha Jawa Timur	7	Grafik 1.31	Perkembangan Komoditas Utama Ekspor Industri Pengolahan	12
Grafik 1.15	Pertumbuhan Komponen Impor Barang Pendukung Konstruksi Jawa Timur	8	Grafik 1.32	Perkembangan Ekspor LN Non Migas Jawa Timur	12
Grafik 1.16	Investasi Penanaman Modal Jawa Timur	8	Grafik 1.33	Perkembangan Muat Barang Luar Negeri Pelabuhan Tanjung Perak	12
Grafik 1.17	Pertumbuhan Komponen Impor Barang Modal Jawa Timur	8			



# Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur Agustus 2025

Grafik 1.34	Perkembangan Penjualan Eceran Berdasarkan Komponen	13	Grafik 2.6	Realisasi Belanja TKDD 2024-2025	32
Grafik 1.35	Pertumbuhan Kredit Modal Kerja LU Perdagangan	13	Grafik 2.7	Realisasi Belanja APBN 2024-2025 Berdasarkan Fungsi	33
Grafik 1.36	Pertumbuhan Produksi Padi dan Jagung Jawa Timur	13	Grafik 2.8	Komposisi Realisasi Belanja APBN s.d. Triwulan II 2025	33
Grafik 1.37	Pertumbuhan Produksi Cabai Besar Jawa Timur	13	Grafik 2.9	Perkembangan Pagu Anggaran APBD Jawa Timur Tahun 2021-2025	33
Grafik 1.38	Realisasi Kegiatan Usaha LU Konstruksi	14	Grafik 2.10	Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal APBD Provinsi Jawa Timur	34
Grafik 1.39	Pertumbuhan Impor Barang Konstruksi	14	Grafik 2.11	Perkembangan Rasio Ketergantungan APBD Provinsi Jawa Timur	34
Grafik 1.40	Perkembangan Konsumsi Semen	15	Grafik 2.12	Realisasi Pendapatan Daerah s.d. Triwulan II 2021-2025	35
Grafik 1.41	Penyaluran Kredit Investasi di LU Konstruksi	15	Grafik 2.13	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) s.d. Trwulan II 2021-2025	35
Grafik 1.42	Kegiatan Usaha LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16	Grafik 2.14	Realisasi Pajak Daerah s.d. Triwulan II 2024-2025	35
Grafik 1.43	Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)	16	Grafik 2.15	Realisasi Retribusi Daerah s.d. Triwulan II 2024-2025	35
Grafik 1.44	Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)	16	Grafik 2.16	Anggaran Belanja APBD Provinsi Jawa Timur 2020-2025	37
Grafik 1.45	Pertumbuhan Penjualan Komponen Makanan Minuman	16	Grafik 2.17	Postur Anggaran Belanja APBD Provinsi Jawa Timur 2020-2025	37
Grafik 2.1	Realisasi Pendapatan Pemerintah di Provinsi Jawa Timur s.d. Triwulan II 2024-2025	30	Grafik 2.18	Anggaran Belanja Operasi APBD Provinsi Jawa Timur 2020-2025	37
Grafik 2.2	Realisasi Belanja Pemerintah di Provinsi Jawa Timur s.d. Triwulan II 2024-2025	30	Grafik 2.19	Anggaran Belanja Modal APBD Provinsi Jawa Timur 2020-2025	37
Grafik 2.3	Postur Anggaran Belanja K/L APBN di Jawa Timur Tahun 2021-2025	32	Grafik 2.20	Komposisi Realisasi Belanja Daerah s.d. Triwulan II 2021-2025	37
Grafik 2.4	Postur Anggaran Belanja APBN Berdasarkan Fungsi 2025	32	Grafik 2.21	Persen Realisasi Belanja Daerah s.d. Triwulan II 2021-2025	37
Grafik 2.5	Realisasi Belanja K/L s.d. Triwulan II 2024-2025	32			

# Grafik



Grafik 2.22	Realisasi Belanja Operasi s.d. Triwulan II 2023-2025	38	Grafik 2.36	Realisasi Belanja Operasi Kabupaten/Kota di Jawa Timur s.d. Triwulan II 2025	44
Grafik 2.23	Realisasi Belanja Modal s.d. Triwulan II 2023-2025	38	Grafik 2.37	Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Jawa Timur s.d. Triwulan II 2025	44
Grafik 2.24	Perbandingan Postur Anggaran Pendapatan 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2021-2025	39	Grafik 2.38	Persentase Realisasi Belanja Daerah 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur s.d. Triwulan II 2025	44
Grafik 2.25	Komposisi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur	39	Grafik 3.1	Perkembangan Inflasi Jawa Timur dan Nasional (yoy)	48
Grafik 2.26	DOF Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2024-2025 (berdasarkan anggaran)	39	Grafik 3.2	Inflasi Provinsi di Jawa Triwulan II 2025 (yoy)	48
Grafik 2.27	Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah s.d. Triwulan II 2021-2025	40	Grafik 3.3	Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	49
Grafik 2.28	Realisasi PAD s.d. Triwulan II 2023-2025	40	Grafik 3.4	Perkembangan Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau	50
Grafik 2.29	Persentasi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur s.d. Triwulan II 2025	40	Grafik 3.5	Perkembangan Produksi dan Harga Cabai Rawit di Jawa Timur	51
Grafik 2.30	Perbandingan Postur Anggaran Belanja 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2021-2025	41	Grafik 3.6	Perkembangan Produksi dan Harga Bawang Merah di Jawa Timur	51
Grafik 2.31	Perbandingan Postur Anggaran Belanja 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2021-2025	41	Grafik 3.7	Perkembangan Harga Kopi Arabica Dunia	51
Grafik 2.32	Perbandingan Anggaran Belanja Operasi 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2024-2025	42	Grafik 3.8	Perkembangan Rerata Harga CPO dan Minyak Goreng	51
Grafik 2.33	Rasio Anggaran Belanja Modal 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024-2025	43	Grafik 3.9	Perkembangan Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	51
Grafik 2.34	Realisasi Belanja Kabupaten/Kota di Jawa Timur s.d. Triwulan II 2025	43	Grafik 3.10	Perkembangan Rerata Harga Emas Global dan Emas Perhiasan Domestik	52
Grafik 2.35	Komposisi Realisasi Belanja Kabupaten/Kota di Jawa Timur s.d. Triwulan II 2025	43	Grafik 3.11	Perkembangan Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	52
			Grafik 3.12	Perkembangan Inflasi Kelompok Transportasi	53



# Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur Agustus 2025

Grafik 3.13	Perkembangan Pembelian Kendaraan Bermotor Roda 4 (kumulatif)	53	Grafik 4.11	Perkembangan Pertumbuhan Kredit Korporasi Sektor Utama Jawa Timur	72
Grafik 3.14	Perkembangan Pembelian Kendaraan Bermotor Roda 2 (kumulatif)	53	Grafik 4.12	Perkembangan Rasio NPL Kredit Korporasi	72
Grafik 3.15	Perkembangan Jumlah Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang Domestik di Bandara Juanda, Surabaya	53	Grafik 4.13	Pertumbuhan DPK Korporasi	73
Grafik 3.16	Perkembangan Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	54	Grafik 4.14	Perkembangan Suku Bunga Tertimbang DPK Korporasi	73
Grafik 3.17	Capaian Inflasi 11 Kab/Kota IHK di Jawa Timur (%yoy)	54	Grafik 4.15	Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga Kredit Rumah Tangga	74
Grafik 4.1	Perkembangan Pertumbuhan Aset Perbankan di Jawa Timur	68	Grafik 4.16	Pangsa Kredit RT Jawa Timur Berdasarkan Jenis Kredit	74
Grafik 4.2	Perkembangan Pangsa Kepemilikan Aset Perbankan	68	Grafik 4.17	Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga KPR-KPA	75
Grafik 4.3	Perkembangan Pertumbuhan DPK Bank Umum	69	Grafik 4.18	Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga KKB	75
Grafik 4.4	Perkembangan Rasio CASA Bank Umum	69	Grafik 4.19	Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga Kredit Multiguna	75
Grafik 4.5	Perkembangan Pertumbuhan Penyaluran Kredit Bank Umum Berdasarkan Lokasi Proyek	70	Grafik 4.20	Perkembangan Pertumbuhan DPK RT	76
Grafik 4.6	Perkembangan BI Rate dan Suku Bunga Bank Tertimbang	71	Grafik 4.21	Perkembangan Suku Bunga Tertimbang DPK RT	76
Grafik 4.7	Perkembangan Rasio NPL Bank Umum	71	Grafik 4.22	Share Kredit UMKM Terhadap Total Kredit di Jawa Timur	77
Grafik 4.8	Perkembangan Loan At Risk (LAR) Bank Umum	71	Grafik 4.23	Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM Perbankan di Jawa Timur	77
Grafik 4.9	Perkembangan Loan To Deposit (LDR) Bank Umum	71	Grafik 4.24	Perkembangan Pangsa Kredit UMKM Sektoral	77
Grafik 4.10	Perkembangan Pertumbuhan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis	72	Grafik 4.25	Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM Sektoral	77
			Grafik 4.26	Perkembangan NPL dan Suku Bunga Tertimbang Kredit UMKM	78
			Grafik 4.27	Proporsi Penyaluran Kredit UMKM Terbesar di Kabupaten/Kota di Jawa Timur	78
			Grafik 4.28	Pertumbuhan Penyaluran Kredit UMKM Spasial Kabupaten/Kota di Jawa Timur	78

# Grafik



Grafik 5.1	Perkembangan <i>Inflow-Outflow</i> Uang Kartal	89	Grafik 5.18	Perkembangan Transaksi BI-Fast di Jawa Timur	92
Grafik 5.2	Kondisi Perkembangan <i>Inflow-Outflow</i> Secara Spasial	89	Grafik 5.19	Perkembangan Transaksi BI-Fast di Jawa Timur	92
Grafik 5.3	Perkembangan Rasio UTLE Terhadap <i>Inflow</i> Jawa Timur	89	Grafik 5.20	Perkembangan Transaksi Melalui Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)	93
Grafik 5.4	Total Transaksi Sistem Pembayaran di Jawa Timur	89	Grafik 5.21	Perkembangan Jumlah Instrumen Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)	93
Grafik 5.5	Komposisi Sistem Pembayaran Jawa Timur Triwulan II 2025	90	Grafik 5.22	Penggunaan Kartu ATM/Debit	93
Grafik 5.6	Transaksi Sistem Pembayaran Jawa Timur Melalui Tarik/Setor Tunai	90	Grafik 5.23	Penggunaan Kartu Kredit	93
Grafik 5.7	Pertumbuhan Transaksi Sistem Pembayaran Tunai Melalui APMK dan UE	90	Grafik 5.24	Perkembangan Transaksi Uang Elektronik	94
Grafik 5.8	Transaksi Sistem Pembayaran Non Tunai di Jawa Timur Untuk Pembelian dan Pembayaran	90	Grafik 5.25	Perkembangan Volume Uang Elektronik	94
Grafik 5.9	Pertumbuhan Transaksi Sistem Pembayaran Non Tunai melalui APMK, UE, dan QRIS	90	Grafik 5.26	Perkembangan Transaksi <i>E-Commerce</i>	94
Grafik 5.10	Transaksi Sistem Pembayaran Melalui Transfer	91	Grafik 5.27	Transaksi <i>E-commerce</i> Berdasarkan Jenis Pembayaran	94
Grafik 5.11	Pertumbuhan Transaksi Transfer melalui APMK, UE, SKNBI, RTGS, dan BI-FAST	91	Grafik 5.28	Perkembangan UKA di Jawa Timur	95
Grafik 5.12	Perkembangan Nominal RTGS Jawa Timur	91	Grafik 5.29	Komposisi Penjualan & Pembelian UKA Berdasarkan Mata Uang	95
Grafik 5.13	Perkembangan Rata-rata Transaksi RTGS	91	Grafik 5.30	Nominal Pemenuhan ULE Berdasarkan Jenis	95
Grafik 5.14	Komposisi Kinerja RTGS Jawa Timur	91	Grafik 5.31	Pemenuhan ULE Secara Spasial	96
Grafik 5.15	Pertumbuhan Transaksi BI-RTGS Per Wilayah Kantor Bank Indonesia	91	Grafik 5.32	Nominal Transaksi Penukaran	96
Grafik 5.16	Perkembangan Kliring Jawa Timur	92	Grafik 5.33	Aktivitas Kas Keliling Jawa Timur	96
Grafik 5.17	Transaksi Kliring Spasial Jawa Timur	92	Grafik 5.34	Nominal Transaksi Kas Titipan	96
			Grafik 5.35	Perkembangan Nominal Transaksi QRIS	97
			Grafik 5.36	Perkembangan Volume Transaksi QRIS	97
			Grafik 5.37	Perkembangan <i>Merchant</i> QRIS Per Skala Usaha	97
			Grafik 5.38	<i>Merchant</i> QRIS Spasial di Jawa Timur	97
			Grafik 5.39	Pengguna QRIS Spasial Jawa Timur	97



# Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur Agustus 2025

Grafik 5.40	Perkembangan Pengguna QRIS	97	Grafik 6.13	Perbandingan Nilai Tukar Peternak (NTPt) Provinsi di Jawa	107
Grafik 5.41	Penerima Program Sembako di Jawa Timur	98	Grafik 6.14	NTP Peternak, IT dan IB Peternak Jawa Timur	107
Grafik 5.42	Penyaluran Program Sembako di Jawa Timur	98	Grafik 6.15	Kondisi Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha	107
Grafik 5.43	Perkembangan Penyaluran Program Sembako Spasial Jawa Timur	98	Grafik 7.1	Prediksi El Nino/La Nina 2025	119
Grafik 5.44	Jumlah Penerima Program PKH di Jawa Timur	99	Grafik 7.2	Harga Emas Dunia	120
Grafik 5.45	Penyaluran Program PKH di Jawa Timur	99	Grafik 7.3	Harga Pupuk Dunia	120
Grafik 5.46	Penyaluran Program PKH Spasial di Jawa Timur	99	Grafik 7.4	Harga Jagung Dunia	120
Grafik 6.1	Jumlah Penduduk Pra-Sejahtera Provinsi di Wilayah Jawa	103	Grafik 7.5	Harga Minyak Kelapa Sawit Dunia	120
Grafik 6.2	Persentase Penduduk Pra-Sejahtera Provinsi di Wilayah Jawa	103	Grafik 7.6	Harga Minyak Dunia (WTI)	122
Grafik 6.3	Jumlah Penduduk Pra-Sejahtera Desa dan Kota	103	Grafik 7.7	Harga Batu Bara Dunia	122
Grafik 6.4	Persentase Penduduk Pra-Sejahtera Desa dan Kota	103			
Grafik 6.5	Garis Kemiskinan Makanan dan Nonmakanan	104			
Grafik 6.6	Garis Kemiskinan Makanan dan Nonmakanan Desa dan Kota	104			
Grafik 6.7	Perbandingan Nilai Tukar Petani Provinsi di Jawa	105			
Grafik 6.8	NTP Jawa Timur, Indeks yang Diterima (IT) dan Indeks Harga yang Dibayar (IB)	105			
Grafik 6.9	NTP Sub Sektor Pertanian Jawa Timur	105			
Grafik 6.10	Inflasi Pedesaan Jawa Timur	105			
Grafik 6.11	Perbandingan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Provinsi di Jawa	106			
Grafik 6.12	NTN, IT dan IB Nelayan Jawa Timur	106			

# Tabel



Tabel 1.1	Pertumbuhan PDRB Jawa Timur – Sisi Pengeluaran	3	Tabel 5.1	Perkembangan Sistem Pembayaran Triwulan II 2025	88
Tabel 1.2	Pertumbuhan PDRB Jawa Timur – Sisi Lapangan Usaha	3	Tabel 6.1	Rasio Gini Jawa Timur	104
Tabel 2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja APBN di Provinsi Jawa Timur s.d. Triwulan II 2024 dan 2025	31	Tabel 6.2	NTP Sub Sektor Pertanian Jawa Timur	106
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah APBD Provinsi Jawa Timur s.d. Triwulan II 2024 dan 2025	34	Tabel 6.3	Kondisi Ketenagakerjaan Jawa Timur (Juta Orang)	108
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur s.d. Triwulan II 2024 dan 2025	36	Tabel 6.4	Perbandingan Kinerja Penyerapan Tenaga Kerja dan Nilai Tambah Lapangan Usaha	108
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah APBD 38 Kab/Kota s.d. Triwulan II 2024 dan 2025	39	Tabel 7.1	Prospek Perekonomian Dunia	116
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur s.d. Triwulan II 2024 dan 2025	42	Tabel 7.2	Faktor Pendorong dan Penahan Inflasi Jawa Timur 2025	123
Tabel 3.1	Komoditas Penyumbang Utama Inflasi Jawa Timur Triwulan II 2025 (yoy)	49			
Tabel 3.2	Komoditas Penyumbang Utama Deflasi Jawa Timur Triwulan II 2025 (yoy)	49			
Tabel 3.3	Inflasi Spasial per Kelompok Barang dan Jasa pada Triwulan II 2025 (%yoy)	54			
Tabel 4.1	Pertumbuhan DPK Perbankan Jawa Timur Berdasarkan Kelompok Nilai	69			



Laporan Perekonomian  
Provinsi Jawa Timur  
**Agustus 2025**



# Ringkasan Eksekutif

***Ekonomi Jawa Timur pada triwulan II 2025 tumbuh meningkat dibandingkan triwulan I 2025. Dari sisi pengeluaran, lebih tingginya kinerja ekonomi ditopang oleh investasi dan ekspor.***

***Dari sisi lapangan usaha (LU), peningkatan kinerja terjadi di sebagian besar LU Utama, yakni LU Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.***

***Realisasi Pendapatan Pemerintah di Jawa Timur secara agregat pada triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp62,97 triliun, turun 1,70% (yoy) dibandingkan triwulan II tahun 2024.***

## Asesmen Pertumbuhan Ekonomi Daerah

**Kinerja ekonomi Jawa Timur pada triwulan II 2025 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.**

Pada triwulan laporan, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,23% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2025 yang tumbuh sebesar 5,00% (yoy). Akselerasi kinerja ekonomi Jawa Timur terutama ditopang oleh peningkatan investasi dan ekspor pada periode laporan. Lebih tingginya investasi pada triwulan laporan ditopang oleh komponen nonbangunan, maupun bangunan. Kenaikan investasi komponen nonbangunan tecermin dari perbaikan pertumbuhan impor barang modal, khususnya pada komoditas mesin dan peralatan. Sementara, peningkatan investasi komponen bangunan didorong oleh berlanjutnya pembangunan proyek strategis pemerintah dan swasta. Lebih lanjut, kenaikan kinerja ekspor disokong oleh ekspor luar negeri (LN), khususnya komoditas logam mulia dan perhiasan, lemak minyak, kayu, serta produk kimia. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang meningkat juga disumbang oleh konsumsi rumah tangga (RT) dan konsumsi pemerintah, meskipun keduanya tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan I 2025. Moderasi konsumsi RT pada triwulan laporan disebabkan oleh normalisasi permintaan masyarakat pasca momen Imlek, Ramadhan, dan Idulfitri sehingga menahan pembelian barang tahan lama. Sementara itu, penurunan konsumsi pemerintah utamanya dipengaruhi oleh terkontraksinya realisasi belanja operasi K/L APBN di Jawa Timur, serta lebih rendahnya belanja operasi APBD Provinsi, belanja operasi APBD Kabupaten/Kota Jawa Timur, belanja bantuan sosial APBN di Jawa Timur, dan belanja bantuan sosial APBD Provinsi Jawa Timur pada triwulan II 2025.

**Dari sisi lapangan usaha (LU), lebih tingginya kinerja perekonomian terutama didukung oleh peningkatan LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, LU Konstruksi, serta LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.** Kenaikan investasi dan ekspor pada triwulan laporan berdampak pada lebih tingginya kinerja LU Konstruksi dan LU Industri Pengolahan. Lebih tingginya kinerja ekspor dan penjualan eceran turut menyokong perbaikan kinerja LU Perdagangan pada triwulan II 2025. Sementara, kenaikan pertumbuhan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum seiring dengan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), kembali normalnya tingkat penghunian kamar hotel berbintang, serta penjualan eceran komponen makanan minuman yang meningkat. Sementara itu, LU Pertanian tumbuh melambat seiring berakhirnya panen raya padi dan perlambatan kinerja produksi cabai merah pada triwulan II 2025.

## Asesmen Keuangan Pemerintah Daerah

**Total realisasi Pendapatan APBD Jawa Timur hingga triwulan II 2025 mengalami penurunan terutama didorong oleh penurunan PAD pada APBD Provinsi Jawa Timur.** Total realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur triwulan II 2025 mencapai Rp62,97 triliun, turun 1,70% (yoy) dibandingkan dengan realisasi triwulan II 2024 yang tercatat sebesar Rp64,05 triliun. Untuk mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak maupun non-pajak. Pada sektor pajak, upaya yang ditempuh meliputi penguatan sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur dalam penyiapan opsen pajak, perluasan digitalisasi transaksi penerimaan daerah, peningkatan sosialisasi kepatuhan pajak, pemberian relaksasi berupa pembebasan denda terutama menjelang akhir tahun, serta pemanfaatan teknologi untuk mengidentifikasi potensi pajak baru. Sementara itu, pada sektor non-pajak, optimalisasi terus dilakukan melalui peningkatan kontribusi Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) dan pemanfaatan *idle asset* menjadi aset produktif. Ke depan, implementasi kebijakan insentif berupa pembebasan sanksi administrasi dan pajak kendaraan bermotor, sesuai Keputusan Gubernur No.100.3.3.1/400/013/2025 yang memperpanjang keringanan dasar pengenaan PKB dan BBNKB, diprakirakan menjadi akselerator pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur pada Triwulan III 2025.

**Kinerja belanja pemerintah menunjukkan penurunan sejalan dengan penurunan pada seluruh komponen belanja.** Realisasi belanja pemerintah di Provinsi Jawa Timur hingga triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp127,78 triliun, kontraksi 12,43% dibandingkan realisasi triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp145,92 triliun. Penurunan realisasi belanja terutama disebabkan oleh penurunan pada seluruh komponen belanja, meliputi belanja daerah, belanja operasi, dan belanja modal. Meskipun proses lelang dan kontrak untuk belanja modal pada bidang jalan, irigasi, dan jaringan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah telah selesai, realisasi fisik dan pencairan dana pada periode ini masih belum optimal. Selain itu, penyaluran Dana Bagi Hasil, DAU, dan DAK Non Fisik dari pemerintah pusat meningkat, namun belum seluruhnya terealisasi menjadi belanja. Lebih lanjut, pemerintah daerah terus melaksanakan upaya untuk meningkatkan realisasi belanja, antara lain melalui pembayaran gaji ke-13 kepada 1.257 satuan kerja, termasuk adanya kenaikan tunjangan kinerja, pembayaran tunjangan pendidik Non PNS dan pembayaran gaji dan tunjangan PPPK, yang turut memberikan kontribusi signifikan terhadap realisasi belanja pegawai.

## Asesmen Inflasi Daerah

**Inflasi Provinsi Jawa Timur pada akhir triwulan II 2025 tercatat sebesar 2,02% (yoy), mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,77% (yoy).** Kenaikan inflasi ini didorong oleh (i) kenaikan harga emas dunia seiring masih tingginya ketidakpastian perekonomian global yang tertransmisi pada harga emas perhiasan domestik; (ii) dinamika pasokan komoditas bahan pangan seiring berakhirnya periode panen raya untuk komoditas padi serta pengaruh bergesernya pola tanam dan kondisi musim kemarau basah untuk komoditas hortikultura, khususnya cabai rawit; serta (iii) transmisi kenaikan harga jual eceran berbagai macam sigaret atas dasar PMK Nomor 96 dan 97 Tahun 2024 yang berlaku per 1 Januari 2025. Meskipun demikian, kenaikan inflasi ini masih ditahan oleh beberapa hal antara lain (i) penurunan beberapa harga komoditas strategis seiring penurunan harga input seperti daging ayam ras seiring penurunan harga jagung dunia dan peningkatan pasokan seiring realisasi impor seperti bawang putih; (ii) penurunan harga BBM non-subsidi domestik seiring penurunan harga minyak dunia; (iii) upaya pengendalian inflasi yang merupakan bentuk sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) seluruh Jawa Timur melalui implementasi program pada pilar 4K yang terintegrasi. Berdasarkan kelompok pengeluaran, meningkatnya tekanan inflasi Jawa Timur pada triwulan II 2025 didorong oleh inflasi pada (i) kelompok makanan, minuman, dan tembakau; (ii) kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, (iii) kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; dan (iv) kelompok transportasi. Adapun peningkatan inflasi lebih lanjut pada triwulan ini ditahan oleh kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan.

**Realisasi Belanja Pemerintah di Provinsi Jawa Timur secara agregat pada triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp127,78 triliun, kontraksi sebesar 12,43% dibandingkan triwulan II tahun 2024.**

**Inflasi Provinsi Jawa Timur pada triwulan II 2025 tercatat 2,02% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2025 (0,77%; yoy).**

**Pada triwulan III 2025, inflasi Provinsi Jawa Timur berpotensi meningkat dibanding triwulan sebelumnya, namun tetap terkendali dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5± 1%.**

**Inflasi Provinsi Jawa Timur pada triwulan III 2025 diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan II 2025, namun masih dalam rentang sasaran nasional 2,5% ± 1%.** Potensi meningkatnya tekanan inflasi pada triwulan III 2025 sejalan dengan (i) prakiraan kenaikan harga komoditas global non-energi, khususnya emas; (ii) kenaikan harga beras seiring meningkatnya harga gabah di penggilingan; (iii) dimulainya tahun ajaran baru 2025/2026 yang mendorong kenaikan biaya sekolah; dan (iv) normalisasi tarif komoditas angkutan (kereta, pesawat, dan kapal) pasca penerapan kebijakan stimulus ekonomi pada bulan Juni - Juli 2025. Upaya pengendalian inflasi di Jawa Timur akan terus diperkuat didukung oleh sinergi program pengendalian inflasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) seluruh Jawa Timur dan koordinasi erat dengan tim pengendalian inflasi pusat (TPIP) termasuk implementasi program Gerakan Nasional Inflasi Pangan (GNPIP).

**Kinerja intermediasi perbankan terpantau tetap solid, tecermin dari kinerja penyaluran kredit yang tumbuh positif dan kinerja penghimpunan DPK yang tumbuh meningkat.**

**Kinerja intermediasi perbankan tetap solid di triwulan II 2025, tecermin dari kinerja penyaluran kredit yang tumbuh positif disertai dengan kualitas kredit yang terjaga.** Kinerja penghimpunan DPK juga terpantau tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya didorong oleh sektor korporasi seiring meningkatnya arus kas dari kinerja ekspor yang kuat, serta preferensi korporasi dalam membangun *buffer* likuiditas di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) Rumah Tangga (RT) tumbuh melambat seiring penggunaan dana untuk kebutuhan harian dan pergeseran preferensi investasi masyarakat ke instrumen dengan imbal hasil lebih tinggi di tengah tren penurunan suku bunga. Sejalan dengan terjaganya likuiditas perbankan, kinerja penyaluran kredit terpantau masih tumbuh positif kendati melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, baik di sektor korporasi maupun RT. Perlambatan kredit korporasi dipengaruhi oleh perbaikan arus kas yang mengurangi kebutuhan Kredit Modal Kerja (KMK), serta strategi manajemen risiko yang lebih konservatif di tengah eskalasi ketidakpastian global. Sementara itu, perlambatan kredit RT seiring dengan normalisasi pola konsumsi pasca HBKN Idulfitri, preferensi masyarakat untuk memanfaatkan dana sendiri termasuk sisa THR untuk konsumsi jangka pendek, serta lebih rendahnya minat terhadap barang tahan lama yang tecermin pada penurunan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Lebih lanjut, tingkat intermediasi perbankan pada triwulan laporan terpantau optimal, tecermin dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar 91,75% yang sejalan dengan acuan rentang intermediasi optimal 84% - 94% dalam ketentuan Rasio Intermediasi Makprudensial Bank Indonesia.

**Ketahanan korporasi dan RT di Jawa Timur masih terjaga, tecermin dari risiko kredit yang masih dalam batas aman, serta CAR yang terpantau stabil dan di atas ketentuan minimum.**

**Ketahanan perbankan di Jawa Timur terjaga, terindikasi dari risiko kredit dan likuiditas yang masih berada dalam batas aman.** Secara agregat, risiko kredit di Jawa Timur pada triwulan II 2025 masih terjaga dalam batas aman yang tecermin dari rasio *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 3,26%, kendati meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,02%. Sementara itu, dari sisi permodalan, CAR terpantau meningkat ke level 29,12% pada triwulan II 2025, jauh di atas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan minimum sebesar 8%, menunjukkan bahwa bank memiliki ketahanan yang baik dalam menghadapi potensi risiko ke depan di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

## Asesmen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

Pada triwulan II 2025, aktivitas sistem pembayaran termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya seiring normalisasi konsumsi pasca momen Imlek, Nyepi, Ramadhan, dan HBKN Idulfitri. Permintaan uang tunai menurun, tecermin dari pergeseran posisi dari *net-outflow* pada triwulan sebelumnya menjadi *net-inflow*. Selaras dengan perlambatan konsumsi rumah tangga, transaksi tunai maupun nontunai mengalami penurunan, termasuk penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE), serta transaksi *e-commerce* yang melambat. Meskipun demikian, penggunaan kartu kredit dalam APMK yang meningkat di tengah pertumbuhan kredit yang melambat pada triwulan laporan.

Sementara itu, di tengah kinerja sistem pembayaran melalui transfer RTGS dan BI-FAST secara nominal mengalami kontraksi, rata-rata nilai per transaksinya meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Kondisi ini sejalan dengan akselerasi aktivitas ekonomi pada sektor utama, khususnya LU Industri Pengolahan dan Perdagangan. Transaksi perdagangan valuta asing di Jawa Timur tercatat mengalami peningkatan seiring perbaikan kinerja LU Akomodasi serta Makan dan Minum yang didorong oleh lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara pada musim liburan dan penyelenggaraan sejumlah event berskala nasional dan internasional di Jawa Timur pada periode laporan, antara lain *Traditional Music International Festival*, *Malang Flower Carnival*, Festival Nasional Reog, dan Eksotika Bromo, yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Selain itu, volume transaksi QRIS di Jawa Timur tercatat meningkat signifikan pada periode laporan, mencerminkan percepatan adopsi pembayaran digital di masyarakat, baik oleh pelaku usaha maupun konsumen. Peningkatan ini didorong oleh kemudahan transaksi, perluasan jaringan *merchant*, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem pembayaran nontunai, dan selaras dengan akselerasi aktivitas ekonomi, khususnya di sektor perdagangan, jasa, dan UMKM.

Bank Indonesia terus berinovasi dalam mengadaptasi teknologi untuk layanan keuangan, salah satunya melalui pengembangan QRIS Tap dan perluasan ETPD melalui Elektronifikasi Bantuan Sosial Nontunai (BSNT). Pada triwulan II 2025, proses penyaluran BSNT tumbuh melambat akibat peralihan skema dari tunai menjadi nontunai yang memerlukan waktu. Meski demikian, proporsi penyaluran nontunai tetap mendominasi, sejalan dengan kebijakan elektronifikasi bantuan sosial yang terus didorong pemerintah. Ke depan, jika seluruh penerima telah memiliki rekening nontunai, penyaluran bantuan akan semakin mudah, sehingga komitmen pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan dapat lebih optimal terwujud. Lebih lanjut, Bank Indonesia juga selalu menggalakkan kampanye nasional Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah yang disinergikan dengan berbagai mitra strategis untuk menjaga integritas Rupiah.

## Asesmen Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada Maret 2025 terpantau meningkat dibandingkan September 2024 dan Maret 2024. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tecermin dari penurunan jumlah penduduk pra-sejahtera di Jawa Timur pada Maret 2025 dibandingkan September 2024 dan Maret 2024 yang diiringi dengan penurunan tingkat kesenjangan ekonomi. Perbaikan tingkat kesejahteraan didukung oleh pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang tumbuh positif, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), konsumsi rumah tangga yang tumbuh, inflasi yang terjaga di sasaran, serta adanya program peningkatan kesejahteraan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pada triwulan II 2025, aktivitas sistem pembayaran termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya seiring normalisasi konsumsi pasca momen Imlek, Nyepi, Ramadhan, dan HBKN Idulfitri.

Sementara itu, di tengah kinerja sistem pembayaran melalui transfer RTGS dan BI-FAST secara nominal mengalami kontraksi, rata-rata nilai per transaksinya meningkat dibanding triwulan sebelumnya.

Bank Indonesia terus berinovasi dalam mengadaptasi teknologi untuk layanan keuangan, salah satunya melalui pengembangan QRIS Tap dan perluasan ETPD melalui Elektronifikasi BSNT.

Kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada Maret 2025 terpantau meningkat dibandingkan September 2024 dan Maret 2024.

**Kesejahteraan pedesaan yang direpresentasikan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan pada triwulan II 2025, terutama pada petani tanaman pangan, perkebunan rakyat, dan peternakan.**

Kesejahteraan masyarakat pedesaan mengalami perbaikan seiring dengan kenaikan harga gabah, peningkatan produksi tebu di tengah peningkatan harga gula, peningkatan permintaan kopi, serta kenaikan penerimaan ternak besar dan kecil. NTP meningkat dari 111,61 pada triwulan I 2025 menjadi 112,39 pada triwulan II 2025. Hal tersebut ditopang oleh peningkatan harga gabah di tingkat petani seiring mulai berkurangnya produksi pasca panen raya di triwulan I 2025 dan April 2025. Lebih lanjut, peningkatan produksi tebu yang diiringi kenaikan rata-rata harga gula, peningkatan permintaan kopi, serta peningkatan indeks harga yang diterima ternak besar dan kecil memicu peningkatan NTP pada triwulan laporan.

**Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur pada Februari 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan Februari 2024 dan Agustus 2024.**

Pada triwulan II 2025, kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur terpantau tetap kuat, terutama pada LU Konstruksi, Transportasi Pergudangan, Informasi Komunikasi, dan *Real Estate*. Berdasarkan Survei Kondisi Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia Jawa Timur, penyerapan tenaga kerja meningkat di sektor Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, serta *Real Estate*. Kenaikan ini sejalan dengan pertumbuhan positif PDRB di sektor-sektor tersebut pada triwulan II 2025.

## Prospek Ekonomi dan Inflasi Tahun 2025

**Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2025 diperkirakan tetap tumbuh positif, ditopang oleh permintaan domestik dan eksternal.**

Sejalan dengan ekonomi nasional, perekonomian Jawa Timur pada tahun 2025 diperkirakan tetap tumbuh positif yang ditopang oleh permintaan domestik dan eksternal, dengan tingkat inflasi yang terkendali pada kisaran target. Kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,7% - 5,5% (yoy). Dari sisi pengeluaran, kinerja ekonomi Jawa Timur diperkirakan didukung oleh tetap terjaganya konsumsi RT, dan pertumbuhan investasi, serta ekspor yang lebih solid. Dari sisi LU, kinerja LU Pertanian pada tahun 2025 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 sejalan dengan prospek cuaca yang lebih mendukung produksi pangan. Lebih lanjut, kinerja LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan di Jawa Timur pada tahun 2025 diperkirakan tetap tumbuh positif. Dari sisi eksternal, prospek perbaikan perekonomian beberapa mitra dagang utama Jawa Timur, khususnya Kawasan Eropa dan Jepang, diperkirakan juga dapat mendukung kinerja ekspor Jawa Timur dan menjaga tingkat optimisme dunia usaha terhadap perekonomian di Jawa Timur. Hal tersebut diperkirakan selain menjadi faktor pendorong kinerja ekspor LN, juga akan mendorong investasi nonbangunan di Jawa Timur pada tahun 2025.

**Inflasi Jawa Timur pada tahun 2025 diperkirakan berada di kisaran sasaran inflasi 2,5%±1% (yoy).**

Inflasi Jawa Timur pada tahun 2025 diperkirakan berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5%±1% (yoy). Prospek tersebut ditopang oleh prakiraan cuaca yang lebih kondusif sehingga mendukung penguatan produktivitas komoditas pangan, dukungan program prioritas Pemerintah yang berfokus pada ketahanan pangan, serta terjangkaunya harga komoditas energi domestik seiring prakiraan harga komoditas energi global yang stabil cenderung melandai. Lebih lanjut, berbagai kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPIP dan TPID, termasuk program GNPIP, diperkirakan turut mendukung tingkat inflasi IHK Jawa Timur di kisaran sasaran inflasi 2,5% ± 1% (yoy).



# Tabel Indikator Ekonomi

## A. PDRB

INDIKATOR	2024					2025	
	I	II	III	IV	TOTAL	I	II
<b>PDRB Lapangan Usaha - Harga Konstan (Rp Milliar)</b>							
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39.055	49.911	51.120	37.704	177.790	43.047	50.162
Pertambangan dan Penggalian	17.591	18.018	18.273	18.706	72.589	18.359	18.388
Industri Pengolahan	145.978	144.393	148.433	149.786	588.589	151.994	155.066
Pengadaan Listrik dan Gas	1.627	1.625	1.759	1.718	6.728	1.796	1.656
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	478	479	467	474	1.899	473	483
Konstruksi	43.855	43.899	45.869	48.345	181.968	44.354	46.350
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	90.492	90.781	93.159	94.452	368.884	93.731	94.344
Transportasi dan Pergudangan	16.060	16.344	16.546	17.094	66.044	17.223	17.868
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	27.012	27.228	26.452	28.142	108.833	28.990	29.510
Informasi dan Komunikasi	33.327	33.828	33.523	34.466	135.144	35.697	36.020
Jasa Keuangan dan Asuransi	11.645	11.647	11.734	11.458	46.484	12.166	11.828
Real Estate	8.264	8.333	8.393	8.424	33.414	8.441	8.669
Jasa Perusahaan	3.663	3.855	3.843	3.955	15.316	3.975	4.231
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.806	9.905	9.252	9.817	37.781	9.676	9.696
Jasa Pendidikan	12.600	12.848	12.883	12.853	51.184	13.395	13.506
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.396	3.615	3.669	3.719	14.399	3.723	3.781
Jasa lainnya	6.782	7.405	7.055	7.523	28.765	7.149	7.896
<b>PDRB Pengeluaran - Harga Konstan (Rp Milliar)</b>							
Konsumsi RT	282.030	290.781	290.253	294.183	1.157.247	296.459	304.886
Konsumsi LNPRT	5.472	5.483	5.508	5.886	22.349	5.829	5.835
Konsumsi Pemerintah	16.168	19.291	20.005	21.637	77.102	16.480	19.185
Pembentukan Modal Tetap Bruto	123.642	124.984	130.361	135.010	513.996	126.366	132.645
Ekspor Barang dan Jasa	265.945	267.096	279.682	275.889	1.088.612	282.108	287.587
Impor Barang dan Jasa	225.266	227.433	237.409	245.848	935.956	235.702	244.642
Net Ekspor	40.679	39.663	42.273	30.041	152.656	46.406	42.945

Sumber : BPS Jawa Timur (diolah)

INDIKATOR	2024					2025	
	I	II	III	IV	TOTAL	I	II
<b>PDRB Lapangan Usaha - (%; yoy)</b>							
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(7,63)	4,29	1,88	0,94	0,07	10,22	0,50
Pertambangan dan Penggalian	(2,80)	(3,29)	(0,98)	4,70	(0,63)	4,36	2,05
Industri Pengolahan	6,10	4,56	5,90	5,06	5,40	4,12	7,39
Pengadaan Listrik dan Gas	10,17	11,74	5,00	1,81	6,92	10,40	1,95
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,81	3,57	0,88	0,56	2,44	(1,25)	0,79
Konstruksi	8,16	7,14	6,51	5,95	6,90	1,14	5,58
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,49	3,96	4,36	5,34	4,54	3,58	3,92
Transportasi dan Pergudangan	14,89	8,37	8,25	7,04	9,50	7,24	9,32
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,75	8,60	5,56	4,27	6,98	7,32	8,38
Informasi dan Komunikasi	7,71	6,22	5,97	5,83	6,42	7,11	6,48
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,70	4,49	1,67	1,97	3,91	4,47	1,56
Real Estate	3,14	2,78	2,87	2,85	2,91	2,14	4,03
Jasa Perusahaan	7,27	8,64	7,50	8,10	7,88	8,49	9,76
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,26	7,00	9,43	11,39	7,78	9,87	(2,11)
Jasa Pendidikan	4,15	6,30	4,46	4,38	4,82	6,31	5,12
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,14	4,92	7,17	8,78	5,52	9,61	4,60
Jasa lainnya	8,92	9,69	5,73	9,95	8,58	5,40	6,62
<b>PDRB Pengeluaran - (%; yoy)</b>							
Konsumsi RT	5,20	4,80	5,08	4,91	4,99	5,12	4,85
Konsumsi LNPRT	18,06	12,01	10,95	9,53	12,49	6,53	6,42
Konsumsi Pemerintah	10,23	5,67	4,07	2,47	5,24	1,92	(0,55)
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,42	5,06	5,40	6,05	5,49	2,20	6,13
Ekspor Barang dan Jasa	8,25	10,13	10,78	7,58	9,17	6,08	7,67
Impor Barang dan Jasa	10,46	11,01	12,46	7,95	10,42	4,63	7,57
Net Ekspor	(2,54)	5,31	2,21	4,65	2,13	14,08	8,27
<b>Pertumbuhan PDRB (%; yoy)</b>	<b>4,81</b>	<b>4,98</b>	<b>4,91</b>	<b>5,03</b>	<b>4,93</b>	<b>5,00</b>	<b>5,23</b>

Sumber: BPS Jawa Timur

## B. INFLASI

INDIKATOR	2023				2024				2025	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
<b>INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK)</b>										
JAWA TIMUR	115,23	115,91	116,58	117,59	106,61	106,37	106,21	107,11	107,43	108,52
- Kota Surabaya	115,74	116,43	117,18	118,17	106,48	106,41	106,32	107,11	107,15	108,47
- Kota Malang	113,42	114,05	114,56	115,57	106,50	106,11	105,99	106,94	107,02	108,35
- Kota Kediri	114,03	114,74	115,39	116,26	106,17	105,67	105,37	106,27	106,13	107,66
- Kab. Jember	116,50	117,19	117,59	118,30	106,37	106,35	106,19	107,09	107,58	108,16
- Kab. Sumenep	116,46	117,25	118,19	120,82	109,15	108,48	108,58	109,71	110,60	111,21
- Kota Probolinggo	112,86	113,87	114,38	115,39	106,64	106,39	106,41	107,18	107,91	108,74
- Kota Madiun	113,32	113,74	114,20	115,26	106,12	105,28	105,03	106,00	106,33	107,28
- Kab. Banyuwangi	113,04	113,59	113,75	114,50	106,61	106,61	106,46	107,32	108,63	109,42
- Kab. Bojonegoro					108,44	107,48	106,98	108,34	108,58	109,88
- Kab. Gresik					105,51	105,22	104,87	105,74	106,36	106,74
- Kab. Tulungagung					107,31	106,58	106,44	107,54	108,27	109,52
<b>LAJU INFLASI TAHUNAN (% , yoy)</b>										
JAWA TIMUR	6,13	4,59	3,01	2,92	3,04	2,21	1,74	1,51	0,77	2,02
- Kota Surabaya	6,30	4,91	3,14	3,03	2,99	2,35	1,65	1,38	0,63	1,94
- Kota Malang	5,74	3,65	2,27	2,56	2,90	2,02	1,62	1,36	0,49	2,11
- Kota Kediri	5,36	3,92	2,55	2,64	2,88	1,72	0,88	1,19	-0,04	1,88
- Kab. Jember	6,48	4,31	3,05	2,29	2,53	1,99	1,56	1,74	1,14	1,70
- Kab. Sumenep	6,43	4,53	4,47	5,08	4,68	3,24	2,45	1,97	1,33	2,52
- Kota Probolinggo	5,04	3,59	3,18	2,86	3,54	2,29	1,97	1,90	1,13	2,21
- Kota Madiun	5,15	3,25	2,16	2,35	3,05	1,85	1,22	1,31	0,20	1,90
- Kab. Banyuwangi	5,71	3,97	3,10	2,15	2,67	2,38	2,07	1,73	1,89	2,64
- Kab. Bojonegoro					4,68	1,89	1,88	1,14	0,13	2,23
- Kab. Gresik					2,81	2,13	2,15	1,85	0,81	1,44
- Kab. Tulungagung					2,98	2,05	1,81	1,75	0,89	2,76
<b>LAJU INFLASI TAHUNAN (% , ytd)</b>										
JAWA TIMUR	0,86	1,46	2,04	2,92	0,64	0,81	0,66	1,51	0,30	1,32
- Kota Surabaya	0,91	1,51	2,16	3,03	0,60	0,72	0,64	1,38	0,04	1,27
- Kota Malang	0,65	1,22	1,66	2,56	0,66	0,57	0,46	1,36	0,07	1,32
- Kota Kediri	0,67	1,29	1,87	2,64	0,61	0,62	0,33	1,19	0,13	1,44
- Kab. Jember	0,73	1,34	1,68	2,29	0,63	1,04	0,88	1,74	0,46	1,00
- Kab. Sumenep	1,28	1,97	2,79	5,08	0,77	0,83	0,92	1,97	0,81	1,37
- Kota Probolinggo	0,60	1,51	1,96	2,86	0,77	1,15	1,17	1,90	0,68	1,68
- Kota Madiun	0,62	0,99	1,41	2,35	0,66	0,62	0,37	1,31	0,31	1,21
- Kab. Banyuwangi	0,85	1,34	1,49	2,15	0,56	1,06	0,92	1,73	1,22	1,95
- Kab. Bojonegoro					0,70	0,34	-0,13	1,14	1,32	1,42
- Kab. Gresik					0,81	1,35	1,01	1,85	0,59	0,94
- Kab. Tulungagung					0,76	0,84	0,71	1,75	0,68	1,84

Sumber: BPS Jawa Timur

## C. SISTEM PEMBAYARAN

INDIKATOR	2023				2024				2025	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
<b>Kinerja (Rp Triliun)</b>										
<i>Inflow</i>	24,71	25,53	20,45	14,41	27,79	29,03	16,44	13,39	22,96	29,28
<i>Outflow</i>	14,89	27,05	15,51	25,25	21,42	21,72	17,13	23,49	25,89	12,88
SKNBI	56,79	49,10	55,69	59,21	51,82	48,02	53,70	56,51	48,15	43,54
RTGS	392,29	359,86	391,77	408,60	341,89	377,05	421,14	461,09	362,66	349,64
BI-FAST	216,59	258,50	325,07	358,60	363,99	408,20	475,51	499,81	494,09	493,89
APMK	243,18	256,93	251,88	254,43	260,43	259,16	252,84	250,53	269,89	262,69
UE	13,40	14,36	14,26	14,56	15,52	15,79	15,98	16,31	17,20	16,50
QRIS	3,71	4,82	6,39	8,42	7,96	12,27	18,65	22,55	26,05	31,65
KUPVA	2,14	2,21	2,20	2,52	2,19	2,20	2,75	2,88	2,38	2,42
<i>E-Commerce</i>	13,28	13,76	15,53	17,16	16,93	16,09	18,05	20,06	21,09	18,09
<b>Pertumbuhan (% ,yoy)</b>										
<i>Inflow</i>	24,39	3,33	21,05	-10,24	12,20	13,73	-19,62	-7,09	-17,39	0,86
<i>Outflow</i>	28,06	13,10	-2,86	1,69	32,49	-19,70	10,48	-7,00	20,88	-40,69
SKNBI	-17,69	-24,57	-11,56	-9,79	-8,75	-2,22	-3,57	-4,56	-7,10	-9,32
RTGS	-29,97	-28,42	0,48	-14,16	-12,85	4,78	7,50	20,48	6,07	-7,27
BI-FAST	1040,24	355,95	181,69	100,12	68,06	57,91	46,28	39,38	35,74	20,99
APMK	-1,21	-0,44	-6,11	2,66	6,62	0,86	0,38	-1,56	3,50	1,35
UE	14,43	6,33	-8,76	-5,99	13,71	9,05	10,75	10,74	9,78	4,28
QRIS	230,60	215,93	224,43	287,30	114,61	154,82	191,63	167,75	227,18	157,91
KUPVA	44,42	37,71	0,87	12,55	2,08	-0,60	24,99	14,40	8,84	10,42
<i>E-Commerce</i>	-2,89	-10,83	-6,34	17,98	27,47	16,91	16,20	16,87	24,57	12,45
<b>Rata-rata Nilai Transaksi (Rp Juta/Transaksi)</b>										
SKNBI	63,38	60,90	63,32	63,51	66,48	64,46	65,25	64,43	67,53	65,88
RTGS	3365,02	3418,25	3326,06	3025,32	3140,16	3611,84	3555,28	3635,03	3072,56	3592,81
BI-FAST	2,91	2,90	2,89	2,77	2,74	2,73	2,73	2,64	2,63	2,65
UE	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
QRIS	0,11	0,11	0,10	0,11	0,11	0,10	0,11	0,10	0,10	0,04
<i>E-Commerce</i>	0,16	0,14	0,12	0,13	0,12	0,12	0,11	0,12	0,11	0,10

Sumber: Bank Indonesia

## D. PERBANKAN

### D.1. Bank Umum

INDIKATOR	2023			2024				2025	
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
<b>Kinerja (Rp Miliar)</b>									
<b>Total Aset</b>	856.972	884.264	879.852	888.676	906.795	916.627	913.504	908.005	929.540
- Bank Umum Milik Negara (BUMN)	342.169	355.069	356.308	360.825	367.721	368.431	374.129	368.104	378.975
- Bank Pemerintah Daerah (BPD)	121.806	126.281	118.734	114.893	116.516	122.117	114.630	113.734	114.534
- Bank Umum Swasta Nasional	376.066	385.444	387.915	396.433	405.914	410.680	408.563	409.680	418.618
- Bank Asing	16.929	17.470	16.894	16.525	16.644	15.399	16.182	16.487	17.412
<b>Dana Pihak Ketiga</b>	711.974	723.706	736.085	752.817	766.653	768.466	771.716	776.089	794.997
- Giro	140.864	141.260	147.883	154.690	159.855	155.993	157.670	149.868	164.071
- Tabungan	314.375	311.579	321.663	323.936	328.496	333.414	339.928	342.540	346.507
- Deposito	255.835	270.867	266.539	274.191	278.302	279.059	274.118	283.681	284.418
<b>Kredit Lokasi Bank (LB)</b>	536.421	541.451	551.461	556.494	565.108	583.884	596.322	590.841	597.727
- Kredit Modal Kerja	290.103	289.750	293.657	292.418	296.386	308.541	314.299	306.737	310.901
- Kredit Investasi	88.801	90.346	92.500	95.275	96.654	98.318	100.604	100.376	100.446
- Kredit Konsumsi	157.517	161.346	165.305	168.801	172.069	177.025	181.419	183.728	186.379
<b>Kredit Lokasi Proyek (LP)</b>	660.795	673.881	683.703	685.935	700.934	707.023	719.729	721.045	729.408
- Kredit Modal Kerja	346.057	352.506	351.949	346.398	353.630	356.163	365.597	362.681	363.002
- Kredit Investasi	130.773	132.721	136.745	140.172	143.798	141.683	141.504	140.824	145.605
- Kredit Konsumsi	183.966	188.555	195.009	199.365	203.505	209.176	214.627	217.540	220.801
<b>Kredit LB ke Sektor Ekonomi Utama</b>	292.868	291.742	296.733	298.546	303.270	316.126	322.660	314.453	318.203
- Kredit Sektor Industri Pengolahan	115.562	112.336	112.072	112.093	114.384	122.440	127.391	120.805	121.414
- Kredit Sektor Perdagangan	139.676	142.295	146.374	147.114	148.927	153.527	154.735	152.345	154.614
- Kredit Sektor Pertanian	37.630	377.111	38.287	39.339	39.959	40.159	40.534	41.303	42.175
<b>Pertumbuhan (% , yoy)</b>									
<b>Total Aset</b>	1,54	4,42	3,01	6,13	5,81	3,66	3,82	2,18	2,51
- Bank Umum Milik Negara (BUMN)	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	2,02	3,06
- Bank Pemerintah Daerah (BPD)	(12,96)	(12,96)	(12,96)	(12,96)	(12,96)	(12,96)	(12,96)	-1,01	-1,70
- Bank Umum Swasta Nasional	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	3,34	3,13
- Bank Asing	(14,03)	(14,03)	(14,03)	(14,03)	(14,03)	(14,03)	(14,03)	-0,23	4,62
<b>Dana Pihak Ketiga</b>	3,17	3,34	3,99	7,59	7,68	6,18	4,84	3,09	3,70
- Giro	0,36	-1,76	1,69	14,47	13,48	10,43	6,62	-3,12	2,64
- Tabungan	1,64	-0,18	1,20	5,75	4,49	7,01	5,68	5,74	5,48
- Deposito	6,40	10,83	8,99	6,15	8,78	3,02	2,84	3,46	2,20
<b>Kredit Lokasi Bank (LB)</b>	5,53	5,29	5,95	6,42	5,35	7,84	8,13	6,17	5,77
- Kredit Modal Kerja	3,58	2,72	3,55	3,77	2,17	6,49	-65,74	4,90	4,90
- Kredit Investasi	9,11	9,83	10,56	11,19	8,84	8,82	96,13	5,35	3,92
- Kredit Konsumsi	7,28	7,64	7,88	8,60	9,24	9,71	9,75	8,84	8,32
<b>Kredit Lokasi Proyek (LP)</b>	7,27	8,17	8,45	7,99	6,07	4,92	5,27	5,12	4,06
- Kredit Modal Kerja	5,35	6,29	5,77	5,25	2,19	1,01	3,88	4,70	2,65
- Kredit Investasi	10,95	12,68	14,42	12,09	9,96	6,75	3,48	0,47	1,26
- Kredit Konsumsi	8,44	8,71	9,44	10,14	10,62	10,94	10,06	9,12	8,50

INDIKATOR	2023			2024				2025	
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
<b>Kredit LB ke Sektor Ekonomi Utama</b>	4,48	3,55	3,99	4,26	3,55	8,36	8,74	5,33	4,92
- Kredit Sektor Industri Pengolahan	5,30	3,00	-0,06	0,62	-1,02	8,99	13,67	7,77	6,15
- Kredit Sektor Perdagangan	2,10	3,80	6,38	6,01	6,62	7,89	5,71	3,56	3,82
- Kredit Sektor Pertanian	11,46	4,30	7,56	8,76	6,19	8,21	5,87	4,99	5,55
<b>Rasio Keuangan (%)</b>									
<b>NPL Lokasi Bank</b>	3,30	3,32	2,99	3,05	2,98	2,78	2,61	3,01	3,28
- NPL Kredit Modal Kerja	4,26	4,35	3,90	3,88	3,70	3,30	2,97	3,54	3,87
- NPL Kredit Investasi	2,27	2,13	1,93	2,35	2,61	2,68	2,76	2,88	3,08
- NPL Kredit Konsumsi	2,11	2,15	1,98	1,99	1,95	1,93	1,89	2,20	2,38
NPL Lokasi Proyek	3,35	3,26	3,06	3,11	3,05	2,79	2,70	3,02	3,26
LDR Lokasi Bank	75,44	74,82	74,92	73,92	73,71	75,98	77,12	76,29	75,36
LDR Lokasi Proyek	92,93	93,12	92,88	91,12	91,43	92,00	93,26	92,91	91,75

Sumber : Laporan Bank (diolah)

## D.2. Bank Umum Syariah

INDIKATOR	2023			2024				2025	
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
<b>Kinerja (Rp Miliar)</b>									
<b>Total Aset</b>	49.843	53.821	54.620	55.609	55.619	59.752	64.304	61.373	62.476
<b>Dana Pihak Ketiga</b>	44.285	47.724	48.827	50.239	50.222	52.907	57.133	55.284	55.200
- Giro	4.704	5.431	5.817	6.444	6.933	7.019	7.754	7.178	7.114
- Tabungan	21.905	22.973	24.531	24.336	24.678	26.118	27.334	26.894	27.843
- Deposito	17.676	19.319	18.480	19.459	18.612	19.770	22.046	21.212	20.243
<b>Pembiayaan Lokasi Bank (LB)</b>	35.829	36.703	37.727	38.792	39.980	41.451	42.321	42.193	44.066
- Modal Kerja	9.702	9.680	9.590	9.833	10.217	10.765	10.654	10.193	10.630
- Investasi	6.745	6.969	7.531	7.746	7.935	8.200	8.498	8.839	8.840
- Konsumsi	19.382	20.054	20.607	21.213	21.829	22.487	23.169	23.880	24.596
<b>Pembiayaan Lokasi Proyek (LP)</b>	48.275	49.473	51.610	53.742	54.098	55.989	55.311	55.659	56.595
- Modal Kerja	16.179	16.492	17.360	18.537	18.071	19.099	17.497	17.066	17.240
- Investasi	11.453	11.618	12.257	12.517	12.674	12.776	12.996	13.100	13.230
- Konsumsi	20.643	21.363	21.992	22.688	23.354	24.114	24.818	25.493	26.125
<b>Pembiayaan LB ke Sektor Ekonomi Utama</b>	9.934	9.825	9.763	10.308	10.690	11.219	11.156	11.002	11.639
- Pembiayaan Sektor Industri Pengolahan	3.756	3.649	3.608	4.151	4.687	5.208	4.976	4.950	5.415
- Pembiayaan Sektor Perdagangan	5.189	5.168	5.219	5.221	5.117	5.115	5.279	5.162	5.334
- Pembiayaan Sektor Pertanian	989	1008	936	936	886	896	901	891	890
<b>Pertumbuhan (% YOY)</b>									
<b>Total Aset</b>	7,40	13,30	11,05	14,31	11,59	11,02	17,73	10,37	12,33
<b>Dana Pihak Ketiga</b>	10,01	16,93	15,13	15,14	13,41	10,86	17,01	10,04	9,91
- Giro	16,84	24,31	42,12	42,38	47,39	29,24	33,30	11,39	2,61
- Tabungan	8,48	8,79	12,14	10,26	12,66	13,69	11,43	10,51	12,83
- Deposito	10,21	26,02	12,39	14,22	5,30	2,33	19,30	9,01	8,76
<b>Pembiayaan Lokasi Bank (LB)</b>	12,28	11,01	10,65	12,26	11,59	12,94	12,18	8,77	10,22
- Modal Kerja	-0,50	-0,84	-2,97	3,92	5,31	11,21	11,09	3,66	4,04
- Investasi	29,04	26,18	30,93	26,55	17,64	17,66	12,84	14,11	11,40
- Konsumsi	14,48	12,81	11,63	11,82	12,63	12,13	12,43	12,57	12,68
<b>Pembiayaan Lokasi Proyek (LP)</b>	20,61	19,39	18,07	55,53	12,06	13,17	7,17	3,57	4,62
- Modal Kerja	31,33	22,60	26,26	95,91	11,69	15,81	0,79	-7,94	-4,60
- Investasi	16,88	26,83	17,22	104,49	10,66	9,97	6,03	4,66	4,39
- Konsumsi	15,28	13,48	12,73	19,59	13,13	12,88	12,85	12,36	11,87
<b>Pembiayaan Lokasi Proyek (LP)</b>	12,26	7,74	2,05	7,44	7,61	14,19	14,27	6,73	8,88
- Pembiayaan Sektor Industri Pengolahan	34,09	21,35	7,41	14,32	24,79	42,72	37,92	19,25	15,54
- Pembiayaan Sektor Perdagangan	-3,66	-5,09	-5,25	2,43	-1,39	-1,03	1,15	-1,13	4,23
- Pembiayaan Sektor Pertanian	49,40	51,12	33,71	8,08	-10,41	-11,11	-3,74	-4,81	0,43

INDIKATOR	2023			2024				2025	
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
<b>Rasio Keuangan (%)</b>									
NPL Lokasi Bank	3,50	3,53	3,35	2,78	2,88	2,92	2,82	3,02	2,80
- Modal Kerja	7,18	7,31	7,10	5,03	5,01	4,99	5,01	5,82	5,61
- Investasi	1,58	1,46	1,21	1,40	1,75	2,46	2,15	2,01	1,81
- Konsumsi	2,32	2,42	2,39	2,23	2,14	2,10	2,06	2,11	1,94
NPL Lokasi Proyek	3,47	3,47	3,22	2,44	2,54	2,63	2,69	2,79	2,69
LDR Lokasi Bank	80,91	76,91	77,27	77,21	79,61	74,04	76,51	76,08	79,69
LDR Lokasi Proyek	109,01	103,66	105,70	106,97	107,72	105,82	96,81	100,68	102,53

Sumber : Laporan Bank (diolah)



Bab I

# Perkembangan Ekonomi Makro Regional



## 1.1. Kondisi Umum Perekonomian Jawa Timur

Perekonomian Jawa Timur pada triwulan II 2025 terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan ekonomi didorong oleh lebih tingginya kinerja investasi, serta ekspor barang dan jasa. Kendati mengalami moderasi, konsumsi rumah tangga (RT) yang tetap tumbuh positif turut mendukung solidnya kinerja ekonomi pada triwulan laporan. Dari sisi lapangan usaha (LU) Utama, kinerja LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, LU Konstruksi, serta LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menopang peningkatan pertumbuhan ekonomi, di tengah perlambatan pertumbuhan LU Pertanian seiring pergeseran masa panen raya padi di triwulan I 2025.

### Kinerja Perekonomian Triwulan II 2025

Ketidakpastian ekonomi global masih tinggi pasca pengumuman tarif efektif resiprokal terbaru Amerika Serikat (AS) ke beberapa negara maju dan berkembang. Tingginya ketidakpastian global tercermin dari indikator *Global Economic Policy Uncertainty (GEPU) Index* pada triwulan II 2025 yang secara rata-rata tercatat sebesar 506,35, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 372,33. *GEPU Index* pada triwulan II 2025 juga terpantau lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahun 2021-2024 pada periode yang sama yakni sebesar 216,09.<sup>1</sup> Penerapan kebijakan tarif impor diprakirakan akan menahan prospek pertumbuhan ekonomi dunia, khususnya di negara maju. Pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Jepang dalam tren menurun, di tengah ditempuhnya kebijakan fiskal ekspansif dan pelonggaran kebijakan moneter di negara tersebut. Kinerja ekonomi Tiongkok juga diprakirakan belum kuat, di tengah berbagai strategi diversifikasi ekspor. Dengan perkembangan tersebut, perekonomian global diprakirakan masih belum kuat, tumbuh di angka 3,0% (yoy) pada 2025. Di pasar keuangan global, pergeseran aliran modal keluar dari AS ke Eropa dan negara berkembang, serta komoditas yang dianggap aman seperti emas terus berlanjut sejalan dengan meningkatnya risiko ekonomi AS, termasuk risiko fiskal. Perkembangan ini menyebabkan berlanjutnya pelemahan indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) dan negara

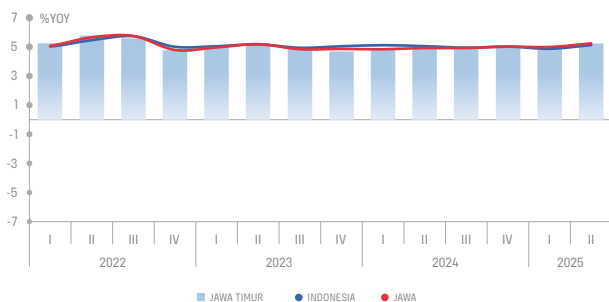
berkembang (ADXY). Ke depan, kewaspadaan serta respons dan koordinasi kebijakan yang lebih kuat diperlukan untuk mitigasi ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global yang masih tinggi, serta menjaga ketahanan eksternal, stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Di tengah masih tingginya ketidakpastian global, kinerja perekonomian Indonesia triwulan II 2025 terakselerasi. Ekonomi Indonesia pada triwulan II 2025 tumbuh 5,12% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya tumbuh 4,87% (yoy). Peningkatan perekonomian Indonesia disokong oleh investasi, ekspor barang dan jasa, serta konsumsi swasta dan konsumsi pemerintah yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2025.

Sejalan dengan nasional, perekonomian Jawa Timur pada triwulan II 2025 juga tumbuh meningkat. Pada triwulan laporan, kinerja ekonomi Jawa Timur tercatat tumbuh 5,23% (yoy), mengalami peningkatan setelah pada triwulan I 2025 tumbuh sebesar 5,00% (yoy) (Grafik 1.1). Kinerja ekonomi Jawa Timur terpantau sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa yang tumbuh 5,24% (yoy), namun lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Nasional yang tercatat tumbuh sebesar 5,12% (yoy) (Grafik 1.2).

Peningkatan kinerja investasi, serta ekspor barang dan jasa menopang percepatan kinerja perekonomian Jawa Timur. Lebih tingginya investasi pada triwulan laporan didorong baik dari investasi komponen bangunan maupun nonbangunan. Kenaikan kinerja investasi bangunan ditunjang oleh berlanjutnya proyek strategis seperti tol Probolinggo-Banyuwangi dan tol Kediri-Tulungagung, serta tercermin dari peningkatan pertumbuhan impor barang pendukung konstruksi, seperti besi baja, bahan konstruksi (semen, gips, tanah liat, batu mineral), barang kaca, dan barang dari logam. Sementara itu, kenaikan investasi nonbangunan ditunjang oleh peningkatan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan pertumbuhan impor barang modal, terutama mesin dan peralatan mekanis. Lebih lanjut, kenaikan

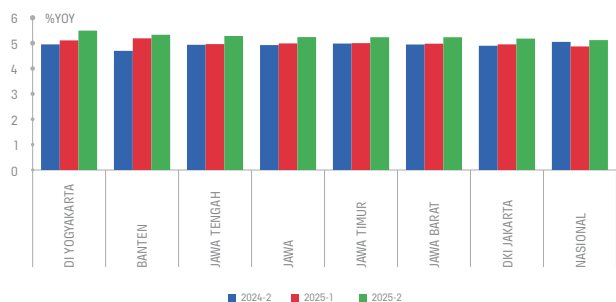
Grafik 1.1 Perekonomian Jawa Timur, Jawa, Nasional



Sumber : BPS (diolah)

1. Economic Policy Uncertainty

Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Jawa



Sumber : BPS (diolah)

**Tabel 1.1 Pertumbuhan PDRB Jawa Timur – Sisi Pengeluaran**

KOMPONEN	2023				2024					2025	
	II	III	IV	TAHUNAN	I	II	III	IV	TAHUNAN	I	II
Konsumsi Rumah Tangga	5,10	5,49	4,02	4,98	5,20	4,80	5,08	4,91	4,99	5,12	4,85
Konsumsi LNPRT	8,16	8,43	16,13	10,30	18,06	12,01	10,95	9,53	12,49	6,53	6,42
Konsumsi Pemerintah	5,77	1,46	-0,02	2,15	10,23	5,67	4,07	2,47	5,24	1,92	-0,55
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,51	4,78	5,02	5,39	5,42	5,06	5,40	6,05	5,49	2,20	6,13
Ekspor Barang Dan Jasa	-2,37	-1,68	8,13	1,16	8,25	10,13	10,78	7,58	9,17	6,08	7,67
Impor Barang Dan Jasa	-3,19	-2,47	7,72	0,54	10,46	11,01	12,46	7,95	10,42	4,63	7,57
<b>PDRB Provinsi Menurut Penggunaan</b>	<b>5,26</b>	<b>4,87</b>	<b>4,69</b>	<b>4,95</b>	<b>4,81</b>	<b>4,98</b>	<b>4,91</b>	<b>5,03</b>	<b>4,93</b>	<b>5,00</b>	<b>5,23</b>

Sumber : BPS (diolah)

**Tabel 1.2 Pertumbuhan PDRB Jawa Timur – Sisi Lapangan Usaha**

LAPANGAN USAHA	2024					2025	
	I	II	III	IV	TAHUNAN	I	II
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-7,63	4,29	1,88	0,94	0,07	10,22	0,50
Pertambangan dan Penggalian	-2,80	-3,29	-0,98	4,70	-0,63	4,36	2,05
Industri Pengolahan	6,10	4,56	5,90	5,06	5,40	4,12	7,39
Pengadaan Listrik dan Gas	10,17	11,74	5,00	1,81	6,92	10,40	1,95
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,81	3,57	0,88	0,56	2,44	-1,25	0,79
Konstruksi	8,16	7,14	6,51	5,95	6,90	1,14	5,58
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,49	3,96	4,36	5,34	4,54	3,58	3,92
Transportasi dan Pergudangan	14,89	8,37	8,25	7,04	9,50	7,24	9,32
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,75	8,60	5,56	4,27	6,98	7,32	8,38
Informasi dan Komunikasi	7,71	6,22	5,97	5,83	6,42	7,11	6,48
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,70	4,49	1,67	1,97	3,91	4,47	1,56
Real Estate	3,14	2,78	2,87	2,85	2,91	2,14	4,03
Jasa Perusahaan	7,27	8,64	7,50	8,10	7,88	8,49	9,76
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,26	7,00	9,43	11,39	7,78	9,87	-2,11
Jasa Pendidikan	4,15	6,30	4,46	4,38	4,82	6,31	5,12
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,14	4,92	7,17	8,78	5,52	9,61	4,60
Jasa lainnya	8,92	9,69	5,73	9,95	8,58	5,40	6,62
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>4,81</b>	<b>4,98</b>	<b>4,91</b>	<b>5,03</b>	<b>4,93</b>	<b>5,00</b>	<b>5,23</b>

Sumber : BPS (diolah)

kinerja ekspor disokong oleh ekspor luar negeri (LN) yang tumbuh signifikan dan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, khususnya oleh komoditas logam mulia dan perhiasan, lemak minyak, kayu, serta berbagai produk kimia.

**Dari sisi lapangan usaha (LU), lebih tingginya kinerja perekonomian terutama didukung oleh peningkatan LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, LU Konstruksi, serta LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.** Kenaikan investasi dan ekspor pada triwulan laporan berdampak pada lebih tingginya kinerja LU Konstruksi dan LU Industri Pengolahan. Lebih tingginya kinerja ekspor dan penjualan eceran turut menyokong perbaikan kinerja LU Perdagangan pada triwulan II 2025. Sementara, kenaikan pertumbuhan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum seiring dengan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), kembali normalnya

tingkat penghunian kamar hotel berbintang, serta penjualan eceran komponen makanan minuman yang meningkat.

**Perekonomian Jawa Timur tertahan untuk tumbuh lebih tinggi terutama disebabkan oleh kinerja konsumsi RT yang melandai, konsumsi pemerintah yang berkontraksi, serta peningkatan impor.** Pada triwulan II 2025, konsumsi RT mengalami perlambatan sejalan dengan normalisasi permintaan masyarakat pasca Imlek, Ramadhan dan Idulfitri 2025, yang diiringi dengan tingkat keyakinan konsumen yang lebih moderat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kendati demikian, kinerja konsumsi RT tetap mencatatkan pertumbuhan positif seiring penjualan eceran yang masih terjaga baik, khususnya komponen makanan minuman. Sementara itu, konsumsi pemerintah berkontraksi, seiring dengan berkontraksinya realisasi belanja operasi K/L APBN di

Jawa Timur, serta lebih rendahnya belanja operasi APBD Provinsi, belanja operasi APBD Kabupaten/Kota Jawa Timur, belanja bantuan sosial APBN di Jawa Timur, dan belanja bantuan sosial APBD Provinsi Jawa Timur pada triwulan II 2025. Lebih lanjut, peningkatan impor sejalan dengan kenaikan kebutuhan untuk pemenuhan aktivitas investasi dan ekspor. Dari sisi lapangan usaha, perlambatan kinerja terjadi pada LU Utama, yakni LU Pertanian seiring pergeseran masa panen raya padi di triwulan I 2025, perlambatan kinerja produksi cabai besar, dan masih terkontraksinya produksi bawang merah.

## 1.2. PDRB SISI PENGELUARAN

**Perekonomian Jawa Timur pada triwulan II 2025 meningkat, ditopang oleh akselerasi investasi, serta ekspor barang dan jasa. Kendati mengalami perlambatan, pertumbuhan positif konsumsi RT pada triwulan laporan turut menjaga kinerja ekonomi Jawa Timur tetap tumbuh dan terakselerasi.**

### 1.2.1. Konsumsi

Kinerja konsumsi pada triwulan II 2025 temoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan konsumsi RT pada triwulan laporan dipengaruhi oleh normalisasi permintaan masyarakat pasca Imlek, Ramadhan, dan Idulfitri 2025, yang diiringi tingkat keyakinan konsumen yang lebih moderat. Konsumsi pemerintah mengalami kontraksi, dan menurun dibandingkan pertumbuhan triwulan I 2025, terutama disebabkan oleh terkontraksinya realisasi belanja operasi K/L APBN di Jawa Timur, serta APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota Jawa Timur. Sementara itu, konsumsi LNPRT sedikit melambat sejalan dengan normalisasi kegiatan keagamaan pasca selesainya momen Ramadhan dan Idulfitri 2025.

#### 1.2.1.1. Konsumsi Swasta (Rumah Tangga & LNPRT)<sup>2</sup>

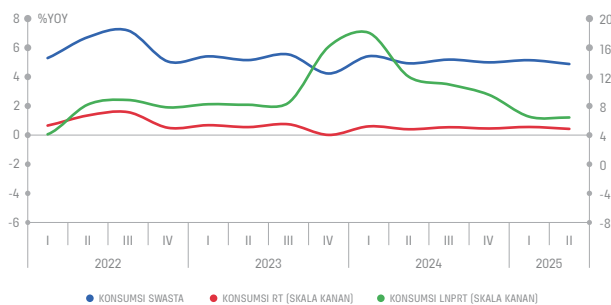
##### Kinerja Konsumsi Swasta Triwulan II 2025

Konsumsi swasta pada triwulan II 2025 melambat dibandingkan triwulan I 2025. Pada triwulan II 2025, konsumsi swasta tumbuh 4,88% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,14% (yoy). Moderasi pertumbuhan konsumsi swasta Jawa Timur terjadi pada konsumsi RT maupun konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT). Kinerja konsumsi RT pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 4,85% (yoy), tumbuh positif namun lebih rendah dibandingkan capaian triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,12% (yoy). Sementara itu, kinerja konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 6,42% (yoy) pada triwulan II 2025, sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya tumbuh 6,53% (yoy) (Grafik 1.3).

**Perlambatan kinerja konsumsi RT Jawa Timur dipicu oleh normalisasi permintaan masyarakat pasca Imlek, Ramadhan, dan Idulfitri 2025, serta melambatnya keyakinan konsumen yang turut menahan konsumsi barang tahan lama.** Keyakinan konsumen Jawa Timur yang lebih moderat tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen dan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini – Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia di Jawa Timur yang lebih rendah masing – masing dari 133,23 dan 123,02 pada triwulan I 2025 menjadi 124,23 dan 111,38 pada triwulan laporan. Hal tersebut berimplikasi pada tertahannya konsumsi barang tahan lama yang dapat dilihat dari lebih rendahnya Indeks Pembelian Barang Tahan Lama – Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia di Jawa Timur, yakni dari 123,72 pada triwulan I 2025 menjadi 112,94 pada triwulan II 2025 (Grafik 1.4).

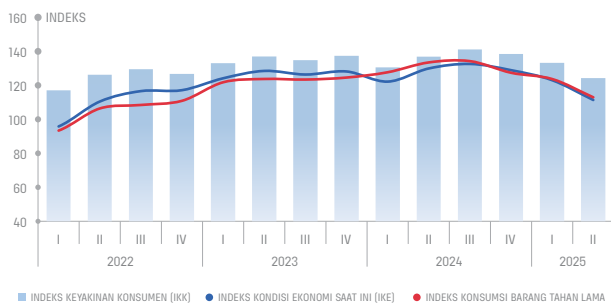
Tertahannya belanja barang tahan lama terutama terjadi pada komponen furnitur dan perabotan rumah, kendaraan motor, barang elektronik, dan barang perhiasan. Perlambatan konsumsi pada komponen kendaraan turut tecermin dari penjualan kendaraan motor yang mengalami kontraksi lebih dalam pada triwulan laporan. Penjualan kendaraan motor di Jawa Timur pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 155.938 unit atau terkontraksi sebesar 14,90% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 168.291 unit atau terkontraksi 7,76% (yoy) (Grafik 1.5).

Grafik 1.3 Pertumbuhan Konsumsi Swasta, Rumah Tangga dan LNPRT



Sumber : BPS (dialah)

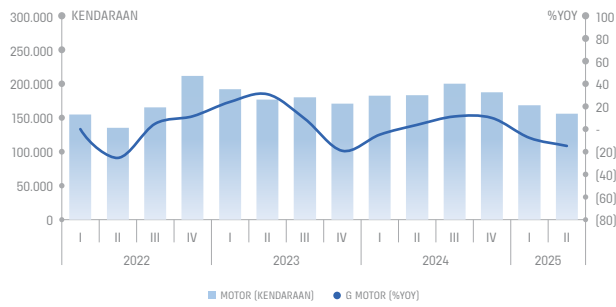
Grafik 1.4 Keyakinan Konsumen dan Konsumsi Barang Tahan Lama



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

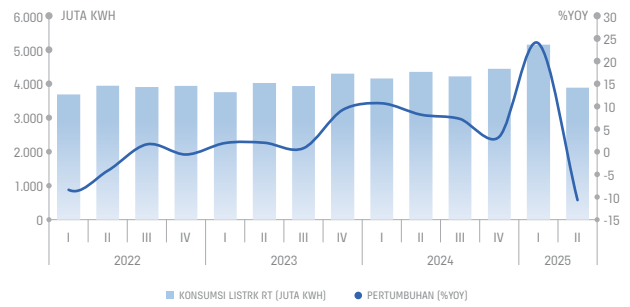
2. Konsumsi swasta merupakan penjumlahan dari konsumsi rumah tangga dan konsumsi LNPRT.

**Grafik 1.5 Penjualan Kendaraan Sepeda Motor**



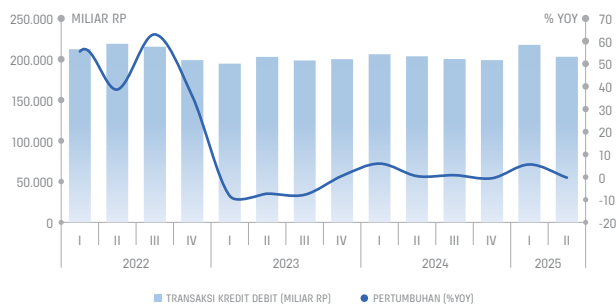
Sumber: Bapenda Jawa Timur (diolah)

**Grafik 1.6 Konsumsi Listrik Rumah Tangga**



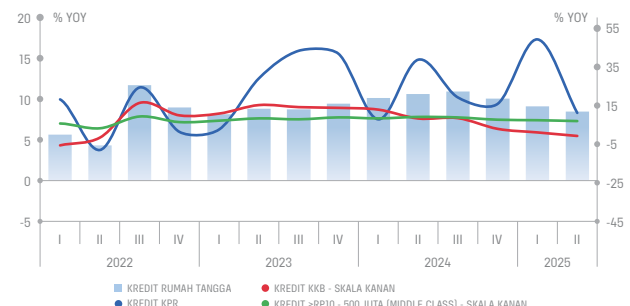
Sumber: PLN (diolah)

**Grafik 1.7 Pertumbuhan Transaksi APMK**



Sumber: Bank Indonesia

**Grafik 1.8 Sumber Pembiayaan Konsumsi Rumah Tangga**



Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)

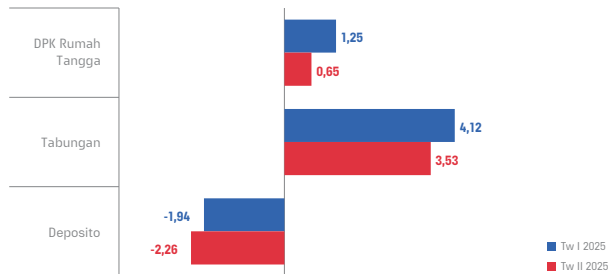
**Melambatnya kinerja konsumsi juga tercermin pada penurunan konsumsi listrik masyarakat dan transaksi pembayaran menggunakan kartu.** Konsumsi listrik rumah tangga di Jawa Timur pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 3.885 juta KWh atau terkontraksi sebesar 10,68% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh signifikan sebesar 23,93% (yoy) (Grafik 1.6). Penurunan konsumsi listrik yang signifikan seiring dengan berakhirnya penerapan diskon tarif listrik pada triwulan I 2025. Selain itu, deselerasi kinerja konsumsi RT di Jawa Timur turut tercermin dari perlambatan transaksi dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Total transaksi dengan APMK Jawa Timur pada triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp203.151 miliar atau sedikit terkontraksi sebesar 0,27% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp217.562 miliar atau tumbuh 5,56% (yoy). Penurunan transaksi terutama untuk transaksi tunai, belanja, dan transfer (Grafik 1.7).

**Perlambatan kredit rumah tangga menunjukkan lebih rendahnya kinerja konsumsi RT.** Kredit RT tumbuh 8,46% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 9,10% (yoy). Perlambatan kinerja kredit RT terjadi pada komponen Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Perlambatan penyaluran KPR dipengaruhi oleh kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) yang mensyaratkan serah terima unit maksimal pada Desember 2025. Sementara itu, proses pembangunan perumahan

umumnya memerlukan waktu lebih panjang, terutama di tengah keterbatasan stok properti siap huni (*ready stock*). Di sisi lain, perlambatan pada penyaluran KKB sejalan dengan berakhirnya sejumlah insentif pajak daerah terkait kendaraan bermotor pada 30 November 2024, antara lain pembebasan Bea Balik Nama (BBN) II dan seterusnya, penghapusan sanksi administratif, serta pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) progresif di wilayah Jawa Timur. Berakhirnya insentif tersebut diperkirakan turut menurunkan minat masyarakat dalam melakukan pembelian kendaraan bermotor. Berdasarkan nominal kredit yang disalurkan, perlambatan kredit RT terutama terjadi pada kredit dengan nominal di atas Rp10 Juta hingga Rp500 juta atau termasuk kategori kelas menengah (*Middle Class*) (Grafik 1.8).

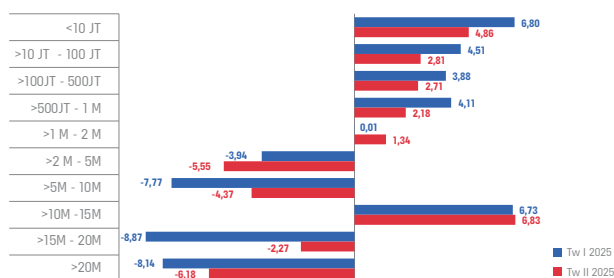
**Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada triwulan II 2025 melambat, terutama pada komponen Tabungan dan Deposito.** DPK sektor rumah tangga di perbankan Jawa Timur pada triwulan II 2025 tumbuh terbatas sebesar 0,65% (yoy), lebih moderat dibandingkan triwulan I 2025 yang tumbuh 1,25% (yoy). Perlambatan DPK rumah tangga terutama disebabkan oleh lebih rendahnya komponen tabungan dan deposito. Pertumbuhan DPK komponen tabungan dan deposito pada triwulan II 2025 masing – masing tercatat sebesar 3,53% dan -2,26% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 4,12% dan -1,94% (yoy) (Grafik 1.9). Ditinjau dari nilainya, perlambatan DPK pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya terjadi pada seluruh

**Grafik 1.9 Pertumbuhan DPK Perbankan Sektor Rumah Tangga Berdasarkan Komponen, Triwulan I 2025 – Triwulan II 2025**



Sumber: Laporan Bank Umum (dialah)

**Grafik 1.10 Pertumbuhan DPK Perbankan Sektor Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Nilai, Triwulan I 2025 – Triwulan II 2025**



Sumber : Laporan Bank Umum (dialah)

kelompok nilai <Rp10 Juta – Rp1 Miliar, dan > Rp2-5 miliar, sementara pertumbuhan DPK dengan nominal tinggi atau >Rp 5 miliar cenderung mengalami peningkatan (Grafik 1.10). Lebih rendahnya kinerja DPK di tengah perlambatan konsumsi RT dan penyaluran kredit RT menunjukkan adanya potensi daya beli yang tertahan dan meningkatnya kehati-hatian dalam berbelanja, serta terbatasnya ruang likuiditas rumah tangga untuk melakukan konsumsi maupun menabung.

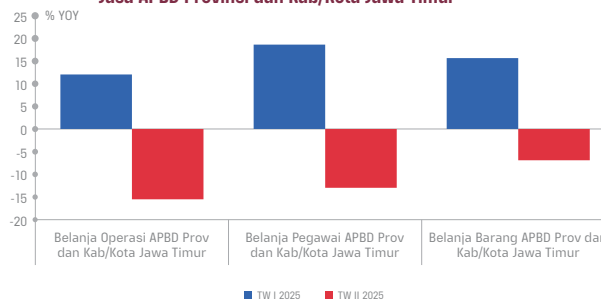
**Kendati demikian, kinerja konsumsi RT tetap mencatatkan pertumbuhan positif seiring penjualan eceran yang tumbuh meningkat, khususnya pada komponen makanan minuman.** Indeks Riil Penjualan Eceran (IRPE) komponen Makanan Minuman tercatat sebesar 810,65 atau tumbuh sebesar 21,59% (yoy) pada triwulan II 2025, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,75% (yoy). Kenaikan konsumsi ritel pada komponen makanan minuman yang diiringi perlambatan indeks konsumsi barang tahan lama mengindikasikan masyarakat Jawa Timur cenderung melakukan konsumsi pada sektor primer, dan menahan konsumsi pada sektor sekunder maupun tersier.

### 1.2.1.2. Konsumsi Pemerintah

#### Kinerja Konsumsi Pemerintah Triwulan II 2025

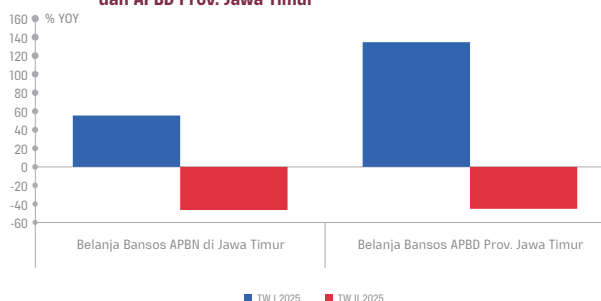
**Konsumsi Pemerintah pada triwulan II 2025 berkontraksi.** Pada triwulan II 2025, konsumsi pemerintah mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,55% (yoy), lebih rendah dibandingkan

**Grafik 1.11 Perkembangan Realisasi Belanja Operasi, Pegawai, dan Barang Jasa APBD Provinsi dan Kab/Kota Jawa Timur**



Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur

**Grafik 1.12 Perkembangan Realisasi Belanja Bansos APBN di Jawa Timur dan APBD Prov. Jawa Timur**



Sumber : BPKAD, Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur

triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,92% (yoy). Penurunan kinerja terutama dipengaruhi oleh realisasi Belanja Operasi K/L APBN di Jawa Timur, serta Belanja Operasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dan realisasi Belanja Bansos di Provinsi Jawa Timur pada triwulan laporan.

**Belanja Operasi K/L APBN di Jawa Timur mengalami kontraksi pada triwulan II 2025.** Belanja Operasi K/L APBN di Jawa Timur tercatat kontraksi 10,21% (yoy) pada triwulan II 2025. Kontraksi Belanja Operasi K/L APBN di Jawa Timur terutama disebabkan oleh realisasi Belanja Barang APBN di Jawa Timur yang berkontraksi sebesar 30,73% (yoy). Hal tersebut terutama seiring dengan pengurangan pagu anggaran dan masih cukup ketatnya realisasi belanja, serta beberapa kegiatan operasional atau perjalanan dinas yang masih ditunda.

**Belanja Operasi pada APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur turut berkontraksi pada triwulan II 2025.** Belanja Operasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur berkontraksi sebesar 15,51% (yoy) pada triwulan II 2025, menurun dari capaian pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,06% (yoy). Penurunan kinerja realisasi Belanja Operasi terutama disebabkan oleh komponen Belanja Pegawai serta Barang dan Jasa APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Jawa Timur. Belanja Pegawai APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur tercatat berkontraksi 12,97% (yoy) pada triwulan II 2025, lebih rendah dari capaian pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 18,63% (yoy). Sementara itu,

realisasi Belanja Barang APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur berkontraksi 6,90% (yoy) pada triwulan laporan, menurun dibandingkan triwulan I 2025 yang tumbuh sebesar 15,65% (yoy) (Grafik 1.11).

Penurunan Belanja Pegawai terjadi seiring dengan pergeseran jadwal penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) 2025 bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahan Provinsi, serta Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Kondisi tersebut berbeda dengan tahun 2024 yang pencairan THR dilakukan pada awal April. Lebih lanjut, penurunan Belanja Barang dipengaruhi oleh mulai berlakunya penerapan pengurangan alokasi belanja perjalanan dinas minimal 50%, terutama pada 13 Kabupaten/Kota, yaitu Kab. Trenggalek, Kab. Bondowoso, Kab. Jember, Kab. Jombang, Kab. Gresik, Kab. Bojonegoro, Kab. Malang, Kab. Kediri, Kab. Ponorogo, Kab. Sidoarjo, Kab. Situbondo, Kab. Pacitan, dan Kota Blitar.

**Deselerasi realisasi Belanja Bantuan Sosial (Bansos) APBN di Jawa Timur dan APBD Provinsi Jawa Timur turut mempengaruhi kinerja konsumsi pemerintah yang lebih rendah pada triwulan II 2025.** Realisasi Belanja Bansos APBN di Jawa Timur dan APBD Provinsi Jawa Timur pada triwulan laporan masing – masing berkontraksi sebesar 46,52% dan 45,17% (yoy). Pencapaian tersebut menurun dibandingkan triwulan I 2025 yang masing – masing tumbuh sebesar 55,43% dan 134,57% (yoy). Penurunan Belanja Bansos sejalan dengan penyaluran program Perlindungan Sosial dan Pendidikan yang telah terealisasi pada triwulan I 2025 (Grafik 1.12).

### 1.2.2. Investasi

**Kinerja investasi pada triwulan II 2025 meningkat dibandingkan triwulan I 2025. Peningkatan pertumbuhan terjadi baik di komponen bangunan, maupun nonbangunan. Akselerasi investasi bangunan tecermin dari meningkatnya kinerja LU Konstruksi yang ditopang oleh berlanjutnya proyek strategis seperti tol Probolinggo-Banyuwangi dan tol Kediri-Tulungagung, serta peningkatan pertumbuhan impor barang pendukung konstruksi. Sementara itu, akselerasi investasi nonbangunan tecermin dari peningkatan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN), serta impor mesin dan peralatan mekanis.**

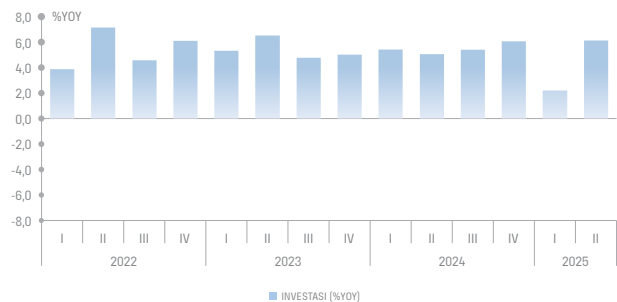
#### Kinerja Investasi Triwulan II 2025

**Kinerja investasi Jawa Timur pada triwulan II 2025 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.** Investasi Jawa Timur pada triwulan II 2025 tumbuh 6,13% (yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan I 2025 yang tumbuh sebesar 2,20% (yoy) (Grafik 1.13). Peningkatan investasi pada triwulan laporan terjadi secara *broad based*, baik komponen bangunan maupun nonbangunan. Akselerasi pertumbuhan investasi di Jawa Timur, sejalan dengan kondisi investasi dunia usaha yang melambat pada triwulan laporan, sebagaimana tecermin dari Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia yang

tercatat sebesar 7,56 (SBT), lebih tinggi dibandingkan kondisi pada triwulan I 2025 sebesar 5,19 (SBT). Peningkatan kinerja investasi juga tecermin dari kinerja manufaktur Jawa Timur yang meningkat pada triwulan laporan. *Prompt Manufacturing Index* (PMI) Jawa Timur pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 52,86%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 52,07% (Grafik 1.14).

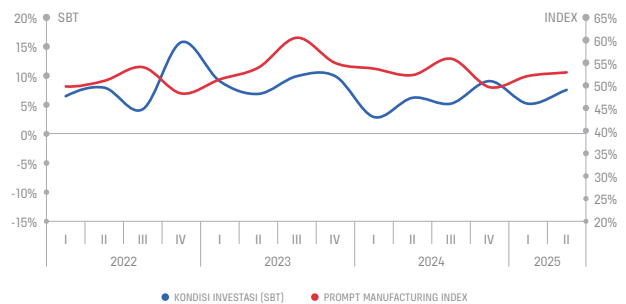
**Percepatan investasi bangunan ditunjang oleh berlanjutnya pembangunan proyek strategis Jawa Timur, turut tecermin dari peningkatan impor barang pendukung konstruksi.** Pembangunan sejumlah proyek strategis, seperti jalan tol Probolinggo-Banyuwangi dan jalan tol Kediri-Tulungagung, berkontribusi terhadap peningkatan kinerja investasi Jawa Timur pada triwulan laporan. Peningkatan aktivitas pembangunan turut didorong oleh peningkatan pertumbuhan impor barang pendukung konstruksi, seperti besi baja, bahan konstruksi (semen, gips, tanah liat, batu mineral), barang kaca, dan barang dari logam (struktur konstruksi). Impor barang besi baja, bahan konstruksi, barang kaca, dan barang dari logam pada triwulan II 2025 masing – masing tumbuh 29,69%, -21,53%, 14,91%, dan 31,80% (yoy), lebih baik dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang masing – masing tercatat 18,09%, -46,63%, -15,14%, dan -8,80% (yoy) (Grafik 1.15).

Grafik 1.13 Pertumbuhan Investasi Jawa Timur



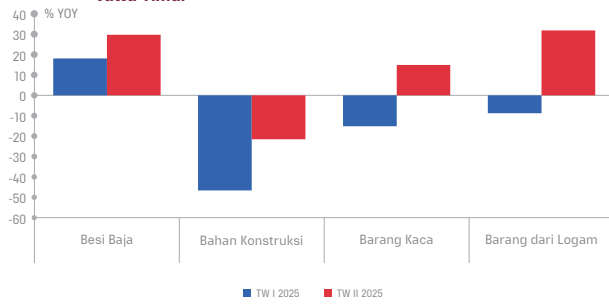
Sumber : BPS (diolah)

Grafik 1.14 Kondisi Investasi Dunia Usaha Jawa Timur



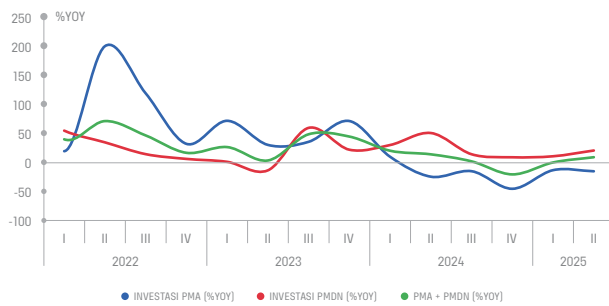
Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha BI (diolah)

**Grafik 1.15 Pertumbuhan Komponen Impor Barang Pendukung Konstruksi Jawa Timur**



Sumber: Laporan Bea Cukai (dialah)

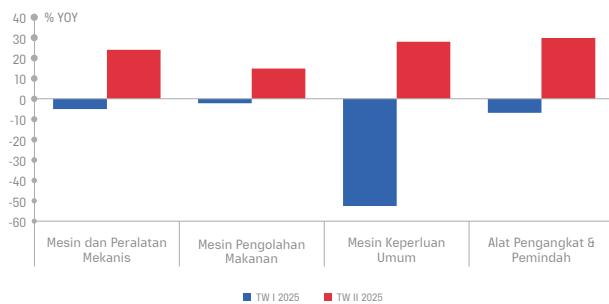
**Grafik 1.16 Investasi Penanaman Modal Jawa Timur**



Sumber: BKPM, DPMPTSP Jawa Timur (dialah)

Peningkatan investasi nonbangunan tecermin dari kenaikan investasi penanaman modal, terutama dalam negeri (PMDN) dan impor barang modal. Investasi penanaman modal di Jawa Timur pada triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp38,64 triliun atau tumbuh sebesar 8,57% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 0,42% (yoy). Peningkatan investasi penanaman modal terutama terjadi pada investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang tumbuh mencapai 20,10% (yoy) pada triwulan laporan, meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 10,19% (yoy) (Grafik 1.16). Investasi PMDN di Jawa Timur mayoritas terjadi di Kawasan Surabaya Raya, yaitu Kota Surabaya (27,3%), Kab. Gresik (20,5%), dan Kab. Sidoarjo (11,4%).

**Grafik 1.17 Pertumbuhan Komponen Impor Barang Modal Jawa Timur**



Sumber: Laporan Bea Cukai (dialah)

Secara sektoral, investasi PMDN ditopang oleh sektor Perumahan, Kawasan, Industri & Perkantoran (16,3%), Industri Makanan (13,4%), serta Perdagangan dan Reparasi (11,7%). Lebih lanjut, peningkatan impor barang modal turut mendukung peningkatan kinerja investasi triwulan laporan, terutama pada impor komoditas mesin peralatan mekanis. Impor komoditas mesin peralatan mekanis mengalami peningkatan, dari berkontraksi sebesar 5,04% (yoy) pada triwulan I 2025, meningkat signifikan menjadi tumbuh 24,01% (yoy) pada triwulan II 2025 (Grafik 1.17). Lebih tingginya impor mesin peralatan mekanis terutama pada komoditas mesin pengolahan makanan minuman, mesin keperluan umum, serta alat pengangkat dan pemindah.

Selain itu, berlanjutnya pembangunan proyek swasta dengan nilai investasi besar di Jawa Timur turut menyumbang lebih tingginya peningkatan kinerja investasi, terutama pembangunan pabrik kimia dan kaca di Gresik, serta investasi pengembangan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus di Jawa Timur.

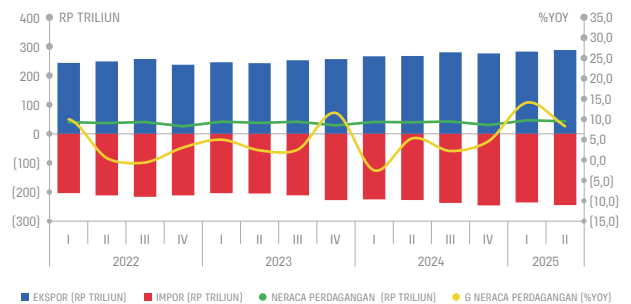
### 1.2.3. Ekspor - Impor

Kinerja net ekspor Jawa Timur pada triwulan II 2025 mencatatkan surplus, kendati tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, seiring peningkatan pertumbuhan impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspor. Kenaikan ekspor barang dan jasa dipicu oleh peningkatan ekspor LN komoditas logam mulia dan perhiasan, lemak minyak, kayu, produk kimia, kakao, serta ikan, krustasea, dan moluska. Sementara itu, lebih tingginya kinerja impor utamanya terjadi pada impor LN, yakni pada komoditas mesin peralatan mekanis, besi baja, plastik, dan sisa industri makanan. Impor tersebut untuk mendukung aktivitas Industri Pengolahan.

### Kinerja Ekspor Impor Triwulan II 2025

Neraca perdagangan Jawa Timur pada triwulan II 2025 mencatatkan surplus, kendati tumbuh lebih rendah. Pada triwulan II 2025, neraca perdagangan Jawa Timur mencatatkan net ekspor sebesar Rp42,95 triliun, lebih rendah dibandingkan

**Grafik 1.18 Neraca Perdagangan Jawa Timur**



Sumber: BPS (dialah)

triwulan I 2025 yang sebesar Rp46,41 triliun (ADHK 2010). Secara pertumbuhan, pencapaian tersebut mencatatkan kinerja yang lebih moderat dibandingkan triwulan I 2025, yakni dari 14,08% (yoy) menjadi 8,27% (yoy). Moderasi pertumbuhan tahunan (yoy) net ekspor seiring peningkatan pertumbuhan impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspor (Grafik 1.18).

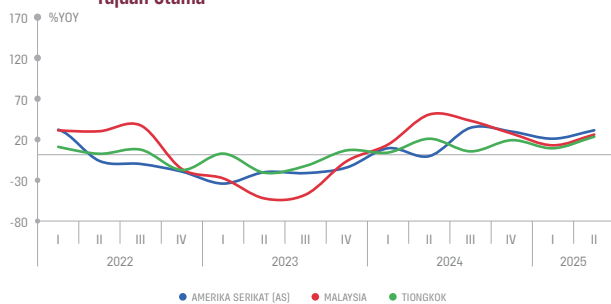
**Kinerja ekspor barang dan jasa tumbuh meningkat pada triwulan II 2025.** Pertumbuhan ekspor Jawa Timur triwulan laporan tercatat sebesar 7,67% (yoy), lebih tinggi dari capaian pada triwulan I 2025 sebesar 6,08% (yoy) (Tabel 1.1). Kinerja ekspor yang lebih tinggi terutama didorong oleh meningkatnya ekspor LN, khususnya pada komoditas logam mulia dan perhiasan, lemak minyak, kayu, produk kimia, kakao, serta ikan, krustasea, dan moluska. Berdasarkan negara tujuan, peningkatan ekspor LN Jawa Timur utamanya ke negara AS, Tiongkok, Swiss, dan Malaysia.

Sementara itu, kinerja perdagangan antardaerah terpantau melambat. Hal tersebut tecermin dari lebih rendahnya kinerja muat barang di Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandara Juanda pada triwulan laporan. Serupa dengan ekspor, kinerja impor juga terpantau meningkat lebih tinggi, dari 4,63% (yoy) pada triwulan I 2025, memeningkat menjadi 7,57% (yoy) pada triwulan laporan. Peningkatan impor terutama pada impor LN untuk pendukung aktivitas Industri Pengolahan.

### Kinerja Ekspor Triwulan II 2025

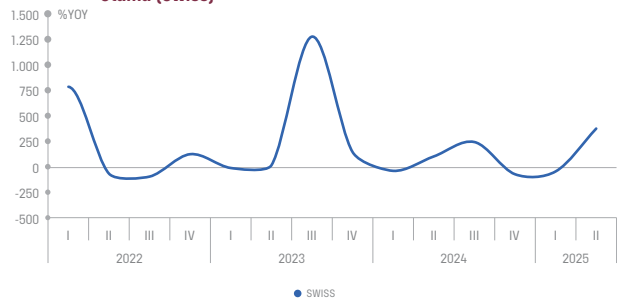
**Kinerja ekspor Jawa Timur pada triwulan II 2025 meningkat dibandingkan triwulan I 2025.** Ekspor pada triwulan II 2025 mencapai Rp287,59 triliun (ADHK 2010) atau tumbuh sebesar 7,67% (yoy). Pencapaian tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2025 yang tumbuh sebesar 6,08% (yoy)<sup>3</sup>. Peningkatan kinerja ekspor barang dan jasa Jawa Timur pada triwulan II 2025 terutama terjadi pada komponen ekspor LN. Berdasarkan data laporan Bea Cukai, ekspor LN pada triwulan II 2025 tumbuh 35,11% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2025 yang berkontraksi sebesar 1,47% (yoy). Peningkatan kinerja ekspor LN terutama pada ekspor nonmigas. Berdasarkan negara

**Grafik 1.19** Pertumbuhan Ekspor Jawa Timur berdasarkan Negara Tujuan Utama



Sumber : Laporan Bea Cukai (diolah)

**Grafik 1.20** Pertumbuhan Ekspor Jawa Timur berdasarkan Negara Tujuan Utama (Swiss)

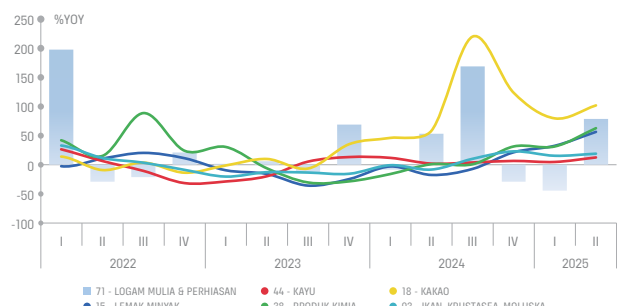


Sumber : Laporan Bea Cukai (diolah)

tujuan, peningkatan ekspor LN terjadi pada beberapa negara mitra dagang utama Jawa Timur, seperti AS, Tiongkok, Malaysia, dan Swiss (Grafik 1.19 – 1.20).

**Berdasarkan komoditas, kinerja ekspor LN Jawa Timur terutama disokong oleh peningkatan ekspor komoditas logam mulia dan perhiasan, lemak minyak, kayu, produk kimia, kakao, serta ikan, krustasea, dan moluska (Grafik 1.21).** Ekspor logam mulia dan perhiasan pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 78,84% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 44,27% (yoy). Hal tersebut didukung oleh lebih tingginya permintaan dari negara Swiss, Singapura, dan Uni Emirat Arab. Peningkatan ekspor emas turut ditopang oleh kenaikan permintaan global atas emas sebagai produk investasi. Sementara, kenaikan kinerja ekspor komoditas lemak minyak terutama ke negara Tiongkok, dengan produk *shortening* atau mentega putih yang digunakan untuk pengolahan makanan. Kinerja ekspor komoditas kayu tercatat mengalami peningkatan, terutama ke negara AS, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Kinerja ekspor komoditas produk kimia juga mengalami peningkatan pada triwulan II 2025 terutama pada komoditas alkohol dan turunannya, yang diekspor ke AS, Belanda, dan Malaysia. Lebih lanjut, pada periode yang sama, peningkatan ekspor LN komoditas kakao, ikan, krustasea, dan moluska turut menyumbang pada pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi.

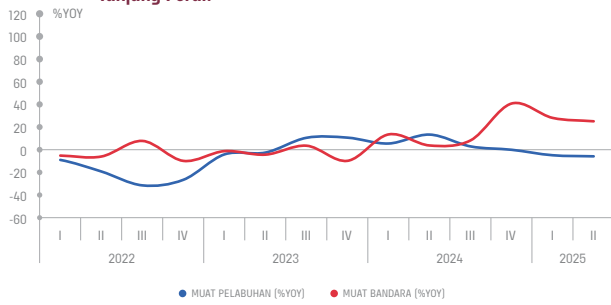
**Grafik 1.21** Pertumbuhan Ekspor Jawa Timur berdasarkan Komoditas Utama



Sumber : Laporan Bea Cukai (diolah)

3. Pangsa ADHK ekspor Jawa Timur pada triwulan II 2025 sebesar 56,45% terhadap total PDRB Jawa Timur.

**Grafik 1.22 Pertumbuhan Barang Muat Bandara Juanda dan Pelabuhan Tanjung Perak**



Sumber : Angkasa Pura I (diolah)

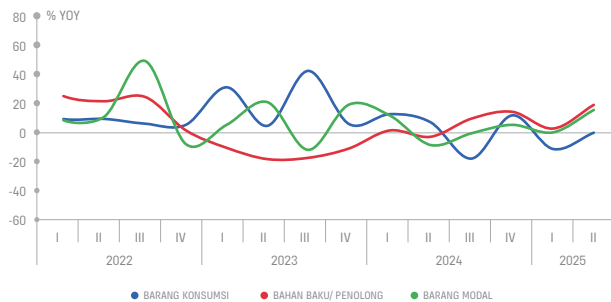
**Peningkatan kinerja ekspor Jawa Timur yang lebih tinggi tertahan oleh aktivitas muat barang di Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandara Juanda yang lebih terbatas.** Aktivitas muat barang Pelabuhan Tanjung Perak pada triwulan II 2025 berkontraksi sebesar 5,85% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 4,89% (yoy). Sementara, volume muat barang di Bandara Juanda tercatat masih tumbuh positif sebesar 25,08% (yoy) pada triwulan laporan, melambat dari pertumbuhan triwulan I 2025 sebesar 28,07% (yoy) (Grafik 1.22).

### Kinerja Impor Triwulan II 2025

**Impor Jawa Timur pada triwulan II 2025 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan lebih tingginya kinerja investasi dan ekspor.** Impor pada PDRB Jawa Timur tercatat sebesar Rp244,64 triliun (ADHK 2010) atau tumbuh 7,57% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,63% (yoy) (Tabel 1.1). Pertumbuhan impor yang lebih tinggi pada triwulan II 2025 terutama terjadi pada impor LN. Berdasarkan data laporan Bea Cukai, impor LN pada triwulan II 2025 tercatat tumbuh 15,78% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh terbatas sebesar 0,20% (yoy).

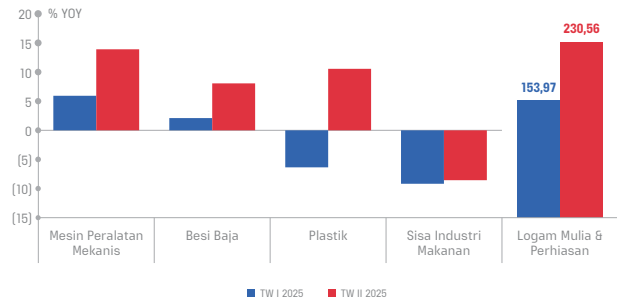
**Peningkatan impor LN terutama terjadi pada impor LN non migas.** Secara umum, peningkatan impor LN pada triwulan II 2025 disumbang oleh lebih tingginya impor beberapa komoditas utama, seperti komoditas logam mulia dan perhiasan, mesin

**Grafik 1.23 Pertumbuhan Impor LN Jawa Timur**



Sumber : Laporan Bea Cukai (diolah)

**Grafik 1.24 Pertumbuhan Komoditas Utama Impor LN Jawa Timur**

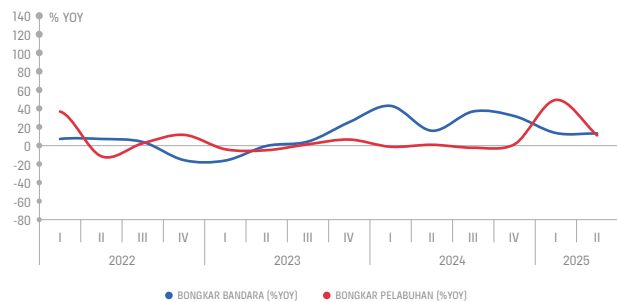


Sumber : Laporan Bea Cukai (diolah)

peralatan mekanis, besi baja, plastik, dan ampas sisa industri makanan. Pada triwulan II 2025, pertumbuhan impor bahan baku, barang konsumsi, maupun barang modal mengalami peningkatan pada triwulan laporan, dari masing-masing tercatat 2,54%, -11,46%, dan -0,08% (yoy) pada triwulan I 2025, menjadi tumbuh sebesar 18,83%, -0,30%, dan 15,33% (yoy). Akselerasi ekspor dan LU Industri Pengolahan Jawa Timur berimplikasi pada lebih tingginya kebutuhan impor bahan baku pada periode laporan. Peningkatan impor bahan baku terutama pada logam mulia dan emas perhiasan, besi baja, plastik, ampas dan sisa industri makanan, dan pupuk. Lebih lanjut, perbaikan kinerja impor barang konsumsi terutama pada komoditas sayuran, makanan olahan, dan alas kaki. Sementara itu, lebih tingginya kinerja impor barang modal pada triwulan laporan terutama mesin peralatan mekanis (Grafik 1.23 – 1.24).

**Peningkatan kinerja impor Jawa Timur yang lebih tinggi tertahan oleh impor dalam negeri (DN) yang terindikasi terbatas, tecermin dari kinerja bongkar barang Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandara Juanda pada triwulan laporan.** Aktivitas bongkar barang di Pelabuhan Tanjung Perak pada triwulan II 2025 terpantau tumbuh sebesar 10,91% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 49,20% (yoy). Lebih lanjut, volume bongkar barang di Bandara Juanda juga terpantau melambat, dari sebelumnya tumbuh sebesar 13,49% (yoy) pada triwulan I 2025, menjadi sebesar 13,08% (yoy) pada triwulan laporan (Grafik 1.25).

**Grafik 1.25 Pertumbuhan Barang Bongkar Bandara Juanda**



Sumber : Angkasa Pura I (diolah)

### 1.3. PDRB SISI LAPANGAN USAHA

Peningkatan kinerja LU utama, yakni LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, LU Konstruksi, serta LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menyokong akselerasi kinerja ekonomi Jawa Timur pada triwulan II 2025. Kinerja ekonomi Jawa Timur yang lebih tinggi tertahan oleh perlambatan kinerja LU Pertanian seiring pergeseran panen raya komoditas padi pada triwulan I 2025.

#### 1.3.1. Industri Pengolahan

Kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan II 2025 meningkat dibandingkan triwulan I 2025, sejalan dengan lebih tingginya kinerja investasi dan ekspor pada triwulan laporan.

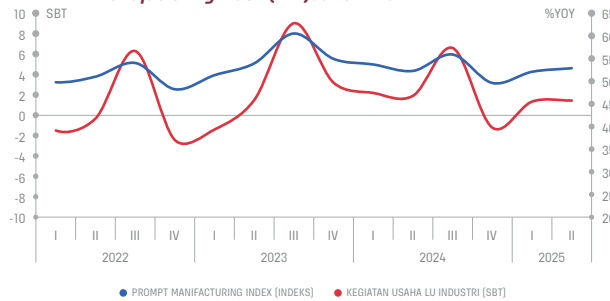
#### Kinerja LU Industri Pengolahan Triwulan II 2025

Pada triwulan II 2025, kinerja LU Industri Pengolahan meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya. LU Industri Pengolahan pada triwulan II 2025 tumbuh 7,39% (yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,12% (yoy) (Tabel 1.2). Akselerasi kinerja LU Industri Pengolahan terkonfirmasi dari peningkatan kegiatan usaha LU Industri Pengolahan hasil SKDU Bank Indonesia di Jawa Timur, dari 1,33 [SBT] pada triwulan I 2025 menjadi 1,44 [SBT] pada triwulan II 2025. Selain itu, peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan juga tecermin pada *Prompt Manufacturing Index* (PMI) Jawa Timur, dari sebelumnya

sebesar 52,07 pada triwulan I 2025 menjadi sebesar 52,86 pada triwulan laporan (Grafik 1.26). Kenaikan kinerja LU Industri Pengolahan turut didukung oleh peningkatan investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN), terutama investasi di Kawasan Industri dan sektor Industri Makanan.

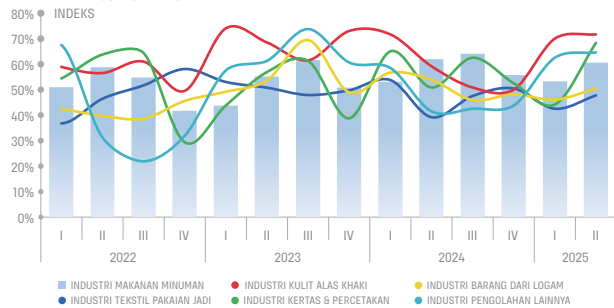
Peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan di Jawa Timur pada triwulan II 2025 dapat dilihat dari aktivitas industri beberapa sub LU Industri Pengolahan yang lebih masif. Berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia di Jawa Timur, *Prompt Manufacturing Index* (PMI) di sub LU Industri Makanan Minuman, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, Industri Kulit Alas Kaki, Industri Kertas dan Percetakan, Industri Barang dari Logam, serta Industri Pengolahan Lainnya masing-masing meningkat dari 53,22; 42,50; 70,00; 44,17; 46,04; dan 62,50 (Indeks) pada triwulan I 2025 menjadi 60,63; 47,73; 71,67; 68,33; 50,42; dan 64,58 (Indeks) pada triwulan laporan. Pencapaian tersebut mencerminkan aktivitas produksi industri utama di Jawa Timur yang mengalami percepatan (Grafik 1.27). Aktivitas industri di Jawa Timur yang lebih masif turut tecermin dari peningkatan pertumbuhan konsumsi listrik di sektor industri. Konsumsi listrik industri Jawa Timur pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh 5,54% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 2,77% (yoy) (Grafik 1.28).

Grafik 1.26 Kondisi Usaha LU Industri Pengolahan dan *Prompt Manufacturing Index* (PMI) Jawa Timur



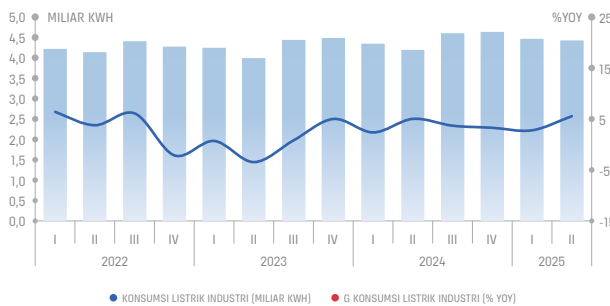
Sumber: SKDU Bank Indonesia (diolah)

Grafik 1.27 *Prompt Manufacturing Index* (PMI) Sub LU Industri Pengolahan Jawa Timur



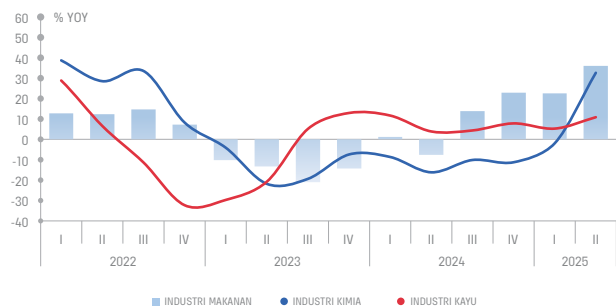
Sumber: SKDU Bank Indonesia (diolah)

Grafik 1.28 Perkembangan Konsumsi Listrik Industri



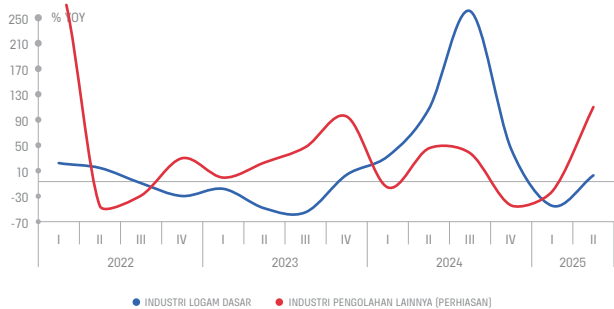
Sumber: PLN (diolah)

Grafik 1.29 Perkembangan Ekspor Industri Pengolahan (Makanan, Kimia, Kayu)



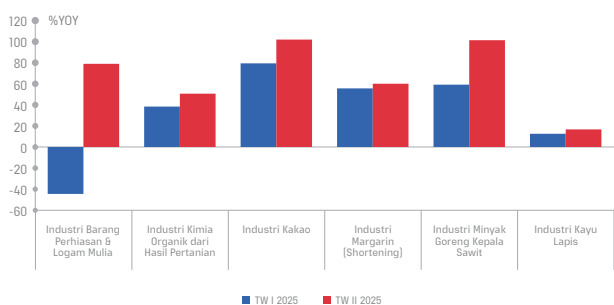
Sumber: Laporan Bea Cukai (diolah)

**Grafik 1.30 Perkembangan Ekspor Industri Pengolahan (Logam, Lainnya)**



Sumber: Laporan Bea Cukai (dialah)

**Grafik 1.31 Perkembangan Komoditas Utama Ekspor Industri Pengolahan**



Sumber: Laporan Bea Cukai (dialah)

**Peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan di Jawa Timur sejalan dengan akselerasi kinerja ekspor Jawa Timur, terutama ekspor LN.** Pertumbuhan ekspor Jawa Timur ditopang oleh kenaikan kinerja ekspor LN terutama pada sub LU Industri Makanan, Industri Pengolahan Lainnya (Emas Perhiasan), Industri Logam Dasar, Industri Kimia, dan Industri Kayu (Grafik 1.29 - 1.30). Peningkatan kinerja ekspor LN Industri Makanan utamanya terjadi pada industri kakao, industri margarin (*shortening*), dan industri minyak goreng kelapa sawit. Lebih tingginya ekspor sub sektor Industri Pengolahan Lainnya dan Logam Dasar disumbang oleh peningkatan ekspor komoditas dari industri barang perhiasan dan pembuatan logam dasar mulia. Lebih lanjut, kenaikan ekspor kayu didominasi oleh industri kayu lapis, sementara ekspor industri kimia disokong oleh industri kimia organik dari hasil pertanian (Grafik 1.31).

### 1.3.2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

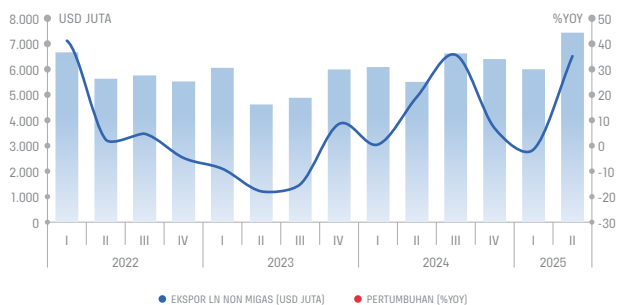
**Peningkatan kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (LU Perdagangan) Jawa Timur pada triwulan laporan tecermin dari kenaikan kinerja perdagangan ekspor dan penjualan eceran, terutama pada komponen makanan minuman. Kinerja LU Perdagangan yang lebih tinggi turut ditunjang oleh peningkatan investasi penanaman modal dalam negeri dan penyaluran kredit modal kerja di LU Perdagangan.**

### Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran Triwulan II 2025

**Pada triwulan II 2025, kinerja LU Perdagangan terpantau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.** Kinerja LU Perdagangan pada triwulan II 2025 tercatat tumbuh 3,92% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2025 yang tumbuh sebesar 3,58% (yoy) (Tabel 1.2). Kenaikan kinerja LU Perdagangan di Jawa Timur pada periode laporan terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, terutama ekspor LN, serta penjualan eceran, khususnya komponen makanan minuman. Lebih lanjut, realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) Jawa Timur pada triwulan II 2025 turut didukung investasi pada sektor Perdagangan dan Reparasi. Hal tersebut berimplikasi pada kinerja LU Perdagangan yang lebih tinggi pada triwulan laporan.

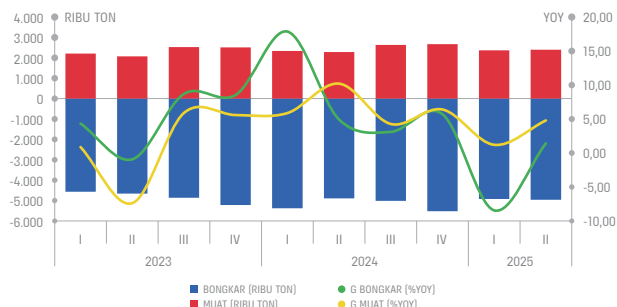
**Peningkatan kinerja LU Perdagangan terkonfirmasi dari lebih tingginya pertumbuhan ekspor LN pada triwulan laporan.** Hal tersebut tecermin dari ekspor LN pada triwulan II 2025 yang meningkat signifikan, yaitu dari terkontraksi sebesar 1,47% (yoy) di triwulan I 2025, menjadi tumbuh sebesar 35,11% (yoy). Secara volume, muat barang luar negeri di Pelabuhan Tanjung Perak mencatatkan peningkatan pertumbuhan, dari tumbuh terbatas di 1,20% pada triwulan I 2025, menjadi tumbuh lebih tinggi sebesar 4,79% (yoy) pada triwulan laporan (Grafik 1.32 - 1.33).

**Grafik 1.32 Perkembangan Ekspor LN Non Migas Jawa Timur**



Sumber: Laporan Bea Cukai (dialah)

**Grafik 1.33 Perkembangan Muat Barang Luar Negeri Pelabuhan Tanjung Perak**

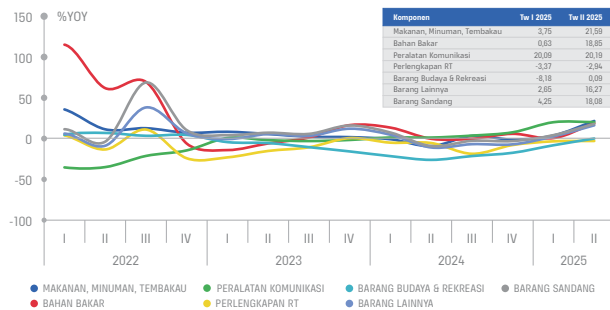


Sumber: BPS (dialah)

**Peningkatan kinerja turut terjadi pada perdagangan ritel.** Lebih tingginya kinerja perdagangan ritel terutama pada komponen makanan minuman, bahan bakar, peralatan dan komunikasi, barang sandang, dan barang lainnya (perawatan pribadi). Indeks Riil Penjualan Eceran (IRPE) – Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia komponen makanan minuman, bahan bakar, peralatan dan komunikasi, barang sandang, dan barang lainnya masing-masing tercatat tumbuh sebesar 21,59%, 18,85%, 20,19%, 18,08%, dan 16,27% (yoy) pada triwulan laporan, tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,75%, 0,63%, 20,09%, 4,25%, dan 2,65% (yoy) pada periode laporan (Grafik 1.34). Peningkatan penjualan eceran komponen makan minuman, barang sandang, dan barang lainnya mengindikasikan masih kuatnya konsumsi masyarakat Jawa Timur, terutama pada pemenuhan kebutuhan primer, seperti makan minum, pakaian, dan kebutuhan pribadi. Lebih tingginya penjualan komponen makanan minuman juga didukung oleh peningkatan penjualan beberapa komoditas seperti kopi, serta komoditas telur sejalan adanya penambahan mitra dan populasi ayam, dengan permintaan stabil dan meningkat seiring berlangsungnya program Makan Bergizi Gratis.

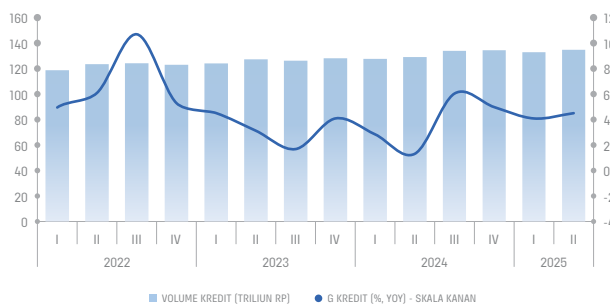
**Kinerja penyaluran pembiayaan perbankan untuk modal kerja ke LU Perdagangan yang meningkat turut menunjang akselerasi kinerja LU Perdagangan pada triwulan laporan.** Kredit perbankan yang disalurkan untuk modal kerja (KMK) ke LU Perdagangan pada triwulan II 2025 tercatat sebesar

**Grafik 1.34 Perkembangan Penjualan Eceran Berdasarkan Komponen**



Sumber: SPE Bank Indonesia (diolah)

**Grafik 1.35 Pertumbuhan Kredit Modal Kerja LU Perdagangan**



Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)

Rp134,78 triliun atau tumbuh 4,50% (yoy). Pertumbuhan tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,08% (yoy) (Grafik 1.35).

### 1.3.3. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

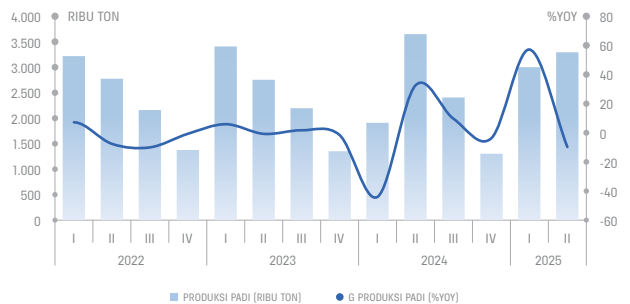
**Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada triwulan II 2025 melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.** Hal tersebut disebabkan oleh lebih rendahnya produksi tanaman pangan seiring dengan pergeseran panen raya padi tahun 2025 pada triwulan I 2025, perlambatan produksi cabai, serta masih terkontraksinya pertumbuhan produksi bawang merah pada triwulan laporan.

#### Kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Triwulan II 2025

**Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.** LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 0,50% (yoy) pada triwulan II 2025, melambat dibandingkan capaian triwulan I 2025 sebesar 10,22% (yoy) (Tabel 1.2). Perlambatan kinerja LU Pertanian terutama disebabkan oleh lebih rendahnya produksi sub LU tanaman pangan, terutama padi, dan sub LU kehutanan.

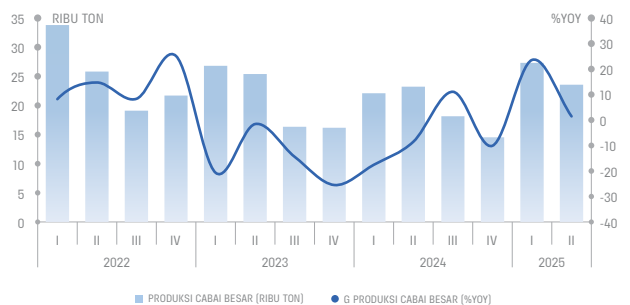
**Perlambatan kinerja LU Pertanian pada triwulan II 2025 disebabkan oleh produksi padi di Jawa Timur yang terkontraksi pada triwulan laporan.** Produksi padi Jawa Timur pada triwulan II 2025 terkontraksi sebesar 9,76% (yoy), menurun

**Grafik 1.36 Pertumbuhan Produksi Padi dan Jagung Jawa Timur**



Sumber: BPS, Dinas Pertanian Jawa Timur (diolah)

**Grafik 1.37 Pertumbuhan Produksi Cabai Besar Jawa Timur**



Sumber: BPS, Dinas Pertanian Jawa Timur (diolah)

cukup dalam dibandingkan kinerja pada triwulan sebelumnya yang tumbuh tinggi sebesar 57,15% (yoy). Penurunan tersebut terjadi seiring dengan pergeseran masa panen raya padi tahun 2025 ke pola normalnya, yakni pada triwulan I 2025 (Grafik 1.36). Penurunan produksi padi Jawa Timur triwulan II 2025 terjadi pada sentra – sentra utama, seperti Kabupaten Jember, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Nganjuk.

**Perlambatan pertumbuhan produksi cabai besar dan masih terkontraksinya produksi bawang merah turut menyebabkan deselerasi kinerja LU Pertanian Jawa Timur pada periode laporan.** Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, produksi cabai besar Jawa Timur pada triwulan II 2025 melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Produksi cabai besar Jawa Timur pada triwulan laporan tercatat mencapai 23,56 ribu ton atau tumbuh terbatas sebesar 1,42% (yoy). Kinerja produksi tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 23,56% (yoy) (Grafik 1.37). Selain itu, produksi bawang merah Jawa Timur pada triwulan II 2025 masih terkontraksi sebesar 3,28% (yoy), hal tersebut turut menahan pertumbuhan LU Pertanian pada triwulan laporan.

**Adanya program dan kegiatan peningkatan produksi pertanian di tahun 2025 menunjang kinerja LU Pertanian untuk tetap tumbuh positif pada triwulan II 2025.** Beberapa program dan kegiatan peningkatan produksi pertanian yang diimplementasikan oleh Pemerintah Jawa Timur pada tahun 2025, antara lain program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Optimalisasi Lahan (OPLAH), alat dan mesin pertanian (alsintan) prapanen dan pascapanen, pengembangan kawasan hortikultura, pengamanan produksi, fasilitas peningkatan nilai tambah pertanian, serta pengembangan champion hortikultura Jawa Timur, turut mengangkat pertumbuhan LU Pertanian di Jawa Timur.

### 1.3.4. Konstruksi

**LU Konstruksi pada triwulan II 2025 tumbuh meningkat didukung oleh berlanjutnya proyek strategis di Jawa Timur, peningkatan impor barang pendukung konstruksi, dan konsumsi semen pada triwulan laporan.**

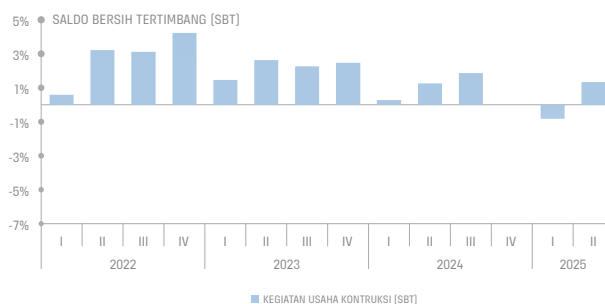
#### Kinerja LU Konstruksi Triwulan II 2025

**Kinerja LU Konstruksi pada triwulan II 2025 meningkat cukup signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya.** LU Konstruksi tumbuh 5,58% (yoy) pada periode laporan, setelah pada triwulan I 2025 tumbuh 1,14% (yoy) (Tabel 1.2). Peningkatan kinerja LU Konstruksi terkonfirmasi dari realisasi kegiatan usaha LU Konstruksi – SKDU Bank Indonesia di Jawa Timur pada triwulan II 2025 yang tercatat sebesar 1,33% (SBT), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat -0,82% (SBT)

(Grafik 1.38). Meningkatnya kinerja LU Konstruksi sejalan pula dengan berlanjutnya proyek strategis Jawa Timur, Pembangunan sejumlah proyek strategis, seperti jalan tol Probolinggo–Banyuwangi dan jalan tol Kediri–Tulungagung. Lebih tingginya pertumbuhan impor barang pendukung konstruksi dan konsumsi semen turut mencerminkan akselerasi kinerja LU Konstruksi pada triwulan laporan.

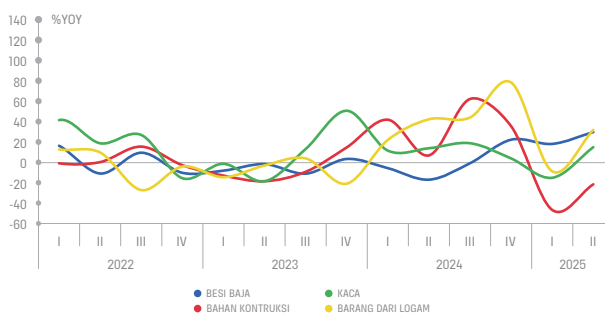
**Peningkatan kinerja LU Konstruksi pada triwulan laporan tecermin dari lebih tingginya impor barang pendukung konstruksi dan konsumsi semen.** Impor barang pendukung konstruksi, meliputi barang besi baja, barang kaca, dan barang dari logam, seperti struktur konstruksi mengalami peningkatan pada triwulan II 2025, masing – masing tumbuh sebesar 29,69%, 14,91%, dan 31,80% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya, yang masing – masing sebesar 18,09%, -15,14%, dan -8,80% (yoy). Kendati masih terkontraksi, perbaikan kinerja impor bahan konstruksi, seperti semen, gamping, bahan konstruksi tanah liat, dan bahan/batu mineral pada triwulan laporan turut menyumbang peningkatan kinerja LU Konstruksi. Sementara itu, konsumsi semen di Jawa Timur pada triwulan II 2025 tercatat 1.960,17 ribu ton atau tumbuh sebesar 6,60% (yoy). Pencapaian tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan konsumsi semen pada triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 4,22% (yoy). Lebih tingginya kinerja impor barang pendukung konstruksi dan konsumsi semen mengindikasikan aktivitas konstruksi pada triwulan II 2025 terakselerasi (Grafik 1.39 – 1.40).

Grafik 1.38 Realisasi Kegiatan Usaha LU Konstruksi



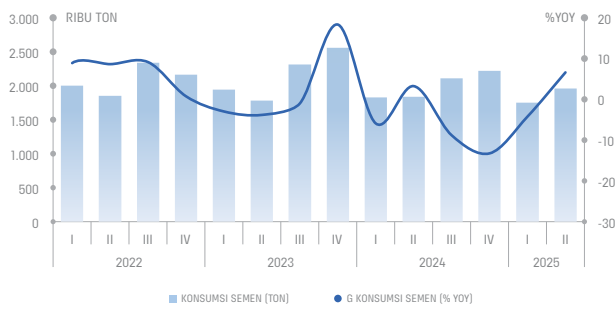
Sumber : SKDU Bank Indonesia (diolah)

Grafik 1.39 Pertumbuhan Impor Barang Konstruksi



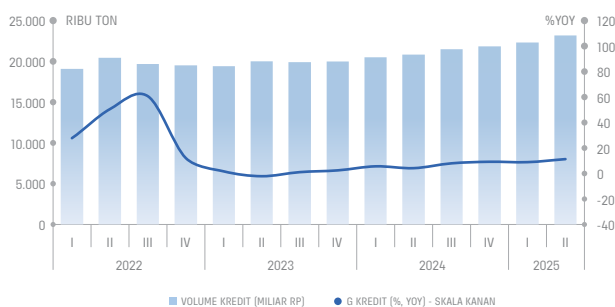
Sumber : Laporan Bea Cukai (diolah)

**Grafik 1.40 Perkembangan Konsumsi Semen**



Sumber: Asosiasi Semen (diolah)

**Grafik 1.41 Penyaluran Kredit Investasi di LU Konstruksi**



Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)

Peningkatan penyaluran pembiayaan perbankan untuk investasi ke LU Konstruksi turut mendukung akselerasi kinerja LU Konstruksi pada triwulan laporan. Kredit investasi perbankan yang disalurkan ke LU Konstruksi pada triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp23,18 triliun atau tumbuh 11,28% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan sebelumnya yang sebesar 8,91% (yoy) (Grafik 1.41).

Lebih lanjut, peningkatan kinerja LU Konstruksi pada triwulan II 2025 ditopang oleh berlanjutnya beberapa proyek swasta dengan nilai investasi besar, seperti pembangunan pabrik kimia di Gresik dengan total investasi sebesar 800 juta dolar AS.

### 1.3.5. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

**Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Jawa Timur pada triwulan II 2025 terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Lebih tingginya pertumbuhan kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada triwulan laporan terutama ditopang oleh peningkatan pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), sehingga berimplikasi pada kenaikan permintaan pada jasa akomodasi dan penjualan makanan minuman.**

### Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Triwulan II 2025

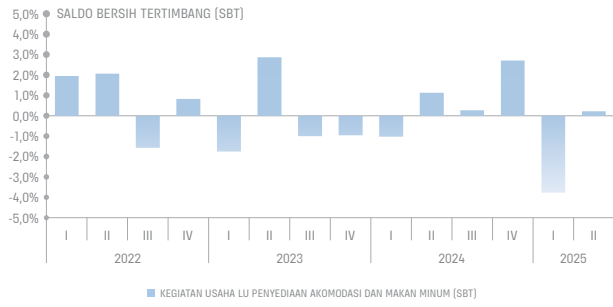
**Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum meningkat pada triwulan laporan.** Pada triwulan II 2025, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 8,38% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2025 yang tumbuh 7,32% (yoy) (Tabel 1.2). Akselerasi kinerja LU Akomodasi Makan Minum disokong oleh peningkatan pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara. Peningkatan tersebut memicu lebih tingginya permintaan pada jasa akomodasi, yang tecermin dengan kembali normalnya tingkat hunian kamar, dan peningkatan penjualan komponen makanan minuman.

**Peningkatan kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tecermin dari lebih tingginya kondisi usaha LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.** Berdasarkan SKDU – Bank Indonesia di Jawa Timur, kondisi usaha LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada triwulan laporan terpantau lebih tinggi, yakni dari -3,78% (SBT) pada triwulan I 2025 menjadi sebesar 0,22% (SBT) pada triwulan II 2025 (Grafik 1.42).

**Lebih tingginya kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum turut didorong dari peningkatan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) ke Jawa Timur.** Jumlah kunjungan wisman ke Jawa Timur melalui Bandara Juanda pada triwulan II 2025 tercatat mencapai 92.301 kunjungan, mengalami pertumbuhan positif dan meningkat, yakni dari sebelumnya yang terkontraksi sebesar 10,64% (yoy) pada triwulan I 2025, menjadi tumbuh sebesar 8,23% (yoy) pada triwulan laporan (Grafik 1.43). Pertumbuhan kunjungan wisman ke Jawa Timur pada triwulan II 2025 terutama ditopang oleh wisatawan asal Tiongkok, Malaysia, dan Singapura. Selain itu, lonjakan signifikan dari negara Thailand seiring dibukanya rute direct Surabaya-Bangkok, turut memperkuat pertumbuhan wisman pada periode laporan. Dengan fokus pada penguatan pasar Asia dan strategi promosi berbasis digital serta konektivitas udara, Jawa Timur berhasil menarik minat wisman secara signifikan.

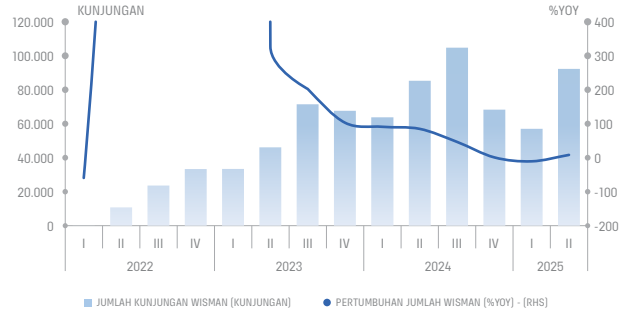
**Perbaikan tingkat penghunian kamar turut menopang kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.** Tingkat Penghunian Kamar (TPK) pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 50,29% atau terkontraksi sebesar 3,97% (yoy), mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 42,91% atau terkontraksi lebih dalam sebesar 7,44% (yoy) (Grafik 1.44). Peningkatan TPK dan perbaikan pertumbuhan TPK pada triwulan II 2025 terutama didorong lebih tingginya kunjungan wisatawan mancanegara, sehingga hotel berbintang di Jawa Timur lebih banyak terokupansi oleh wisatawan mancanegara pada triwulan laporan. Selain itu, beberapa strategi penguatan pariwisata, seperti pelaksanaan event lokal, serta daya tarik wisata edukatif dan alam turut menunjang perbaikan tingkat penghunian kamar di Jawa Timur.

**Grafik 1.42 Kegiatan Usaha LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**



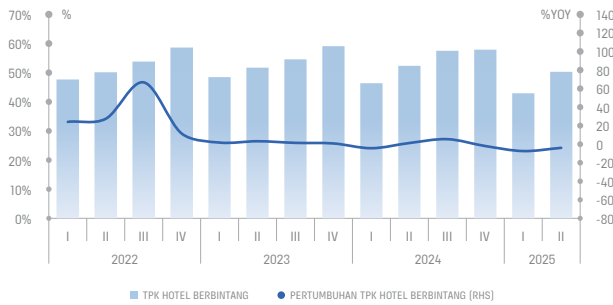
Sumber: SKDU Bank Indonesia (diolah)

**Grafik 1.43 Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)**



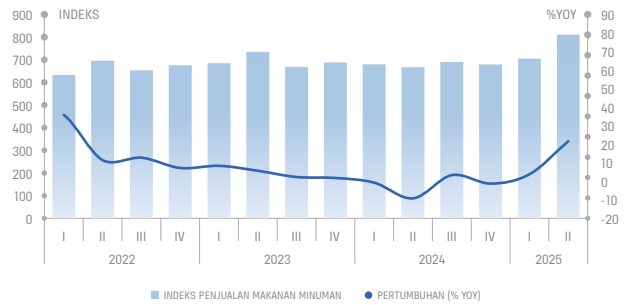
Sumber: BPS (diolah)

**Grafik 1.44 Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)**



Sumber: BPS (diolah)

**Grafik 1.45 Pertumbuhan Penjualan Komponen Makanan Minuman**



Sumber: SFE Bank Indonesia (diolah)

**BOKS 1**

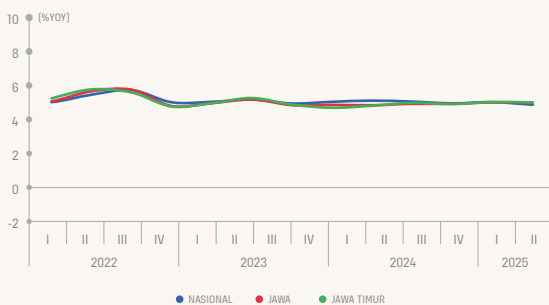
**Mengakselerasi Pertumbuhan Inklusif melalui Pemerataan Daya Saing Jawa Timur**

Di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut, perekonomian Indonesia tumbuh akseleratif. Pada triwulan II 2025, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,12% (yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan sebelumnya yang sebesar 4,87% (yoy). Perekonomian Indonesia yang solid tidak lepas dari peran krusial Provinsi Jawa Timur, dengan kontribusi lebih dari 14% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sehingga menjadi kontributor utama kedua setelah Provinsi DKI Jakarta (BPS, 2025). Sejalan dengan nasional, perekonomian Jawa Timur turut mengalami peningkatan, yakni dari 5,00% (yoy) pada triwulan I 2025 menjadi sebesar 5,23% (yoy) pada triwulan II 2025.

Kuatnya perekonomian turut ditopang oleh daya saing Jawa Timur yang unggul. Hal tersebut tecermin dari Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dirilis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) secara tahunan<sup>4</sup>. Pada tahun 2024, daya saing Jawa Timur menempati peringkat kelima nasional, setelah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Provinsi Bali, dan Provinsi Jawa Barat.

Tingginya daya saing Jawa Timur ditopang oleh pilar infrastruktur, ukuran pasar, dinamika bisnis, institusi, dan kapabilitas inovasi yang termasuk dalam 3 (tiga) besar nasional. Sebagai contoh, pada pilar Infrastruktur, Jawa Timur ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas yang memadai, seperti: (1) pelabuhan Tanjung Perak, dan pelabuhan internasional Manyar; (2) kemudahan akses tol Trans-Jawa dan jaringan kereta; (3) Kawasan Industri dan/atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terintegrasi seperti *Java Integrated Industrial and Port Estate* (JIPE) di Gresik; serta (4) tersedianya energi listrik dan gas industri yang mencukupi.

**Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa, dan Jawa Timur**



Sumber: BPS, diolah (2025)

**Tabel 1. Indeks Daya Saing Daerah Provinsi (Ranking)**

Provinsi	Ranking Indeks Daya Saing Daerah
DKI Jakarta	1
DIY	2
Bali	3
Jawa Barat	4
Jawa Timur	5
Banten	6
Jawa Tengah	7
Sumatera Utara	8
Sumatera Barat	9
Sumatera Selatan	10

Sumber: BRIN, diolah (2025)

Ke depan, masih terdapat ruang pengembangan bagi Jawa Timur untuk meningkatkan daya saing. Peningkatan dapat dilakukan salah satunya melalui *bottlenecking* pada pilar yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut, seperti pilar Adopsi TIK, Keterampilan, dan Pasar Tenaga Kerja. Proporsi penduduk usia produktif (15-59 tahun) dengan keterampilan TIK di Jawa Timur adalah sebesar 81,15%, lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 82,75% (BPS, 2024). Hal ini menyebabkan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja lokal. Beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan, antara lain: (1) perluasan akses jaringan internet hingga di daerah pinggiran; (2) akselerasi pengadaan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri; serta (3) mendorong transformasi digital pada sektor utama dengan pemanfaatan *big data* dan *artificial intelligence* (AI). Sebagai langkah *extra miles*, Provinsi Jawa Timur turut dapat meningkatkan kinerja pilar yang telah unggul, seperti pilar Institusi, yang mencakup faktor keamanan dan regulasi sebagai indikator di dalamnya. Penguatan keamanan dapat dilakukan melalui koordinasi antar instansi untuk mengatasi isu premanisme dan pungutan liar, termasuk di level Kabupaten/Kota. Sementara itu, di sisi regulasi, penguatan dapat dilakukan melalui harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan pusat.

Pemerataan daya saing di seluruh wilayah Jawa Timur menjadi esensial untuk dilakukan. Berdasarkan analisis granular yang dilakukan oleh KPwBI Provinsi Jawa Timur dengan mengklasifikasi 38 Kabupaten/Kota ke dalam 4 (empat) kuadran dengan indikator daya saing yang

4. IDSD merupakan agregasi dari 12 pilar, di antaranya Institusi, Infrastruktur, Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Stabilitas Ekonomi Makro, Kesehatan, Keterampilan, Pasar Produk, Pasar Tenaga Kerja, Sistem Keuangan, Ukuran Pasar, Dinamika Bisnis, dan Kapabilitas Inovasi

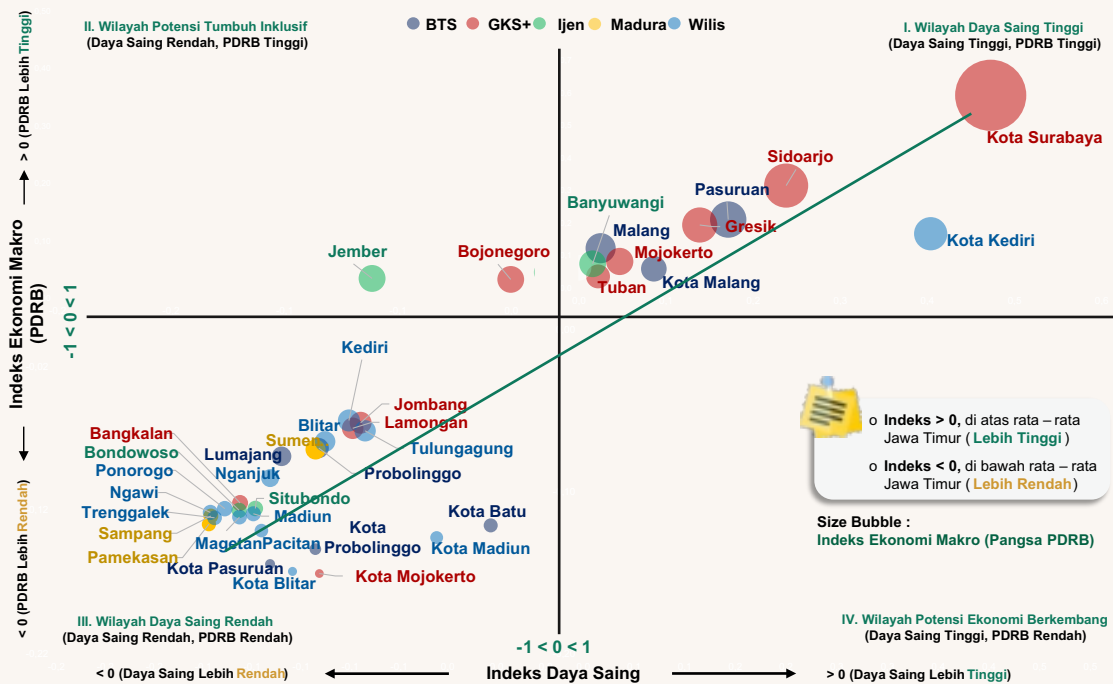
**BOKS 1**

diukur dari investasi dan produktivitas, serta indikator kondisi ekonomi makro yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), didapatkan hasil bahwa sebagian besar Kabupaten/Kota di kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan dan wilayah sekitarnya (GKS+) berada pada kuadran I, yakni daerah yang memiliki keunggulan ekonomi seiring tingginya daya saing. Sementara itu, kawasan lainnya seperti Kawasan Bromo – Tengger – Semeru (BTS), Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, Kawasan Selingkar Ijen, serta Kawasan Madura

dan Kepulauan masih memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk peningkatan daya saingnya.

Pemerataan peningkatan daya saing dapat mendorong kinerja ekonomi Jawa Timur yang lebih inklusif. Lebih lanjut, kondisi ekonomi yang inklusif akan mendorong perbaikan kualitas hidup masyarakat, yang tercermin dari kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraannya. Butuh sebuah sinergi dari masing-masing daerah dan beberapa pihak yang bergerak bersama membentuk sebuah orkestrasi yang baik.

**Grafik 2. Klasifikasi Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Berdasarkan Daya Saing dan Indikator Ekonomi Makro**



Sumber: BPS, KPwBI Provinsi Jawa Timur

(Replikasi Metodologi Asia Competitiveness Institute (ACI) – National University Singapore)

## Perkembangan Kebijakan Tarif Resiprokal AS: Menakar Risiko dan Peluang Perekonomian Jawa Timur

### BOKS 2

**Ketidakpastian ekonomi global masih tinggi pascapengumuman tarif efektif resiprokal terbaru Amerika Serikat (AS) ke beberapa negara maju dan berkembang.** Tingginya ketidakpastian global tercermin dari indikator *Global Economic Policy Uncertainty* (GEPU) Index pada triwulan II 2025 yang secara rata-rata tercatat sebesar 506,35, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 372,33. Penerapan kebijakan tarif impor diperkirakan akan menahan prospek pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Jepang dalam tren menurun, di tengah ditempuhnya kebijakan fiskal ekspansif dan pelanggaran kebijakan moneter di negara tersebut. Kinerja ekonomi Tiongkok juga diperkirakan belum kuat, di tengah berbagai strategi diversifikasi ekspor. Dengan perkembangan tersebut, perekonomian global diperkirakan masih belum kuat, tumbuh di angka 3,0% (yoy) pada 2025 (Tabel 1).

**Kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump pada tanggal 2 April 2025 dilandasi oleh semangat proteksionisme dan nasionalisme ekonomi.** Kebijakan tarif resiprokal AS dilakukan oleh Presiden Trump sebagai bentuk strategi untuk mengurangi defisit perdagangan AS dan melindungi industri domestik. AS merasa dirugikan oleh defisit perdagangan yang cukup dalam terhadap beberapa negara, terutama Tiongkok, Meksiko, Jerman, dan sejumlah negara ASEAN. Untuk mengatasi

ketimpangan ini, Trump memperkenalkan kebijakan tarif resiprokal, yakni AS akan mengenakan tarif yang setara terhadap negara-negara yang memberlakukan tarif tinggi terhadap produk AS.

**Selain pertimbangan ekonomi, kebijakan tarif resiprokal juga mencerminkan strategi geopolitik AS untuk memperkuat posisinya dalam rantai pasok global.** AS berupaya keluar dari posisi hilir dalam proses manufaktur yang selama ini didominasi oleh Tiongkok dan negara berkembang. Melalui tarif tinggi, pemerintahan Trump mendorong relokasi industri manufaktur ke dalam negeri atau ke negara mitra yang lebih stabil secara politik. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada negara pesaing dan membentuk blok ekonomi baru yang lebih menguntungkan AS. Dengan demikian, kenaikan tarif bukan sekadar langkah ekonomi, tetapi juga upaya strategis menata ulang peta perdagangan global demi mempertahankan dominasi AS.

**Per tanggal 7 Agustus, Indonesia mendapat tarif resiprokal dari AS sebesar 19%.** Awalnya, Indonesia dikenai tarif resiprokal sebesar 32% pada tanggal 2 April 2025, sebagai bagian dari langkah AS menyeimbangkan surplus dagang yang dinilai merugikan ekonomi domestik AS. Tarif tersebut dikenakan terhadap berbagai komoditas ekspor unggulan Indonesia ke AS, termasuk udang segar, tekstil, alas kaki, kayu, furnitur, dan makanan olahan, seperti udang olahan, mentega kakao, turunan minyak nabati. Namun, melalui rangkaian diplomasi ekonomi dan negosiasi intensif antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, serta Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Indonesia berhasil menurunkan tarif tersebut menjadi 19% pada Juli 2025. Kontribusi diplomatik utama datang dari komitmen Indonesia untuk membuka 99% sektor pertaniannya (gandum, kedelai) bagi produk AS tanpa hambatan tarif, membeli 50 unit pesawat Boeing, serta menyepakati pembelian gas alam cair (LNG) senilai USD 15 miliar (Reuters, 2025).

Penurunan tarif ini membawa dampak langsung pada sektor ekspor nasional, termasuk Jawa Timur yang menyumbang sekitar 13 - 15% dari total ekspor nonmigas Indonesia ke AS. Berdasarkan data Laporan Bea Cukai, nilai ekspor nonmigas Jawa Timur ke AS pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 31,33% (yoy) setelah

**Tabel 1. Simulasi Perhitungan Dampak Langsung Tarif Resiprokal AS terhadap Ekonomi Jawa Timur**

	2021	2022	2023	2024	2025* Jul' 25
<b>Dunia</b>	<b>6,3</b>	<b>3,5</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3</b>
<b>Negara Maju</b>	<b>5,6</b>	<b>2,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>
Amerika Serikat	5,9	1,9	2,9	2,8	2,1
Uni Eropa	5,6	3,4	0,4	0,9	0,9
Jepang	2,2	1	1,5	0,1	0,8
<b>Negara Berkembang</b>	<b>6,9</b>	<b>4,1</b>	<b>4,4</b>	<b>4,3</b>	<b>3,9</b>
Tiongkok	8,4	3	5,2	5	4,3
India	8,3	6,8	7,7	6,5	6,6
Asean-5	4	5,5	4	4,6	4,3
Amerika Latin	7,4	4,2	2,4	2,4	2
Negara Berkembang Eropa	7,3	1,2	3,3	3,4	2,1
Timur Tengah & Asia	4,3	5,4	2	2,4	3,5

Sumber: IMF WEO, \*Proyeksi Ban Indonesia (Juli 2025)

**BOKS 2**

sempat turun 18% saat tarif 32% berlaku. Peningkatan ekspor Jawa Timur ke AS terutama ditopang oleh komoditas produk kimia, hasil laut (udang segar, udang olahan), alas kaki, serta ekspor kakao yang tumbuh tinggi. Penurunan tarif AS merupakan momentum bagi Jawa Timur untuk mendorong percepatan ekspor, terutama ke sektor-sektor unggulan.

**Dalam konteks persaingan global, posisi Indonesia dengan tarif resiprokal 19% oleh AS menempatkannya dalam kategori "semi kompetitif".** Jika dibandingkan dengan Vietnam yang tarifnya berada di angka 20%, India (25%), Malaysia (19%), dan Thailand (19%), maka Indonesia relatif memiliki peluang yang setara. Namun demikian, dibandingkan dengan negara-negara yang tergabung dalam perjanjian perdagangan bebas dengan AS seperti Meksiko dan Kanada (USMCA), serta Korea Selatan dan Jepang yang memiliki tarif lebih rendah, maka Indonesia masih mempunyai potensi kerugian daya saing harga di pasar AS.

Sebagai pendalaman, menurut data USTR 2025 dan ITC *Trade Map*, ekspor furnitur dari Indonesia yang dikenai tarif 19% harus bersaing dengan produk sejenis dari Meksiko tanpa tarif, seiring komoditas furnitur merupakan salah satu komoditas yang termasuk dalam perjanjian USMCA. Hal tersebut membuat produk Indonesia menjadi 15–20% lebih mahal di tingkat perdagangan besar. Untuk ekspor komoditas udang segar terutama disebabkan oleh daya saing Indonesia yang lebih rendah dibandingkan negara eksportir utama udang segar ke AS lainnya, seperti Kanada dan Ekuador. Kanada lebih unggul dalam kualitas udang,

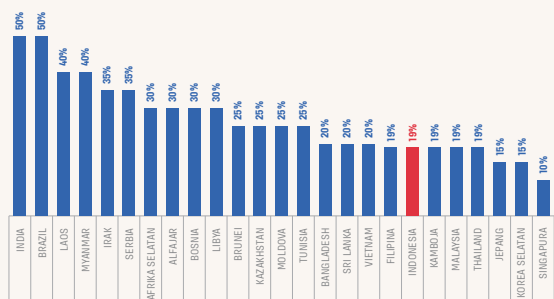
sementara Ekuador unggul dalam skala produksi dan harga yang lebih bersaing. Potensi penurunan ekspor komoditas udang segar juga dipengaruhi oleh pasar ekspor yang terkonsentrasi di AS, sehingga cukup sulit untuk diversifikasi ke pasar baru (Tabel 2).

Komoditas seperti alas kaki juga menghadapi tekanan seiring dengan Vietnam yang telah memiliki jalur pasok yang lebih efisien dan biaya logistik yang murah. Namun, pengenaan tarif AS yang sedikit lebih tinggi pada Vietnam (20%) dan harga produk Indonesia yang lebih kompetitif berpotensi mendukung ekspor alas kaki Indonesia, khususnya Jawa Timur masih kuat. Sementara untuk produk makanan olahan dan pengolahan hasil laut (mentega kakao, turunan minyak nabati, udang olahan) Indonesia, khususnya Jawa Timur masih memiliki peluang seiring dengan kualitas produk dan permintaan yang relatif kuat, terutama dari konsumen AS yang menyukai produk tropis (Tabel 2).

Potensi ekspor udang olahan yang tetap kuat dan lebih tinggi terutama didorong oleh tingginya pangsa ekspor udang olahan Indonesia ke AS dibandingkan negara eksportir lainnya (*market leader*), harga yang kompetitif, serta peluang mengambil alih pasar Vietnam seiring lebih tingginya tarif resiprokal yang dikenakan AS ke Vietnam (20%), meskipun terdapat tantangan logistik Vietnam yang lebih efisien. Lebih tingginya potensi ekspor mentega kakao sejalan dengan potensi Indonesia dapat bersaing setara dengan Malaysia diringi pangsa ekspor yang tinggi, harga tergolong kompetitif, serta tren pertumbuhan tinggi pada ekspor kakao, khususnya di Jawa Timur (Tabel 2).

Lebih lanjut, komoditas turunan lemak minyak diperkirakan tetap tumbuh kuat seiring terkompensasi dengan adanya potensi pengalihan ke pasar utama komoditas ke Tiongkok dan ASEAN. Potensi peningkatan ekspor komoditas kayu (*plywood*) ditunjang adanya isu pembatasan ekspor kayu Kanada ke AS, serta potensi peningkatan ekspor komoditas instrumen musik seiring dengan Indonesia merupakan *market leader* eksportir ke pasar AS (Tabel 2).

**Grafik 1. Negara dengan Tarif Resiprokal Tertinggi**



Sumber: Anekdotat (CNBC)

## BOKS 2

Tabel 2. Komparasi Indonesia dengan Negara Kompetitor di Pasar AS

Krustasea dan Moluska yang Telah Diolah (HS 1605)				
	Share Ekspor ke AS	Pangsa Pasar AS	Harga (USD/Unit)	Tarif AS
Indonesia	25,50%	80,00%	11.253	19%
India	17,80%	83,80%	10.648	50%
Vietnam	14,80%	29,50%	10.316	20%
Canada	11,10%	88,00%	30.632	0%
Thailand	8,20%	36,00%	11.069	19%
<b>Tumbuh Lebih Tinggi</b> Market Leader (share ekspor ke AS > 25%), Harga Kompetitif, Peluang Take Over Pasar Vietnam dan India				

Mentega, Lemak, Minyak dari Kakao (HS 1804)				
	Share Ekspor ke AS	Pangsa Pasar AS	Harga (USD/Unit)	Tarif AS
Indonesia	38,00%	24,50%	5.138	19%
Malaysia	29,00%	22,50%	4.950	19%
India	6,70%	81,40%	4.896	50%
Brazil	4,10%	30,30%	5.811	50%
Canada	4,10%	49,20%	5.674	0%
<b>Tetap Tumbuh</b> Market Leader (share ekspor ke AS > 25%), Harga Kompetitif, Bersaing Setara dengan Malaysia/Peluang Take Over Pasar India				

Produk Alas Kaki (Kulit) (HS 6403)				
	Share Ekspor ke AS	Pangsa Pasar AS	Harga (USD/Unit)	Tarif AS
Vietnam	28,10%	40,10%	22	20%
China	22,50%	26,90%	22	30%
Italy	13,50%	12,10%	146	16%
Indonesia	10,20%	33,10%	18	19%
Mexico	5,90%	95,50%	55	0%
<b>Tumbuh Lebih Tinggi</b> Potensi Ekspansi Pasar (5% < share ekspor ke AS < 25%), Harga Kompetitif, Peluang Take Over Pasar Vietnam dan Tiongkok				

Produk Alas Kaki (Bahan Tekstil) (HS 6404)				
	Share Ekspor ke AS	Pangsa Pasar AS	Harga (USD/Unit)	Tarif AS
Vietnam	42,00%	33,90%	19	20%
China	36,80%	22,40%	8	30%
Indonesia	8,70%	28,30%	18	19%
Italy	6,50%	10,50%	93	20%
<b>Tumbuh Lebih Tinggi</b> Potensi Ekspansi Pasar (5% < share ekspor ke AS < 25%), Harga Kompetitif, Peluang Take Over Pasar Vietnam dan Tiongkok				

Kayu Lapis (Plywood), Panel Veneer (HS 4412)				
	Share Ekspor ke AS	Pangsa Pasar AS	Harga (USD/Unit)	Tarif AS
Canada	15,70%	96,90%	827	0%
Vietnam	14,10%	31,50%	722	20%
Indonesia	12,00%	22,40%	1.030	19%
Brazil	9,80%	37,40%	396	10%
Chile	8,50%	57,20%	610	10%
<b>Tumbuh Lebih Tinggi</b> Potensi Ekspansi Pasar (5% < share ekspor ke AS < 25%), Harga Kompetitif, Peluang Take Over Pasar Vietnam & Kanada (Pembatasan Ekspor)				

Krustasea Hidup, Segar, Dingin, Beku (HS 0306)				
	Share Ekspor ke AS	Pangsa Pasar AS	Harga (USD/Unit)	Tarif AS
India	27,00%	40,80%	7.830	50%
Canada	23,60%	55,50%	17.465	0%
Ecuador	19,20%	20,20%	6.950	10%
Indonesia	10,60%	52,60%	8.361	19%
Vietnam	4,00%	14,00%	11.969	20%
<b>Potensi Menurun</b> Pasar Cukup Terkonsentrasi (pangsa pasar AS > 50%), Daya Saing yang Lebih Rendah dari Ekuador, Kanada (kualitas tinggi), dan India				

Instrumen Musik (HS 9207)				
	Share Ekspor ke AS	Pangsa Pasar AS	Harga (USD/Unit)	Tarif AS
China	36,40%	29,00%	100	30%
Indonesia	27,30%	28,00%	256	19%
Malaysia	8,90%	26,70%	526	19%
Mexico	8,50%	100,00%	259	25%
Korsel	4,00%	51,90%	193	25%
<b>Tumbuh Lebih Tinggi</b> Market Leader (share ekspor ke AS > 25%), Peluang Take Over Pasar Tiongkok dan Malaysia				

Sumber: Laporan Bea Cukai, BPS, Analisis BI Jatim (diolah)

**BOKS 2**

**Tabel 3. Simulasi Perhitungan Dampak Langsung Tarif Resiprokal AS terhadap Ekonomi Jawa Timur**

ASUMSI AWAL (SEBELUM KEBIJAKAN TARIF)		ASUMSI PASCA KEBIJAKAN TARIF	
Potensi Pertumbuhan Ekspor LN (%yoy) [a]	10,76%	Potensi Pertumbuhan Ekspor LN (%yoy) [a]	10,58%
Pangsa Ekspor LN thd PDRB [b]	14,39%	Pangsa Ekspor LN thd PDRB [b]	14,39%
Dampak Terhadap		Dampak Terhadap	
<b>PDRB (a*b)</b>	<b>1,55%</b>	<b>PDRB (a*b)</b>	<b>1,52%</b>
<b>Dampak terhadap DPRB Jatim</b>		<b>-0,03%</b>	

Sumber: Laporan Bea Cukai, BPS, Analisis BI Jatim (diolah)

Berdasarkan penurunan tarif resiprokal AS dan pendalaman potensi ekspor komoditas utama Jawa Timur ke AS, **dengan penerapan tarif resiprokal AS, ekonomi Jawa Timur masih berpotensi tetap tumbuh dengan penurunan pertumbuhan yang lebih terbatas.** Dengan menggunakan asumsi pertumbuhan ekspor LN Jawa Timur pasca kebijakan sebesar 10,58% (yoy) (*baseline* rata-rata pertumbuhan 10,76% (yoy)), dan tarif resiprokal AS untuk Indonesia sebesar 19%, maka risiko dampak kebijakan tarif resiprokal AS terhadap perekonomian Jawa Timur (*direct impact*) berpotensi menurunkan pertumbuhan PDRB Jawa Timur secara terbatas sebesar -0,03% (yoy). Penurunan tersebut lebih terbatas dibandingkan simulasi dengan tarif sebesar 32%, yaitu menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar -0,06% (yoy).

**Faktor logistik menjadi tantangan utama Jawa Timur dalam bersaing di pasar AS.** Penerapan tarif 19% oleh AS terhadap Indonesia menempatkan RI dalam kelompok negara yang harus bersaing secara langsung dengan negara-negara lain yang mendapatkan tarif serupa, seperti Vietnam (20%), Malaysia (19%), dan Thailand (19%). Dalam kondisi tersebut, keunggulan harga tidak lagi juga ditentukan oleh faktor biaya logistik, efisiensi produksi, serta akses terhadap jaringan distribusi di AS. Berdasarkan data *Logistics Performance Index* (LPI) 2023 dari World Bank, Indonesia berada di peringkat 61 dengan skor 3,0; masih tertinggal dari Vietnam (peringkat 46; skor 3,3) dan Malaysia (peringkat 26; skor 3,6). Biaya pengiriman kontainer di Tanjung Perak masih tergolong mahal seiring inefisiensi operasional, dan waktu tunggu bongkar-muat yang panjang.

Dalam kondisi tersebut, eksportir Indonesia, termasuk dari Jawa Timur, terpaksa memberi diskon harga hingga 10% ke buyer di AS untuk menjaga pangsa pasar. Fenomena *“race to the bottom”* ini membuat margin

keuntungan menipis dan hanya bisa diimbangi jika Indonesia mempercepat pembangunan ekosistem logistik yang efisien, seperti digitalisasi pelabuhan, integrasi jalur darat-laut-kereta, serta insentif *direct call* ekspor. Jika tantangan logistik ini tidak segera diatasi, maka meskipun tarif 19% sudah lebih rendah dibanding sebelumnya, Indonesia tetap akan kalah dalam kompetisi global berbasis harga dan kecepatan distribusi.

Berdasarkan krusialnya faktor logistik, **daya saing industri ekspor sangat bergantung pada sistem logistik dan struktur kawasan industri yang terintegrasi.** Jawa Timur memiliki keunggulan geografis sebagai gerbang baru nusantara, khususnya Indonesia bagian timur, namun infrastruktur logistiknya masih terfragmentasi. Berdasarkan kajian Bappenas, biaya logistik di Indonesia mencapai 14,29% dari PDB. Mengacu pada *World Bank*, biaya logistik Indonesia tahun 2020 sebesar 24% dari PDB, angka yang lebih tinggi dibandingkan Vietnam (20%), Thailand (15%), Tiongkok (14%), dan Malaysia (13%). Kawasan industri di Gresik, Sidoarjo, dan Pasuruan masih menghadapi kendala akses langsung ke pelabuhan ekspor, keterbatasan layanan kereta barang, dan rendahnya digitalisasi proses logistik.

Oleh karena itu, untuk memperkuat posisi Jawa Timur dalam rantai pasok global, perlu **dilakukan akselerasi pembangunan kawasan industri berbasis aglomerasi dengan konektivitas antar sektor (hulu-hilir), sistem logistik terpadu, serta fasilitas layanan ekspor terpadu.** Percepatan pembangunan jalan tol, jalur lintas selatan (JLS), pengembangan *dryport* di kawasan industri dan pelabuhan di Jawa Timur untuk penguatan konektivitas darat, serta pengembangan *direct call* ekspor dari Tanjung Perak ke pelabuhan utama AS harus menjadi prioritas utama agar pelaku industri tidak lagi bergantung pada pengiriman via Jakarta atau

**BOKS 2**

Singapura. Pemerintah daerah juga perlu menyediakan insentif fiskal dan pelatihan SDM logistik untuk mendorong transformasi digital. Dengan ekosistem industri dan logistik yang kuat, Jawa Timur dapat menurunkan biaya logistik, sekaligus mempercepat arus barang ke pasar AS, yang menjadi kunci dalam kompetisi global.

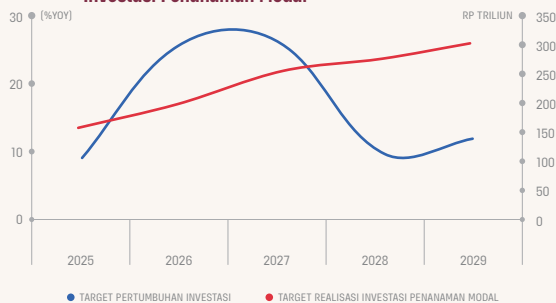
**BOKS 3**

## High Level Meeting Forum Investasi dan East Java Investment Dialogue: Langkah Strategis Dukungan Investasi Provinsi Jawa Timur

Dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 2025–2029, diperlukan akselerasi investasi yang signifikan. Untuk mewujudkan target pertumbuhan 6,30% pada tahun 2029 sesuai RPJMD Provinsi Jatim 2025-2029, maka diperlukan pertumbuhan investasi di atas 13,08% per tahun. Lebih lanjut, dalam rangka mengakselerasi target nasional menuju *trajectory* pertumbuhan ekonomi 8%, berdasarkan ICOR Jatim sebesar 5,5, maka dari simulasi yang dilakukan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur membutuhkan peningkatan PMTB lebih dari 26% (yoy) atau setara Rp302 triliun. Apabila target tersebut tercapai, maka Jawa Timur berpotensi dapat menekan tingkat pengangguran terbuka (TPT) hingga 2,93% pada akhir periode, sekaligus memperkokoh perannya sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional dan gerbang baru nusantara.

**Jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur terus berupaya menciptakan iklim investasi di Jawa Timur yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut.** Salah satu upaya itu dilakukan dengan cara mendorong dan memperkuat komitmen, konsistensi, inovasi dan sinergi bersama Kepala Daerah se-Jawa Timur melalui *High Level Meeting* (HLM) Forum Investasi. HLM Forum Investasi yang dilaksanakan di Gedung Negara Graha Surabaya pada tanggal 15 Juli 2025 mengusung *tagline* "Akselerasi Peningkatan Investasi Untuk Menciptakan Lapangan Kerja". Forum ini bertujuan untuk merumuskan arah pengembangan dan mempromosikan investasi, serta upaya *debottlenecking* tantangan investasi di Jawa Timur. HLM terselenggara sebagai *kickoff* kerja forum investasi yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/310/013/2025 tentang Forum

**Grafik 1. Target Pertumbuhan Investasi dan Target Realisasi Investasi Penanaman Modal**



Sumber: Simulasi KPwBI Provinsi Jawa Timur

Investasi Jawa Timur Periode Tahun 2025-2030. HLM Forum Investasi dihadiri oleh lebih dari 180 peserta terdiri dari jajaran Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, termasuk 20 Bupati/Walikota, 4 Wakil Bupati, 3 Sekretaris Daerah, Kepala DPMTSP dan Bapeda dari 38 Kabupaten/Kota, serta seluruh anggota Forum Investasi dan semua pihak pemangku kepentingan.

Dalam arahannya, Gubernur Jawa Timur mendorong untuk **lebih proaktif dalam menjangring peluang investasi baru, serta pentingnya menjaga komitmen yang telah dideklarasikan bersama** sebagai bentuk konsistensi dalam menciptakan iklim investasi yang inklusif dan berkelanjutan. Pada kegiatan ini turut dilakukan **Tanda Tangan Deklarasi Bebas Pungli dan Premanisme** antara Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, dan Bupati/Walikota se-Jawa Timur sebagai wujud komitmen menjaga iklim usaha yang inklusif, berkelanjutan, aman dan bebas premanisme guna memberikan kepastian dan kenyamanan bagi investor yang merupakan prioritas bersama.

**Tabel 1. Skenario Optimis Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 2025-2029**

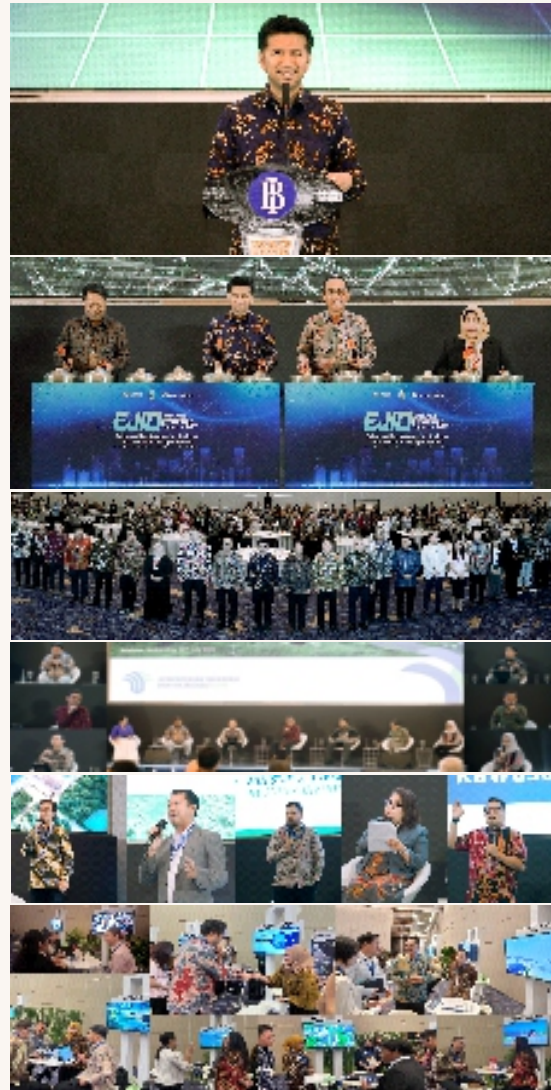
	Skenario Batas Bawah				Skenario Rata-rata				Skenario Batas Atas			
	%g PDRB	PMTB (%yoy)	Investasi (PMA PMDN)	%TPT	%g PDRB	PMTB (%yoy)	Investasi (PMA PMDN)	%TPT	%g PDRB	PMTB (%yoy)	Investasi (PMA PMDN)	%TPT
2025	4,80	-0,57	Rp 142 T		5,00	3,57	Rp 148 T		5,20	7,71	Rp 154 T	
2026	4,80	4,80	Rp 149 T		5,10	7,10	Rp 158 T		5,40	9,25	Rp 168 T	
2027	4,90	6,98	Rp 159 T	4,33- 4,49%	5,25	8,19	Rp 171 T	4,00- 4,20%	5,60	9,30	Rp 184 T	3,67- 390%
2028	5,00	7,04	Rp 171 T		5,45	9,26	Rp 187 T		5,90	11,26	Rp 204 T	
2029	5,10	7,10	Rp 183 T		5,70	10,29	Rp 207 T		6,30	13,08	Rp 231 T	

Tumbuh Lebih Tinggi

## BOKS 3

Gambar 1. *Highlight Pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Forum Investasi 2025*

Menindaklanjuti HLM Forum Investasi dan rangkaian promosi investasi *Road to EJIF*, dilaksanakan *East Java Investment Dialogue 2025* di Ballroom Fourpoints Surabaya pada tanggal 16 Juli 2025. Kegiatan dipimpin oleh Wakil Gubernur Jawa Timur yang didampingi oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, serta turut dihadiri oleh Konsulat Jenderal di Surabaya, *Embassy, Chambers of Commerce*, Kemenlu, IIPC, jajaran Pimpinan Daerah Kab/Kota se-Jawa Timur, 38 DPMTSP Kab/Kota, Instansi vertikal, perwakilan dari BUMD, perbankan, dan *Project Owners* dengan total peserta lebih dari 300 orang. Acara ini mempromosikan 18 (delapan belas) *Investment Project Ready-to-Offer (IPRO)* di bidang infrastruktur, kesehatan, pariwisata dan kawasan, serta manufaktur; dan 8 KI/KEK unggulan Jawa Timur. Adapun rangkaian kegiatan promosi pada EJID 2025 di antaranya meliputi 2 (dua) sesi *panel dialogue* dengan narasumber dari Kementerian/Lembaga maupun dari Kawasan Industri dan *Project Owner*. Selain itu, diadakan sesi *one-on-one meeting* dan *showcasing* proyek IPRO dan Kawasan Industri sepanjang pelaksanaan acara. Adapun pelaksanaan acara mengusung tagline "*Collaborative Dialogue on Business and Investment Opportunities*" yang selaras dengan tema besar EJIF 2025, yaitu "*Boosting Investment for inclusive and sustainable growth to support East Java as Gerbang Baru Nusantara.*"

Gambar 2. *Highlight Pelaksanaan East Java Investment Dialogue (EJID) 2025*

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur menegaskan kesiapan Jatim sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan infrastruktur yang kuat dan lokasi strategis, serta mendorong sinergi lintas sektor untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Beliau juga menyoroti pentingnya hilirisasi industri dan pengembangan SDM lokal guna mendukung transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

### BOKS 3

Adapun kegiatan EJID 2025 menghasilkan 33 (tiga puluh tiga) *One on One Meeting* bersama dengan intermediaries, serta dihadiri oleh 29 (dua puluh sembilan) *intermediaries* dari luar negeri, yakni Russia, British, Morocco, Belanda, Jerman, Australia, Amerika Serikat, Jepang, China, Thailand, India, Belarus, Singapore, dan Dubai. Beberapa *intermediaries* juga menyatakan ketertarikan dan telah melaksanakan tindak lanjut *One on One Meeting* dengan beberapa pemilik proyek yang dipromosikan.

**Agenda strategis selanjutnya, Bank Indonesia akan menyelenggarakan *East Java Investment Forum (EJIF)* sebagai kelanjutan dari upaya memperkuat ekosistem investasi di Jawa Timur.** EJIF diharapkan menjadi ajang promosi investasi berskala internasional yang tidak hanya mempertemukan pemerintah daerah dengan investor potensial, tetapi juga mendorong terciptanya kerja sama konkret, perluasan pasar, serta peningkatan aliran modal masuk. Melalui EJIF, diharapkan dapat mengakselerasi realisasi investasi, mendukung penciptaan lapangan kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.





Bab II

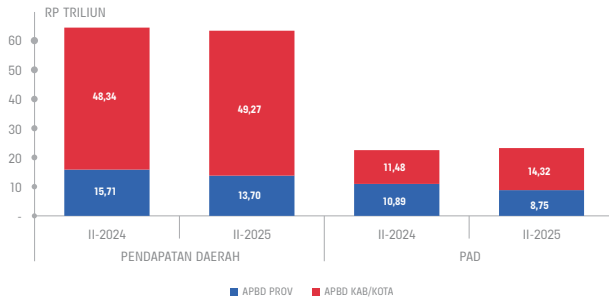
# Keuangan Pemerintah



## 2.1. Gambaran Umum

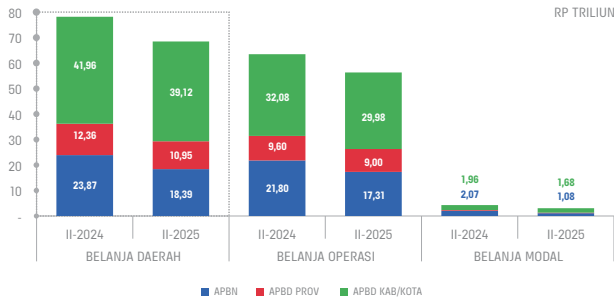
**Total realisasi Pendapatan APBD Jawa Timur hingga triwulan II 2025 mengalami penurunan terutama didorong oleh penurunan PAD pada APBD Provinsi Jawa Timur.** Total realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur triwulan II 2025 mencapai Rp62,97 triliun, turun 1,70% (yoy) dibandingkan dengan realisasi triwulan II 2024 yang tercatat sebesar Rp64,05 triliun (Grafik 2.1). Untuk mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak maupun non-pajak. Pada sektor pajak, upaya yang ditempuh meliputi penguatan sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur dalam penyiapan opsen pajak, perluasan digitalisasi transaksi penerimaan daerah, peningkatan sosialisasi kepatuhan pajak, pemberian relaksasi berupa pembebasan denda terutama menjelang akhir tahun, serta pemanfaatan teknologi untuk mengidentifikasi potensi pajak baru. Sementara itu, pada sektor non-pajak, optimalisasi terus dilakukan melalui peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pemanfaatan aset *idle* menjadi aset produktif. Ke depan, implementasi kebijakan insentif berupa pembebasan sanksi administrasi dan pajak kendaraan bermotor, sesuai Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/400/013/2025 yang memperpanjang keringanan dasar pengenaan PKB dan BBNKB, diprakirakan menjadi akselerator pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur pada Triwulan III 2025.

**Grafik 2.1 Realisasi Pendapatan Pemerintah di Provinsi Jawa Timur s.d. Triwulan II 2024-2025**



Sumber : BPKAD Jawa Timur, DJPb Jawa Timur (diolah)

**Grafik 2.2 Realisasi Belanja Pemerintah di Provinsi Jawa Timur s.d. Triwulan II 2024-2025**



Sumber : BPKAD Jawa Timur, DJPb Jawa Timur (diolah)

Kinerja belanja pemerintah menunjukkan penurunan sejalan dengan penurunan pada seluruh komponen belanja. Realisasi belanja pemerintah di Provinsi Jawa Timur hingga triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp127,78 triliun, terkontraksi 12,43% dibandingkan realisasi triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp145,92 triliun (Grafik 2.2). Penurunan realisasi belanja terutama disebabkan oleh penurunan pada seluruh komponen belanja, meliputi belanja daerah, belanja operasi, dan belanja modal. Meskipun proses lelang dan kontrak untuk belanja modal pada bidang jalan, irigasi, dan jaringan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah telah selesai, realisasi fisik dan pencairan dana pada periode ini masih belum optimal. Selain itu, penyaluran Dana Bagi Hasil, DAU, dan DAK Non Fisik dari pemerintah pusat meningkat, namun belum seluruhnya terealisasi menjadi belanja. Lebih lanjut, pemerintah daerah terus melaksanakan upaya untuk meningkatkan realisasi belanja, antara lain melalui pembayaran gaji ke-13 kepada 1.257 satuan kerja, termasuk adanya kenaikan tunjangan kinerja, pembayaran tunjangan pendidik Non PNS dan pembayaran gaji dan tunjangan PPPK, yang turut memberikan kontribusi signifikan terhadap realisasi belanja pegawai.

## 2.2. APBN di Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

**Pagu belanja APBN Provinsi Jawa Timur pada tahun 2025 secara keseluruhan mengalami kontraksi dibandingkan tahun 2024.**

Total pagu belanja APBN 2025 tercatat sebesar Rp127,12 triliun, menurun 8,59% (yoy) dari Rp139,06 triliun pada tahun sebelumnya. Berdasarkan jenis belanja, penurunan pagu belanja APBN terutama disebabkan oleh berkurangnya alokasi Belanja K/L, yang turun 22,92% (yoy) menjadi Rp43,63 triliun dari Rp56,61 triliun pada 2024. Penurunan ini terutama terjadi pada Belanja Barang yang turun sebesar 45,69% (yoy) dan memberikan kontribusi 30,06% terhadap total Belanja K/L, serta Belanja Modal yang menurun 23,72% (yoy) dengan kontribusi 15,09%. Penurunan Belanja Barang terutama disebabkan tidak adanya kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemilu Serentak seperti yang dianggarkan pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, penurunan pagu Belanja K/L tertahan oleh meningkatnya alokasi untuk Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Pegawai, yang memiliki pangsa 54,53% terhadap total Belanja K/L, naik sebesar 0,41%, sementara Belanja Bantuan Sosial, dengan pangsa 0,32%, meningkat 8,29% (Tabel 2.1).

**Kenaikan pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada tahun 2025 didorong oleh pertumbuhan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, serta DAK Non Fisik.** Pagu APBN yang dialokasikan untuk TKDD di Jawa Timur mencapai 65,68% dari total belanja APBN, atau setara dengan Rp83,49 triliun. Komponen terbesar dalam TKDD adalah Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp43,09 triliun, atau 51,61% dari keseluruhan TKDD, mengalami

**Tabel 2. 1 Anggaran dan Realisasi Belanja APBN di Provinsi Jawa Timur s.d. Triwulan II 2024 dan 2025**

JENIS BELANJA	Pagu APBN		% Perubahan	Realisasi APBN				Pertumbuhan Realisasi s.d. II 2025 (%yoy)
	APBD 2024	APBD 2025		Realisasi s.d. II 2024		Realisasi s.d. II 2025		
	(Rp Miliar)	(Rp Miliar)		(Rp Miliar)	% Pagu	(Rp Miliar)	% Pagu	
<b>Belanja K/L</b>	<b>56.604,78</b>	<b>43.628,85</b>	<b>(22,92)</b>	<b>23.869,02</b>	<b>42,17</b>	<b>18.393,48</b>	<b>42,16</b>	<b>(22,94)</b>
Belanja Pegawai	23.694,68	23.790,84	0,41	12.676,80	53,50	12.952,12	54,44	2,17
Belanja Barang	24.148,43	13.113,97	(45,69)	9.060,91	37,52	4.289,68	32,71	(52,66)
Belanja Modal	8.633,48	6.585,22	(23,72)	2.072,01	24,00	1.084,12	16,46	(47,68)
Belanja Bantuan Sosial	128,19	138,82	8,29	59,30	46,26	67,56	48,67	13,93
<b>Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)</b>	<b>82.459,32</b>	<b>83.490,12</b>	<b>1,25</b>	<b>41.366,82</b>	<b>50,17</b>	<b>41.705,86</b>	<b>49,95</b>	<b>0,82</b>
Dana Bagi Hasil	10.914,24	12.827,06	17,53	4.539,28	41,59	5.015,00	39,10	10,48
Dana Alokasi Umum	42.818,00	43.089,58	0,63	22.764,42	53,17	23.244,76	53,95	2,11
DAK Fisik	3.694,93	2.096,67	(43,26)	215,73	5,84	29,38	1,40	(86,38)
DAK Non Fisik	15.740,07	16.912,72	7,45	8.120,77	51,59	8.379,44	49,55	3,19
Dana Insentif Daerah	1.023,08	530,33	(48,16)	294,75	28,81	272,72	51,42	(7,47)
Dana Desa	8.269,00	8.033,76	(2,84)	5.431,88	65,69	4.764,56	59,31	(12,29)
<b>TOTAL</b>	<b>139.064,10</b>	<b>127.118,97</b>	<b>(8,59)</b>	<b>65.235,84</b>	<b>46,91</b>	<b>60.099,34</b>	<b>47,28</b>	<b>(7,87)</b>

Sumber: Kementerian Keuangan - DJPB, DJPB Kanwil Jawa Timur, diolah

peningkatan sebesar 0,63% secara tahunan dibandingkan tahun 2024 yang tercatat Rp42,82 triliun. Namun, laju peningkatan ini tertahan oleh penurunan pagu DAK Fisik, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa, yang masing-masing turun sebesar 43,26%, 48,16%, dan 2,84% secara tahunan. Penurunan DAK Fisik sejalan dengan pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

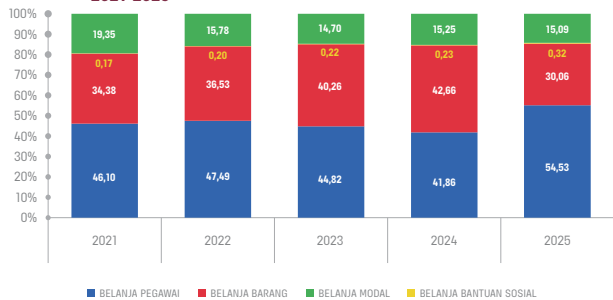
**Dalam lima tahun terakhir, sebagian besar anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) difokuskan pada Belanja Pegawai dan pengadaan Belanja Barang.** Di Provinsi Jawa Timur, alokasi anggaran Belanja K/L mayoritas terserap oleh kedua pos tersebut, dengan rata-rata kontribusi masing-masing sebesar 54,53% untuk Belanja Pegawai dan 30,06% untuk Belanja Barang. Sementara itu, Belanja Bantuan Sosial relatif stabil, memberikan kontribusi sekitar 0,32% terhadap total anggaran Belanja APBN di Jawa Timur (Grafik 2.3).

**Struktur pagu belanja APBN di Provinsi Jawa Timur berdasarkan klasifikasi fungsi menunjukkan dominasi pada fungsi pelayanan umum, dengan proporsi terbesar dialokasikan untuk Belanja Pegawai.** Penetapan belanja daerah menurut fungsi mengacu pada standar internasional *Classification of the Functions of Government* (COFOG) yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sehingga memungkinkan perbandingan antarnegara. Dari sisi penggunaan, alokasi Belanja APBN di Provinsi Jawa Timur terutama diarahkan untuk mendukung pengeluaran pada fungsi pelayanan umum, dengan pangsa mencapai 67,1% (Grafik 2.4). Anggaran untuk fungsi pelayanan umum ini sebagian besar dialokasikan pada Program Pengelolaan Anggaran Transfer ke Daerah sebesar 67,09% dari

total APBN di Jawa Timur tahun 2025, yakni senilai Rp85,25 triliun, terutama ditopang oleh alokasi anggaran pada Pengelolaan Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dengan porsi 50,55% dan DAK Non Fisik dengan pangsa 19,84%. Sebaliknya, alokasi belanja dengan proporsi paling rendah diberikan untuk fungsi perumahan dan fasilitas umum, yang hanya menerima anggaran sebesar Rp301,67 miliar atau sekitar 0,24% dari total anggaran tahun 2025.

**Realisasi belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Jawa Timur pada triwulan II 2025 mengalami penurunan, seiring dengan menurunnya realisasi pada komponen Belanja Barang dan Belanja Modal.** Hingga triwulan II 2025, realisasi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) APBN di Provinsi Jawa Timur tercatat sebesar Rp18,39 triliun, setara dengan 42,16% dari total pagu yang telah ditetapkan. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 22,94% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu Rp23,87 triliun (Tabel 2.1), yang terutama disebabkan oleh penurunan signifikan pada komponen Belanja Barang dan Belanja Modal, masing-masing menurun sebesar 52,66% (yoy) dan 47,68% (yoy). Hingga akhir Triwulan II Tahun 2025, realisasi Belanja Barang tercatat menyumbang 23,32% dari total Belanja Kementerian/Lembaga, dengan nilai sebesar Rp4,29 triliun. Sementara itu, Belanja Modal memberikan kontribusi sebesar 5,89%. Penurunan realisasi Belanja Kementerian/Lembaga yang lebih dalam tertahan oleh pertumbuhan pada komponen Belanja Pegawai yang meningkat sebesar 2,17% (yoy) dan Belanja Bantuan Sosial yang tumbuh sebesar 13,93% (yoy). Kondisi ini sejalan dengan realisasi pembayaran Gaji ke-13 serta terdapat peningkatan alokasi untuk tunjangan kinerja, pembayaran Tunjangan Pendidik Non-PNS, serta gaji dan tunjangan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

**Grafik 2.3 Postur Anggaran Belanja K/L APBN di Jawa Timur Tahun 2021-2025**



Sumber : DJPb Kanwil Jawa Timur, diolah

Meskipun mengalami penurunan dari triwulan II 2024, terdapat percepatan realisasi belanja modal pada bulan Mei dan Juni seiring kebijakan pembukaan blokir anggaran. Realisasi Belanja Modal hingga triwulan II 2025 telah mencapai Rp1,08 triliun. Anggaran tersebut antara lain dialokasikan untuk pemanfaatan sebagai berikut:

**1. Peralatan dan Mesin**

Dialokasikan untuk pengadaan prasarana di bidang pertahanan dan keamanan (POLRI dan Kementerian Pertahanan), prasarana pendidikan (Kementerian Agama), serta mencakup modernisasi peralatan kesehatan, pendidikan, dan peralatan internal Kementerian/Lembaga.

**2. Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

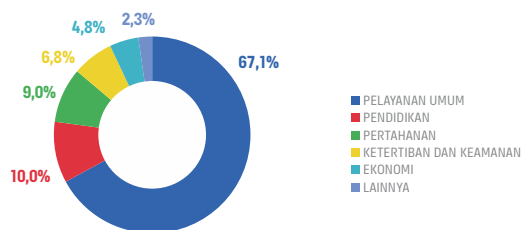
Digunakan untuk pelaksanaan kegiatan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional, pengembangan bendungan, danau, serta penampungan air lainnya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), termasuk pembangunan infrastruktur konektivitas transportasi laut dan perkeretaapian oleh Kementerian Perhubungan.

**3. Gedung dan Bangunan**

Dimanfaatkan untuk belanja awal perbaikan gedung, rumah dinas, serta prasarana pendidikan.

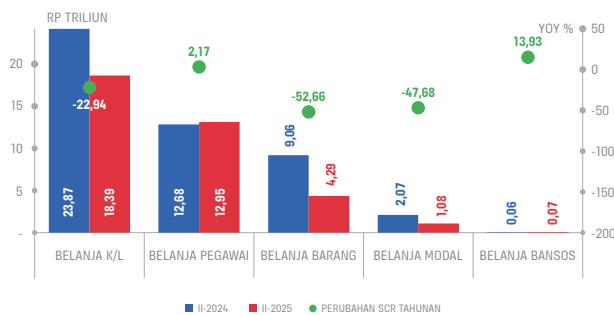
Lebih lanjut, realisasi Belanja Pegawai APBN di Jawa Timur hingga triwulan II 2025 meningkat utamanya disokong oleh pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan. Realisasi komponen Belanja Pegawai meningkat menjadi Rp12,95 triliun, dengan kontribusi sebesar

**Grafik 2.4 Postur Anggaran Belanja APBN Berdasarkan Fungsi 2025**



Sumber : BPKAD Jawa Timur, DJPb Jawa Timur (diolah)

**Grafik 2.5 Realisasi Belanja K/L s.d. triwulan II 2024-2025**

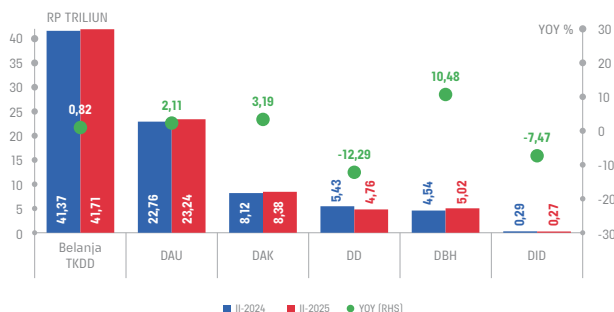


Sumber : DJPb Kanwil Jawa Timur, diolah

70,42% terhadap total Belanja K/L. Peningkatan ini terutama didorong oleh realisasi pembayaran Gaji ke-13 yang mencapai Rp1,14 triliun kepada 1.257 satuan kerja. Selain itu, terdapat kenaikan tunjangan kinerja, pembayaran Tunjangan Pendidik Non PNS dan pembayaran gaji dan tunjangan PPPK. Sejalan dengan itu, realisasi komponen Belanja Bantuan Sosial juga mengalami kenaikan menjadi Rp67,56 miliar kendati memiliki pangsa terhadap total Belanja K/L hanya sebesar 0,37%. Belanja Bantuan Sosial masih difokuskan pada bantuan program pendidikan wajib belajar 12 tahun sebesar Rp24,53 juta (terealisasi 47,39% dari pagu), bantuan pendidikan tinggi untuk mendukung peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi sebesar Rp67,53 miliar (terealisasi 48,66% dari pagu), serta bantuan sosial kepada anak yatim piatu (YAPI) sebesar Rp347,26 miliar kepada 467.201 anak, PKH sebesar Rp2,11 triliun untuk 2.845.568 KPM yang disalurkan melalui Kementerian Sosial.

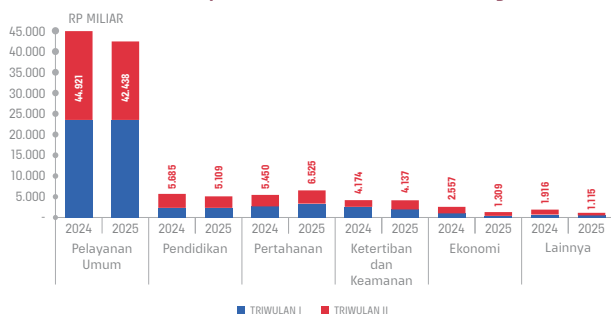
Realisasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mengalami peningkatan secara nominal dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kendati demikian, proporsinya terhadap total alokasi anggaran menunjukkan penurunan. Kinerja Belanja TKDD mengalami kenaikan sebesar 0,82% (yoy), yang utamanya disebabkan oleh peningkatan realisasi DAU sebesar 2,11% (yoy). DAU memberikan kontribusi sebesar 55,73% terhadap total Belanja TKDD. Kenaikan tersebut sejalan dengan pendanaan penyelenggaraan layanan publik serta belanja aparatur daerah. Di samping itu, realisasi DAK Non Fisik

**Grafik 2.6 Realisasi Belanja TKDD 2024-2025**



Sumber : DJPb Kanwil Jawa Timur, diolah

**Grafik 2.7 Realisasi Belanja APBN 2024-2025 Berdasarkan Fungsi**



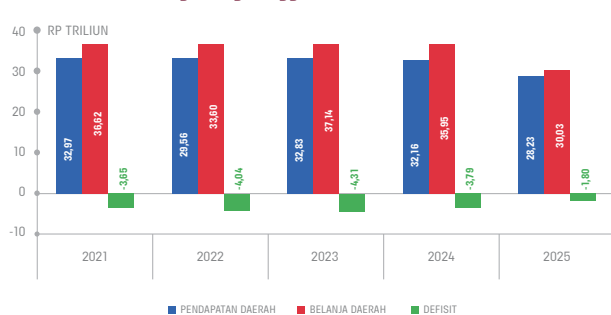
turut berkontribusi sebesar 20,09% terhadap total kenaikan Belanja TKDD, dengan realisasi senilai Rp8,38 triliun. Capaian tersebut banyak ditopang oleh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta digunakan untuk mendanai belanja sektor pendidikan dan kesehatan. Lebih lanjut, hingga akhir Juni 2025, penyaluran Dana Bagi Hasil juga menyumbang peningkatan TKDD dengan pangsa sebesar 12,02%.

**Berdasarkan aspek fungsinya, realisasi Belanja APBN di Provinsi Jawa Timur diarahkan terutama untuk mendukung pengeluaran pada fungsi pelayanan umum, dengan pangsa mencapai 70,61% untuk mengoptimalkan layanan dasar kepada masyarakat (Grafik 2.7). Realisasi untuk fungsi pelayanan umum ini sebagian besar dialokasikan pada Program Pengelolaan Anggaran Transfer ke Daerah, terutama pada pos Transfer Dana Alokasi Umum sebesar 54,77% dari total APBN di Jawa Timur, yakni senilai Rp23,24 triliun, serta DAK Non Fisik yang memiliki proporsi sebesar 19,75% atau senilai Rp8,38 triliun. Sebaliknya, alokasi belanja dengan proporsi paling rendah diberikan untuk fungsi perumahan dan fasilitas umum, yang hanya terealisasi sebesar Rp42,71 miliar atau sekitar 0,07% dari total realisasi tahun 2025.**

### 2.3. APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

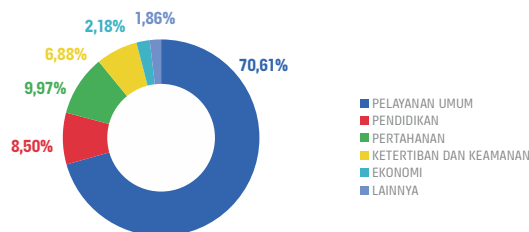
**Realisasi pendapatan APBD Provinsi Jawa Timur 2025 mengalami penurunan, terutama ditopang oleh penurunan PAD.** Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan tidak ada

**Grafik 2.9 Perkembangan Pagu Anggaran APBD Jawa Timur Tahun 2021-2025**



Sumber: BPKAD Jawa Timur, diolah

**Grafik 2.8 Komposisi Realisasi Belanja APBN s.d. Triwulan II 2025**



kenaikan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sebagai tindak lanjut atas implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Kepastian tersebut dituangkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/722/KPTS/031/2024 yang mengatur pemberian keringanan terhadap dasar pengenaan PKB dan BBNKB. Kebijakan ini berdampak pada berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi, terutama karena sebagian penerimaan telah dialihkan dalam bentuk opsen kepada pemerintah kabupaten/kota.

**Sejalan dengan hal tersebut, Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan.** Penurunan ini selaras dengan turunnya baik pagu dan realisasi Belanja Operasi, khususnya pada komponen Belanja Pegawai dan Belanja Hibah. Namun, pertumbuhan Belanja Daerah secara keseluruhan cenderung termoderasi oleh menurunnya Belanja Modal, yang disebabkan oleh rendahnya penyerapan anggaran karena sebagian besar masih berada pada tahap proses tender pekerjaan.

#### 2.3.1. Pendapatan Daerah APBD Provinsi Jawa Timur

##### 2.3.1.1 Anggaran Pendapatan Daerah

**Pagu Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2025 turun sejalan dengan penurunan pagu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.** Total anggaran Pendapatan Daerah tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp28,23 triliun, atau mengalami penurunan sebesar 12,23% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp32,16 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya alokasi PAD sebesar 20,53% (yoy), seiring dengan pengalihan sebagian pendapatan menjadi opsen bagi pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, pos Lain-lain Pendapatan yang Sah juga tercatat mengalami penurunan sebesar 56,04% (yoy), yang utamanya disebabkan oleh perubahan sandi akun ke dalam pos retribusi daerah, yang justru menunjukkan peningkatan.

Secara keseluruhan, **Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang 59,37% terhadap total anggaran Pendapatan Daerah** (Tabel 2.2). Penurunan pajak daerah akibat pengalihan opsen terlihat pada beberapa pajak utama, antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang turun 37,62% (yoy) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang menurun 38,54% (yoy). Kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap total pagu penerimaan pajak daerah sebagai berikut: PKB 35,38%, BBNKB 15,13%, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 24,08%, Pajak Rokok 24,64%, Pajak Air Permukaan 0,27%, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLLB) sebesar 0,50%.

**Penurunan anggaran PAD yang lebih dalam tertahan oleh meningkatnya penerimaan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.** Anggaran retribusi daerah naik sebesar 0,51%, terutama karena reklasifikasi beberapa pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), khususnya dari jasa layanan kesehatan, yang sebelumnya tercatat pada pos Lain-lain PAD yang Sah dan kini dialihkan ke pos Retribusi

Daerah. Perubahan ini terutama terjadi pada kategori Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

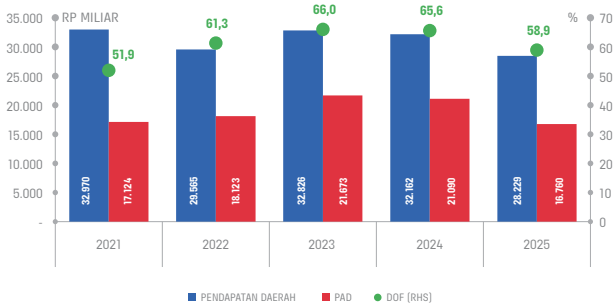
**Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Provinsi Jawa Timur tahun 2025 tercatat turun terdampak dari penurunan pagu PAD.** Pada tahun 2025, DOF APBD Provinsi Jawa Timur turun menjadi 59,4% dari 65,6% pada tahun 2024 (Grafik 2.10). Meski demikian, kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih dikategorikan mandiri dengan nilai Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) sebesar 0,59 (0,50 ≤ IKF < 0,75), yang menjelaskan bahwa lebih dari 50% pembiayaan dan belanja pemerintah daerah ditopang oleh PAD. Sementara itu, pagu Pendapatan Transfer meningkat sebesar 3,93% (yoy), yang seluruhnya didorong oleh Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat, senilai Rp11,44 triliun. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan tingkat ketergantungan, yang diukur melalui rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan; semakin tinggi rasio tersebut, semakin besar pula ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Tabel 2. 2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah APBD Provinsi Jawa Timur s.d. Triwulan II 2024 dan 2025

URAIAN	Pagu APBD Prov. Jawa Timur		% Perubahan	Realisasi APBD Provinsi Jawa Timur				Pertumbuhan Realisasi s.d. II 2025 (%yoy)
	P-APBD 2024	APBD 2025*		Realisasi s.d. II 2024		Realisasi s.d. II 2025		
	[Rp Miliar]	[Rp Miliar]		[Rp Miliar]	% Pagu	[Rp Miliar]	% Pagu	
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>32.161,55</b>	<b>28.228,90</b>	<b>(12,23)</b>	<b>15.712,08</b>	<b>48,85</b>	<b>13.698,98</b>	<b>48,53</b>	<b>(12,81)</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>21.089,69</b>	<b>16.760,29</b>	<b>(20,53)</b>	<b>10.887,51</b>	<b>51,62</b>	<b>8.749,75</b>	<b>52,21</b>	<b>(19,63)</b>
Pajak Daerah	17.242,26	12.872,18	(25,35)	8.574,16	49,73	6.179,71	48,01	(27,93)
Retribusi Daerah	2.731,15	2.745,05	0,51	1.352,98	49,54	1.600,18	58,29	18,27
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	473,11	475,82	0,57	454,03	95,97	459,39	96,55	1,18
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	643,17	667,24	3,74	506,34	78,73	510,48	76,51	0,82
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>11.008,17</b>	<b>11.440,61</b>	<b>3,93</b>	<b>4.820,26</b>	<b>43,79</b>	<b>4.943,78</b>	<b>43,21</b>	<b>2,56</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	11.008,17	11.440,61	3,93	4.820,26	43,79	4.943,78	43,21	2,56
Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>63,69</b>	<b>28,00</b>	<b>(56,04)</b>	<b>4,31</b>	<b>6,77</b>	<b>5,45</b>	<b>19,46</b>	<b>26,38</b>
Pendapatan Hibah	63,69	28,00	(56,04)	0,15	0,23	-	-	(100,00)
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	4,16	-	5,45	-	30,84

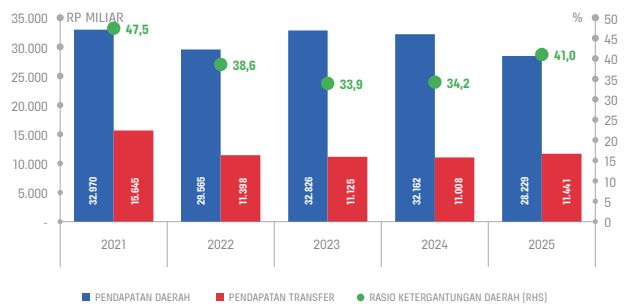
\* Pagu APBD 2025 merupakan pagu perubahan APBD murni mendahului P-APBD  
Sumber: BPKAD Jawa Timur

Grafik 2.10 Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal APBD Provinsi Jawa Timur



Sumber: BPKAD Jawa Timur, diolah

Grafik 2.11 Perkembangan Rasio Ketergantungan APBD Provinsi Jawa Timur



Sumber: BPKAD Jawa Timur, diolah

### 2.3.1.2 Realisasi Pendapatan Daerah

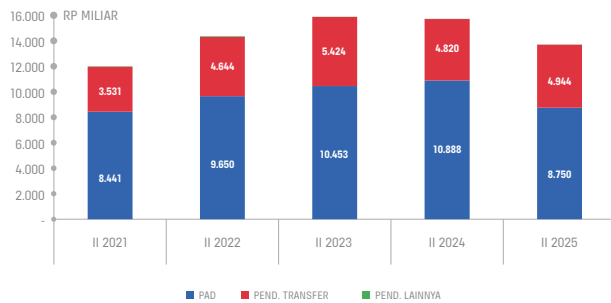
**Realisasi pendapatan Provinsi Jawa Timur tahun 2025 tercatat mengalami penurunan baik pagu terhadap realisasi maupun nominal.** Hingga Triwulan II 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp13,70 triliun, mengalami penurunan sebesar 12,81% (yoy) dengan capaian 48,53% dari pagu (Grafik 2.12). Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat realokasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ke pemerintah kabupaten/kota.

**Penurunan realisasi PAD menjadi faktor utama dalam turunnya realisasi total Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.** Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kontributor terbesar, menyumbang 63,87% terhadap total Pendapatan Daerah, sedangkan Pendapatan Transfer memiliki porsi 36,09%. Pajak daerah tetap menjadi penyumbang utama PAD, mencapai 70,63% dari total PAD hingga Triwulan II 2025. Sementara itu, Pendapatan Transfer mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 2,56%. Penurunan PAD tersebut sejalan dengan dampak berlakunya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang efektif sejak 5 Januari 2024, tecermin dari penurunan realisasi Pajak Daerah hingga Triwulan II 2025. Hal ini terjadi karena Pajak Daerah telah menerapkan konsep opsen sesuai amanat Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lebih lanjut, turunnya realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya turut menyumbang penurunan PAD, sesuai Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/400/013/2025 yang memperpanjang keringanan dasar pengenaan PKB dan BBNKB hingga akhir tahun, berdampak pada belum optimalnya realisasi PAD di triwulan II 2025, mengingat masa berlaku kebijakan tersebut baru dimulai pada tanggal 14 Juli hingga 31 Agustus 2025.

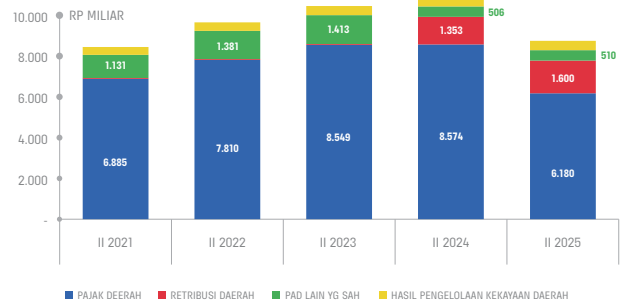
**Penurunan realisasi pendapatan daerah lebih dalam ditahan oleh kenaikan realisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.** Capaian pendapatan transfer triwulan II 2025 sebesar Rp4,94 triliun atau terealisasi 43,21% dari target. Peningkatan tersebut bersumber dari realisasi pencairan dari Pusat atas DAU *block grant* termasuk untuk Gaji ke-13 dan Gaji ke-14 tahun 2025, realisasi DBH termasuk DBH Pajak dan DBHCHT), DAK Disik dan DAK Non Fisik serta realisasi atas insentif fiskal di triwulan II 2025 yang diberikan kepada daerah yang mampu mengelola keuangan dengan baik, menjaga inflasi, dan memenuhi indikator kinerja lainnya.

**Grafik 2.12 Realisasi Pendapatan Daerah s.d. Triwulan II 2021-2025**



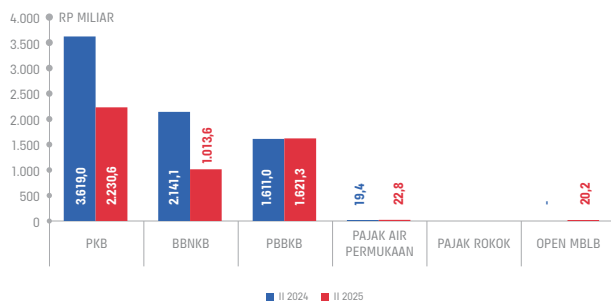
Sumber: BPKAD Jawa Timur

**Grafik 2.13 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) s.d. Trwulan II 2021-2025**



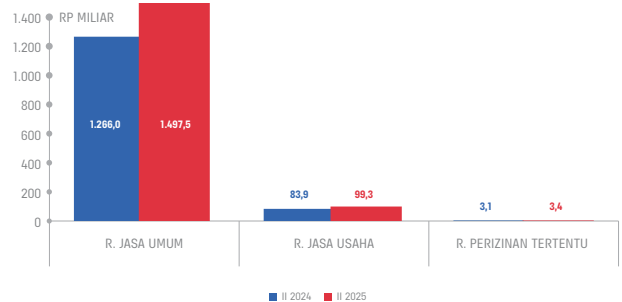
Sumber: BPKAD Jawa Timur

**Grafik 2.14 Realisasi Pajak Daerah s.d. Triwulan II 2024-2025**



Sumber: BPKAD Jawa Timur

**Grafik 2.15 Realisasi Retribusi Daerah s.d. Triwulan II 2024-2025**



Sumber: BPKAD Jawa Timur

## 2.3.2. Belanja Daerah APBD Provinsi Jawa Timur

### 2.3.2.1 Anggaran Belanja Daerah

**Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan terutama pada pagu komponen Belanja Operasi dan Belanja Transfer.** Pagu Belanja Daerah berkurang 16,46% (yoy), dari Rp35,95 triliun pada Tw II 2024 menjadi Rp30,03 triliun pada akhir triwulan laporan. Pagu Belanja Operasi menyumbang 74,13% yang menjadi kontributor utama penurunan Belanja Daerah, kemudian disusul oleh penurunan pagu Belanja Transfer yang berkontribusi sebesar 16,38% (Tabel 2.3).

**Penurunan alokasi Belanja Operasi terutama disumbang oleh Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Hibah.** Alokasi Belanja Operasi turun sebesar 7,67% (yoy) disebabkan oleh penurunan pagu Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp809,01 miliar atau -7,69% (yoy) terutama karena penurunan alokasi belanja barang, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan. Lebih lanjut, pagu Belanja Hibah (pangsa 14,02%) juga mengalami penurunan sebesar 30,94% (yoy).

**Selanjutnya, alokasi Belanja Transfer juga mengalami penurunan pada seluruh komponen belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.** Penurunan pagu Belanja Transfer terutama dipengaruhi oleh menurunnya alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten/kota, serta

pengurangan Belanja Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota dan desa. Hal ini terjadi seiring dengan perubahan skema penyaluran, yakni pengalihan belanja menjadi opsens atas PKB dan BBNKB yang langsung dicatat sebagai PAD oleh pemerintah kabupaten/kota.

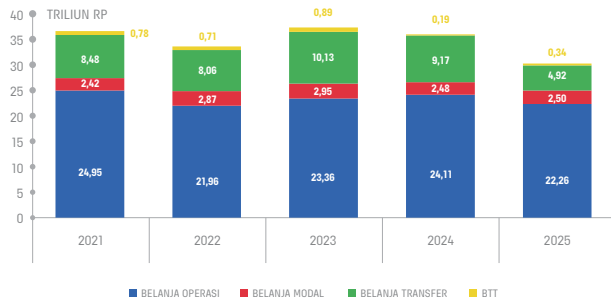
**Penurunan pagu Belanja Daerah yang lebih signifikan dapat tertahan oleh adanya peningkatan pada pagu Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga.** Peningkatan pagu Belanja Modal didorong oleh beberapa komponen utama antara lain Belanja Modal Tanah meningkat sebesar 2,04% (yoy) dengan kontribusi 1,30% terhadap total Belanja Modal. Belanja Modal Gedung dan Bangunan tumbuh 17,84% (yoy) dengan porsi terbesar, yakni 37,00%. Sementara itu, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan melonjak 85,77% (yoy) dengan pangsa 20,74%, dan Belanja Modal Aset Lainnya mengalami kenaikan signifikan sebesar 215,95% (yoy), meskipun dengan kontribusi yang relatif kecil sebesar 0,31%. Kenaikan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan utamanya diarahkan untuk pembangunan gedung perkantoran, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, serta infrastruktur transportasi seperti terminal, pelabuhan, dan bandara.

**Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur s.d. Triwulan II 2024 dan 2025**

URAIAN	Pagu APBD Prov. Jawa Timur		% Perubahan	Realisasi APBD Provinsi Jawa Timur				Pertumbuhan Realisasi s.d. II 2025 (%yoy)
	P-APBD 2024	APBD 2025*		Realisasi s.d. II 2024		Realisasi s.d. II 2025		
	(Rp Miliar)	(Rp Miliar)		(Rp Miliar)	% Pagu	(Rp Miliar)	% Pagu	
<b>Belanja Daerah</b>	<b>35.949,33</b>	<b>30.031,26</b>	<b>(16,46)</b>	<b>12.355,11</b>	<b>34,37</b>	<b>10.945,55</b>	<b>36,45</b>	<b>(11,41)</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>24.112,34</b>	<b>22.263,18</b>	<b>(7,67)</b>	<b>9.596,17</b>	<b>39,80</b>	<b>8.997,18</b>	<b>40,41</b>	<b>(6,24)</b>
Belanja Pegawai	8.874,89	9.199,23	3,65	3.949,89	44,51	3.816,52	41,49	(3,38)
Belanja Barang Dan Jasa	10.518,34	9.709,33	(7,69)	3.423,28	32,55	3.749,29	38,62	9,52
Belanja Subsidi	31,04	35,00	12,75	13,15	42,36	14,67	41,91	11,56
Belanja Hibah	4.519,46	3.121,35	(30,94)	2.133,31	47,20	1.324,22	42,42	(37,93)
Belanja Bantuan Sosial	168,61	198,27	17,59	76,54	45,39	92,48	46,64	20,83
<b>Belanja Modal</b>	<b>2.478,79</b>	<b>2.504,02</b>	<b>1,02</b>	<b>232,03</b>	<b>9,36</b>	<b>257,11</b>	<b>10,27</b>	<b>10,81</b>
Belanja Modal Tanah	31,84	32,49	2,04	22,75	71,45	0,55	1,69	(97,58)
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	1.280,74	920,76	(28,11)	146,20	11,42	141,60	15,38	(3,15)
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	786,17	926,44	17,84	31,29	3,98	62,22	6,72	98,85
Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	279,62	519,43	85,77	7,71	2,76	31,47	6,06	308,17
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	97,99	97,18	(0,83)	23,97	24,46	19,81	20,38	(17,36)
Belanja Modal Aset Lainnya	2,44	7,71	215,95	0,11	4,55	1,46	18,94	1.215,32
<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>192,81</b>	<b>344,19</b>	<b>78,52</b>	<b>121,96</b>	<b>63,26</b>	<b>62,62</b>	<b>18,19</b>	<b>(48,66)</b>
<b>Belanja Transfer</b>	<b>9.165,38</b>	<b>4.919,86</b>	<b>(46,32)</b>	<b>2.404,95</b>	<b>26,24</b>	<b>1.628,64</b>	<b>33,10</b>	<b>(32,28)</b>
Belanja Bagi Hasil	8.235,07	4.407,41	(46,48)	2.220,70	26,97	1.482,33	33,63	(33,25)
Belanja Bantuan Keuangan	930,31	512,45	(44,92)	184,25	19,81	146,31	28,55	(20,59)

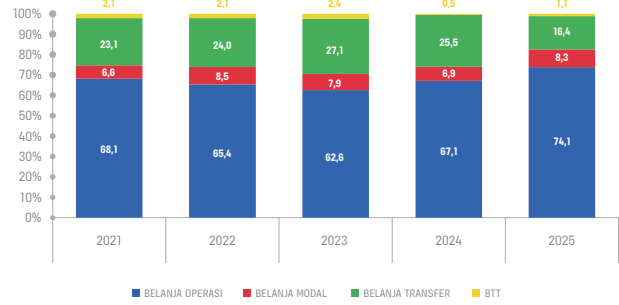
\*) Pagu APBD 2025 merupakan pagu perubahan APBD murni mendahului P-APBD  
Sumber: BPKAD Jawa Timur

**Grafik 2.16 Anggaran Belanja APBD Provinsi Jawa Timur 2020-2025**



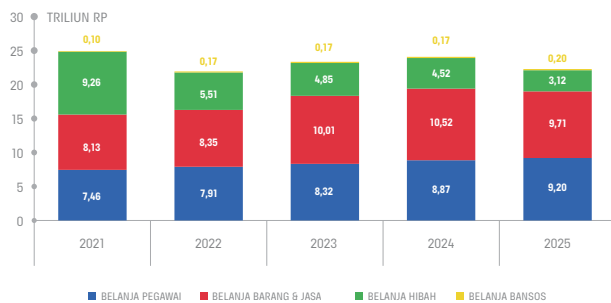
Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur

**Grafik 2.17 Postur Anggaran Belanja APBD Provinsi Jawa Timur 2020-2025**



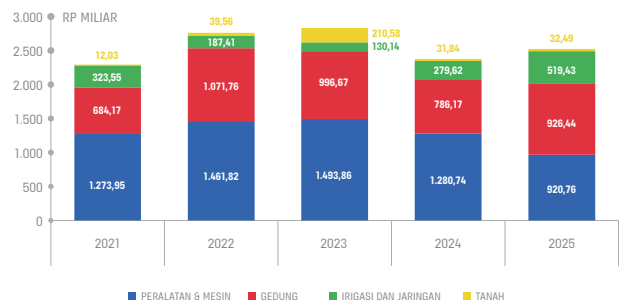
Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur

**Grafik 2.18 Anggaran Belanja Operasi APBD Provinsi Jawa Timur 2020-2025**



Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur

**Grafik 2.19 Anggaran Belanja Modal APBD Provinsi Jawa Timur 2020-2025**



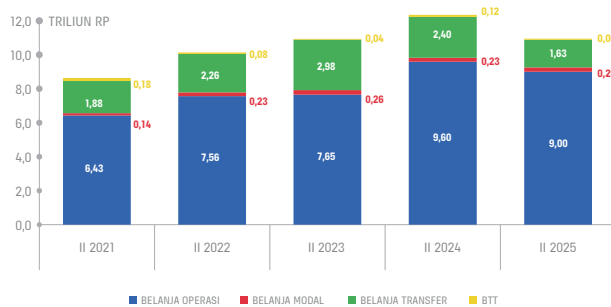
Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur

### 2.3.2.2 Realisasi Belanja Daerah

**Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2025 tercatat mengalami penurunan (Tabel 2.3).** Penurunan realisasi Belanja Daerah terutama didorong oleh turunnya Belanja Operasi sebesar 6,24% yang sebelumnya Rp9,60 triliun menjadi Rp9 triliun. Turunnya realisasi Belanja Operasi terutama didorong oleh penurunan Belanja Pegawai (3,38%, yoy) seiring penurunan pada pos Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN serta pos Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH. Lebih lanjut, Belanja Hibah juga mengalami penurunan realisasi sebesar 37,93% (yoy) seiring dengan turunnya Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar 94,15%.

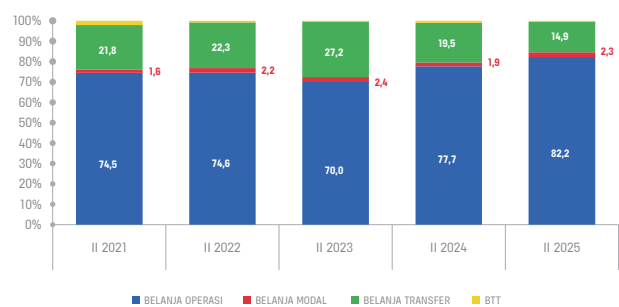
Selanjutnya, penurunan realisasi Belanja Daerah juga ditopang oleh penurunan Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) mengalami penurunan sebesar Rp59,34 miliar atau 48,66%. Penurunan ini disebabkan oleh rendahnya permohonan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis dan pemerintah kabupaten/kota yang mengajukan penggunaan BTT kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, penurunan juga dipengaruhi oleh penyelesaian kebijakan terkait penggunaan dana BTT yang sebelumnya dialokasikan untuk mengantisipasi program-program dari Pemerintah Pusat.

**Grafik 2.20 Komposisi Realisasi Belanja Daerah s.d. triwulan II 2021-2025**



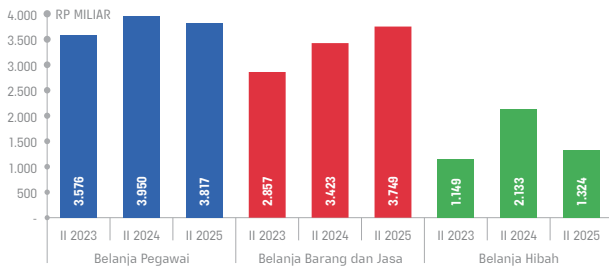
Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur

**Grafik 2.21 Persen Realisasi Belanja Daerah s.d. triwulan II 2021-2025**



Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur

**Grafik 2. 22 Realisasi Belanja Operasi s.d. triwulan II 2023-2025**



Sumber: BPKAD Jawa Timur

Lebih lanjut, hingga akhir Triwulan II 2025, realisasi Belanja Transfer tercatat mengalami penurunan sebesar 32,28%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pencairan Belanja Bagi Hasil yang sebagian besar baru direalisasikan pada Triwulan II 2025.

**Penurunan pencapaian Belanja Daerah yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan Belanja Modal.** Hingga Triwulan II 2025, realisasi Belanja Modal menunjukkan peningkatan sebesar 10,81% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama didorong oleh meningkatnya realisasi Belanja Modal untuk gedung dan bangunan, serta jalan, jaringan, dan irigasi sejalan dengan implementasi Inpres No.2 Tahun 2025. Peningkatan tersebut utamanya berasal dari pelaksanaan kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas PU Bina Marga, dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya, serta dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

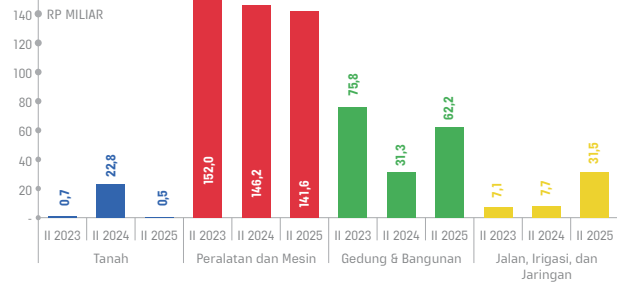
## 2.4. APBD 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur

**Capaian target pendapatan Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur hingga triwulan II 2025 mengalami peningkatan utamanya ditopang oleh realisasi PAD dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.**

Pencapaian ini terutama didorong oleh berlakunya opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang kini menjadi bagian dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan implementasi UU HKPD, sehingga PAD daerah meningkat.

**Selama semester I 2025, kinerja belanja daerah di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur menunjukkan penurunan.** Hal tersebut terutama didorong oleh menurunnya realisasi hampir seluruh komponen belanja. Faktor utama yang memengaruhi peningkatan tersebut antara lain belum maksimalnya pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, serta tambahan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat.

**Grafik 2. 23 Realisasi Belanja Modal s.d. triwulan II 2023-2025**



Sumber: BPKAD Jawa Timur

### 2.4.1. Pendapatan Daerah APBD Kabupaten/Kota

#### 2.4.1.1. Anggaran Pendapatan Daerah

Pagu Pendapatan Daerah 38 Kabupaten/Kota di Jawa timur hingga akhir Juni 2025 turun sejalan dengan penurunan pagu Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Kenaikan pagu pendapatan daerah didorong oleh meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang sejalan dengan naiknya target penerimaan dari pajak dan retribusi daerah. Peningkatan ini terutama bersumber dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta hasil reklasifikasi sandi akun dari pos Lain-lain Pendapatan yang Sah ke pos Retribusi Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang HKPD, peningkatan PAD ini berdampak pada menurunnya pendapatan transfer, khususnya pendapatan transfer antar daerah, karena terjadinya peralihan pos anggaran dari transfer antar daerah menjadi PAD yang bersumber dari opsen PKB dan BBNKB. Adapun total target Pendapatan Daerah pada seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebesar Rp106,52 triliun, turun 0,87% (yoy) dibandingkan target Pendapatan Daerah periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp107,46 triliun. Penurunan target anggaran tersebut terutama disebabkan oleh penurunan target Pendapatan Transfer sebesar 7,66% (yoy) atau menjadi sebesar Rp74,27 triliun dari sebelumnya sebesar Rp80,44 triliun, di tengah lebih tingginya pagu PAD yang naik sebesar 20,24% (yoy). Alokasi PAD terhadap total pagu Pendapatan Daerah secara agregat berkontribusi sebesar 30,11%.

**Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo merupakan Kabupateb/Kota dengan peringkat tertinggi dalam hal kontribusi terhadap anggaran pendapatan di Jawa Timur.**

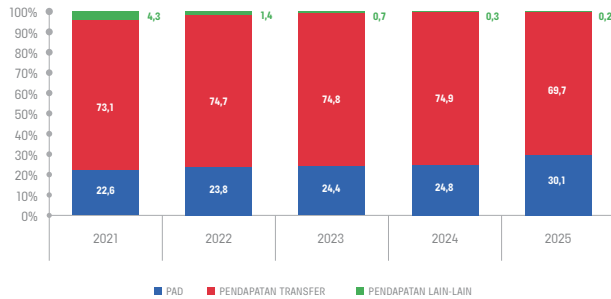
Adapun target pendapatan Kota Surabaya sebesar Rp12,14 triliun berkontribusi hingga 11,39% dari seluruh daerah se-Jawa Timur. Sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan bisnis, ekonomi Kota Surabaya terutama ditopang oleh sektor perdagangan, khususnya perdagangan ritel, serta sektor akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman. Kedua sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Di sisi lain, Kabupaten Sidoarjo mencatatkan pagu pendapatan sebesar Rp5,43 triliun, naik 9,93% (yoy), sejalan dengan naiknya pagu pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

**Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah APBD 38 Kab/Kota di Jawa Timur s.d. Triwulan II 2024 dan 2025**

URAIAN	Pagu APBD Kab/Kota		% Perubahan	Realisasi APBD Kab/Kota				Pertumbuhan Realisasi s.d. II 2025 (%yoy)
	P-APBD 2024	APBD 2025		Realisasi s.d. II 2024		Realisasi s.d. II 2025		
	(Rp Miliar)	(Rp Miliar)		(Rp Miliar)	% Pagu	(Rp Miliar)	% Pagu	
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>107.463</b>	<b>106.523</b>	<b>(0,87)</b>	<b>48.341</b>	<b>44,98</b>	<b>49.267</b>	<b>46,52</b>	<b>1,92</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>26.674</b>	<b>32.072</b>	<b>20,24</b>	<b>11.482</b>	<b>43,05</b>	<b>14.324</b>	<b>54,30</b>	<b>24,75</b>
Pajak Daerah	13.739	18.840	37,13	6.199	45,12	8.201	60,58	32,29
Retribusi Daerah	6.733	9.417	39,86	2.156	32,02	3.959	62,07	83,62
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	728	712	(2,26)	457	62,73	441	60,55	(3,36)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.474	3.103	(43,30)	2.670	48,78	1.722	30,03	(35,49)
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>80.436</b>	<b>74.273</b>	<b>(7,66)</b>	<b>36.784</b>	<b>45,73</b>	<b>34.815</b>	<b>43,96</b>	<b>(5,35)</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	70.828	69.804	(1,45)	34.502	48,71	33.309	47,58	(3,46)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	9.608	4.469	(53,49)	2.282	23,75	1.506	16,39	(33,99)
<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>353</b>	<b>178</b>	<b>(49,45)</b>	<b>75</b>	<b>21,25</b>	<b>128</b>	<b>39,65</b>	<b>71,35</b>
Pendapatan Hibah	73	24	(67,75)	6	8,71	15	39,25	128,85
Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	280	155	(44,68)	69	24,52	114	39,70	66,02

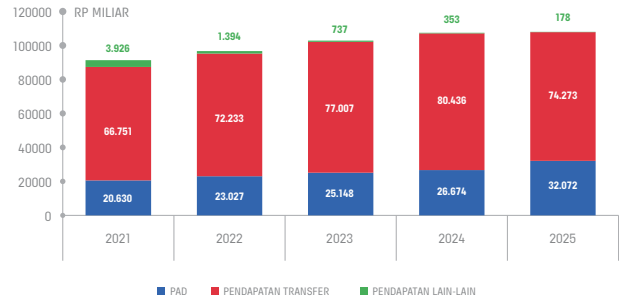
Sumber: BPKAD Jawa Timur, diolah

**Grafik 2. 24 Perbandingan Postur Anggaran Pendapatan 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2019-2025**



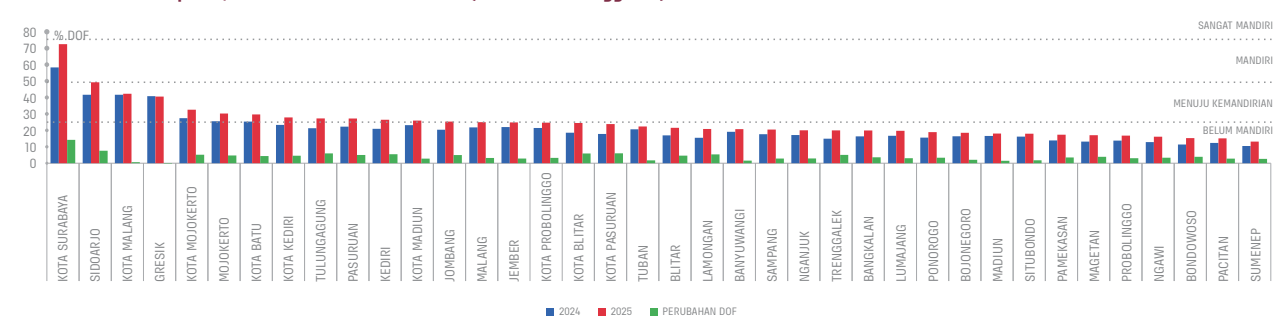
Sumber: BPKAD Jawa Timur

**Grafik 2. 25 Komposisi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur**



Sumber: BPKAD Jawa Timur

**Grafik 2. 26 DOF Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2024-2025 (berdasarkan anggaran)**



Sumber: BPKAD Jawa Timur

Secara rata-rata, nilai DOF untuk seluruh daerah di Jawa Timur naik sejalan dengan meningkatnya pagu PAD. DOF merupakan rasio yang mencerminkan kemandirian fiskal suatu daerah, hingga triwulan II 2025 nilai rata-rata DOF 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur adalah 25,00% meningkat dibandingkan dengan

triwulan II 2024 yakni sebesar 21,08%. Meningkatnya rata-rata DOF tersebut ditopang oleh kenaikan seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur kecuali Kabupaten Gresik yang turun sebesar 0,24%. Lebih lanjut, terdapat 13 Kabupaten/Kota yang memiliki DOF lebih tinggi dari rata-rata.

### 2.4.1.2. Realisasi Pendapatan Daerah

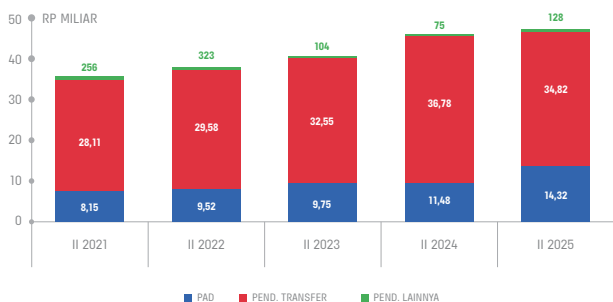
Hingga Triwulan II 2025, realisasi Pendapatan Daerah seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur menunjukkan peningkatan, yang terutama didorong oleh kenaikan PAD serta Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sampai akhir Juni 2025, pendapatan daerah tercatat tumbuh sebesar 1,92% (yoy), dari Rp48,34 triliun pada Triwulan II tahun sebelumnya menjadi Rp49,27 triliun pada periode yang sama tahun 2025. Peningkatan realisasi pendapatan daerah ini terutama didorong oleh naiknya realisasi PAD, yang memiliki pangsa sebesar 29,07% terhadap total pendapatan daerah, serta oleh meningkatnya realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah, yang berkontribusi sebesar 0,26% dari total pendapatan daerah. Realisasi PAD tercatat sebesar Rp14,32 triliun, tumbuh 27,75% (yoy) sejalan dengan kenaikan komponen realisasi pajak daerah sebesar 32,29% dan kenaikan signifikan pada realisasi retribusi daerah sebesar 83,62%. Lebih lanjut, kenaikan realisasi Pendapatan Lain-lain yang Sah sebesar 71,35% (yoy) utamanya disumbang oleh kenaikan pendapatan hibah (128,85%, yoy) dan Lain-lain Pendapatan Sesuai Undang-undang (66,02%, yoy).

Peningkatan penerimaan PAD terjadi seiring dengan adanya tambahan pendapatan dari opsen Pajak PKB dan BBNKB dan percepatan realisasi penerimaan pajak lainnya. Pemerintah Kabupaten/Kota turut mendorong optimalisasi penerimaan daerah, salah satunya melalui percepatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2025. Upaya ini didukung dengan berbagai program

sosialisasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Di sisi lain, PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tetap menjadi penyumbang utama PAD, diikuti oleh pajak dari sektor restoran dan hotel yang juga menunjukkan kontribusi signifikan.

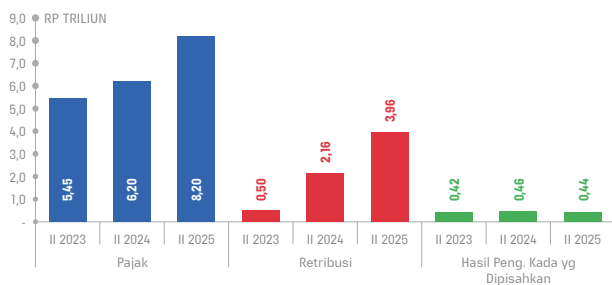
**Kabupaten Mojokerto menempati urutan pertama persentase realisasi pendapatan daerah dari seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur.** Hingga akhir semester I 2025, realisasi pendapatan Kabupaten Mojokerto mencapai Rp1,44 triliun atau telah mencapai 52,77% dari target yang ditetapkan (Grafik 2.29). Pencapaian realisasi tersebut didorong oleh realisasi PAD yang meningkat dibandingkan dengan triwulan II 2024 sebesar Rp439,01 miliar (24,14%, yoy) atau terealisasi 53,30% dari target. Capaian tertinggi dalam realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Mojokerto hingga saat ini tercatat pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang telah mencapai 68,90% dari target sebesar Rp116 miliar. Capaian tersebut diikuti oleh Pajak Penerangan Jalan (PPJ), PKB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai inovasi dan kolaborasi yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Mojokerto dengan melibatkan Pemerintah Desa, masyarakat, hingga pelaku usaha. Khusus untuk PBB-P2, strategi jemput bola dilakukan melalui mobil layanan keliling desa, kemudahan pembayaran secara elektronik maupun nontunai, serta program pemutakhiran data objek pajak. Selain itu,

Grafik 2.27 Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah s.d. Triwulan II 2021-2025



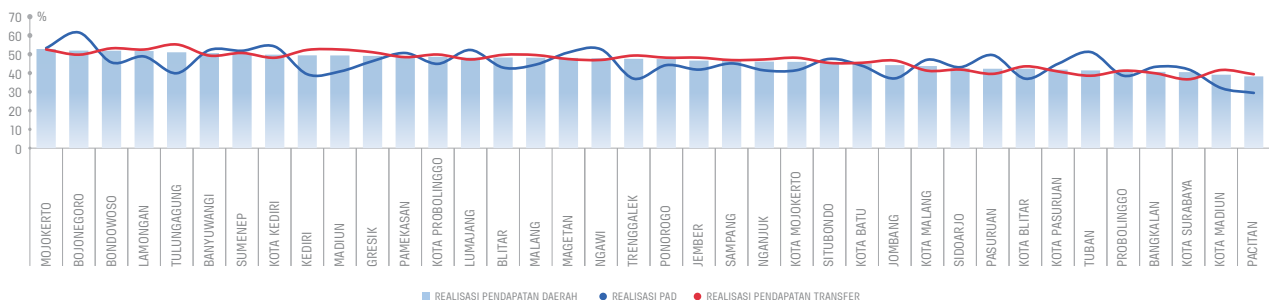
Sumber: BPKAD Jawa Timur, diolah

Grafik 2.28 Realisasi PAD s.d. Triwulan II 2023-2025



Sumber: BPKAD Jawa Timur

Grafik 2.29 Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur s.d. Triwulan II 2025



Sumber: BPKAD Jawa Timur

peningkatan kapasitas SDM, penguatan pengawasan, serta penyempurnaan regulasi daerah turut mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah. Berbagai upaya tersebut secara konsisten mendorong pertumbuhan PAD dari sektor perpajakan.

**Di sisi lain, Kota Surabaya sebagai wilayah dengan realisasi pendapatan tertinggi diantara 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur mencatatkan kinerja persentase realisasi pendapatan dibawah rata-rata Kabupaten/Kota.** Hingga akhir semester II 2025, realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp4,91 triliun atau 40,48% dari target yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan rata-rata 38 Kabupaten/Kota yang sebesar 46,45%. Capaian tersebut utamanya disebabkan oleh realisasi Pendapatan Transfer yang hanya sebesar 36,66% dan PAD sebesar 41,92% dari pagu anggaran. Pemerintah Kota Surabaya terus berusaha meningkatkan pendapatan daerah, antara lain dengan mengoptimalkan retribusi daerah dari sektor parkir, dengan mengimplementasikan sistem pembayaran parkir elektronik (*tap*) secara menyeluruh di semua titik parkir. Target implementasi sistem *tap* ini, mencakup sekitar 2.400 titik parkir, serta 5.000 lokasi hotel, restoran dan kafe di seluruh Kota Surabaya.

Disparitas antar daerah dalam realisasi pendapatan masih tergolong tinggi, terdapat daerah yang telah merealisasikan lebih dari 40% anggaran, namun ada pula yang masih berada di bawah angka tersebut. Ketimpangan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kendala teknis, hambatan administratif, maupun belum optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal (Grafik 2.29). Oleh karena itu, optimalisasi realisasi pendapatan daerah perlu diarahkan tidak hanya pada capaian nominal semata, tetapi juga pada kualitas yang berkelanjutan dan selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah.

Ruang percepatan belanja daerah terutama terletak pada Belanja Modal dan Belanja Operasi. Belanja Modal, yang berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik dalam jangka panjang, saat ini belum terealisasi secara optimal. Mengingat realisasi belanja berbanding lurus dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan evaluasi terhadap pola penjadwalan kegiatan, proses pengadaan barang/jasa, serta tingkat daya serap masing-masing OPD. Selain itu, digitalisasi proses belanja dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga merupakan kunci penting dalam mempercepat penyerapan anggaran.

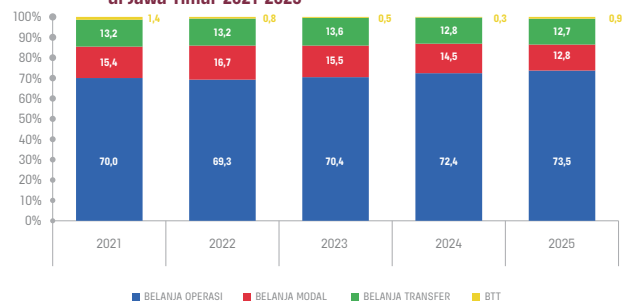
## 2.4.2. Belanja Daerah APBD Gabungan Kabupaten/Kota

### 2.4.2.1 Anggaran Belanja Daerah

**Pagu Belanja Daerah 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur tercatat meningkat (Tabel 2.5).** Peningkatan tersebut utamanya ditopang oleh naiknya komponen pagu belanja operasi dan BTT. Pagu Belanja Operasi berkontribusi paling besar 73,50% terhadap total pagu dan naik sebesar 1,95% (yoy). Kontribusi tersebut lebih besar dari alokasi Belanja Operasi pada periode sebelumnya yaitu sebesar 72,49%.

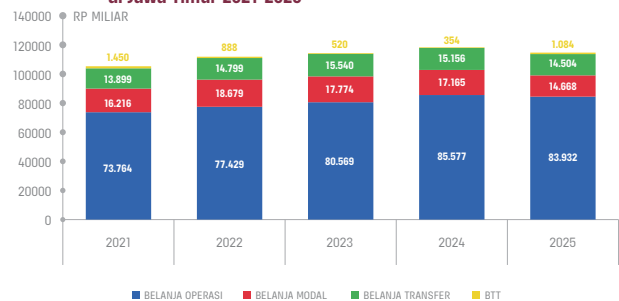
Target Belanja Operasi pada seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur hingga triwulan II 2025 menunjukkan peningkatan, seiring dengan naiknya alokasi pada beberapa komponen utama, yakni Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Bunga. Secara umum meningkatnya anggaran Belanja Pegawai sejalan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terus melakukan penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk memenuhi kebutuhan pegawai di berbagai instansi, sementara anggaran Belanja Barang dan Jasa cenderung difokuskan untuk fungsi infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

**Grafik 2.30 Perbandingan Postur Anggaran Belanja 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2021-2025**



Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur

**Grafik 2.31 Perbandingan Postur Anggaran Belanja 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2021-2025**



Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur

**Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur s.d Triwulan II 2024 dan 2025**

URAIAN	Pagu APBD Kab/Kota		% Perubahan	Realisasi APBD Kab/Kota				Pertumbuhan Realisasi s.d. II 2025 (%yoy)
	P-APBD 2024	APBD 2025		Realisasi s.d. II 2024		Realisasi s.d. II 2025		
	[Rp Miliar]	[Rp Miliar]		[Rp Miliar]	% Pagu	[Rp Miliar]	% Pagu	
<b>Belanja Daerah</b>	<b>118.253,08</b>	<b>114.187,29</b>	<b>(3,44)</b>	<b>41.957,64</b>	<b>35,48</b>	<b>39.120,25</b>	<b>34,26</b>	<b>(6,76)</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>85.577,38</b>	<b>83.931,74</b>	<b>(1,92)</b>	<b>32.078,21</b>	<b>37,48</b>	<b>29.983,82</b>	<b>35,72</b>	<b>(6,53)</b>
Belanja Pegawai	40.752,34	44.126,82	8,28	18.197,17	44,27	18.041,72	40,89	(0,85)
Belanja Barang Dan Jasa	36.424,21	34.422,29	(5,50)	10.963,78	29,26	10.656,86	30,96	(2,80)
Belanja Bunga	31,65	45,92	45,09	18,65	37,28	11,80	25,70	(36,73)
Belanja Subsidi	44,97	114,96	155,62	5,65	97,17	43,70	38,01	673,45
Belanja Hibah	7.507,81	4.483,69	(40,28)	2.656,33	13,97	1.048,71	23,39	(60,52)
Belanja Bantuan Sosial	816,39	738,06	(9,60)	236,63	22,17	181,03	24,53	(23,50)
<b>Belanja Modal</b>	<b>17.165,05</b>	<b>14.667,80</b>	<b>(14,55)</b>	<b>1.959,35</b>	<b>11,41</b>	<b>1.684,71</b>	<b>11,49</b>	<b>(14,02)</b>
Belanja Modal Tanah	566,50	759,11	34,00	124,25	24,95	141,34	18,62	13,75
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	3.510,12	2.899,51	(17,40)	436,99	10,30	361,70	12,47	(17,23)
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	4.475,93	4.121,53	(7,92)	342,55	5,92	265,11	6,43	(22,61)
Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	8.371,45	6.751,46	(19,35)	1.028,76	10,76	900,71	13,34	(12,45)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	205,18	102,59	(50,00)	18,15	4,49	9,22	8,99	(49,20)
Belanja Modal Aset Lainnya	35,86	33,60	(6,31)	8,65	18,49	6,63	19,73	(23,35)
<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>354,19</b>	<b>1.083,64</b>	<b>205,95</b>	<b>56,98</b>	<b>16,09</b>	<b>62,93</b>	<b>5,81</b>	<b>10,44</b>
<b>Belanja Transfer</b>	<b>15.156,47</b>	<b>14.504,11</b>	<b>(4,30)</b>	<b>7.863,10</b>	<b>51,88</b>	<b>7.388,79</b>	<b>50,94</b>	<b>(6,03)</b>
Belanja Bagi Hasil	819,02	1.024,99	25,15	150,28	18,35	222,07	21,67	47,77
Belanja Bantuan Keuangan	14.337,45	13.479,12	(5,99)	7.712,82	53,79	7.166,72	53,17	(7,08)

Sumber: BPKAD Jawa Timur, diolah

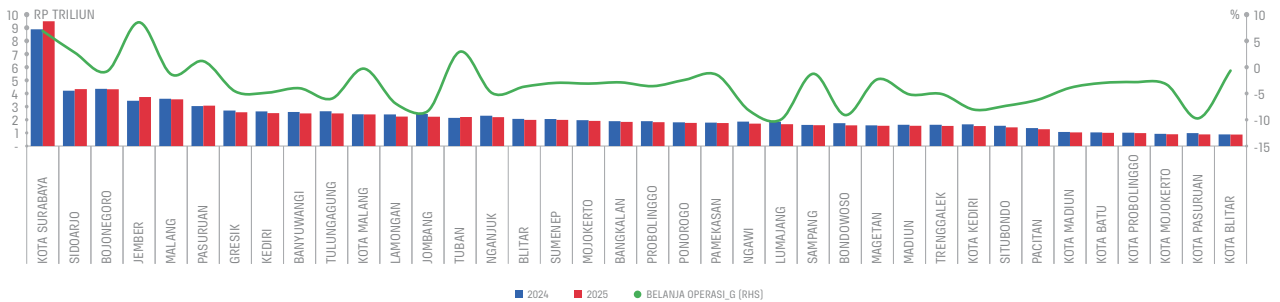
Peningkatan pagu Belanja Daerah lebih tinggi tertahan oleh penurunan sejumlah komponen meliputi Belanja Modal dan Belanja Transfer. Penurunan tersebut utamanya didorong menurunnya pagu belanja modal di 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, dan hanya 11 kab/kota yang mengalami kenaikan. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pada pagu Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi serta Belanja Aset Tetap Lainnya.

Secara spasial, pertumbuhan pagu Belanja Operasi tertinggi sampai dengan triwulan laporan dicatatkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Belanja Operasi di Kota Surabaya tumbuh

6,88 % (yoy), meningkat dari Rp8,33 triliun menjadi Rp9,49 triliun. Kenaikan ini didorong oleh pertumbuhan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang berkontribusi 55,56% dan Belanja Pegawai sebesar 39,80% (Grafik 2.30). Peningkatan Belanja Operasi menjadi cerminan upaya pemerintah dalam mengakselerasi pelayanan publik, memperkuat tata kelola birokrasi, dan menjamin keberlangsungan operasional pemerintahan.

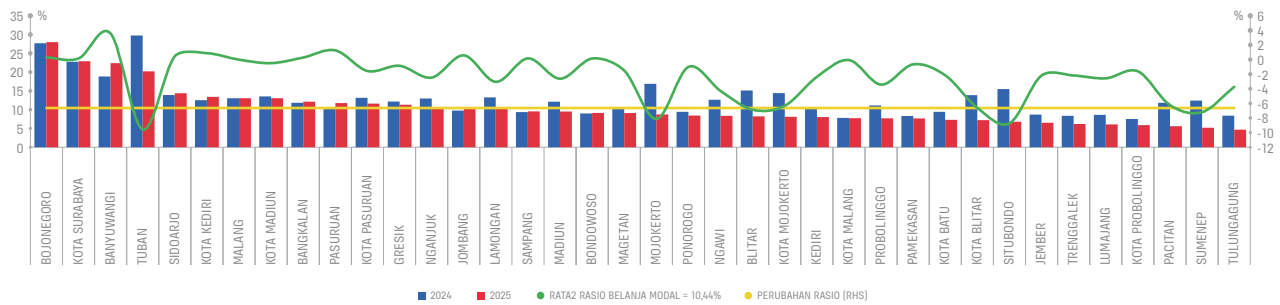
Secara rata-rata, proporsi Belanja Modal terhadap total belanja daerah di Jawa Timur menurun pada tahun 2025. Rasio pangsa belanja modal mencatatkan sebesar 10,44%, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 12,83%.

**Grafik 2. 32 Perbandingan Anggaran Belanja Operasi 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2024-2025**



Sumber: BPKAD Jawa Timur

**Grafik 2. 33 Rasio Anggaran Belanja Modal 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024-2025**



Sumber: BPKAD Jawa Timur

Penurunan ini terjadi di mayoritas daerah yaitu 27 daerah yang tercatat turun (Grafik 2.33). Kab. Bojonegoro dengan rasio belanja modal tertinggi didorong oleh percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Di sisi lain, Kabupaten Lumajang menjadi daerah dengan rasio Belanja Modal terendah disebabkan oleh penurunan pagu belanja.

**Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, Kota Surabaya menjadi daerah dengan alokasi anggaran belanja terbesar.** Pada tahun 2025, anggaran belanja Kota Surabaya ditargetkan sebesar Rp12,35 triliun atau setara 10,82% dari total belanja seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Grafik 2.28). Alokasi tersebut didominasi oleh Belanja Operasi yang mencapai 76,83%, diikuti oleh Belanja Modal sebesar 22,89%. Sebaliknya, Kota Blitar menjadi daerah dengan alokasi belanja terendah, hanya sebesar Rp976,89 miliar atau 0,86% dari total belanja Kabupaten/Kota di provinsi.

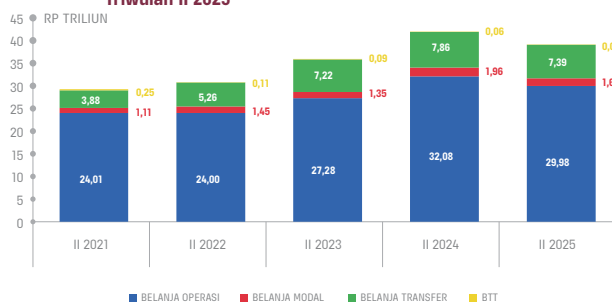
### 2.4.2.2 Realisasi Belanja Daerah

**Hingga triwulan II 2025, realisasi Belanja Daerah pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur tercatat mengalami penurunan, yang terutama disebabkan oleh menurunnya hampir seluruh komponen belanja** (Tabel 2.5). Serapan belanja daerah

menurun sebesar 6,76% (yoy), dengan kontribusi terbesar dari penurunan Belanja Operasi yang mendominasi dengan pangsa 76,65%. Penurunan Belanja Operasi ini mencakup komponen Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Hibah, serta Bantuan Sosial. Meskipun demikian, kontraksi yang lebih dalam berhasil tertahan oleh meningkatnya realisasi Belanja Tak Terduga yang tumbuh 10,44% (yoy) (Grafik 2.34).

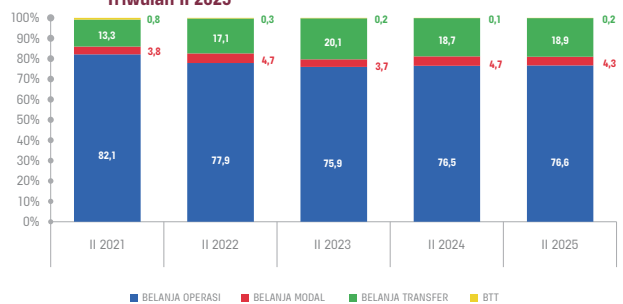
**Secara spasial, Kabupaten Jombang mencatatkan realisasi belanja tertinggi hingga triwulan II 2025, yakni sebesar 42,56% dari total pagu anggaran yang sebesar Rp3,06 triliun.** Capaian ini terutama didorong oleh Belanja Operasi yang terealisasi sebesar Rp901,82 miliar, memberikan kontribusi sebesar 69,25% terhadap total belanja daerah. Sementara itu, Belanja Modal mencapai 21,04%, didorong oleh pelaksanaan sejumlah Proyek Strategis Daerah (PSD) tahun 2025, seperti pembangunan Jembatan Kudubanjar dan Jembatan Bailey yang dimulai pada triwulan II. Sebaliknya, Kabupaten Bojonegoro mencatatkan realisasi belanja terendah di Jawa Timur, yakni sebesar 22,29% atau Rp1,76 triliun secara nominal. Rendahnya capaian ini tercermin pada hampir seluruh komponen belanja, terutama Belanja Modal yang baru terealisasi sebesar 1,41%.

**Grafik 2. 34 Realisasi Belanja Kabupaten/Kota di Jawa Timur s.d. Triwulan II 2025**



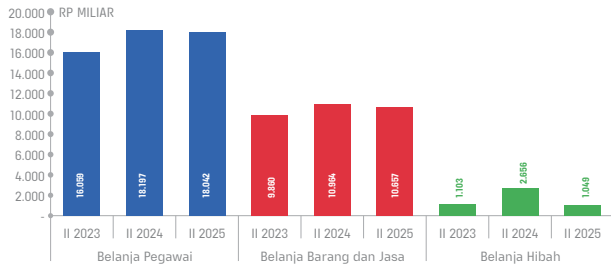
Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur

**Grafik 2. 35 Komposisi Realisasi Belanja Kabupaten/Kota di Jawa Timur s.d. Triwulan II 2025**



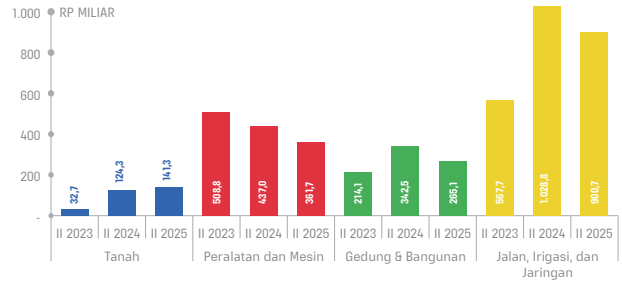
Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur

**Grafik 2.36 Realisasi Belanja Operasi Kabupaten/Kota di Jawa Timur s.d. Triwulan II 2025**



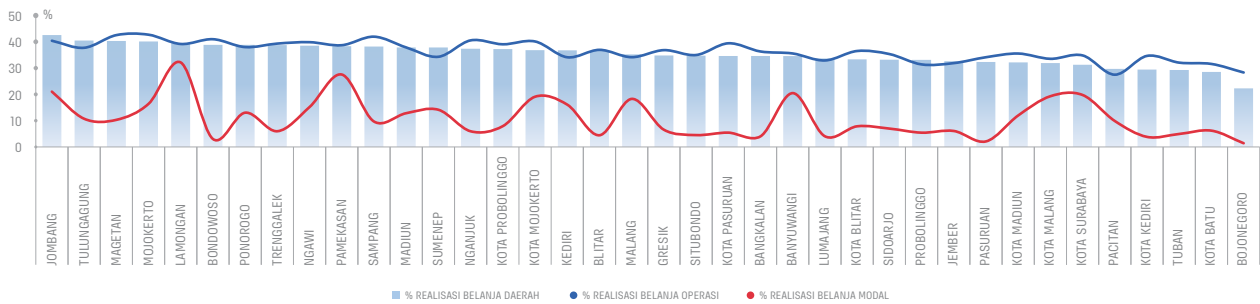
Sumber: BPKAD Jawa Timur

**Grafik 2.37 Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Jawa Timur s.d. Triwulan II 2025**



Sumber: BPKAD Jawa Timur

**Grafik 2.38 Persentase Realisasi Belanja Daerah 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur s.d Triwulan II 2025**



Sumber: BPKAD Jawa Timur





Bab III

# Perkembangan Inflasi



### 3.1. Kondisi Umum

Inflasi Provinsi Jawa Timur pada akhir triwulan II 2025 tercatat sebesar 2,02% (yoy), mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,77% (yoy). Kenaikan inflasi ini didorong oleh (i) kenaikan harga emas dunia seiring masih tingginya ketidakpastian perekonomian global yang ditransmisikan pada harga emas perhiasan domestik; (ii) dinamika pasokan komoditas bahan pangan seiring berakhirnya periode panen raya untuk komoditas padi serta pengaruh bergesernya pola tanam dan kondisi musim kemarau basah untuk komoditas hortikultura, khususnya cabai rawit; (iii) solidnya permintaan di tengah adanya keterbatasan pasokan dunia a.l. pada komoditas kopi dan kelapa; serta (iv) transmisi kenaikan harga jual eceran berbagai macam sigaret atas dasar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 dan 97 Tahun 2024 yang berlaku per 1 Januari 2025. Meskipun demikian, kenaikan inflasi ini masih ditahan oleh beberapa hal antara lain (i) penurunan beberapa harga komoditas strategis seiring penurunan harga input seperti Daging Ayam Ras seiring penurunan harga jagung dunia dan peningkatan pasokan seiring realisasi impor seperti bawang putih; (ii) penurunan harga BBM non-subsidi oleh PT Pertamina seiring penurunan harga minyak dunia; (iii) upaya pengendalian inflasi yang merupakan bentuk sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) seluruh Jawa Timur melalui implementasi program pada pilar 4K yang terintegrasi. Berdasarkan kelompok pengeluaran, meningkatnya tekanan inflasi Jawa Timur pada triwulan II 2025 didorong oleh inflasi pada (i) kelompok makanan, minuman, dan tembakau; (ii) kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, (iii) kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; dan (iv) kelompok transportasi. Adapun peningkatan inflasi lebih lanjut pada triwulan ini ditahan oleh kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan.

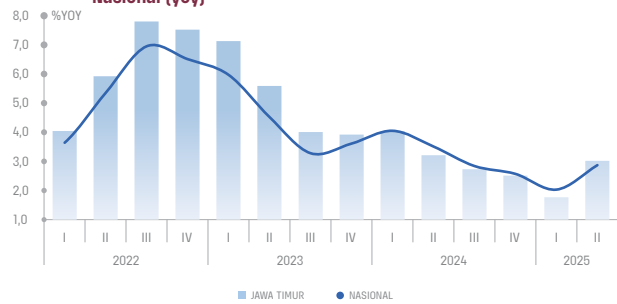
Inflasi Provinsi Jawa Timur pada triwulan III 2025 diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan II 2025, namun masih dalam rentang sasaran nasional 2,5% ± 1%. Potensi meningkatnya tekanan inflasi pada triwulan III 2025 sejalan dengan (i) prakiraan kenaikan harga komoditas global non-energi (khususnya emas); (ii) Kenaikan harga beras seiring meningkatnya harga gabah di penggilingan; (iii) dimulainya tahun ajaran baru 2025/2026 yang mendorong kenaikan biaya sekolah; (iv) penyesuaian harga bensin non-subsidi seiring dengan kenaikan harga energi global; dan (v) kenaikan harga tarif PDAM di Kab. Sumenep. Kendati demikian, peningkatan inflasi lebih lanjut pada triwulan III diperkirakan tertahan oleh moderasi pasokan bahan pangan termasuk a.l. beras, cabai rawit, bawang merah, dan tomat dan tertahannya konsumsi masyarakat karena tidak adanya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) selama triwulan tersebut.

### 3.2. Kinerja Inflasi Jawa Timur

#### 3.2.1. Perkembangan Inflasi Triwulan II 2025

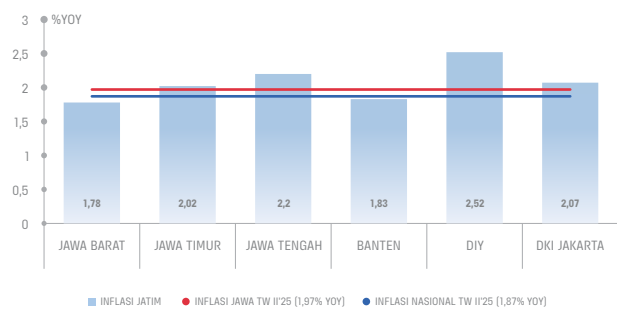
Pada triwulan II 2025 Provinsi Jawa Timur tercatat mengalami kenaikan inflasi menjadi sebesar 2,02% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,77% (yoy). Capaian inflasi Jawa Timur di triwulan laporan terpantau lebih tinggi dibandingkan dengan capaian inflasi nasional di periode yang sama yaitu sebesar 1,87% (yoy). Seluruh provinsi se-Jawa mengalami inflasi pada triwulan laporan dan secara spasial, dari seluruh provinsi se-Jawa, inflasi Jawa Timur berada pada posisi ke-4. Meningkatnya tekanan inflasi pada triwulan II ini didorong oleh komoditas-komoditas sebagai berikut: (i) emas perhiasan (andil 0,55%); (ii) beras (andil 0,21%); (iii) kopi bubuk (andil 0,11%); (iv) bahan bakar rumah tangga (andil 0,10%); (v) minyak goreng (andil 0,09%); (vi) sigaret kretek mesin (andil 0,08%); (vii) cabai rawit (andil 0,07%); (viii) nasi dengan lauk pauk (andil 0,07%); (ix) kelapa (andil 0,06%); (x) santan jadi (andil 0,06%); (xi) bawang merah (andil 0,03%); (xii) sigaret kretek tangan (andil 0,03%); (xiii) tomat (andil 0,03%); dan (xiv) sigaret putih mesin (andil 0,02%). Secara umum, meningkatnya harga beras disebabkan oleh penurunan pasokan seiring dengan berakhirnya masa panen raya dan saat ini sebagian besar tanaman padi berada fase vegetatif. Selain itu, kenaikan harga jual gabah di tingkat penggilingan juga mendorong kenaikan harga beras di tengah dukungan distribusi pasokan beras SPHP yang masih tertahan. Selain itu, kondisi musim kemarau

Grafik 3.1 Perkembangan Inflasi Gabungan Kota IHK Jawa Timur dan Nasional (yoy)



Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.2 Inflasi Provinsi di Jawa Triwulan II 2025 (yoy)



Sumber: BPS, diolah

**Tabel 3.1 Komoditas Penyumbang Utama Inflasi Jawa Timur Triwulan II 2025 (yoy)**

Jenis Komoditi/Barang	Sumbangan Inflasi
Emas Perhiasan	0,55
Beras	0,21
Kopi Bubuk	0,11
Bahan Bakar Rumah Tangga	0,11
Minyak Goreng	0,09
Sigaret Kretek Mesin	0,08
Cabai Rawit	0,07
Nasi dengan lauk	0,07
Kelapa	0,06
Santan Jadi	0,06

Sumber: BPS, diolah

basah yang menyebabkan budidaya tanaman hortikultura tidak optimal. Kenaikan harga kelapa dan santan jadi didorong oleh meningkatnya permintaan dari luar negeri sehingga menurunkan pasokan untuk pasar domestik. Adapun, harga sigaret baik sigaret kretek mesin, sigaret kretek tangan, dan sigaret putih mesin secara tahunan meningkat seiring penetapan Harga Jual Eceran (HJE) baru yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025 melalui PMK Nomor 96 dan 97 Tahun 2024.

### 3.2.2. Analisis Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa

Berdasarkan kelompok barang dan jasa, tekanan inflasi Jawa Timur yang meningkat pada triwulan II 2025 terutama disumbang oleh inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau (inflasi 2,51% yoy; andil 0,70%); kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (inflasi 9,96% yoy; andil 0,65%); kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (inflasi 1,31%; andil 0,15%); dan kelompok transportasi (inflasi 0,47%; andil 0,06%). Namun demikian, meningkatnya inflasi pada periode laporan ditahan oleh kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (deflasi -0,52% yoy; andil -0,04%) (Grafik 3.3).

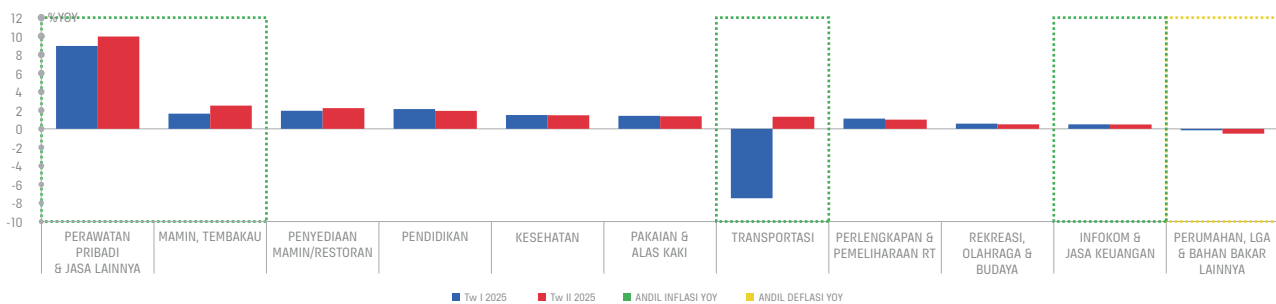
**Tabel 3.2 Komoditas Penyumbang Utama Deflasi Jawa Timur Triwulan II 2025 (yoy)**

Jenis Komoditi/Barang	Sumbangan Deflasi
Daging Ayam Ras	-0,09
Bensin	-0,05
Cabai Merah	-0,04
Bawang Putih	-0,04
Daun Bawang	-0,03
Ikan Mujair	-0,03
Telepon Seluler	-0,03
Jagung Manis	-0,02

Sumber: BPS, diolah

Inflasi pada Kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada triwulan laporan didorong oleh komoditas bahan pangan utamanya komoditas beras seiring berakhirnya periode panen raya pada triwulan sebelumnya sehingga mendorong kenaikan harga gabah di tingkat penggilingan pada triwulan laporan. Adapun kenaikan harga di lapangan tercatat mencapai lebih dari harga acuan pembelian Gabah Kering Panen (GKP) yang telah ditetapkan Pemerintah sebesar Rp6.500/kg sejak tanggal 15 Januari 2025. Selanjutnya kenaikan harga pada komoditas rokok sebagai dampak lanjutan dari penyesuaian HJE sigaret tahunan yang berlaku sejak Januari 2025 sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 96 dan 97 Tahun 2024. Sementara itu, inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya utamanya didorong oleh komoditas emas perhiasan. Naiknya harga emas perhiasan ini seiring dampak *imported inflation* dari kenaikan harga emas global yang terus meningkat disebabkan oleh tensi geopolitik yang tinggi di berbagai wilayah di dunia a.l penerapan kebijakan tarif resiprokal AS kepada berbagai negara di dunia, konflik militer di beberapa negara seperti Israel-Iran, perang dingin Rusia-Ukraina, dsb. kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga disumbang oleh komoditas bahan bakar rumah tangga dengan andil sebesar 0,10%. Kenaikan ini

**Grafik 3.3 Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran**



Sumber: BPS, diolah

disebabkan naiknya Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk LPG tabung 3 kg per tanggal 15 Januari yang didasari oleh SK Gubernur Jawa Timur No. 100.3.3.1/801/KPTS/013/2024. Selanjutnya, kelompok transportasi didorong oleh oleh komoditas motor dengan andil 0,04% dan mobil dengan andil 0,03%. Di sisi lain, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mendukung tertahannya inflasi pada periode laporan. Deflasi pada kelompok ini utamanya disebabkan oleh penerapan diskon 50% untuk tarif pulsa dan paket internet pada momen HBKN Idulfitri dan Nyepi 2025 oleh berbagai macam operator seluler yang bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

### 3.2.2.1 Kelompok Pendorong Inflasi

#### Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

Pada triwulan II ini, kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat mengalami inflasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada periode laporan, inflasi pada kelompok ini mencatatkan inflasi sebesar 2,51% (yoy) dengan andil sebesar 0,70%. Pada triwulan yang lalu, inflasi pada kelompok ini tercatat inflasi sebesar 1,64% (yoy) dengan andil 0,46%. Kenaikan tekanan inflasi disumbang oleh seluruh subkelompok baik subkelompok makanan, minuman yang tidak beralkohol, serta rokok dan tembakau. Subkelompok Makanan tercatat meningkat dari 0,88% (yoy) menjadi 1,87% (yoy), subkelompok rokok dan tembakau meningkat dari 4,33% (yoy) menjadi 4,51% (yoy), serta subkelompok minuman tidak beralkohol meningkat dari 6,15% (yoy) menjadi 6,48% (yoy) pada triwulan laporan (Grafik 3.4).

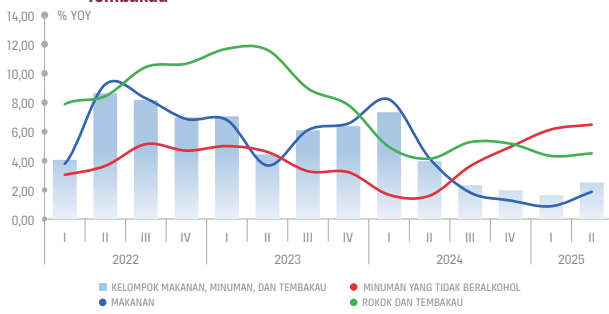
Pendorong inflasi tahunan terutama didorong inflasi komoditas pangan dan berbagai sigaret. Berikut adalah komoditas-komoditas yang menjadi penyumbang inflasi, beras (andil 0,21%); kopi bubuk (andil 0,11%); minyak goreng (andil 0,09%); sigaret kretek mesin (andil 0,08%); cabai rawit (andil 0,07%); kelapa (andil 0,06%); santan jadi (andil 0,06%); bawang merah (andil 0,03%); tomat (andil 0,03%); sigaret kretek tangan (andil 0,03%); dan sigaret putih mesin (andil 0,02%). Komoditas kopi bubuk seringkali menjadi penyumbang inflasi tahunan. Hal ini dikarenakan dari sisi produksi terjadi

penurunan secara global di negara produsen seperti Brasil dan Vietnam. Cuaca ekstrem seperti kekeringan dan suhu tinggi menyebabkan budidaya kopi tidak kondusif. Berdasarkan BAINCOFE Index, harga kopi arabika global meningkat dari R\$1.224/bag (60kg) menjadi R\$2.379/bag (60 kg) atau naik 91,28% (yoy).

Inflasi pada komoditas beras terutama disebabkan oleh beberapa faktor a.l (i) meningkatnya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras per tanggal 15 Januari 2025 sesuai Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Kepbadan) Nomor 2 Tahun 2025; (ii) berakhirnya periode panen di beberapa wilayah, seperti Kab. Bojonegoro, Lamongan, dan Mojokerto yang menyebabkan pasokan beras berkurang; (iii) peningkatan permintaan beras pada momen hajatan di bulan Dzulhijjah (Kalender Islam); maupun (iv) kendala pada kelancaran distribusi akibat periode libur panjang yang berdampak pada peningkatan biaya logistik. Berdasarkan pantauan harga SISKAPERBAPO, harga komoditas beras medium tercatat naik dari Rp11.929/kg menjadi Rp12.650/kg atau naik 6,04% (yoy) sejalan dengan kenaikan harga gabah yang terjadi selama triwulan II di tingkat penggilingan. Selanjutnya, komoditas pangan hortikultura seperti cabai rawit, bawang merah, dan tomat mengalami kenaikan harga disebabkan adanya musim kemarau basah yang menyebabkan budidaya komoditas-komoditas tersebut tidak optimal. Gangguan organisasi pengganggu tanaman (OPT) berupa bercak daun menjadi salah satu tantangan bagi pertanian cabai rawit di musim seperti ini. Dari pantauan harga SISKAPERBAPO, komoditas cabai rawit meningkat dari Rp29.322/Kg menjadi Rp43.463/Kg atau naik sebesar 48,23% (yoy). Selanjutnya, inflasi bawang merah juga tecermin dari kenaikan harga dari Rp36.171/kg menjadi Rp37.370/Kg atau naik sebesar 3,32% (yoy). Sementara itu, komoditas tomat tercatat naik dari Rp11.998/kg menjadi Rp16.327/Kg atau naik 36,08% (yoy). Kenaikan harga tomat didorong beberapa faktor spesifik yaitu terganggunya produksi tomat seiring serangan OPT berupa ulat buah, kutu kebul, dan lalat buah berkembang pesat karena kelembaban tinggi dan suhu hangat.

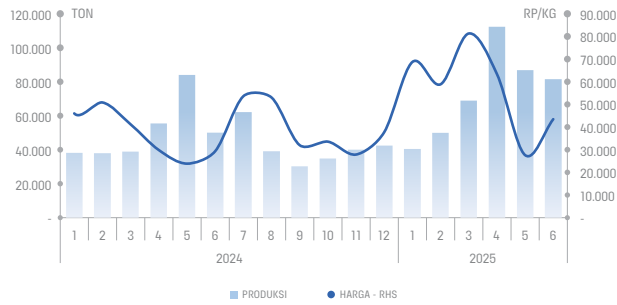
Inflasi tahunan komoditas minyak goreng terjadi seiring kenaikan harga minyak kelapa sawit dunia yang turut ditransmisi pada harga minyak goreng domestik. Berdasarkan PAL2MALY Index, harga *Crude Palm Oil* (CPO) global tercatat meningkat dari US\$853/metric menjadi US\$944/metric atau naik 10,67% (yoy). Adapun produk MinyakKita sebagai opsi minyak goreng terjangkau pasca pencabutan skema pemenuhan dalam negeri atau *Domestic Market Obligation* (DMO) turut mengalami peningkatan harga. Berdasarkan pantauan harga SISKAPERBAPO, komoditas minyak goreng tercatat meningkat dari Rp.16.614/ltr menjadi Rp18.066/ltr atau naik 8,74% (yoy). Di sisi lain, program B30 oleh pemerintah yang mewajibkan pencampuran 30% biodiesel berbasis minyak sawit dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil

Grafik 3.4 Perkembangan Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau



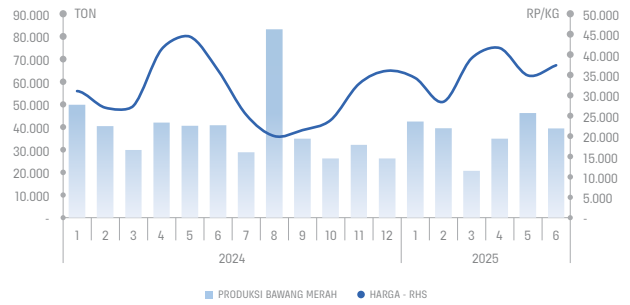
Sumber: BPS, diolah

**Grafik 3.5 Perkembangan Produksi dan Harga Cabai Rawit di Jawa Timur**



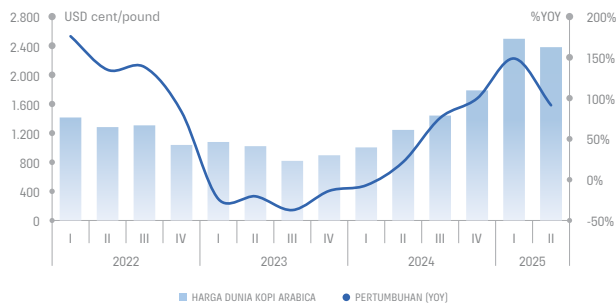
Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dan SISKAPERBAPO, diolah

**Grafik 3.6 Perkembangan Produksi dan Harga Bawang Merah di Jawa Timur**



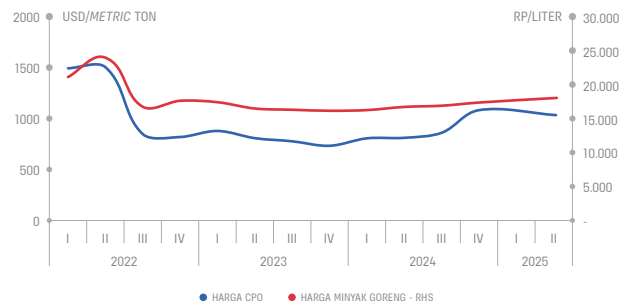
Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dan SISKAPERBAPO, diolah

**Grafik 3.7 Perkembangan Harga Kopi Arabica Dunia**



Sumber: BAINCOFE Index, diolah

**Grafik 3.8 Perkembangan Rerata Harga CPO dan Minyak Goreng**



Sumber: PAL2MALY Index dan SISKAPERBAPO, diolah

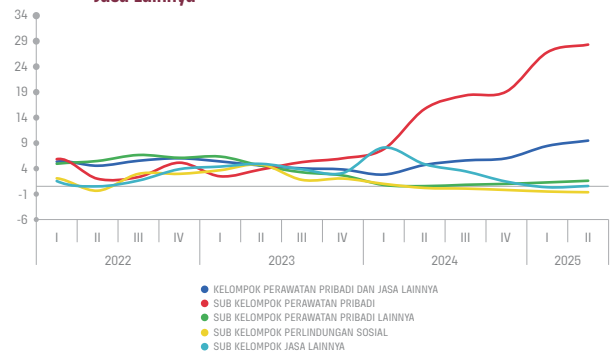
menyebabkan pasokan CPO sebagai bahan dasar produksi minyak goreng berkurang. Kenaikan harga kelapa dan santan yang cukup signifikan terjadi sebagai akibat dari peningkatan permintaan yang tinggi dari luar negeri yaitu Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sehingga menurunkan pasokan untuk pasar domestik. Adapun, kenaikan harga sigaret, baik sigaret kretek mesin, sigaret kretek tangan, dan sigaret putih mesin secara tahunan terjadi seiring implementasi PMK Nomor 96 dan 97 Tahun 2024, yakni pemerintah menetapkan HJE baru yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025.

## Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

**Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya kembali mengalami inflasi tahunan pada triwulan II 2025.** Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatatkan inflasi yang lebih tinggi dari triwulan sebelumnya, yaitu sebesar 9,96% (yoy) dengan andil 0,65%. Pada triwulan sebelumnya, inflasi pada kelompok ini terpantau sebesar 8,94% (yoy) dengan andil 0,57%. Peningkatan tekanan inflasi terjadi pada subkelompok Perawatan Pribadi yang meningkat dari 26,46% (yoy) menjadi 27,87% (yoy) pada triwulan laporan. Selanjutnya inflasi subkelompok Perawatan Pribadi Lainnya tercatat meningkat dari 1,95% (yoy) menjadi 2,28% (yoy) dan subkelompok Jasa Lainnya naik dari 0,86% (yoy) menjadi 1,10% (yoy) pada triwulan laporan. Terakhir, subkelompok Perlindungan Sosial tercatat mengalami inflasi sebesar 0,46% (yoy), melandai dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,57% (yoy) (Grafik 3.9).

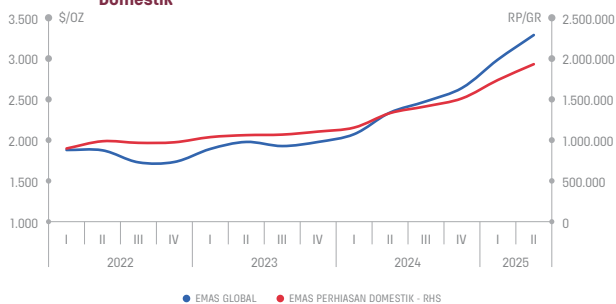
**Peningkatan inflasi pada subkelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya didorong oleh inflasi pada komoditas emas perhiasan.** Komoditas emas perhiasan tercatat memiliki andil 0,55% terhadap inflasi tahunan, lebih tinggi dibandingkan andil triwulan lalu sebesar 0,48%. Kenaikan harga emas sejalan dengan peningkatan harga emas global yang tertransmisi ke harga emas domestik, termasuk harga emas perhiasan. Kenaikan harga emas global dipengaruhi oleh sentimen risiko geopolitik yang meningkatkan ketidakpastian. Dalam kurun waktu setahun, harga emas mengalami tren kenaikan yang pesat disebabkan oleh kondisi ketidakpastian global yang tinggi seiring terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina,

**Grafik 3.9 Perkembangan Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya**



Sumber: BPS, diolah

**Grafik 3.10 Perkembangan Rerata Harga Emas Global dan Emas Perhiasan Domestik**



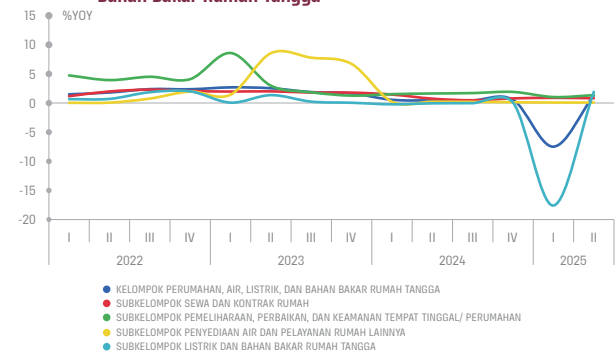
Sumber: GOLDS Comdty dan Kontan.id, diolah

penerapan tarif resiprokal AS, konflik Timur Tengah, serta beberapa tensi global lainnya. Peristiwa tersebut terus memicu meningkatnya harga emas global yang tertransmisi pada harga emas domestik, termasuk harga emas perhiasan. Perkembangan rerata harga emas global pada triwulan laporan tercatat meningkat 40,66% (yoy), lebih tinggi dari kenaikan di triwulan sebelumnya sebesar 38,14% (yoy). Pada triwulan laporan harga emas global meningkat dari US\$2.338/oz menjadi US\$3.288/oz atau naik sebesar 40,66% (yoy). Di sisi domestik, harga emas perhiasan tercatat meningkat dari Rp1.347.733/gr menjadi Rp1.921.403/gr atau naik 43,28% (yoy) pada triwulan laporan. Ke depan, risiko kenaikan emas global diprakirakan masih terus berlanjut seiring dengan masih tingginya ketidakpastian global (Grafik 3.10).

## Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

**Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga** tercatat mengalami peningkatan pada triwulan laporan. Pada triwulan II 2025, kelompok tersebut mencatatkan inflasi sebesar 1,31% (yoy) dengan andil 0,15%, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang justru mencatatkan deflasi cukup dalam sebesar -7,49% (yoy) dengan andil -0,84%. Peningkatan tekanan inflasi disebabkan oleh normalisasi harga pada subkelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga dengan

**Grafik 3.11 Perkembangan Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga**



Sumber: BPS, diolah

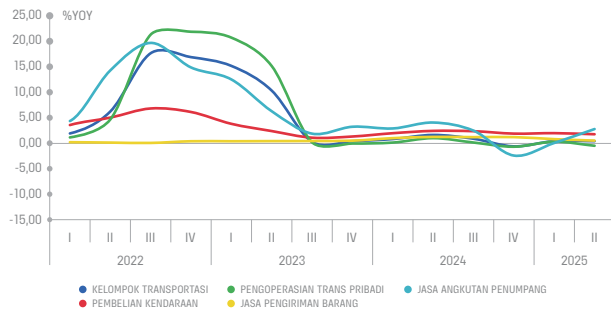
inflasi sebesar 1,92% (yoy), seiring berakhirnya kebijakan insentif berupa diskon tarif listrik dari Pemerintah yang mendorong deflasi sebesar -17,59% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 3.11).

**Komoditas tarif listrik pada triwulan sebelumnya memperoleh diskon harga sebesar 50% kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA yang berlaku selama bulan Januari dan Februari 2025 untuk pelanggan PLN.** Pada bulan April s.d Juni 2025, harga tarif listrik kembali dengan tarif normal dengan rincian sbb, (i) daya 900 VA tarif Rp1.352/Kwh, (ii) daya 1.300 VA tarif Rp 1.444,70/Kwh, (iii) daya 2.200 VA tarif Rp 1.444,70/Kwh. Selanjutnya, 3 subkelompok lainnya dalam kelompok ini mengalami inflasi tahunan dengan besaran sebagai berikut (i) subkelompok sewa dan kontrak sebesar 0,82% (yoy); (ii) subkelompok pemeliharaan, perbaikan, dan keamanan tempat tinggal/perumahan sebesar 1,35% (yoy); dan (iii) subkelompok penyediaan air dan pelayanan rumah lainnya sebesar 0,09% (yoy). Kenaikan inflasi subkelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga disumbang oleh komoditas bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,10%. Sementara itu, subkelompok pemeliharaan, perbaikan, dan keamanan tempat tinggal/perumahan didorong oleh komoditas kontrak rumah dan tukang bukan mandor dengan andil masing-masing 0,02%. Berlanjutnya kenaikan komoditas BBRT merupakan lanjutan dari kebijakan kenaikan harga LPG tabung 3kg dari Rp16.000 menjadi Rp18.000 sejak tanggal 15 Januari 2025 di Jawa Timur sesuai dengan Surat Keputusan Penjabat Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/801/KPTS/013/2024. Sementara inflasi tahunan pada komoditas kontrak rumah dan sewa rumah merupakan pola yang rutin terjadi baik di awal tahun ataupun pertengahan tahun.

## Kelompok Transportasi

**Kelompok transportasi terpantau mengalami inflasi pada triwulan laporan sebesar 0,47% (yoy) dengan andil 0,06%, capaian ini relatif sama dengan triwulan sebelumnya yang tercatat inflasi 0,48% (yoy) dengan andil 0,06%.** Pendorong utama inflasi tahunan pada kelompok ini adalah subkelompok pembelian kendaraan dengan komoditas sepeda motor dengan andil 0,04% dan mobil dengan andil 0,03%. Kenaikan harga kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 pada tahun 2025 ditengarai sebagai bentuk respon produsen seiring peningkatan biaya produksi, khususnya bahan baku impor di tengah nilai tukar USD yang menguat terhadap IDR secara tahunan. Meningkatnya harga kendaraan menyebabkan pembelian kendaraan bermotor baru baik roda 2 dan roda 4 mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, penahan inflasi bersumber dari deflasi pada subkelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi yang bersumber dari komoditas bensin dengan andil -0,05%. Penurunan harga BBM ini juga mengikuti tren penurunan harga minyak dunia yang tecermin dari

**Grafik 3.12 Perkembangan Inflasi Kelompok Transportasi**

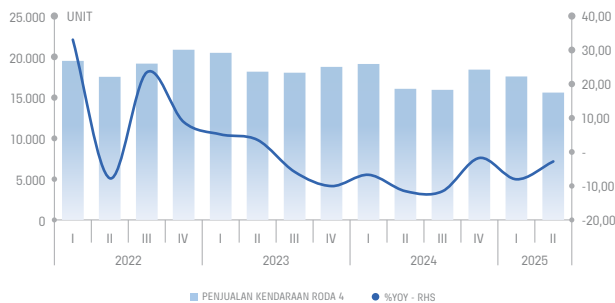


Sumber: BPS, diolah

USCRWTIC Comdty. Harga minyak WTI pada USCRWTIC Comdty tercatat mengalami penurunan dari -21,05% (yoy) dari US\$ 80,83/barel menjadi US\$63,81/barel. Penyesuaian penurunan harga BBM non-subsidi terjadi setiap bulannya selama periode triwulan laporan. Penurunan harga bahan bakar minyak non-subsidi per 1 Juni 2025 oleh PT. Pertamina tercatat sebagai berikut, 1) Pertamax RON 92 turun dari Rp12.400/ltr menjadi Rp12.100/ltr, 2) Pertamax Turbo RON 98 turun dari Rp13.300/ltr menjadi Rp13.050/ltr, 3) Pertamax Green turun dari Rp13.150/ltr menjadi Rp12.800/ltr, dan 4) Pertamina Dex turun dari Rp13.750/ltr menjadi Rp13.200/ltr.

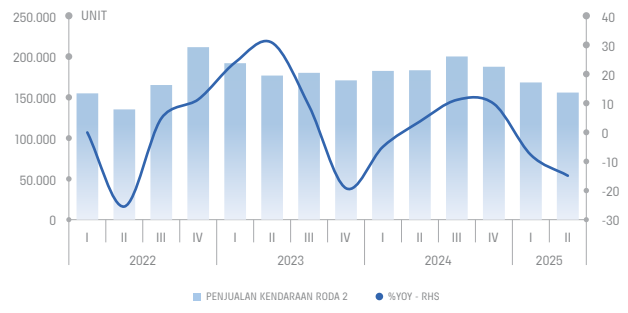
**Inflasi pada kelompok transportasi subkelompok Jasa Angkutan Penumpang terutama disumbang oleh komoditas angkutan udara** yang tercatat inflasi 0,65%. Catatan inflasi ini lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang justru tercatat deflasi -2,43% (yoy). Inflasi pada subkelompok ini seiring dengan normalisasi penerapan harga tiket pesawat penerbangan domestik setelah penerapan diskon tarif pada periode HBKN Idul Fitri 2025, pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pengurangan tarif kebandarudaraan pada triwulan sebelumnya. Selain itu, banyaknya *long weekend* a.l. HBKN paskah, waisak, Iduladha 1446 H pada triwulan laporan turut meningkatkan mobilitas masyarakat sehingga meningkatkan permintaan terhadap komoditas angkutan. Tingginya keinginan masyarakat untuk berpergian ini tecermin dari

**Grafik 3.13 Perkembangan pembelian kendaraan bermotor roda 4 (kumulatif)**



Sumber: Bapenda, diolah

**Grafik 3.14 Perkembangan pembelian kendaraan bermotor roda 2 (kumulatif)**



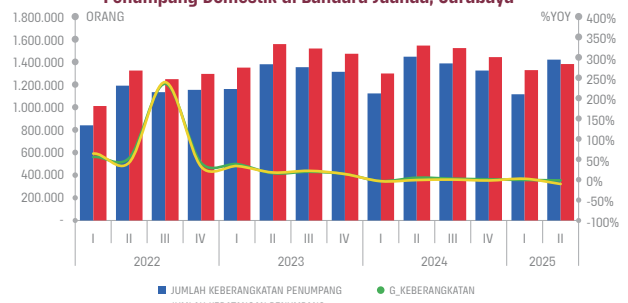
Sumber: Bapenda, diolah

jumlah perkembangan keberangkatan dan kedatangan penumpang domestik di Bandara Juanda. Berdasarkan data BPS, tercatat terjadi tren kenaikan jumlah penumpang domestik pada triwulan II ini.

### 3.2.2.2 Kelompok Penahan Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

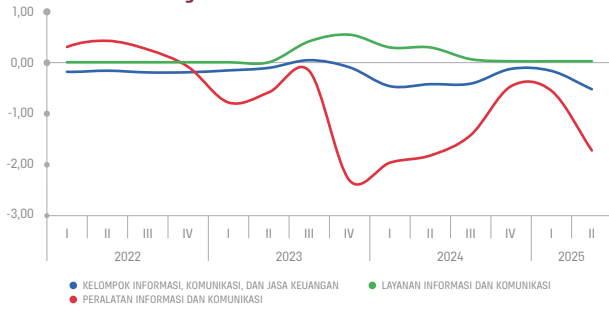
**Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan kembali mengalami deflasi pada triwulan II 2025. Deflasi pada periode laporan tercatat lebih dalam dari triwulan sebelumnya.** Pada triwulan laporan, kelompok ini tercatat mengalami deflasi sebesar -0,52% (yoy) dengan andil -0,04% lebih rendah daripada periode sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar -0,16% (yoy) dengan andil -0,01%. Tekanan deflasi yang lebih dalam pada triwulan II 2025 didorong oleh subkelompok peralatan informasi dan komunikasi khususnya pada komponen telpon seluler dengan andil deflasi -0,01%. Kebijakan pemerintah pusat melalui koordinasi dan sinergi Komdigi bersama operator seluler memberikan diskon tarif pulsa dan internet bagi masyarakat. Komoditas lainnya yang menyumbang deflasi adalah laptop/notebook dengan andil 0,01%. Adanya diskon tengah tahun (*mid year sale*) menjadi pendorong deflasi pada komoditas laptop/notebook.

**Grafik 3.15 Perkembangan Jumlah Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang Domestik di Bandara Juanda, Surabaya**



Sumber: BPS, diolah

**Grafik 3.16 Perkembangan Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan**



Sumber: BPS, diolah

**Grafik 3.17 Capaian Inflasi 11 Kab/Kota IHK di Jawa Timur (%yoy)**



Sumber: BPS, diolah

### 3.3. Analisis Inflasi Spasial Jawa Timur

Pada triwulan II 2025, seluruh wilayah pantauan IHK Jawa Timur sebanyak 11 kab/kota tercatat mengalami inflasi tahunan dengan catatan inflasi tertinggi di Kab. Tulungagung 2,76% (yoy) dan terendah Kab. Gresik dengan inflasi 1,44% (yoy) (Grafik 3.17).

Kab. Tulungagung tercatat sebagai kabupaten dengan inflasi tertinggi pada triwulan II dengan kelompok penyumbang tertinggi bersumber dari kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan inflasi sebesar 3,63% dengan andil 1,29%. Komoditas yang dominan menyumbang inflasi a.l Beras (andil 0,33%), Kelapa (andil 0,29%), Kopi Bubuk (andil 0,23%), Santan Jadi (andil 0,19%), Sigaret Kretek Mesin (SKM) (andil 0,13%), Minyak Goreng (andil 0,10%), dan Kangkung (andil 0,06%). Berdasarkan data SISKAPERBAPO, beras medium di Kab. Tulungagung meningkat dari Rp11.438/Kg menjadi Rp12.250/Kg atau tumbuh 7,10% (yoy). Faktor yang mendorong kenaikan harga beras antara lain karena tersendatnya distribusi beras dan masih tertahannya beras di gudang. Rantai pasok yang kurang efektif ini mendorong harga beras pada periode laporan.

Kab. Banyuwangi tercatat sebagai kabupaten dengan inflasi tertinggi kedua di triwulan ini. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi pendorong inflasi di triwulan laporan dengan besaran inflasi 17,63% (yoy) dengan andil 1,42%. Catatan tersebut lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat inflasi 15,13% (yoy) dan andil 1,18%. Kenaikan pada kelompok ini utamanya disebabkan oleh komoditas emas perhiasan yang memiliki andil terhadap inflasi Kab. Banyuwangi sebesar 1,25%. Kenaikan tersebut sejalan dengan peningkatan harga emas global yang tertransmisi ke harga komoditas emas perhiasan domestik termasuk di Kab. Banyuwangi.

Kabupaten Gresik tercatat menjadi wilayah pantauan IHK dengan inflasi terendah sebesar 1,44% (yoy). Kelompok penyumbang inflasi bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas yang signifikan memberikan andil inflasi tahunan pada Juni 2025 a.l beras (andil 0,18%), cabai rawit (andil 0,10%), bawang merah (andil 0,09%), minyak goreng (andil 0,08%), dan santan jadi (andil 0,08%). Sementara itu

**Tabel 3.3 Inflasi Spasial per Kelompok Barang dan Jasa pada Triwulan II 2025 (%yoy)**

KELOMPOK BARANG	Jawa Timur	Surabaya	Malang	Kediri	Jember	Sumenep	Probolinggo	Madiun	Banyuwangi	Kab. Bojonegoro	Kab. Gresik	Kab. Tulungagung
<b>UMUM</b>	2,02	1,94	2,11	1,88	1,70	2,52	2,21	1,90	1,74	2,23	1,44	2,76
Makanan, Minuman Dan Tembakau	2,51	2,81	2,33	2,44	2,03	2,22	252,00	3,05	[0,82]	3,18	1,41	3,63
Pakaian Dan Alas Kaki	1,00	0,80	2,42	1,06	1,12	0,84	0,75	2,15	[0,52]	1,42	1,89	1,64
Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar RT	1,31	1,06	1,83	1,55	1,17	2,55	1,03	1,25	2,07	1,06	0,78	2,66
Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin RT	0,49	0,10	1,36	0,64	0,52	0,32	-0,74	0,02	1,45	0,79	[0,58]	2,03
Kesehatan	2,23	2,18	1,67	0,39	0,92	0,24	0,16	4,35	2,36	1,42	7,97	0,57
Transportasi	0,47	0,54	0,15	0,38	0,51	0,56	0,66	0,76	0,65	0,68	0,25	0,43
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	[0,52]	[0,45]	0,13	0,07	[2,52]	[0,28]	-0,35	0,31	[0,54]	0,01	[0,39]	[0,09]
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	1,35	1,07	1,61	-	1,99	1,46	1,14	[0,38]	0,99	0,74	0,99	4,24
Pendidikan	1,47	1,32	1,21	1,91	0,49	1,70	2,71	0,71	2,91	1,58	2,48	0,87
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,94	2,29	1,62	1,22	1,85	1,60	1,77	1,67	1,27	2,60	1,46	0,94
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	9,96	9,83	10,47	8,79	9,15	12,42	10,77	5,10	17,41	6,29	3,62	9,95

Sumber: BPS (diolah)

■ Lebih Tinggi dari Inflasi Jawa Timur ■ Lebih Rendah dari Inflasi Jawa Timur

komoditas penahan inflasi a.l: ikan mujair (andil -0,26%), daging ayam ras (andil -0,15%), udang basah (andil -0,07%), dan telur ayam ras (andil 0,05%). Berdasarkan pantau harga di laman SISKAPERBAPO, tercatat komoditas beras medium mengalami kenaikan harga dari Rp11.910/kg menjadi Rp12.350/kg atau naik 3,69% (yoy). Selanjutnya, komoditas cabai rawit tercatat mengalami kenaikan harga dari Rp33.800/kg menjadi Rp48.000/kg atau naik 48,02% (yoy). Faktor musim kemarau basah menjadikan budidaya komoditas cabai rawit menjadi kurang optimal sehingga kuantitas maupun kualitasnya menurun. Selain itu, meningkatnya harga cabai rawit juga disebabkan oleh jumlah pasokan yang berkurang karena rusaknya komoditas dalam proses pengiriman di tengah cuaca yang cenderung bersifat basah. Pada periode laporan, komoditas santan turut menjadi penyumbang inflasi seiring banyaknya kelapa yang dikirim ke luar negeri sehingga bahan baku pembuatan santan di pasar domestik menjadi menurun dan mendorong harga naik.

### 3.4. Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah

Inflasi Jawa Timur yang terjaga dalam rentang sasaran inflasi nasional  $2,5 \pm 1\%$  tidak lepas dari dukungan berbagai sinergi program pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jawa Timur, mengacu pada kerangka pengendalian inflasi Jawa Timur 2025 yang sejalan dengan pedoman 4K Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Selama triwulan II 2025, implementasi program-program oleh TPID se-Jawa Timur meliputi:

#### K1 – Keterjangkauan Harga

1. Optimalisasi Etalase Pengendalian Inflasi di Kabupaten/Kota (EPIK) di Jawa Timur berupa warung/toko sebagai upaya penyediaan Operasi Pasar yang berkelanjutan. EPIK telah beroperasi di 24 Kabupaten/Kota yang menjual bahan pokok strategis dengan harga HET atau lebih murah dari pasar.
2. Pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM)/Operasi Pasar Murah (OPM) yang diinisiasi oleh Kabupaten/Kota, diantaranya di Kab. Malang (setiap hari Jumat) yang berfokus pada komoditas beras medium dan Minyakita, di Kab. Sampang (tanggal 4 Juni 2025) kerja sama dengan Pemprov Jatim untuk komoditas beras, minyak gula, aneka bawang dan aneka cabai, serta di Kab. Jember (tanggal 23-24 Juni 2025) kerjasama dengan Disperindag Prov Jatim untuk komoditas aneka bawang. Selain pelaksanaan GPM/OPM, TPID se-Jawa Timur juga rutin melaksanakan sidak pasar untuk mendukung implementasi kebijakan harga yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Realisasi penyaluran SPHP beras oleh BULOG s.d 26 Juni 2025 sebesar 16,05 ribu ton atau 50,51% dari target tahun 2025 sebesar 31,78 ribu ton. Capaian ini tidak berubah

dibandingkan posisi tanggal 31 Maret 2025 seiring belum adanya kegiatan pasar murah pasca HBKN Idul Fitri dan Perum Bulog yang masih menunggu arahan Bapanas terkait penyaluran SPHP.

#### K2 – Ketersediaan Pasokan

1. Per tanggal 26 Juni 2025, stok beras BULOG dalam gudang sebesar 881,16 ribu ton, dan gabah sebesar 100,68 ribu ton, atau secara total simpanan setara beras mencapai 981,84 ribu ton. Capaian ini meningkat 11,29% dibandingkan posisi akhir Mei 2025 sejalan dengan masih berlangsungnya panen di sejumlah sentra produksi di Jawa Timur.
2. Per tanggal 26 Juni 2025, pengadaan CBP BULOG mencapai 603,20 ribu ton atau 103,01% dari target tahun 2025 sebesar 585,58 ribu ton. Capaian ini meningkat 21,30% dibandingkan posisi akhir Mei 2025, didorong oleh kenaikan HPP yang berdampak pada peningkatan *appetite* petani untuk menjual beras ke BULOG di tengah masih berlangsungnya masa panen raya. Sehubungan dengan capaian pengadaan CBP yang telah melebihi target, telah dilakukan penyesuaian target menjadi 609,68 ribu ton atau meningkat 4,12% dari target sebelumnya.
3. Penambahan kapasitas gudang BULOG Jatim melalui kegiatan sewa gudang mengingat telah penuhnya sejumlah gudang akibat lonjakan penyerapan gabah-beras selama musim panen. Perum Bulog Kanwil Jatim telah menyewa gudang dengan kapasitas tambahan sebanyak 150.919 ton.
4. BULOG Jatim bekerjasama dengan PT Pupuk Indonesia untuk menawarkan pupuk dengan harga terjangkau saat transaksi penjualan gabah ke BULOG. Inisiasi ini diharapkan dapat menekan ongkos produksi di masa tanam selanjutnya.
5. Optimalisasi PT JGU sebagai *off taker* pangan strategis (beras) bagi: (i) korporasi petani Jombang (KMP Santri), yang didistribusikan untuk keperluan beras ASN; serta (ii) korporasi petani Madiun untuk mendukung operasional EPIK di berbagai Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
6. Pemberian bantuan sarana prasana untuk ketahanan pangan melalui pemanfaatan anggaran PI KEKDA selama tahun 2025, yakni:
  - a. *Combine harvester* besar ke Poktan Sumber Makmur 1 di Kab. Lamongan. Adapun untuk menunjang efektivitas pemberian bantuan, telah dilakukan *training* penggunaan.
  - b. *Smart irrigation and climate monitoring controller* ke Poktan Sumber Makmur 1 di Kab. Lamongan untuk menunjang efektivitas pertanian melalui implementasi *digital farming*.

7. Pengembangan beras biofortifikasi Sunwangi Banyuwangi yang lebih kaya kandungan gizi dan efisien terhadap kebutuhan air, yang telah panen perdana pada tanggal 25 Juni 2025. Selanjutnya beras ini akan menjadi pengganti beras program MBG dan diharapkan dapat mengurangi angka *stunting* ke depan.
8. *Training of Trainers* (ToT) KKN Sigap UNISKA yg bersinergi dengan BRMP Provinsi Jatim untuk memberikan pelatihan pengolahan hilirisasi bahan pangan pada tanggal 17 Juni 2025.
9. Penyelenggaraan Karya Kreatif Mataraman oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri pada tanggal 20-22 Juni 2025 yang bersinergi dengan 13 Pemda di wilayah kerja yang turut menyajikan produk pangan dan hilirisasi pangan unggulan daerah.
10. Bimbingan teknis pembuatan kompos dari kotoran sapi oleh Pemkab Banyuwangi bekerja sama dengan perusahaan peternakan.

### K3 – Kelancaran Distribusi

1. KAD antara PT Jatim Graha Utama sebagai distributor dengan 8 Kab/Kota (13 toko EPIK) dalam rangka distribusi komoditas pangan strategis.
2. Optimalisasi dukungan fasilitas distribusi pangan berupa kendaraan oleh KPwBI Prov Jawa Timur dalam pendistribusian beras JATIM CETTAR ke sejumlah toko EPIK di Surabaya.
3. Pembentukan KAD antara Kota Probolinggo dgn Kabupaten Blitar untuk komoditas telur dan jagung.

### K4 – Komunikasi Efektif

1. Penguatan SISKAPERBAPO sebagai *platform monitoring* harga komoditas strategis se-Jawa Timur secara harian dan optimalisasi *website/aplikasi monitoring* harga eksisting yang sudah dimiliki oleh 16 Kab/Kota.
2. Transparansi informasi harga bahan pokok, baik melalui layar monitor di Kota Surabaya (Pasar Wonokromo, Tambahrejo, Genteng Baru, Pucang Anom dan Pabean) maupun fitur *scan barcode* di Kota Madiun (Pasar Besar Madiun dan Pasar Sleko).
3. Rapat Fasilitasi Pembiayaan antara Bank Jatim Cabang Madiun dan Koperasi Multi Pihak (KMP) Madiun pada Rabu, tanggal 4 Juni 2025 sebagai upaya fasilitasi untuk mendukung perluasan implementasi korporasi petani dan penguatan akses pembiayaan petani di Madiun.
4. Rapat Koordinasi dan *Capacity Building* TPID Provinsi Jawa Timur bersama TPID Kab/Kota se-Bakorwil Jember pada tanggal 16 Mei 2025 dan se-Bakorwil I Madiun pada tanggal 5 Juni 2025, dengan hasil diskusi mencakup (i) korporasi petani sebagai *game changer*; (ii) optimalisasi infrastruktur melalui kelembagaan yang baik; (iii) pentingnya sistem pemantauan terintegrasi;

(iv) pengaturan *contract farming* agar tidak mengganggu kesediaan lokal; (v) pentingnya dokumentasi kegiatan sebagai dasar evaluasi program; (vi) penyusunan *roadmap* kiranya sejalan dengan Asta Cita dan RPJMD.

5. Rapat Koordinasi dan *Capacity Building* TPID Provinsi Jawa Timur bersama TPID Kab/Kota se Bakorwil II Bojonegoro pada tanggal 17 Juni 2025, dengan hasil diskusi mencakup (i) perluasan cakupan beras JATIM CETTAR; (2) peningkatan kualitas data SISKAPERBAPO dan potensi penambahan fitur *monitoring stok*; serta (3) pentingnya koordinasi antar kab/kota dalam implementasi program, khususnya KAD.
6. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Mingguan Jawa Timur yang dihadiri oleh TPID Provinsi dan seluruh 38 Kabupaten/Kota.

## 3.5. Tracking Inflasi Triwulan III 2025

**Inflasi Jawa Timur triwulan III 2025 (realisasi hingga bulan Juli 2025) tercatat berada rentang sasaran target inflasi nasional  $2,5\% \pm 1,0\%$  (yoy) dan diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.** Meningkatnya tekanan inflasi didorong kelompok makanan, minuman, dan tembakau diperkirakan terjadi seiring produksi bahan pangan yang menurun seperti pada komoditas beras seiring berakhirnya periode panen raya serta komoditas bawang merah akibat pengaruh musim kemarau basah yang terjadi hingga Juli. Selanjutnya, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (BBRT) sejalan dengan peningkatan harga gas LPG di level konsumen serta penyesuaian harga bensin oleh PT Pertamina dengan menaikkan harga jualnya per 1 Juli untuk BBM non-subsidi seperti Pertamina Ron 92, Pertamina Turbo Ron 98, Pertamina *Green*, dan Dexlite merespons kenaikan harga energi dunia. Selain itu, tekanan dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya seiring potensi meningkatnya harga emas perhiasan akibat dari tensi geopolitik dunia yang masih tinggi khususnya di Timur Tengah. Kemudian, tekanan inflasi turut diperkirakan bersumber dari kelompok transportasi seiring kenaikan tol Waru – Bandara Juanda per tanggal 15 Juli 2025 berdasarkan SK Menteri PUPR No. 642/KPTS/M/2025.

**Dengan perkembangan tersebut dan beberapa indikator terkini, inflasi tahunan Jawa Timur pada triwulan III 2025 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2025 namun tetap terkendali.** Potensi meningkatnya tekanan inflasi pada triwulan III 2025 sejalan dengan (i) prakiraan dampak transmisi kenaikan harga komoditas global non-energi (khususnya emas), di tengah masih tingginya ketegangan geopolitik; (ii) peningkatan mobilitas dan permintaan pada momen libur sekolah yang terjadi pada Juni – Agustus 2025 berpotensi mendorong inflasi pada triwulan III 2025; (iii) Normalisasi tarif komoditas angkutan (kereta, pesawat, dan kapal) pasca penerapan kebijakan stimulus ekonomi pada bulan Juni - Juli 2025; serta (iv) kenaikan tarif PDAM di Kab. Sumenep

berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 690/371/435.404/2025. Namun demikian, peningkatan inflasi lebih lanjut diperkirakan tertahan seiring perbaikan pasokan pasca periode panen cabai rawit dan tomat. Upaya pengendalian inflasi di Jawa Timur akan terus diperkuat didukung oleh sinergi program pengendalian inflasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) seluruh Jawa Timur dan koordinasi erat dengan tim pengendalian inflasi pusat (TPIP) termasuk implementasi program Gerakan Nasional Inflasi Pangan (GNPIP).

**BOKS 4**

## EJAVEC : Mendorong Perekonomian Jawa Timur Melalui Kajian yang Terstruktur

Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi Jawa Timur, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan tahunan the 12<sup>th</sup> East Java Economic (EJAVEC) Forum dengan tema “Meningkatkan Produktivitas, Inovasi, dan Kapasitas Ekonomi Jawa Timur di Tengah Berbagai Tantangan Global”.

menyemarakkan dan menggemakan kegiatan kompetisi CFP, dilaksanakan beberapa seminar ekonomi bertajuk “Road to EJAVEC 2025”. Rangkaian kegiatan seminar diselenggarakan di beberapa kota a.l. Surabaya, Malang, dan Jember. Minat dan antusiasme dari kalangan mahasiswa, akademisi, peneliti, praktisi hingga masyarakat umum yang tinggi tecermin dari perolehan *paper* masuk sebanyak 376 *full paper* atau naik 230% dibandingkan dengan capaian tahun lalu.

Gambar 1. Flyer Kegiatan EJAVEC 2025



Gambar 2. Kegiatan Road to EJAVEC yang dilaksanakan di FEB UNAIR, FEB UB, dan FEB UNEJ



EJAVEC Forum berupaya mendukung pengembangan ekonomi Jawa Timur melalui kajian terstruktur. Guna mencapai tujuan tersebut, salah satu rangkaian kegiatan EJAVEC Forum adalah kompetisi *call for paper* (CFP) dengan sub-topik sebagai berikut: (i) Industri Padat Modal; (ii) Industri Padat Karya, termasuk Pertanian dan UMKM; (iii) Kualitas Tenaga Kerja yang Berdaya Saing; (iv) Perdagangan Domestik dan/atau Internasional; (v) Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga; (vi) Pariwisata; dan/atau (vii) Isu Logistik. Untuk

Proses seleksi paper dilakukan oleh para ekonom yang terdiri dari 6 guru besar dan 9 doktor dari beberapa universitas ternama di Jawa dan Bank Indonesia. Dari hasil pejurian didapatkan 8 finalis dari kategori mahasiswa dan 8 finalis dari kategori umum. Proses penjurian akhir dilakukan di hadapan dewan juri dan *observer* dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Timur.

## BOKS 4

Gambar 3. Foto bersama dewan juri EJAVEC 2025



Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan EJAVEC Conference yang juga merupakan puncak acara dengan sesi diskusi ekonomi dan pengumuman pemenang kompetisi CFP. Kegiatan EJAVEC Conference dibuka oleh Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Dalam pembukaan acara, disampaikan mengenai potensi Jawa Timur untuk menjadi orkestrator nilai tambah Indonesia. Rencana ini memerlukan dukungan dari kajian yang kuat untuk menentukan kebijakan pendukung yang tepat. Selanjutnya, pada kesempatan conference tersebut disampaikan *proceeding paper* dari Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur kepada Wakil Gubernur. Hal ini merupakan komitmen Bank Indonesia untuk senantiasa membangun sinergi bersama mitra kerja dalam penguatan kebijakan yang berbasis penelitian atau *research based policy*, khususnya melalui pelaksanaan EJAVEC yang telah berjalan selama 12 tahun terakhir.

Gambar 4. Penyerahan *Proceeding Paper* dari Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur kepada Wakil Gubernur Jawa Timur

EJAVEC Conference diisi diskusi ekonomi dengan menghadirkan tiga narasumber yaitu Yose Rizal Damuri (CSIS), Prof. Ari Kuncoro (UI), dan Prof. Rudi Purwono (Unair). Diskusi tersebut menggarisbawahi mengenai strategi memperkuat ketahanan ekonomi Jawa Timur melalui produktivitas, inovasi, inklusivitas, keberlanjutan, dan resiliensi.

Gambar 5. Foto bersama narasumber (Bp. Yose Rizal Damuri, Prof. Ari Kuncoro, dan Prof. Rudi Purwono) dan moderator (Prof. Soni Harsono)



Pada akhir kegiatan, diumumkan pemenang *Call for Papers* sebagai berikut:

**Kategori Mahasiswa:**

- Juara I (*Membentang Jalan, Menopang Harapan: Analisis Dampak Jalan Tol Trans Jawa Dalam Meningkatkan Perekonomian Jawa Timur*) dari Universitas Indonesia;
- Juara II (*Menjahit Konektivitas Sektorial Untuk Pariwisata Jawa Timur: Simulasi Dampak Ekonomi Transportasi, Akamamin, Dan Perdagangan Melalui Model Ras Input-Output 2024*), dari Universitas Indonesia;
- Juara III (*Efektivitas Kebijakan Local Currency Transaction (LCT) Dalam Meningkatkan Kinerja Ekspor Perhiasan Jawa Timur: Difference-In-Differences Dan Analisis Tematik*) dari PKN STAN;

**Kategori Umum**

- Juara I (*Penguatan Hilirisasi Agro Jawa Timur: Integrasi Pertanian Dan Industri Agro Dalam Rantai Nilai Lokal Melalui Pendekatan Spasial Dan Identifikasi Wilayah Potensial*) dari Badan Pusat Statistik;

#### BOKS 4

- Juara II (*Analisis Indeks Kualitas Pekerja Pra Lansia Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Jawa Timur (Pendekatan Night Time Light): Refleksi Potensi Silver Economy*) dari Badan Pusat Statistik;
- Juara III (*Digital Darwinism In The Tourism World: Who Adapts, Who Falls Behind? A Case Study Of East Java Province*) dari PT. Sagamartha Ultima.

Sebagai wujud kontribusi terhadap dunia akademis Jawa Timur, Jurnal EJAVEC turut dihadirkan secara rutin dengan *reviewer* dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia.

Pada tahun ini, jurnal EJAVEC 2025 telah tersertifikasi ISSN dan memperoleh akreditasi SINTA 3 (*Science and Technology Index*) oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Kategori jurnal SINTA 3 artinya jurnal EJAVEC memiliki kualitas baik dan terindeks nasional serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan pemikiran ekonomi secara nasional.

Gambar 6 Foto bersama Pemenang CFP



**BOKS 5**

## Penguatan Hilirisasi Agro Jawa Timur: Integrasi Pertanian dan Industri Agro dalam Rantai Nilai Lokal melalui Pendekatan Spasial dan Identifikasi Wilayah Potensial

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya memperkuat peran industri manufaktur sebagai sumber ketahanan ekonomi sekaligus akselerator pertumbuhan. Komitmen ini tercermin dalam Perda Jawa Timur No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) 2019–2039, yang menekankan strategi percepatan pertumbuhan industri manufaktur berbasis potensi sumber daya lokal. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi melalui penguatan industrialisasi lokal telah memiliki landasan yang kuat, sekaligus menjadi orientasi utama dalam pembangunan ekonomi Jawa Timur ke depan.

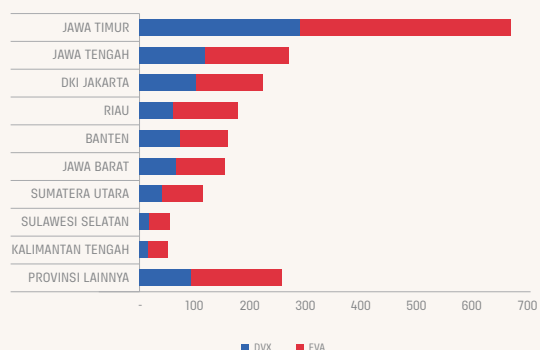
Kontributor utama dalam sektor industri manufaktur Jawa Timur adalah subsektor industri agro. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, industri agro menyumbang sekitar 86,46% keseluruhan nilai tambah yang dihasilkan sektor manufaktur Jawa Timur pada tahun 2024. Ekspansi industri agro di Jawa Timur turut didukung oleh sisi *demand* dan *supply*, sejalan dengan ketersediaan pasokan bahan baku berupa hasil pertanian yang cukup. Dengan adanya hilirisasi pada subsektor industri agro, nilai tambah akan lebih besar yang dapat dinikmati baik oleh petani maupun pelaku UMKM. Hilirisasi pada subsektor industri agro diperkirakan semakin terakselerasi, mengingat hal tersebut termasuk ke dalam prioritas nasional sebagaimana RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, dan Astacita.

Pemenang pertama Jurnal EJAVEC 2025 karya Kurniawan & Satrio (2025) menunjukkan bahwa Jawa Timur memegang peran sentral bagi industri agro nasional. Jawa Timur memiliki partisipasi *local value chain* terbesar di Indonesia, baik dari sisi *forward* maupun *backward* (Gambar 1). Tingginya nilai DVX (*Domestic Value Added*) dari industri agro Jawa Timur mengindikasikan besarnya nilai tambah industri agro Jawa Timur yang terkandung dalam ekspor provinsi mitra. Sementara itu, nilai yang tinggi pada FVA (*Foreign Value Added*) menunjukkan besarnya nilai tambah dari provinsi lainnya dalam ekspor industri agro Jawa Timur.

Peran sektor pertanian yang vital bagi industri agro menjadikan keterkaitan kedua sektor ini menjadi sangat erat dalam proses produksi industri agro. Berdasarkan uji simultanitas Hausman, ditemukan bahwa sektor pertanian dan industri agro saling terintegrasi antar daerah. Hal ini turut menunjukkan urgensi percepatan hilirisasi sektor pertanian sebagai salah satu agenda strategis pembangunan industri Jawa Timur dan nasional.

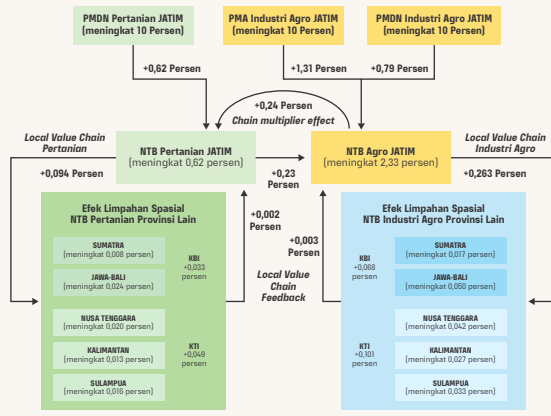
Sektor pertanian menjadi fondasi hilirisasi agro. Di Jawa Timur, basis produksi sektor pertanian sebagai hulu sudah kuat, sehingga mampu menopang kebutuhan sektor industri agro yang berada di hilir. Dengan dukungan infrastruktur jalan dan pelabuhan yang memadai, industri agro di Jawa Timur mampu melakukan transfer input antara dengan minim hambatan logistik baik dengan provinsi mitra yang berada di regional Kawasan Barat Indonesia (KBI) maupun Kawasan Timur Indonesia (KTI), untuk memperoleh bahan baku yang belum tersedia di Jawa Timur. Lebih lanjut, ketersediaan tenaga kerja pada sektor pertanian juga menjadi penting sebagai penentu utama kestabilan pasokan industri agro. Aliran investasi domestik ke sektor pertanian Jawa Timur juga berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja sektor pertanian dan rantai nilai lokal. Dengan demikian, dukungan pembiayaan lokal di sektor pertanian cukup krusial berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

**Grafik 1. FVA dan DVX Industri Agro Jawa Timur dan Nasional (Kurniawan & Satrio, 2025)**



**BOKS 5**

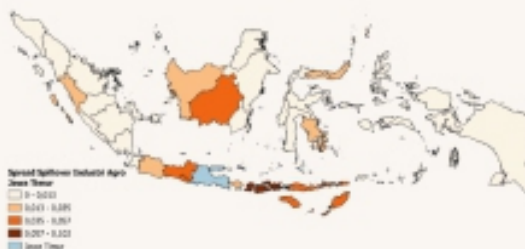
**Gambar 1. Simulasi Dampak Peningkatan Investasi Jawa Timur terhadap Nilai Tambah Industri Agro Nasional, KBI, dan KTI (Kurniawan & Satrio, 2025)**



**Integrasi antara industri agro dan sektor pertanian menjadi salah satu kunci utama dalam upaya hilirisasi industri nasional.** Dalam konteks hilirisasi industri agro, pertanian menjadi fondasi utama dalam penyediaan bahan baku input serta menentukan daya saing industri hilir. Keterkaitan ini membentuk rantai nilai produksi yang saling bergantung. Lebih lanjut, kemajuan pada sektor pertanian dapat memperluas kapasitas produksi industri agro melalui peningkatan ketersediaan bahan baku input serta produktivitas sektor hilir.

**Sektor pertanian dan industri agro yang meningkat di Jawa Timur akan memberikan dampak terhadap peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan industri agro di provinsi lainnya dalam bauran ekonomi rantai nilai lokal industri agro melalui efek limpahan spasial.** KTI menjadi wilayah dengan penerima limpahan industri

**Gambar 2. Efek Limpahan Spread Jawa Timur pada Industri Agro Nasional (Kurniawan & Satrio, 2025)**



agro terbesar dari Jawa Timur, yang sekaligus membuktikan bahwa Jawa Timur sebagai *center of gravity* ekonomi bagi KTI (Gambar 2). Sementara pada KBI, efek limpahan Jawa Timur dari sektor industri agro terkonsentrasi di Jawa-Bali seiring dengan kedekatan antar daerah yang berdampak pada intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi (Gambar 3).

**Performa lapangan usaha pertanian sebagai sektor hulu penopang keberlanjutan industri agro sangat ditentukan oleh dinamika beberapa variabel kunci di setiap kabupaten/kota.** Beberapa variabel kunci tersebut adalah NTB (Nilai Tambah Bruto), PMA (Penanaman Modal Asing), IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan Digitalisasi (Internet) (Tabel 1). Kolaborasi lintas sektor pada level kabupaten/kota menunjukkan keterkaitan positif sektor pertanian dan industri pengolahan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh tingginya nilai koefisien NTB industri manufaktur dibandingkan variabel lainnya. Pengaruh positif juga konsisten pada kelompok Kabupaten/Kota di kawasan WPPI (Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri) atau KPI (Kawasan Peruntukkan Industri). WPPI dan KPI merupakan kawasan yang diarahkan sebagai *prime mover* pengembangan industri di Jawa Timur dan nasional. Lebih lanjut, penelitian juga menemukan fakta bahwa investasi asing/PMA utamanya pada kelompok kabupaten/kota KPI berpengaruh positif dalam mendorong *output* sektor pertanian. Hal ini menjelaskan bahwa penanaman modal asing cenderung memberikan dampak yang lebih positif pada wilayah kabupaten/kota yang telah memiliki infrastruktur pendukung yang memadai. Pada aspek pembangunan manusia, IPM berperan dalam meningkatkan nilai tambah industri Jawa Timur khususnya pada kawasan WPPI. Temuan ini mengindikasikan bahwa modal manusia yang tinggi berdampak signifikan pada daerah dengan ekosistem industri yang sudah memadai. Pada aspek digital, pemanfaatan teknologi internet secara umum memiliki pengaruh positif terhadap nilai tambah industri, sejalan dengan penggunaan yang mendorong produktivitas, efisiensi, dan konektivitas lebih luas.

## BOKS 5

Tabel 1. Estimasi Model Regresi Panel Simultan Kabupaten/Kota (Kurniawan &amp; Satrio, 2025)

Variabel	Seluruh Kabupaten/Kota		WPPI1		KPI2	
	Pertanian	Industri	Pertanian	Industri	Pertanian	Industri
NTB industri kako	0,166**		0,133*		0,172**	
NTB tani kako		0,165**		0,678**		0,168**
TK tani kako	-0,022		0,022		-0,067	
TK industri kako		-0,112		0,138		-0,169
PMA kako	0,051*	-0,006	0,004	-0,003	0,053*	-0,008
PMDN kako	-0,003	0,002	0,001	-0,021**	-0,006	0,007
IPM kako	-0,041	0,061*	-0,005	0,074***	-0,051	0,057
Inet kako	0,001	0,005**	-0,001	0,001	0,001	0,007**
AIC	-464,04	-154,31	-442,93	-367,67	-448,32	-451,4
Hausman Test	44,119	59,139	74,737	20,438	19,884	36,134
(p-value)	0	0	0	-0,002	-0,003	0
VIF	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10

Catatan: 1)Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri berdasarkan Perda Jatim No 3 Tahun 2019 tentang RPIP Jatim 2019-2039  
2)Kawasan Peruntukan Industri berdasarkan Perda Jatim No 10 Tahun 2023 tentang RTRW Jatim 2023-2043  
\*p < 0,05; \*\* p < 0,01; \*\*\* p < 0,001

Tabel 2. Estimasi Model Regresi Industri Menurut Koridor Pengembangan Wilayah Jatim (Kurniawan &amp; Satrio, 2025)

Variabel	Selingkar Wilis	Gerbang kertosusila Plus	Bromo-Tengger-Semeru	Selingkar Ijen	Madura dan Kepulauan
NTB tani kako	0,183*	0,653**	0,142	-0,51	0,435
TK industri kako	-0,062	0,122	0,042	0,007	0,024
PMA kako	-0,023	-0,006	0,01	-0,004	-0,002
PMDN kako	0,046	-0,016**	-0,037	0,001	-0,003
IPM kako	0,053	0,074***	0,065	0,095***	0,068***
Inet kako	0,009*	0,001	0,007*	0,0001	0,0001
VIF	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10

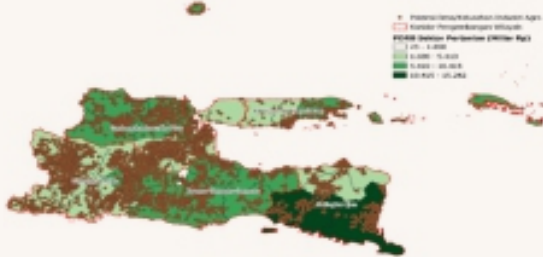
Catatan: 1)Berdasarkan Perda Jatim No. 5 Tahun 2024 tentang RPIP Jatim 2025-2045 dan Perpres No. 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan  
\*p < 0,05; \*\* p < 0,01; \*\*\* p < 0,001

Melihat pemodelan industri agro pada koridor pengembangan wilayah di Jawa Timur (Tabel 2), terlihat bahwa kawasan Selingkar Wilis dan Gerbangkertosusila Plus memiliki integrasi yang positif pada sektor pertanian terhadap nilai tambah industri pengolahan. Hubungan yang signifikan pada Kawasan Selingkar Wilis sejalan dengan tema pembangunan wilayah tersebut, yaitu meningkatkan nilai tambah industri agro dan pengembangan wilayah agropolitan. Sementara itu, kawasan Gerbangkertosusila Plus menjadi kawasan metropolitan sekaligus sentra industri manufaktur nasional, seperti adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) *Java Integrated Industrial and Ports Estate* (JIPE) di Kabupaten Gresik.

Pada level desa/kelurahan, keberadaan beberapa variabel meningkatkan probabilitas atau kecenderungan desa/kelurahan untuk memiliki aktivitas industri agro. Variabel tersebut adalah keberadaan komoditas unggulan, koperasi, agen bank, fasilitas pendidikan SMA/SMK, lembaga pelatihan keterampilan, sinyal internet yang kuat, digitalisasi pada kantor desa/kelurahan, dan capaian pendidikan kepala desa/lurah. Konsentrasi desa/kelurahan yang memiliki potensi untuk pengembangan industri agro di Jawa Timur sebagian besar terletak di Kabupaten Kediri dan Malang (Gambar 4). Sementara itu, menurut koridor pengembangan wilayahnya, Selingkar Wilis, Gerbangkertosusila Plus, dan Bromo-Tengger-Semeru secara berturut-turut memiliki desa/kelurahan potensi industri agro terbesar di Jawa Timur.

BOKS 5

Gambar 3. Peta Potensi Pengembangan Industri Agro di Desa/Kelurahan (Kurniawan & Satrio, 2025)



Berdasarkan hasil penelitian Kurniawan & Satrio (2025) didapatkan bahwa secara umum, Jawa Timur merupakan sentra industri agro serta *central hub* dalam rantai nilai industri agro nasional. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan dan hambatan dalam penguatan hilirisasi industri agro Jawa Timur, yaitu belum efisiennya *supply chain* produk pertanian, masih kompleksnya regulasi penanaman modal yang memengaruhi iklim investasi, serta fluktuasi beberapa indikator makroekonomi yang memengaruhi minat investor. Berdasarkan hal tersebut, beberapa langkah strategis diusulkan untuk mengatasi kendala ini, yaitu:

1. **Penguatan kolaborasi rantai nilai lokal industri agro Jawa Timur dengan daerah lain** melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan provinsi daerah lainnya dalam skema kemitraan.
2. **Penguatan industri agro Jawa Timur melalui optimalisasi kebijakan *import substitution industrialization* (ISI)** dalam proses produksi industri agro guna memastikan peningkatan peran rantai nilai lokal.

3. **Penguatan kualitas SDM tenaga kerja sektor hulu dan hilir industri agro.** Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan adaptif terhadap teknologi mendukung efisiensi produksi dan peningkatan daya saing produk.
4. **Penyusunan peta daerah potensial dengan strategi diferensiasi.** Promosi penanaman modal di sektor hilir lebih diarahkan untuk menarik investor asing, sementara aliran investasi sektor hulu diarahkan untuk investor domestik. Industri agro sebagai sektor hilir perlu diperkuat dengan adopsi teknologi termutakhir yang bersifat padat modal melalui suntikan PMA. Di sisi lain, PMDN dapat diarahkan untuk memperkuat fondasi produksi dan pasokan produk pertanian untuk bahan baku industri agro di Jawa Timur.
5. **Pengembangan desa/kelurahan potensi industri agro untuk menjadi daerah sentra industri agro di Jawa Timur** melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan yang dimiliki oleh setiap desa/kelurahan. Lebih lanjut, dapat dilakukan perluasan akses finansial dan digitalisasi internet pada desa/kelurahan yang berada pada sentra industri agro, agropolitan, dan minapolitan. Kemitraan koperasi desa melalui *business matching - off taker* yaitu koperasi berperan sebagai penyalur *output* sektor pertanian dan industri agro desa yang nantinya dapat digunakan sebagai input bagi industri yang lebih besar. Pelatihan keterampilan masyarakat desa dalam mengolah komoditas agro dengan kolaborasi antara Balai Latihan Kerja (BLK) atau praktisi industri agro dengan Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.





## BAB IV

# Pembiayaan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM



## 4.1. Kondisi Umum

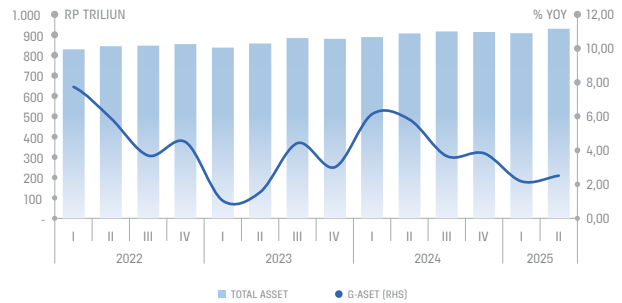
Kinerja intermediasi perbankan tetap solid di triwulan II 2025, tecermin dari kinerja penyaluran kredit yang tumbuh positif disertai dengan kualitas kredit yang terjaga. Kinerja penghimpunan DPK juga terpantau tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya didorong oleh sektor korporasi seiring meningkatnya arus kas dari kinerja ekspor yang kuat, serta preferensi korporasi dalam membangun buffer likuiditas di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, DPK Rumah Tangga (RT) tumbuh melambat seiring penggunaan dana untuk kebutuhan harian dan pergeseran preferensi investasi masyarakat ke instrumen dengan imbal hasil lebih tinggi di tengah tren penurunan BI Rate. Sejalan dengan terjaganya likuiditas perbankan, kinerja penyaluran kredit terpantau masih tumbuh positif kendati melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, baik di sektor korporasi maupun RT. Perlambatan kredit korporasi dipengaruhi oleh perbaikan arus kas yang mengurangi kebutuhan Kredit Modal Kerja (KMK), serta strategi manajemen risiko yang lebih konservatif di tengah eskalasi ketidakpastian global. Sementara itu, perlambatan kredit RT seiring dengan normalisasi pola konsumsi pasca HBKN Idulfitri, preferensi masyarakat untuk memanfaatkan dana sendiri termasuk sisa THR untuk konsumsi jangka pendek, serta lebih rendahnya minat terhadap barang tahan lama yang tecermin pada penurunan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Lebih lanjut, tingkat intermediasi perbankan pada triwulan laporan terpantau optimal, tecermin dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar 91,75% yang sejalan dengan acuan rentang intermediasi optimal 84% - 94% dalam ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial Bank Indonesia.

**Ketahanan perbankan di Jawa Timur terjaga, terindikasi dari risiko kredit dan likuiditas yang masih berada dalam batas aman.** Secara agregat, risiko kredit di Jawa Timur pada triwulan II 2025 masih terjaga dalam batas aman yang tecermin dari rasio *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 3,26%, kendati meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,02%. Sementara itu, dari sisi permodalan, CAR terpantau meningkat ke level 29,12% pada triwulan II 2025, jauh di atas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan minimum sebesar 8%, menunjukkan bahwa bank memiliki ketahanan yang baik dalam menghadapi potensi risiko ke depan di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

## 4.2. Pembiayaan Daerah di Jawa Timur

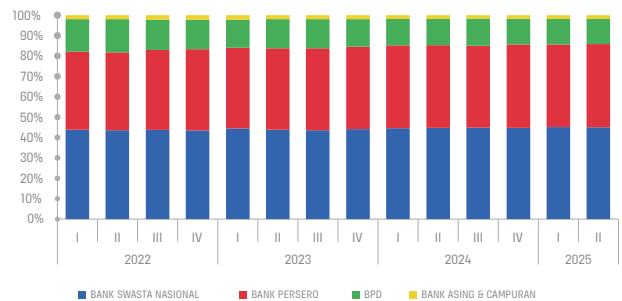
Kinerja intermediasi perbankan tetap solid pada triwulan II 2025 dan memberikan dukungan untuk pembiayaan perekonomian Jawa Timur. Solidnya intermediasi perbankan didorong oleh kinerja penyaluran kredit yang masih positif kendati melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, serta kinerja penghimpunan DPK yang tumbuh meningkat. Likuiditas perbankan tercatat meningkat tecermin dari lebih tingginya

**Grafik 4.1 Perkembangan Pertumbuhan Aset Perbankan di Jawa Timur**



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

**Grafik 4.2 Perkembangan Pangsa Kepemilikan Aset Perbankan**



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

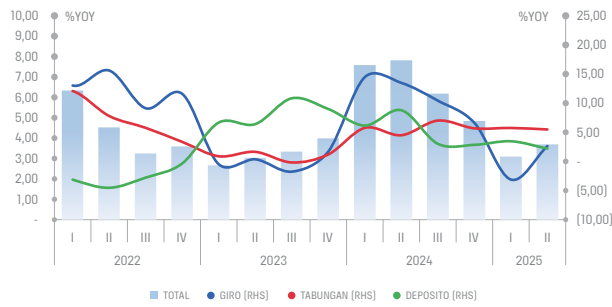
pertumbuhan DPK pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya, terutama pada komponen giro. Dukungan perbankan untuk pembiayaan juga tecermin pada total aset perbankan yang tumbuh meningkat dari 2,18% (yoy) atau sejumlah Rp908,00 triliun pada triwulan I 2025, menjadi 2,51% (yoy) atau sejumlah Rp929,54 triliun pada triwulan laporan (Grafik 4.1). Peningkatan pertumbuhan aset tersebut terjadi pada kelompok Bank Persero (Bank Umum Milik Negara/BUMN) dan Bank Asing, sementara Bank Swasta Nasional terpantau masih tumbuh positif kendati melambat. Kondisi tersebut ditengarai oleh dampak positif dari optimalisasi ekosistem perbankan digital dan peningkatan realisasi investasi<sup>5</sup> yang membawa aliran dana segar. Adapun pertumbuhan aset Bank Pemerintah Daerah (BPD) terpantau berkontraksi dipengaruhi oleh efisiensi anggaran pemerintah di tahun 2025. Lebih lanjut, berdasarkan kelompok bank, pangsa aset terbesar masih didominasi oleh kelompok Bank Swasta Nasional sebesar 45,04%, diikuti oleh Bank Persero sebesar 40,77%, BPD sebesar 12,32%, dan Bank Asing sebesar 1,87% (Grafik 4.2).

### 4.2.1. Dana Pihak Ketiga

Kinerja penghimpunan DPK perbankan terpantau tumbuh meningkat. Pada triwulan II 2025, nominal DPK mencapai Rp795 triliun atau tumbuh 3,70% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (3,09%; yoy) (Grafik 4.3). Peningkatan tersebut terjadi di sektor korporasi seiring perbaikan arus kas

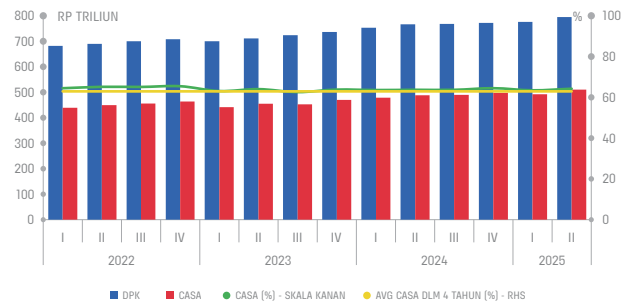
5. Kinerja investasi Jawa Timur meningkat dari 2,20% (yoy) pada triwulan I 2025 menjadi 6,13% (yoy) pada triwulan II 2025.

**Grafik 4.3 Perkembangan Pertumbuhan DPK Bank Umum**



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

**Grafik 4.4 Perkembangan Rasio CASA Bank Umum**



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

**Tabel 4.1 Pertumbuhan DPK Perbankan Jawa Timur berdasarkan Kelompok Nilai**

Klasifikasi	Kelompok Nilai	IV - 2024		I - 2025		II - 2025	
		Nominal (Rp Miliar)	%yoy	Nominal (Rp Miliar)	%yoy	Nominal (Rp Miliar)	%yoy
Kecil	<10 JT	34.204	5,82	35.649	7,16	34.023	5,23
	>10 JT - 100 JT	114.867	3,56	115.823	4,99	114.428	3,29
	>100JT - 500JT	144.336	3,81	144.269	4,71	144.689	3,72
Menengah	>500JT - 1 M	72.745	5,93	72.952	5,71	72.897	3,96
	>1 M - 2 M	57.076	2,63	58.798	2,80	60.460	3,98
	>2 M - 5M	77.781	3,04	78.106	1,40	78.407	0,75
	>5M - 10M	53.166	5,28	52.153	1,12	53.972	0,87
Besar	>10M -15M	23.635	14,69	23.406	9,42	23.906	11,57
	>15M - 20M	18.476	6,02	18.306	1,43	20.083	10,69
	>20M	175.430	6,00	176.626	[0,32]	192.131	3,93

Sumber : Laporan Bank Umum, diolah

dari kinerja ekspor yang kuat<sup>6</sup> serta preferensi korporasi dalam membangun *buffer* likuiditas di tengah masih tingginya ketidakpastian global<sup>7</sup>. Di sisi lain, kinerja DPK Rumah Tangga terpantau tumbuh melambat seiring penggunaan dana untuk kebutuhan harian dan pergeseran preferensi investasi masyarakat ke instrumen dengan imbal hasil lebih tinggi di tengah tren penurunan BI *Rate*.

**Peningkatan DPK terjadi pada komponen giro.** Pada triwulan II 2025, komponen giro tumbuh 2,64% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi 3,12% (yoy). Kondisi ini didukung oleh perbaikan arus kas korporasi dari peningkatan kinerja ekspor, terutama sektor industri pengolahan dan perdagangan<sup>8</sup>, yang disimpan dalam bentuk giro untuk memudahkan akses likuiditas jangka pendek dan fleksibilitas transaksi operasional. Selain itu, preferensi perbankan untuk mengelola porsi dana mahalannya, khususnya yang berasal dari deposito, turut mendukung hadirnya suku bunga giro yang lebih kompetitif<sup>9</sup>. Komponen deposito dan tabungan turut tumbuh positif kendati sedikit melambat, dari semula masing-masing tercatat 3,46% (yoy) dan 5,74% (yoy) pada triwulan I 2025 menjadi 2,20% (yoy) dan 5,48% (yoy) pada triwulan laporan. Perlambatan pada komponen tabungan dan deposito sejalan dengan

penggunaan dana untuk kebutuhan harian dan pergeseran preferensi investasi masyarakat ke instrumen dengan imbal hasil lebih tinggi di tengah tren penurunan BI *Rate*. Lebih lanjut, apabila ditinjau berdasarkan kelompok nilai, pertumbuhan nominal DPK terjadi pada klasifikasi depositan besar dan klasifikasi depositan menengah (kelompok nilai Rp1 miliar – Rp2 miliar). Kondisi tersebut turut mengkonfirmasi kondisi korporasi yang mengalami perbaikan arus kas dari kinerja ekspor yang kuat dan preferensi korporasi dalam membangun *buffer* likuiditas serta preferensi rumah tangga terkait penggunaan dana untuk kebutuhan harian ataupun peralihan investasi ke instrumen dengan imbal hasil lebih tinggi (Tabel 4.1).

**Rasio dana murah atau *current account saving account (CASA)* perbankan di Jawa Timur terpantau tetap berada pada level yang tinggi.** Rasio CASA perbankan di Jawa Timur pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 64,22%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 63,45%, dan tetap berada di atas rata-rata rasio CASA dalam 5 tahun terakhir sebesar 62,92% (Grafik 4.4). Peningkatan rasio CASA seiring perlambatan pertumbuhan deposito pada triwulan laporan yang didukung oleh beberapa faktor antara lain preferensi depositan terhadap instrumen keuangan lain dengan imbal

6. Kinerja ekspor Jawa Timur meningkat dari 6,08% (yoy) pada triwulan I 2025 menjadi 7,67% (yoy) pada triwulan II 2025.  
7. Berdasarkan Global Economic Policy Uncertainty (GEPU) Index, indeks ketidakpastian global meningkat dari 372,89 pada triwulan I 2025 menjadi 506,98 pada triwulan II 2025.

8. Kinerja LU Industri Pengolahan Jawa Timur meningkat dari 4,12% (yoy) pada triwulan I 2025 menjadi 7,39% (yoy) pada triwulan II 2025, serta kinerja LU Perdagangan meningkat dari 3,58% (yoy) menjadi 3,92% (yoy).  
9. Suku bunga giro bank umum meningkat dari 1,91% pada triwulan I 2025 menjadi 1,96% pada triwulan II 2025.

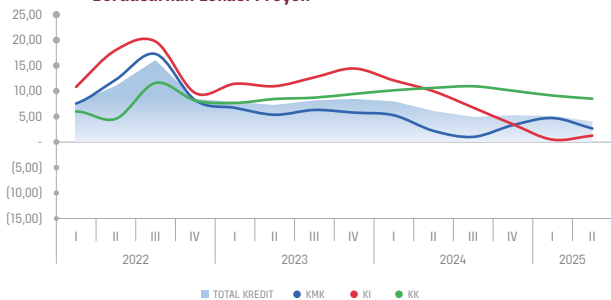
hasil lebih tinggi di tengah tren penurunan BI Rate, strategi perbankan untuk mengelola porsi dana mahal dalam rangka menurunkan *cost of fund* untuk efisiensi biaya operasional, serta tren akseptasi digital masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan.

#### 4.2.2. Penyaluran Kredit

**Pada triwulan II 2025, kinerja penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek di Jawa Timur tumbuh positif, kendati melambat.**

Penyaluran kredit pada triwulan laporan mencapai Rp729,41 atau tumbuh 4,06% (yoy), sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,12% (yoy) (Grafik 4.5). Berdasarkan jenis penggunaannya, perlambatan penyaluran kredit terjadi pada kredit modal kerja (pangsa 49,77%) dari 4,70% (yoy) pada triwulan I 2025 menjadi 2,65% (yoy) pada triwulan laporan, dan kredit konsumsi (pangsa 30,27%) dari 9,12% (yoy) menjadi 8,50% (yoy). Perlambatan kredit modal kerja dipengaruhi oleh membaiknya kondisi arus kas dari peningkatan kinerja ekspor yang memungkinkan korporasi mengandalkan *internal financing* dan mengurangi ketergantungan pembiayaan eksternal, serta strategi manajemen risiko yang lebih konservatif di tengah eskalasi ketidakpastian global. Sementara itu, perlambatan kredit konsumsi didorong oleh normalisasi pola konsumsi pasca HBKN Idulfitri, preferensi masyarakat untuk memanfaatkan dana sendiri termasuk sisa THR untuk konsumsi jangka pendek, serta lebih rendahnya minat terhadap barang tahan lama yang tecermin dari penurunan penyaluran KPR dan KKB. Kondisi ini juga terkonfirmasi dari penurunan kinerja kredit konsumsi RT Jawa Timur pada triwulan laporan<sup>11</sup> yang menjadi komponen utama dari kredit konsumsi. Di sisi lain, kredit investasi (pangsa 19,96%) terpantau tumbuh 1,26% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,46% (yoy) didukung oleh kejelasan arah kebijakan Pemerintah dan solidnya kondisi ekonomi regional yang mendorong pelaku usaha keluar dari sikap *wait and see*. Peningkatan ini juga diantaranya didukung oleh kembali dimulainya pembangunan program strategis nasional dan program PMK Nomor 29 di Jawa Timur serta program swasembada pangan yang mendorong investasi di sektor pertanian. Hal ini tecermin dari peningkatan realisasi kredit investasi pada LU Pertanian<sup>12</sup>.

**Grafik 4.5 Perkembangan Pertumbuhan Penyaluran Kredit Bank Umum Berdasarkan Lokasi Proyek**



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

**Kualitas kredit di Jawa Timur pada triwulan II 2025 terjaga, tecermin dari rasio *Non Performing Loan (NPL)* yang masih berada di bawah *threshold* 5%.** NPL gross Jawa Timur pada triwulan laporan terjaga di tingkat 3,26% atau masih berada di bawah *threshold* 5%, kendati meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,02% (Grafik 4.7). Berdasarkan jenis penggunaannya, peningkatan rasio NPL terjadi pada KMK dan KK, sementara rasio NPL KI terpantau membaik. Sejalan dengan peningkatan NPL, tingkat kredit berisiko atau *Loan at Risk (LaR)* juga terpantau meningkat seiring peningkatan *outstanding* kredit restrukturisasi dan kredit dalam pengawasan khusus (kolektibilitas 2). Pada triwulan II 2025, LaR tercatat sebesar 7,88% atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (7,49%) (Grafik 4.8).

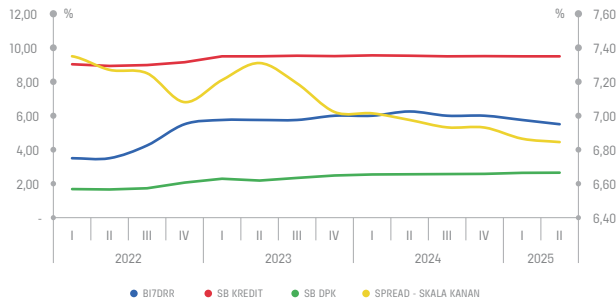
**NIM perbankan di Jawa Timur terpantau menurun.** Pada triwulan II 2025, *spread* suku bunga perbankan tercatat turun dari 6,86% pada triwulan I 2025 menjadi 6,84% pada triwulan laporan. Penurunan *spread* ini terjadi seiring dengan terkoreksinya suku bunga kredit dari 9,50% menjadi 9,49% sebagai respons atas penurunan BI Rate dari 5,75% menjadi 5,50%, meski cenderung masih terbatas. Relatif terbatasnya penyesuaian *spread* mengindikasikan adanya *lag* transmisi kebijakan moneter, yaitu penurunan BI Rate yang belum sepenuhnya ditertransmisi ke suku bunga kredit seiring diperlukannya waktu bagi perbankan dalam melakukan *rebalancing portofolio* dan *repricing cycle* dari kredit *outstanding* yang menggunakan kontrak dengan mengacu pada suku bunga periode sebelumnya. Sejalan dengan perkembangan *spread* suku bunga, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat NIM perbankan di Jawa Timur pada triwulan II 2025 menurun dari 4,57% pada triwulan I 2025 menjadi 4,65% pada triwulan laporan<sup>13</sup>. Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan terhadap *margin* bunga perbankan yang disebabkan oleh kenaikan *cost of fund* di tengah kompetisi ketat penghimpunan dana, terlebih suku bunga kredit sulit disesuaikan lebih rendah akibat risiko kredit dan kebutuhan profitabilitas bank.

**Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) perbankan di Jawa Timur terpantau meningkat signifikan.**

Berdasarkan data OJK, rasio BOPO perbankan di Jawa Timur tercatat sebesar 88,29% pada triwulan I 2025, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 80,53%. Peningkatan BOPO yang cukup besar ini menunjukkan bahwa efisiensi operasional perbankan mengalami penurunan, dipengaruhi oleh kenaikan beban operasional dan tekanan terhadap pendapatan operasional akibat menyempitnya *margin* bunga. Sejalan dengan menurunnya efisiensi operasional perbankan, profitabilitas perbankan tercatat turun yang tecermin dari penurunan *Net Profit Margin (NPM)* dari 26,25% pada triwulan IV 2024 menjadi 20,78% pada triwulan I 2025.

11. Kinerja kredit konsumsi RT tumbuh 4,85% (yoy) pada triwulan II 2025, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,12% (yoy).  
12. Penyaluran kredit investasi pada LU Pertanian tumbuh 26,34% (yoy) pada triwulan II 2025, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 14,92% (yoy).  
13. Posisi laporan Mei 2025 (sumber: Kanwil OJK Jawa Timur)

**Grafik 4.6 Perkembangan BI Rate dan Suku Bunga Bank Tertimbang**



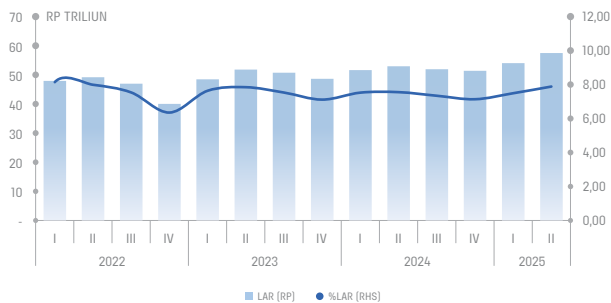
Sumber: Laporan Bank Umum & Website Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.7 Perkembangan Rasio NPL Bank Umum**



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

**Grafik 4.8 Perkembangan Loan at Risk (LAR) Bank Umum**



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

**Grafik 4.9 Perkembangan Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Umum**



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

### 4.2.3. Loan to Deposit Ratio (LDR)

Tingkat intermediasi perbankan di Jawa Timur terjaga. Pada triwulan II 2025, tingkat LDR bank umum di Jawa Timur berada pada level 91,75%, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 92,91% [Grafik 4.9]. Kondisi tersebut sejalan dengan peningkatan nominal DPK yang lebih tinggi dibandingkan dengan nominal kredit. Hal ini mengindikasikan adanya kehati-hatian perbankan dalam penyaluran kredit, serta strategi pengelolaan aset dan likuiditas yang lebih konservatif di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Namun demikian, capaian LDR tersebut mengindikasikan tetap optimalnya intermediasi perbankan di Jawa Timur pada triwulan laporan, sejalan dengan acuan rentang intermediasi optimal 84% - 94% dalam ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial Bank Indonesia yang komponen perhitungannya turut mempertimbangkan kredit dan DPK perbankan.

## 4.3. Perkembangan Kinerja Korporasi

### 4.3.1. Kinerja Umum Korporasi

Kinerja korporasi terpantau terjaga, tecermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia terhadap korporasi di Jawa Timur. Berdasarkan hasil SKDU, kegiatan dunia usaha di Jawa Timur terindikasi tetap kuat, tecermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) pada triwulan II 2025 yang

sebesar 5,51 atau positif<sup>14</sup>. Kondisi ini juga terkonfirmasi dari akselerasi kinerja sejumlah LU utama diantaranya LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan sejalan dengan kinerja ekspor luar negeri yang lebih tinggi. Terjaganya kinerja korporasi juga tecermin pada kondisi rentabilitas (kemampuan menghasilkan laba) dan likuiditas korporasi yang positif. Berdasarkan hasil SKDU, 89,93% korporasi menyatakan bahwa kondisi rentabilitas pada triwulan II 2025 cenderung tetap dan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Demikian pula, 92,68% korporasi menyatakan bahwa kondisi likuiditas juga cenderung tetap dan meningkat. Perkembangan ini turut tecermin dari tumbuhnya penghimpunan DPK korporasi di perbankan pada triwulan laporan.

## 4.3.2. Eksposur Perbankan pada Sektor Korporasi

### 4.3.2.1 Penyaluran Kredit Korporasi

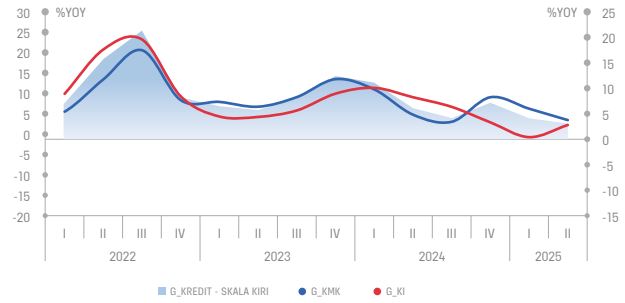
Di tengah kinerja umum korporasi yang terjaga, kinerja penyaluran kredit korporasi pada triwulan II 2025 terpantau melambat. Secara agregat, kredit korporasi pada triwulan laporan tercatat mencapai Rp306,47 triliun atau tumbuh 3,09% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,10% (yoy) [Grafik 4.10]. Kondisi ini sejalan dengan membaiknya kondisi arus kas dari peningkatan kinerja ekspor

14. Interpretasi dari hasil perhitungan SBT kegiatan usaha: Dalam hal  $SBT > 0$ , maka jumlah jawaban "naik" lebih besar dari jawaban "turun" yang artinya kondisi kegiatan usaha meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya;  $SBT = 0$ , maka jumlah jawaban "naik" dan "turun" seimbang yang artinya kondisi kegiatan usaha sama dengan triwulan sebelumnya;  $SBT < 0$ , maka jumlah jawaban "turun" lebih besar dari jawaban "naik" yang artinya kondisi kegiatan usaha menurun dibandingkan triwulan sebelumnya.

yang memungkinkan korporasi mengandalkan *internal financing* dan mengurangi ketergantungan pembiayaan eksternal, serta strategi manajemen risiko yang lebih konservatif di tengah eskalasi ketidakpastian global. Perlambatan tersebut juga dipengaruhi oleh kebijakan penyaluran kredit Perbankan yang cenderung lebih ketat<sup>15</sup>, khususnya untuk aspek plafon kredit, premi kredit berisiko, dan agunan, yang menunjukkan faktor kehati-hatian perbankan dalam mitigasi risiko di tengah masih tingginya ketidakpastian global. Berdasarkan komponennya, perlambatan kredit terutama disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan kredit modal kerja (pangsa 69,04%) dari 6,23% [yoy] pada triwulan I 2025 menjadi 3,44% [yoy] pada triwulan laporan. Di sisi lain, kredit investasi korporasi (pangsa 30,86%) tercatat tumbuh 2,24% [yoy], meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi 0,75% [yoy].

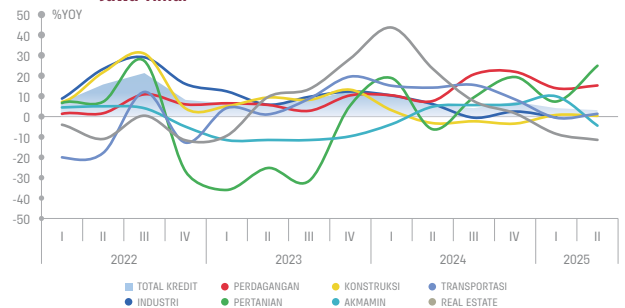
**Berdasarkan lapangan usaha, perlambatan pertumbuhan kredit korporasi terutama disebabkan oleh kontraksi pada kredit LU Industri Pengolahan, LU Real Estate, dan LU Penyediaan Akmamin (Grafik 4.11).** Pada triwulan II 2025, penyaluran kredit kepada LU Industri Pengolahan (pangsa 46,60%) mengalami kontraksi sebesar 0,32% [yoy], lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 1,51% [yoy], sejalan dengan strategi *internal financing* dan manajemen risiko yang lebih konservatif di tengah eskalasi ketidakpastian global serta strategi penarikan kredit sebelum periode HBKN Idul Fitri yang pada tahun 2025 sepenuhnya terjadi pada triwulan I 2025. Penyaluran kredit kepada LU *Real Estate* (pangsa 4,17%) juga mengalami kontraksi yang lebih dalam yaitu dari kontraksi 8,54% [yoy] pada triwulan I 2025 menjadi kontraksi 11,46% [yoy] pada triwulan laporan, dipengaruhi oleh kinerja penjualan properti yang mengalami tantangan akibat terbatasnya properti *ready stock* di Jawa Timur, khususnya *landed house*, yang menyulitkan pemenuhan syarat serah terima PPN DTP<sup>16</sup> serta penyesuaian besaran insentif PPN DTP dari 100% menjadi 50% per Juli 2025<sup>17</sup>. Lebih lanjut, kinerja penyaluran kredit LU Penyediaan Akmamin (pangsa 1,52%) juga mengalami kontraksi 4,48% [yoy], menurun signifikan dari 9,89% [yoy] pada triwulan sebelumnya, seiring dengan implementasi efisiensi anggaran pemerintah yang menahan permintaan dari sektor pemerintahan. Di sisi lain, perlambatan kredit korporasi yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan penyaluran kredit pada LU Perdagangan (pangsa 20,11%) yang tercatat tumbuh 15,23% [yoy], meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 13,86% [yoy]. Kondisi ini terkonfirmasi dari capaian kinerja PDRB LU Perdagangan Jawa Timur yang tumbuh meningkat pada triwulan II 2025<sup>19</sup>.

**Grafik 4.10 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis**



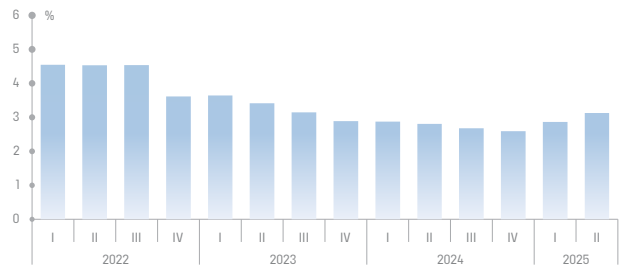
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

**Grafik 4.11 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Korporasi Sektor Utama Jawa Timur**



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

**Grafik 4.12 Perkembangan Rasio NPL Kredit Korporasi**



Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)

**Risiko kredit korporasi terjaga kendati sedikit meningkat.** Pada triwulan II 2025, rasio NPL kredit korporasi di Jawa Timur terjaga di bawah *threshold* 5% meskipun mengalami sedikit peningkatan, yaitu dari 2,87% pada triwulan I 2025 menjadi 3,13% pada triwulan laporan (Grafik 4.12).

15. Berdasarkan Survei Perbankan, kebijakan penyaluran kredit pada triwulan II 2025 diindikasikan lebih ketat, tercermin dari indeks lending standard (LS) yang bernilai positif 0,08, meningkat dari triwulan sebelumnya yang bernilai negatif 1,32%.

16. Hasil liaison dengan salah satu pengembang properti terbesar di Jawa Timur.

17. Berdasarkan PMK No.13/2025 tanggal 4 Februari 2025. Pemerintah telah menyampaikan rencana perpanjangan PPN DTP sektor properti sebesar 100% sampai dengan 31 Desember 2025 pada akhir Juli 2025, namun belum terdapat peraturan resmi yang mengubah peraturan sebelumnya.

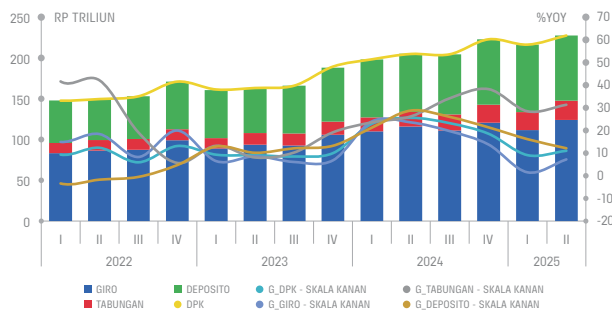
18. Sektor pemerintahan menyumbang 30-40% dari bisnis perhotelan di Indonesia (Sumber: Archipelago International)

19. Kinerja PDRB LU Perdagangan tumbuh 3,92% [yoy] pada triwulan II 2025, meningkat dibandingkan triwulan I 2025 sebesar 3,58%.

### 4.3.2 Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Korporasi

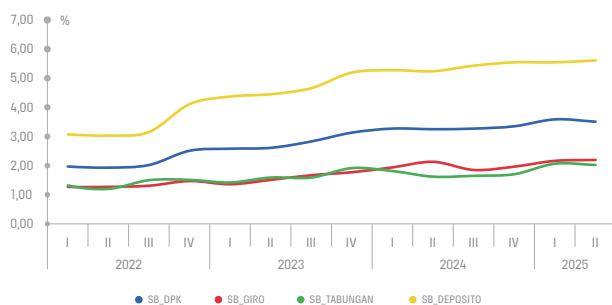
**Kinerja penghimpunan DPK korporasi di perbankan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.** Pada triwulan II 2025, DPK korporasi di perbankan tercatat tumbuh 11,03% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,10% (yoy) (Grafik 4.13). Peningkatan ini dipengaruhi oleh perbaikan arus kas korporasi dari kinerja ekspor yang kuat serta preferensi korporasi dalam membangun *buffer* likuiditas di tengah peningkatan ketidakpastian global. Berdasarkan komponennya, peningkatan penghimpunan DPK korporasi terjadi pada komponen giro dan tabungan yang masing-masing meningkat dari 1,52% (yoy) dan 28,45% (yoy) pada triwulan I 2025 menjadi 7,21% (yoy) dan 31,33% (yoy) pada triwulan II 2025. Di sisi lain, komponen deposito terpantau hanya tumbuh 12,12% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 16,15% (yoy), seiring strategi korporasi yang melakukan pegeseran preferensi investasi ke instrumen dengan imbal hasil lebih tinggi di tengah tren penurunan BI *Rate*. Adapun DPK korporasi masih didominasi oleh giro dan deposito dengan pangsa masing-masing sebesar 54,53% dan 35,11% dari total DPK korporasi di perbankan, sementara pangsa tabungan hanya 10,36% dari total DPK korporasi.

Grafik 4.13 Pertumbuhan DPK Korporasi



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

Grafik 4.14 Perkembangan Suku Bunga Tertimbang DPK Korporasi



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

**Suku bunga tertimbang DPK korporasi tercatat menurun dibandingkan periode sebelumnya (Grafik 4.14).** Pada triwulan II 2025, suku bunga tertimbang DPK korporasi tercatat sebesar 3,51%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (3,59%). Adapun penurunan suku bunga terjadi pada komponen tabungan dari 2,07% menjadi 2,02%, sementara suku bunga giro dan deposito masing-masing terpantau meningkat dari 2,16% dan 5,54% menjadi 2,19% dan 5,61%. Kenaikan suku bunga giro dan deposito mengindikasikan adanya kompetisi perbankan dalam menarik dana korporasi di tengah tren penurunan BI *Rate*.

## 4.4. Perkembangan Kinerja Rumah Tangga

### 4.4.1. Kinerja Umum Rumah Tangga

**Kinerja Rumah Tangga (RT) di Jawa Timur terpantau melambat.** Kondisi tersebut sejalan dengan realisasi kinerja PDRB konsumsi RT di Jawa Timur yang melambat dari 5,12% (yoy) pada triwulan I 2025 menjadi 4,85% (yoy) pada triwulan laporan, sejalan dengan normalisasi pola konsumsi pasca Imlek, Ramadhan, dan HBKN Idulfitri 2025. Penurunan kinerja RT juga tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada level 124,23 yang termoderasi dari triwulan sebelumnya sebesar 133,23. Meski demikian, IKK masih terjaga pada level optimis (>100). Di sisi lain, tetap kuatnya kinerja RT didukung oleh berbagai program Pemerintah dan Bank Indonesia seperti insentif PPN DTP di sektor properti sebesar 100% sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 dan 50% sampai dengan tanggal 31 Desember 2025<sup>20</sup>, insentif stimulus ekonomi berupa diskon transportasi pada bulan Juni – Juli 2025, serta perpanjangan kebijakan relaksasi *Loan to Value/Financing to Value* (LTV/FTV) dengan rasio paling tinggi sebesar 100% dan relaksasi Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor paling rendah sebesar 0% hingga akhir tahun 2025<sup>21</sup>. Selain itu, berlanjutnya insentif Pemerintah melalui program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, serta implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengurangi beban pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan turut menopang terjalannya kinerja RT pada triwulan laporan. Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga berupaya untuk memperkuat daya beli dan kesejahteraan RT di Jawa Timur melalui berbagai program strategis, yakni (1) penyiapan 5 (lima) lokasi Sekolah Rakyat yang ditargetkan beroperasi Juli 2025 untuk memberikan pendidikan gratis; serta (2) peningkatan anggaran bansos untuk memperluas cakupan skema bantuan antara lain melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Plus untuk lansia, Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas untuk penyandang disabilitas berat, dan Program KIP Putri Jawa untuk siswi perempuan dari keluarga tidak mampu.

20. Berdasarkan PMK No.13/2025 tanggal 4 Februari 2025. Pemerintah telah menyampaikan rencana perpanjangan PPN DTP sektor properti sebesar 100% sampai dengan 31 Desember 2025 pada akhir Juli 2025, namun belum terdapat peraturan resmi yang mengubah peraturan sebelumnya.

21. Keputusan RDG BI tanggal 15-16 Oktober 2024.

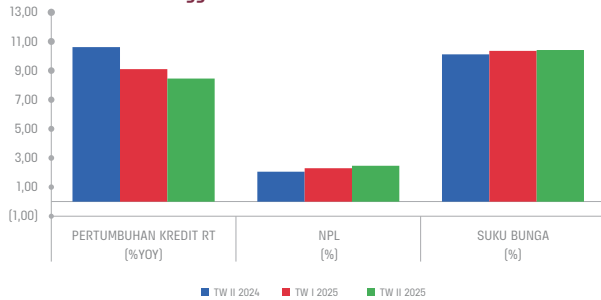
## 4.4.2. Eksposur Perbankan pada Rumah Tangga

### 4.4.2.1 Penyaluran Kredit Rumah Tangga

Sejalan dengan perlambatan kinerja RT, kinerja penyaluran kredit RT juga terpantau tumbuh melambat pada triwulan laporan meski tetap pada level yang tinggi. Pada triwulan II 2025, penyaluran kredit RT tercatat tumbuh sebesar 8,46% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 9,10% (yoy) (Grafik 4.15). Kondisi ini seiring dipengaruhi oleh normalisasi pola konsumsi pasca Imlek, Ramadhan, dan HBKN Idulfitri 2025 yang terjadi pada triwulan I 2025, preferensi masyarakat untuk memanfaatkan dana sendiri termasuk sisa THR untuk konsumsi jangka pendek, serta lebih rendahnya minat terhadap barang tahan lama yang tecermin pada indeks konsumsi barang tahan lama<sup>22</sup>. Berdasarkan jenisnya, perlambatan kredit RT terutama disebabkan oleh melambatnya penyaluran KPR, KKB, dan Kredit Lainnya yang masing-masing memiliki pangsa sebesar 36,50%, 6,74% dan 13,46% (Grafik 4.16). Di sisi lain, perlambatan penyaluran kredit RT yang lebih dalam terutama tertahan oleh peningkatan penyaluran Kredit Multiguna (pangsa 39,63%).

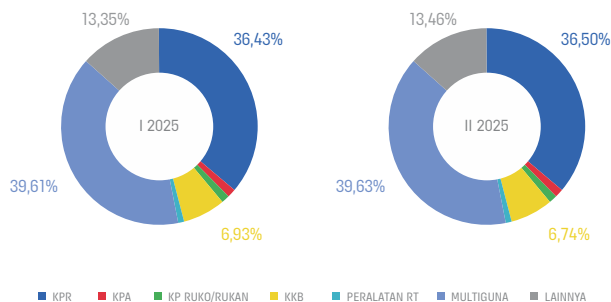
**Risiko kredit RT terjaga tecermin dari rasio NPL yang masih berada di bawah threshold.** Pada triwulan II 2025, risiko kredit RT terpantau mengalami peningkatan dari 2,30% pada triwulan sebelumnya menjadi 2,46%, namun masih terjaga di bawah *threshold* 5% (Grafik 4.15). Terjaganya rasio NPL kredit RT mengindikasikan bahwa daya beli dan kemampuan membayar RT tetap terjaga.

**Grafik 4.15 Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga Kredit Rumah Tangga**



Sumber : Laporan Bank Umum (dialah)

**Grafik 4.16 Pangsa Kredit RT Jawa Timur Berdasarkan Jenis Kredit**



Sumber : Laporan Bank Umum (dialah)

## Kredit Pemilikan Apartemen dan Kredit Pemilikan Rumah (KPA dan KPR)

**Kinerja penyaluran KPR terpantau tumbuh positif kendati melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 4.17).** Penyaluran KPR pada triwulan II 2025 tumbuh positif sebesar 8,30% (yoy), kendati lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (17,31%; yoy). Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya properti *ready stock* di Jawa Timur, khususnya *landed house*, yang menyulitkan pemenuhan syarat serah terima PPN DTP<sup>23</sup>, serta normalisasi permintaan menjelang penyesuaian besaran insentif PPN DTP dari 100% menjadi 50% per tanggal 1 Juli 2025<sup>24</sup>. Kondisi ini terkonfirmasi dari penurunan penyaluran KPR untuk rumah dengan tipe di bawah 21 m<sup>2</sup> dan tipe 22 m<sup>2</sup> – 70 m<sup>2</sup> yang masing-masing tercatat menurun signifikan dari 82,14% (yoy) dan 20,67% (yoy) pada triwulan I 2025, menjadi terkontraksi 5,76% (yoy) untuk rumah dengan tipe di bawah 21 m<sup>2</sup> dan tumbuh lebih rendah sebesar 10,07% (yoy) untuk rumah dengan tipe 22 m<sup>2</sup> – 70 m<sup>2</sup> pada triwulan laporan. Sementara itu, rumah dengan tipe di atas 70 m<sup>2</sup> konsisten tumbuh positif sejak triwulan II 2023, dengan capaian pada triwulan II 2025 sebesar 6,77% (yoy), mencerminkan resiliensi segmen menengah atas.

**Masih positifnya kinerja penyaluran KPR didukung oleh sejumlah kebijakan akomodatif oleh Pemerintah Pusat, BI, dan OJK.** Selain insentif PPN DTP, masih positifnya kinerja penyaluran KPR turut didukung oleh perpanjangan kebijakan pelonggaran rasio LTV/FTV hingga tanggal 31 Desember 2025 oleh Bank Indonesia<sup>25</sup>. Perkembangan positif juga didukung oleh kerangka regulasi OJK yang kondusif, diantaranya penyederhanaan penilaian kualitas KPR berdasarkan ketepatan pembayaran untuk plafon hingga Rp5 miliar, serta pemberian keleluasaan pembiayaan pengadaan tanah bagi pengembang yang dapat meningkatkan pasokan *ready stock* ke depan. Lebih lanjut, kebijakan akomodatif turut didukung oleh penawaran pembiayaan dari perbankan yang secara konsisten menurunkan suku bunga KPR sejak triwulan II 2024, yakni dari 7,07% pada triwulan I 2025 menjadi 7,05% pada triwulan laporan, mencerminkan transmisi penurunan BI *Rate*. Selain itu, sebagai upaya untuk mendorong penyaluran KPR pada semester II 2025, Pemerintah Pusat telah menyampaikan rencana perpanjangan PPN DTP sektor properti sebesar 100% sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 pada akhir Juli 2025, namun belum terdapat peraturan resmi yang mengubah peraturan sebelumnya.

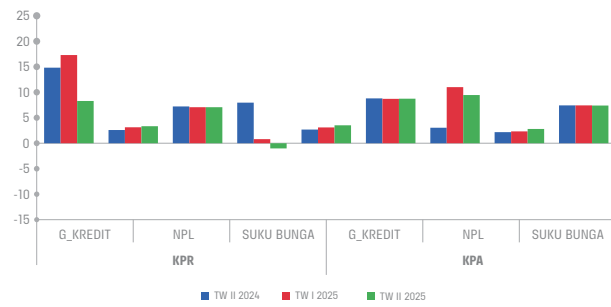
22. Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia di wilayah Jawa Timur, indeks konsumsi barang tahan lama tercatat pada level 112,94 pada triwulan II 2025, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 123,72.

23. Hasil lisan dengan salah satu pengembang properti terbesar di Jawa Timur.

24. Berdasarkan PMK No.13/2025 tanggal 4 Februari 2025. Pemerintah telah menyampaikan rencana perpanjangan PPN DTP sektor properti sebesar 100% sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 pada akhir Juli 2025, namun belum terdapat peraturan resmi yang mengubah peraturan sebelumnya.

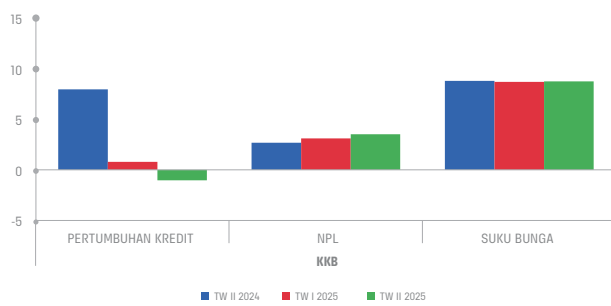
25. Berdasarkan Siaran Pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia periode Oktober: 15-16 Oktober 2024

**Grafik 4.17 Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga KPR-KPA**



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

**Grafik 4.18 Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga KKB**



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

**Kinerja penyaluran KPA tercatat melambat, namun relatif lebih moderat dibandingkan KPR (Grafik 4.17).** Penyaluran KPA terpantau melambat dari 11,01% (yoy) pada triwulan I 2025 menjadi 9,46% (yoy) pada triwulan laporan, dengan perlambatan yang lebih moderat dibandingkan KPR. Perkembangan tersebut juga sejalan dengan normalisasi permintaan menjelang penyesuaian besaran insentif PPN DTP dari 100% menjadi 50% per tanggal 1 Juli 2025<sup>26</sup>. Namun, perlambatan penyaluran KPA yang lebih moderat didukung oleh ketersediaan apartemen *ready stock* yang lebih memadai dibandingkan *landed house*<sup>27</sup>, didukung oleh upaya pengusaha properti khususnya di Kota Surabaya yang terus melakukan ekspansi secara berkelanjutan serta meningkatnya preferensi apartemen pada generasi muda. Hal tersebut turut didukung oleh penawaran pembiayaan dari perbankan yang semakin terjangkau, yakni dari 7,41% pada triwulan sebelumnya menjadi 7,38% pada triwulan laporan. Sepanjang tahun 2024-2025, terdapat 7 (tujuh) proyek apartemen berkapasitas lebih dari 5.000 unit yang sudah mulai serah terima secara bertahap mulai dari kuartal kedua tahun 2024. Wilayah Barat Kota Surabaya terus mempertahankan posisi sebagai subpasar apartemen paling aktif mengingat tingginya jumlah proyek yang dibangun, yakni 43% dari total kapasitas, yang dilanjutkan oleh wilayah Selatan Surabaya sebesar 29%, dan daerah lainnya sebesar 28%.

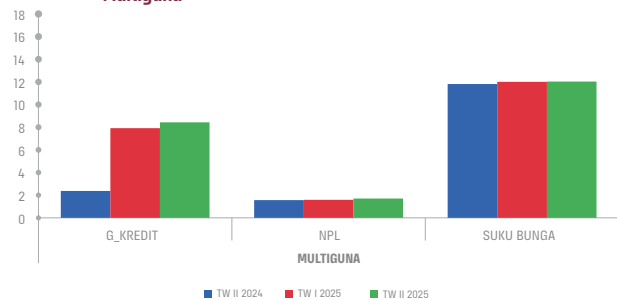
26. Berdasarkan PMK No.13/2025 tanggal 4 Februari 2025. Pemerintah telah menyampaikan rencana perpanjangan PPN DTP sektor properti sebesar 100% sampai dengan 31 Desember 2025 pada akhir Juli 2025, namun belum terdapat peraturan resmi yang mengubah peraturan sebelumnya.  
27. Hasil liaison dengan salah satu pengembang properti terbesar di Jawa Timur.

**Risiko kredit KPR dan KPA terpantau tetap terjaga di bawah *threshold* 5%.** Pada triwulan II 2025, rasio NPL KPR sebesar 3,34%, masih terjaga di bawah *threshold* meskipun sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,11%. Pola serupa juga terjadi pada NPL KPA yang terpantau meningkat dari 2,31% pada triwulan I 2025 menjadi 2,80% pada triwulan laporan.

### Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

**Kinerja penyaluran KKB tercatat terkontraksi (Grafik 4.18).** Pada triwulan II 2025, kinerja penyaluran KKB terkontraksi 1,03% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,79% (yoy). Penurunan terutama terjadi pada tipe kendaraan mobil roda empat (pangsa 83,62%) yang terkontraksi 2,57% (yoy) pada triwulan laporan, setelah tumbuh 0,03% (yoy) pada triwulan I 2025. Perkembangan tersebut ditengarai dipengaruhi oleh penghentian pemberian sejumlah insentif pajak daerah terkait kendaraan bermotor pada tanggal 30 November 2025, yakni bebas Bea Balik Nama (BBN) II dan seterusnya, bebas sanksi administratif, serta bebas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) progresif di Jawa Timur, yang diperkirakan berdampak pada melandainya minat masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor. Di sisi lain, penyaluran KKB untuk kendaraan roda dua (pangsa 14,61%) masih menunjukkan resiliensi dengan pertumbuhan 4,44% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,21% (yoy), mencerminkan kebutuhan mobilitas masyarakat yang tetap tinggi. Ke depan, sebagai upaya untuk mendorong penyaluran KKB dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan kembali menerapkan kebijakan pemutihan PKB dan BBNKB yang akan dimulai pada bulan Juli 2025. Lebih lanjut, risiko penyaluran KKB terpantau meningkat namun masih berada di di bawah *threshold* 5%, yaitu dari 3,11% pada triwulan I 2025 menjadi 3,34% pada triwulan laporan.

**Grafik 4.19 Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga Kredit Multiguna**



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

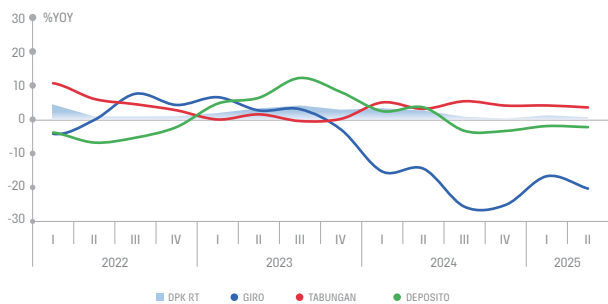
## Kredit Multiguna

**Pertumbuhan kredit multiguna tercatat meningkat pada triwulan laporan (Grafik 4.19).** Kredit multiguna tumbuh positif pada triwulan II 2025 sebesar 8,44% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,91% (yoy). Peningkatan ditengarai sejalan dengan preferensi masyarakat untuk memanfaatkan kredit multiguna yang lebih fleksibel guna memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Lebih lanjut, rasio NPL kredit multiguna terpantau masih berada di bawah *threshold* 5% kendati sedikit meningkat, yaitu dari 1,59% pada triwulan I 2025 menjadi 1,71% pada triwulan laporan.

### 4.4.2.2 Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga

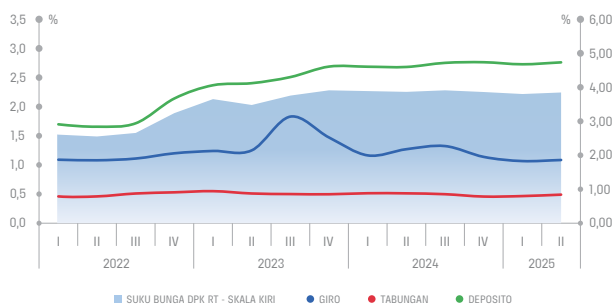
**DPK RT di Jawa Timur terpantau melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.** Pada triwulan II 2025, penghimpunan DPK RT mencapai Rp507,06 triliun atau tumbuh 0,65% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,25% (yoy) (Grafik 4.20). Berdasarkan komponen, perlambatan penghimpunan DPK terjadi pada seluruh komponen. Komponen tabungan terpantau melambat dari 4,12% (yoy) pada triwulan I 2025 menjadi 3,53% (yoy) pada triwulan laporan. Sementara itu, komponen giro dan deposito terpantau mengalami kontraksi masing-masing sebesar 20,36% (yoy) dan 2,26% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 16,70% (yoy) dan 1,94% (yoy).

Grafik 4.20 Perkembangan Pertumbuhan DPK RT



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

Grafik 4.21 Perkembangan Suku Bunga Tertimbang DPK RT



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh penggunaan dana untuk kebutuhan harian dan pergeseran preferensi investasi masyarakat ke instrumen dengan imbal hasil lebih tinggi di tengah tren penurunan BI *Rate*. Lebih lanjut, komposisi DPK RT masih didominasi oleh tabungan dengan pangsa sebesar 61,72%, deposito sebesar 35,81%, dan giro sebesar 2,47%.

**Suku bunga tertimbang DPK RT terpantau meningkat. Suku bunga tertimbang DPK RT pada triwulan laporan tercatat sebesar 2,25%, sedikit meningkat** dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,22%. Berdasarkan komponennya, peningkatan terutama didorong oleh meningkatnya suku bunga deposito dari 4,68% pada triwulan I 2025 menjadi 4,73% pada triwulan laporan. Di sisi lain, suku bunga giro dan tabungan relatif stabil, yakni masing-masing dari 1,07% dan 0,47% menjadi 1,08% dan 0,49%. Peningkatan suku bunga DPK RT yang terjadi di tengah tren penurunan BI *Rate* dan perlambatan kinerja penghimpunan DPK RT mengindikasikan intensitas kompetisi perbankan dalam mempertahankan dana murah RT seiring dengan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap instrumen investasi berimbal hasil lebih tinggi, serta upaya bank untuk memitigasi potensi disintermediasi ke produk investasi alternatif.

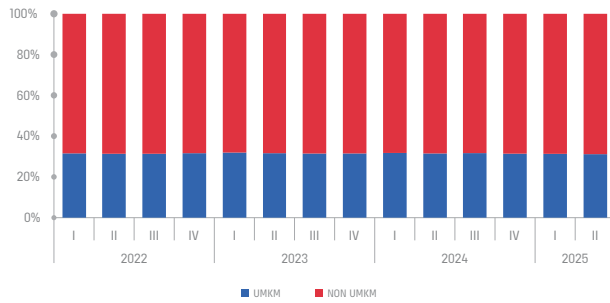
## 4.5. Perkembangan Akses Keuangan dan UMKM

### 4.5.1. Eksposur Perbankan pada UMKM

**Eksposur perbankan terhadap UMKM tumbuh positif dan tetap tinggi.** Pada triwulan II 2025, pangsa kredit UMKM terhadap total penyaluran kredit di Jawa Timur tercatat 31,14%, lebih tinggi dibandingkan target pangsa kredit UMKM oleh Pemerintah (30%) (Grafik 4.22). Tingginya pangsa kredit UMKM sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan perbankan untuk bersinergi mendorong peran UMKM dalam akselerasi perekonomian Jawa Timur, mengingat UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Jawa Timur.

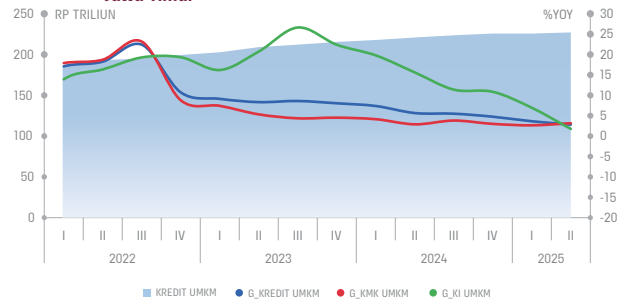
**Kinerja penyaluran kredit kepada UMKM tercatat tumbuh positif kendati sedikit melambat.** Penyaluran kredit UMKM pada triwulan II 2025 tercatat mencapai Rp227,16 triliun atau tumbuh 2,83% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (3,64% yoy) (Grafik 4.23). Kinerja yang positif ini turut didukung oleh berbagai kebijakan akomodatif dari Pemerintah baik untuk sisi permintaan antara lain melalui perpanjangan PPh Final UMKM menjadi 0,5% hingga tahun 2025, maupun kebijakan akomodatif dari Bank Indonesia pada sisi penawaran kredit bank melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) dari Bank Indonesia. Pada triwulan II 2025, Bank di Jawa Timur telah mengoptimalkan pemanfaatan insentif KLM berupa pelanggaran Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 5% sehingga terdapat tambahan likuiditas yang dapat

**Grafik 4.22 Share Kredit UMKM Terhadap Total Kredit di Jawa Timur**



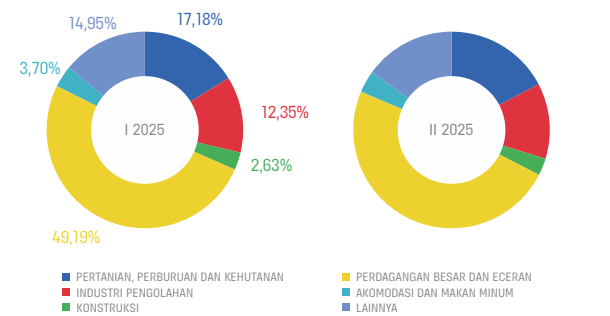
Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

**Grafik 4.23 Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM Perbankan di Jawa Timur**



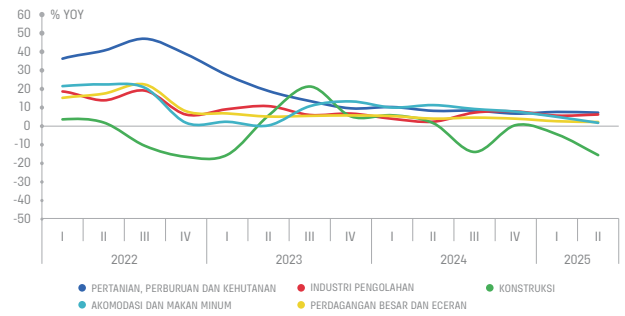
Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

**Grafik 4.24 Perkembangan Pangsa Kredit UMKM Sektoral**



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

**Grafik 4.25 Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM Sektoral**



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

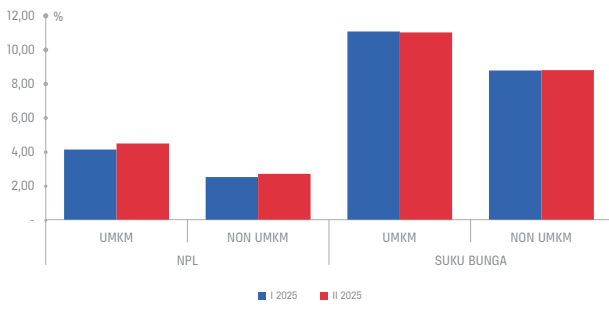
digunakan Bank untuk meningkatkan intermediasi. Selain itu, untuk mendorong pembiayaan UMKM, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Bank UMKM Jatim terus melanjutkan Program Kredit Sejahtera (Prokesra) dengan memberikan fasilitas bunga rendah 3% melalui subsidi sebesar 9,25% yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2025, target penyaluran kredit Prokesra adalah 12.000 hingga 15.000 debitur, dengan plafon pinjaman hingga Rp50 juta dan tenor cicilan maksimal 3 tahun.

Perlambatan pertumbuhan kredit UMKM disebabkan oleh perlambatan penyaluran kredit investasi yang melambat dari 6,95% (yoy) pada triwulan I 2025 menjadi 1,76% (yoy) pada triwulan laporan. Sementara itu, perlambatan lebih dalam tertahan oleh kinerja penyaluran kredit modal kerja yang tumbuh 3,16% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,65% (yoy). Berdasarkan skala usahanya, perlambatan penyaluran kredit UMKM terjadi pada kelompok UMKM skala mikro dan menengah, sementara UMKM skala kecil meningkat. Kinerja penyaluran kredit UMKM skala mikro dan menengah masing-masing melambat dari 0,63% (yoy) dan 4,13% (yoy) pada triwulan I 2025 menjadi kontraksi 1,51% (yoy) untuk UMKM skala mikro dan 1,40% (yoy) untuk UMKM skala menengah pada triwulan laporan. Sementara itu, kredit UMKM kecil terpantau meningkat dari 7,88% (yoy) menjadi 10,34% (yoy). Adapun pangsa penyaluran kredit UMKM pada triwulan II 2025 masih didominasi oleh UMKM skala mikro (46,47%).

**Mayoritas penyaluran kredit UMKM diberikan kepada LU Perdagangan, LU Pertanian, dan LU Industri Pengolahan.** Ketiga sektor tersebut merupakan tiga sektor dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jawa Timur. Pangsa tersebut cenderung stabil dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 4.24). Secara pertumbuhan, penyaluran kredit UMKM mengalami perlambatan pada LU Pertanian, Konstruksi, Perdagangan, dan Penyediaan Akmamin, sementara LU Industri Pengolahan terpantau meningkat (Grafik 4.25).

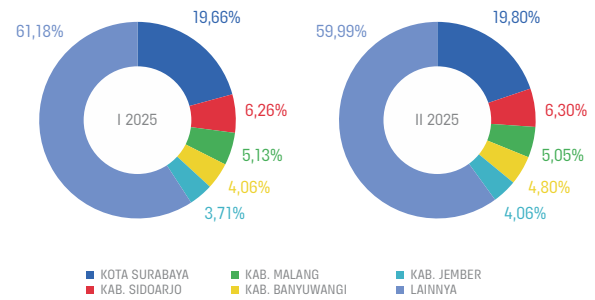
**Kualitas penyaluran kredit UMKM di Jawa Timur masih terjaga di bawah threshold.** Rasio NPL kredit UMKM pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 4,49%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 4,13%, namun masih terjaga di bawah threshold (Grafik 4.26). Terjaganya kualitas kredit UMKM ditengarai turut didorong oleh implementasi PP No.47/2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhitung sejak tanggal 5 November 2024 yang memberikan ruang pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih kredit/pembiayaan UMKM tertentu bagi Bank dan/atau lembaga keuangan nonBank BUMN. Adapun suku bunga tertimbang kredit UMKM terpantau sedikit menurun pada triwulan laporan sejalan dengan tren penurunan BI Rate, yakni dari 11,07% pada triwulan sebelumnya menjadi 11,01% pada triwulan laporan (Grafik 4.26).

**Grafik 4.26 Perkembangan NPL dan Suku Bunga Tertimbang Kredit UMKM**



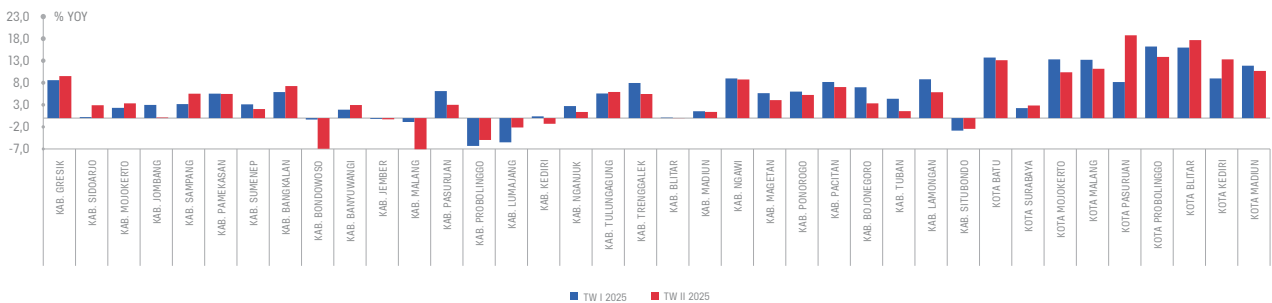
Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

**Grafik 4.27 Proporsi Penyaluran Kredit UMKM Terbesar di Kabupaten/Kota di Jawa Timur**



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

**Grafik 4.28 Pertumbuhan Penyaluran Kredit UMKM Spasial Kabupaten/Kota di Jawa Timur**



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

Secara spasial, kredit UMKM terbesar masih terkonsentrasi di Kota Surabaya. Penyaluran kredit tertinggi terutama terjadi di tiga kabupaten/kota, yaitu Kota Surabaya dengan pangsa 19,80%, Kabupaten Sidoarjo dengan pangsa 6,30%, dan Kabupaten Malang dengan pangsa 5,05% (Grafik 4.27). Tingginya penyaluran kredit pada daerah tersebut sejalan dengan banyaknya jumlah UMKM di wilayah Ibu Kota Provinsi, wilayah padat industri, dan pusat pariwisata Jawa Timur yang berlokasi di tiga daerah tersebut. Adapun mayoritas pertumbuhan penyaluran kredit UMKM seluruh kabupaten/kota pada triwulan II 2025 terpantau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 4.28).

#### 4.5.2. Perkembangan Program Akses Keuangan dan UMKM

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jawa Timur mendorong sinergi pentahelix guna memperkuat fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas melalui peningkatan akses keuangan UMKM untuk mendukung optimalisasi pembiayaan daerah serta mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan tujuan dimaksud, diperlukan upaya mengakselerasi pengembangan UMKM serta Pelaku Usaha Syariah (PUS) yang berlandaskan pada 3 (tiga) pilar kebijakan pengembangan Bank Indonesia, yaitu korporatisasi (penguatan kelembagaan), peningkatan kapasitas (SDM dan usaha), dan penguatan akses pembiayaan sebagaimana yang dilaksanakan oleh KPwBI Jatim pada triwulan II 2025 dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Pengembangan Klaster Tanaman Pangan dan Potensi Ekspor

#### a. Pengembangan Klaster Pangan Strategis

Sebagai upaya mendukung strategi 4K pengendalian inflasi, khususnya pada pilar ketersediaan pasokan, KPwBI Provinsi Jawa Timur melalui program pengembangan kelompok tani/klaster melakukan asesmen pembentukan kelompok tani yang fokus pada komoditas ketahanan pangan Jawa Timur guna mendukung stabilitas inflasi *volatile foods*. Pelaksanaan kajian ini bertujuan untuk menentukan target pengembangan klaster baru dalam rangka peningkatan produksi dan stabilisasi pasokan di daerah sentra. Dari hasil kajian tersebut, KPwBI Prov. Jawa Timur telah melakukan pengembangan dalam bentuk pendampingan kepada 4 (empat) klaster pangan dan 2 (dua) klaster potensial ekspor diantaranya sbb:

##### 1) Klaster Bawang Merah Kabupaten Pamekasan

KPwBI Provinsi Jawa Timur bersama stakeholder terkait melaksanakan pendampingan pengembangan klaster bawang merah di wilayah Pamekasan yang mengacu pada *Good Agricultural Practices* (GAP). Pada triwulan II 2025 kelompok tani menerapkan implementasi sistem sistem penanaman bawang dengan metode *True Shallot Seed* (TSS) sehingga dapat meningkatkan produktivitas sebesar 9,2 ton/ha atau tumbuh 22,6% (ctc). Sejalan dengan perkembangan hasil

produksi, klaster mampu membuat produk turunan dan diproduksi secara masif.

## 2) Klaster Cabai Rawit Tuban

KPwBI Provinsi Jawa Timur mendukung pengembangan kelompok tani cabai rawit guna mendukung ketersediaan pasokan. Berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi pada triwulan II 2025, klaster cabai rawit Tuban masih dalam masa persiapan musim tanam. Dalam rangka mendukung hal tersebut, KPwBI Provinsi Jawa Timur telah memberikan sumur bor guna mendorong efisiensi penggunaan air dalam persiapan musim tanam tiap periode. Program pengembangan juga masih tetap berjalan berkolaborasi bersama Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.

## 3) Klaster Padi Kabupaten Lamongan

Pada triwulan II 2025, KPwBI Provinsi Jawa Timur memberikan dukungan *digital farming* guna mendukung *Good Agricultural Practices* (GAP) berupa *drip irrigation* dan *smart climate controller*. Lebih lanjut, pada periode ini kelompok tani masih dalam tahap pemeliharaan tanaman yang diharapkan dapat dipanen pada triwulan III 2025.

## 4) Klaster Sapi Potong Kabupaten Bojonegoro

KPwBI Provinsi Jawa Timur melakukan pendampingan optimalisasi budidaya sapi potong melalui *bio-security* dalam pembibitan dan penggemukan, pengolahan pakan, pengolahan pupuk organik dan olahan pangan, serta optimalisasi reproduksi melalui inseminasi buatan (IB) sapi peranakan ongole (PO). Pada awal triwulan II 2025, kelompok tani ternak telah memulai penanaman tumbuhan indigofera sebagai bahan pakan ternak yang memiliki kandungan protein lebih tinggi 25% dibanding bahan pakan lainnya. Di sisi hilir, klaster juga telah melakukan implementasi produksi olahan daging secara konsisten.

## b. Pengembangan Klaster Potensial Ekspor

### 1) Klaster Kopi Jombang

Dalam rangka mendukung klaster unggulan daerah yang berorientasi ekspor, KPwBI Provinsi Jawa Timur melaksanakan program pengembangan pada klaster kopi di wilayah Jombang dengan fokus *specialty* yaitu Liberica/Excelsa. Sebagai upaya dalam memperluas jaringan pasar, telah dilakukan realisasi ekspor kopi excelsa ke Jepang sebagai tindak lanjut program *business matching* yang

difasilitasi oleh Bank Indonesia. Pada triwulan II 2025, klaster kopi di Jombang turut ikut serta dalam kegiatan Misi Dagang Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Kalimantan Timur sebagai bentuk dukungan KPwBI Provinsi Jawa Timur terhadap pemasaran produk turunan kopi.

### 2) Klaster Kopi Trawas

Sejalan dengan upaya pengembangan kopi sebagai komoditas potensial ekspor, KPwBI Provinsi Jawa Timur telah melakukan inisiasi peningkatan kapasitas klaster kopi di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Adapun Klaster Kopi Trawas telah mengikuti *cupping scoring* dari 5.758 *coffee lab* dan mendapatkan nilai 83,63 untuk robusta dan 82,50 untuk arabika. Upaya pengembangan ini merupakan tindak lanjut dari *kick-off* program pengembangan klaster selama 5 (lima) tahun ke depan yang dilakukan oleh KPwBI Provinsi Jawa Timur bersama Fakultas Pertanian Universitas pada triwulan II 2025.

## 2. Monitoring terhadap Klaster yang telah Phasing Out

Selain melakukan *monitoring* terhadap klaster binaan eksisting, KPwBI Provinsi Jawa Timur melakukan *monitoring* kepada klaster binaan yang telah *phasing out* untuk mempertahankan kualitas klaster. Klaster yang telah *phasing out* diantaranya sebagai berikut:

### a. Klaster Padi Organik Kabupaten Mojokerto

Klaster mengimplementasikan pertanian organik yang telah tersertifikasi halal dan organik. Selain itu, telah dilakukan implementasi *digital farming* sisi hulu melalui penggunaan teknologi *drone* untuk proses pemupukan yang mampu meningkatkan efisiensi biaya produksi sebesar 15%. Sementara pada sisi hilir, klaster padi organik telah aktif melakukan pemasaran digital melalui sosial media dan *e-commerce* sebagai salah satu strategi perluasan pemasaran untuk meningkatkan penjualan.

### b. Klaster Jagung Madura

Dalam pengembangannya, klaster menggunakan varietas bibit unggul jagung Madura 3 yang telah mencapai peningkatan produktivitas jagung dari yang sebelumnya 3 ton/Ha menjadi 7,1 ton/Ha. Secara lebih spesifik, teknik budidaya untuk 50% petani klaster jagung ini menggunakan *integrated farming* yang memungkinkan untuk memanfaatkan limbah peternakan menjadi pupuk. Di sisi hilir, klaster telah berhasil memasarkan produk olahan/turunan berupa *tatocis* (*tortilla*) berbahan jagung yang telah dipasarkan melalui pasar modern, dan briket yang berasal dari limbah bonggol jagung sebagai alternatif pengganti bahan bakar.

c. **Klaster Sapi Kabupaten Tuban**

Klaster Sapi Tuban telah berhasil menerapkan teknik budidaya sapi potong yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan mampu meningkatkan produktivitas hingga 200%. Pada sisi hilir, klaster ini bekerjasama dengan *platform* penjualan *online (marketplace)* dan berhasil memperoleh *rolling out* transaksi penjualan yang menandai perluasan pemasaran produk klaster.

3. **UMKM Jawa Timur Go Export**

Pada triwulan II 2025, KPwBI Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan UMKM Jatim *Go Export* yang terdiri dari rangkaian *capacity building*, pendampingan, serta *business matching* dengan *potential buyer*. Kegiatan dimaksud diikuti oleh 45 UMKM potensial ekspor yang terdiri dari sektor makanan dan minuman, *craft*, dan *home decor*. KPwBI Provinsi Jawa Timur terus mendukung pengembangan UMKM berorientasi ekspor melalui 2 (dua) strategi, yaitu *pull strategy (market driven)* melalui pameran dan kurasi nasional/internasional serta *push strategy* melalui peningkatan kapasitas, sertifikasi, digitalisasi, dan akses pemasaran. Melalui program ini, diharapkan UMKM dapat memenuhi 3 (tiga) aspek yaitu pemenuhan kapasitas, kontinuitas produksi, serta peningkatan kualitas produk.

4. **SAKA JATIM (Sarana Akselerasi Klaster Agribisnis Jawa Timur)**

Bank Indonesia melakukan pengembangan klaster pangan sebagai upaya mendukung stabilitas nilai Rupiah dalam kerangka pengendalian inflasi baik inflasi nasional maupun inflasi daerah. Selain itu, pendekatan klaster juga menjadi salah satu solusi yang ditawarkan untuk meningkatkan daya saing UMKM khususnya sektor pertanian. Hal ini sejalan dengan strategi pengembangan UMKM Bank Indonesia, yaitu korporatisasi, kapasitas dan pembiayaan. Melalui pendekatan klaster, upaya korporatisasi dilakukan dengan membentuk kelompok untuk memproduksi komoditas tertentu dalam rangka menjaga kontinuitas produksi dan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui fasilitasi bantuan teknis untuk meningkatkan kemampuan petani, baik manajerial maupun peningkatan kualitas produk dan akses pasar, agar berdampak pada peningkatan skala usaha. Selanjutnya, adanya peningkatan skala usaha tersebut diharapkan dapat mempermudah klaster untuk mengakses pembiayaan. Pada triwulan II 2025, KPwBI Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan program SAKA JATIM (Sarana Akselerasi Klaster Agribisnis Jawa Timur) Tahun 2025 sebagai sarana peningkatan kapasitas dengan mengusung konsep pelatihan yang terfokus, berkelanjutan dan militan. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya penjangkaran pengusaha tani potensial yang akan mampu meningkatkan perekonomian Jawa Timur. Hingga saat ini, terdapat 31 klaster dari 7 komoditas strategis yaitu

padi, cabai, bawang merah, jagung, sapi potong, dan ayam petelur yang telah bergabung. Program ini juga merupakan wadah bagi KPwBI Provinsi Jawa Timur untuk melakukan identifikasi rencana pengembangan terhadap klaster potensial.

5. **Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah**

a. Sertifikasi Halal

KPwBI Provinsi Jawa Timur secara konsisten melaksanakan proses pendaftaran dan pendampingan fasilitasi sertifikasi halal kepada UMKM dan/atau pelaku usaha pesantren yang telah dilakukan sejak tahun 2021 dan berhasil memfasilitasi ±700 UMKM telah tersertifikasi halal. Pada tahun 2025, pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal tidak hanya fokus pada produk UMK, namun juga Rumah Penjualan Hewan/Unggas (RPH/U) dengan target 810 produk UMK dan 8 RPH/U. Program ini akan bekerjasama dengan Pusat Kajian Halal Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Lembaga Halal Universitas Negeri Islam Surabaya dan Halal Center Universitas Airlangga Surabaya. Fasilitasi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk untuk siap masuk ke pasar yang lebih luas. Di sisi lain, untuk mendukung sertifikasi halal sisi hulu, akan dilakukan program lanjutan pelatihan dan sertifikasi kompetensi Juru Sembelih Halal (JULEHA) yang telah dimulai sejak tahun 2022 dan menghasilkan 200 peserta lolos ujian sertifikasi. Sampai dengan akhir Juni 2025, telah dilaksanakan sertifikasi kompetensi Juleha sebanyak 120 peserta yang bekerjasama dengan Dinas Peternakan Jawa Timur dan Asosiasi Juru Sembelih Halal Indonesia Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Jawa Timur. Melalui program JULEHA, diharapkan jaminan produk halal disisi hulu akan semakin kuat dan mempermudah proses audit halal ke produk turunannya.

b. Gerakan Sadar Wakaf

Pelaksanaan Gerakan Sadar Wakaf Jawa Timur ditujukan untuk memastikan terciptanya inklusivitas perekonomian untuk meningkatkan akses layanan keuangan sosial syariah bagi kelompok rentan dan berpenghasilan rendah. Program ini berfokus pada sub sektor proyek yang mendukung ketahanan pangan, kelompok subsisten dan *green waqf* dengan 4 (empat) tujuan utama, yaitu: i) Meningkatkan realisasi dana zakat dan wakaf melalui kolaborasi kegiatan; ii) Memperkuat Inklusivitas perekonomian melalui alternatif pembiayaan; iii) Mendorong terciptanya ekosistem perwakafan yang optimal; iv) Mendorong penggunaan *platform* aplikasi Satu Wakaf dan *platform* lainnya oleh masing-masing lembaga ZISWAF. Adapun terdapat 12 lembaga nazhir yang

memiliki proyek riil yang berpotensi dibiayai dengan dana wakaf. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini berkolaborasi dengan tenaga ahli dari Universitas Airlangga Surabaya sebagai tenaga pendamping lembaga dalam melakukan penggalangan dana serta kurator proyek strategis berbasis wakaf yang akan dikampanyekan dalam *platform* digital. Hingga akhir Juni 2025, sebanyak 15 (lima belas) proyek strategis berbasis wakaf telah melakukan *onboarding* pada *platform* aplikasi Satu Wakaf, dan sejumlah lembaga wakaf telah berhasil melakukan *crowd funding*. Ke depan, program ini diharapkan memiliki dampak signifikan sebagai alternatif pembiayaan yang menopang perekonomian berkelanjutan di sektor riil.

c. **Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah**

Tingkat literasi ekonomi syariah Indonesia baru mencapai 42,84%, masih jauh dari target 50% yang ditetapkan Wakil Presiden pada ISEF 2023. Melalui program edukasi/seminar/*talkshow* melalui kerjasama dengan berbagai mitra, terutama *Key Opinion Leader* seperti Dai, Guru, dan Penyuluh Agama,

upaya peningkatan literasi terus dilakukan secara masif di Jawa Timur. Hingga Maret 2025, program ini berhasil meningkatkan literasi 100 anggota IKADI dengan tingkat pemahaman mencapai 91%.

d. **Komoditas Pangan Halal**

Dalam upaya pengembangan ekosistem komoditas pangan halal yang mendukung pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), KPwBI Provinsi Jawa Timur sedang berada di tahap implementasi *best practice greenhouse* sebagai infrastruktur untuk melakukan pembenihan, pembibitan, dan pemeliharaan dalam budidaya komoditas cabai di Ponpes Binaan KPwBI Provinsi Jawa Timur. Hingga akhir bulan Juni 2025, pesantren tersebut telah berhasil melakukan panen perdana komoditas cabai serta dapat memberikan nilai tambah ekonomi kepada pesantren. Ke depan, program ini diharapkan dapat mendorong perekonomian daerah dan kemandirian ekonomi pesantren.

## BOKS 6

## Pelaksanaan *Road to KKI Jawa Timur 2025* : Sinergi dan Kolaborasi dalam Upaya Mendorong Inovasi pada UMKM untuk Menembus Pasar Global dan Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.

**Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis sebagai tulang punggung perekonomian nasional dan daerah.** Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM menopang 61% PDB nasional dan menyerap 97% tenaga kerja (Kemenkop UKM, 2024). Di Jawa Timur, jumlahnya mencapai lebih dari 9,8 juta unit usaha dengan kontribusi sekitar 54% terhadap PDRB provinsi, menjadikannya sektor kunci untuk pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah. Menyadari potensi ini, Bank Indonesia mendorong penguatan UMKM bukan hanya sebagai mesin pertumbuhan, tetapi juga sebagai instrumen strategis menjaga stabilitas harga pangan, khususnya pada kelompok *volatile food* yang kerap memicu inflasi.

Dengan kekayaan komoditas unggulan mulai dari pertanian bernilai tambah, industri pengolahan, hingga kerajinan dan wastra, pengembangan UMKM difokuskan pada 3 (tiga) pilar utama yaitu mempercepat subsektor berpotensi ekspor dan substitusi impor, membangun ekosistem ekonomi inklusif serta ramah lingkungan melalui pembiayaan hijau dan syariah dan memperluas pemanfaatan teknologi digital seperti QRIS, *e-commerce* dan *digital payment*. Strategi ini diyakini akan memperkuat daya saing UMKM, membuka akses pasar global, dan memastikan perannya tetap kokoh sebagai pilar ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan di tengah dinamika global.

Untuk mendukung peran UMKM tersebut, maka Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Jawa Timur (Surabaya, Malang, Kediri, Jember) pada triwulan II dan awal triwulan III 2025 telah menyelenggarakan rangkaian acara *Road to Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2025*. Adapun tema besar yang diusung oleh Kantor Perwakilan BI di Jatim adalah pentingnya memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pengembangan UMKM agar mampu mandiri dan berdaya saing. Acara dimulai pada tanggal 20-22 Juni 2025 melalui pelaksanaan Karya Kreatif Mataraman (KKM) di Kediri, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Sekarkijang Kreatif Fest (SKF) yang dikolaborasi dengan acara Banyuwangi Ethno Carnival 2025 pada tanggal 10-13 Juli 2025. Kegiatan selanjutnya adalah Malang BI-Youth-Tiful Festival (MBF) 2025 yang diadakan pada tanggal 30 Juli-3 Agustus 2025, yang ditutup dengan pelaksanaan *Java Coffee and Flavour Festival (JCFF) 2025* yang dilaksanakan pada tanggal 23-25 Agustus 2025.

Adapun pelaksanaan acara memiliki dampak yang cukup besar terhadap perekonomian dan pengembangan UMKM di Jawa Timur. Secara total, telah dilakukan lebih dari 64 kegiatan yang melibatkan ratusan UMKM sepanjang pelaksanaan acara. Total jumlah peserta yang hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut mencapai 200 ribu orang, dengan total transaksi tercatat mencapai Rp133,58 miliar, meliputi Rp93,36 miliar *business matching* penjualan dan Rp40,22 miliar berupa *business matching* pembiayaan. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan per masing-masing wilayah sebagai berikut:

Secara umum, Strategi pengembangan UMKM dan keuangan digital Kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri disusun dalam 2 rangkaian kegiatan besar: yaitu *Road to KKM* yang terdiri dari rangkaian kegiatan penguatan UMKM seperti *onboarding* UMKM andalan, pendampingan kelompok subsisten, inkubasi kreasi wastra, pelatihan kopi, *business matching* maupun diseminasi hasil kajian, serta penguatan keuangan digital seperti pembentukan ekosistem pembayaran digital dengan kantin/koperasi, pembayaran via QRIS di sekolah, lingkup bayangkara, maupun pelaksanaan lomba dan literasi terkait keuangan digital.

**Gambar 1. Pembukaan Karya Kreatif Mataraman 2025**



Pada puncak acara, diselenggarakan KKM 2025 yang terdiri dari 7 kegiatan meliputi: (1) *Business Matching & Pembiayaan*. Total transaksi Rp13,79 miliar, terdiri dari penjualan Rp6,71 miliar (dalam dan luar negeri) dan pembiayaan Rp7,08 miliar untuk 7 UMKM; (2) Parade Kreasi Wastra Mataraman "Rupantara": menampilkan mode berkelanjutan oleh 30 desainer lokal; (3) Pameran UMKM & *Live Selling*: Diikuti 114 UMKM QRIS, total penjualan Rp1,31 miliar; (4) *Capacity Building & Edukasi* terdapat

## BOKS 6

1.122 peserta *offline* dan 5.360 *online* mengikuti *talkshow* kewirausahaan, digitalisasi pembayaran, QRIS, CBP Rupiah dan perlindungan konsumen, didukung 1.577 *user experience* QRIS; (5) Perlombaan dan kompetisi yaitu berbagai lomba untuk semua usia, termasuk dongeng CBP Rupiah, *voice competition*, *cooking challenge*, *barista art*, *QRIS reels/photo* dan edukasi konsumen; (6) Mataraman *QRIS Run* dengan 3.000 peserta melakukan 31.029 transaksi QRIS sebagai bentuk edukasi digital pembayaran; (7) Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri menutup acara dan mengumumkan pemenang kompetisi.

Gambar 2. Rangkaian Acara SCF x BEC 2025



Karya Kreatif Mataraman (KKM) 2025 bukan sekadar ajang pameran karya, melainkan sebuah panggung inovasi, kolaborasi dan penguatan ekonomi lokal. Melalui kombinasi kegiatan digital dan konvensional, KKM berhasil memadukan edukasi, literasi keuangan, pemasaran bagi UMKM, serta promosi budaya lokal yang menciptakan ruang yang memungkinkan kreativitas dan kewirausahaan tumbuh berdampingan.

Setelah KKM, *Road to KKI* dilanjutkan dengan pelaksanaan Sekarkijang *Creative Fest* (SCF) di Banyuwangi. Pembada utama kegiatan SCF tahun 2025 adalah adanya kolaborasi SCF dengan pelaksanaan Banyuwangi Ethno Carnival yang diselenggarakan pada tanggal 10-13 Juli 2025. Dengan tema "Memperkuat Sinergi dan Inovasi, Membangun UMKM *Go Digital*, *Go Global*", kegiatan SCF menghadirkan beragam kegiatan meliputi kurasi UMKM, pelatihan SIAPIK, *business matching* pembiayaan, *onboarding* UMKM, sertifikasi *digital marketing* BSNP, Forum Bisnis, seminar nasional, *talkshow* pariwisata, sosialisasi CBP dan perlindungan konsumen, *showcase* UMKM, penyaluran program sosial Bank Indonesia, penyerahan sertifikasi JULEHA dan RPU, *live cooking*, dan *capacity building* UMKM kuliner untuk mengedukasi inovasi pangan berbasis cabai kering (diversifikasi pangan), hingga berbagai perlombaan dan hiburan lain.

Antusiasme publik terhadap SCF x BEC 2025 sangat tinggi. Sepanjang rangkaian kegiatan, jumlah peserta dan pengunjung tercatat mencapai 153.000 orang, terdiri atas wisatawan domestik dan mancanegara. Angka ini meliputi pengunjung *showcase* UMKM di Taman Gesibu Banyuwangi, peserta BEC, serta penonton berbagai agenda utama. Dengan kemasan yang menyatu ini, SCF x BEC 2025 tidak hanya menjadi etalase produk, tetapi juga pusat transformasi UMKM menuju daya saing nasional dan global.

Acara *road to KKI* dilanjutkan melalui pelaksanaan Malang Bi-Youth-Tiful Festival (MBF) yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juli s.d. 3 Agustus 2025. Mengangkat tema "Sinergi Inovasi UMKM dan Ekonomi Syariah: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Kemandirian Regional", kegiatan ini merupakan bentuk tindak lanjut dan implementasi program Gernas BBI (Gerakan Nasional Bangga Buat Indonesia), KKI (Karya Kreatif Indonesia), dan FESyar (Festival Ekonomi Syariah) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang. Lebih lanjut, kegiatan MBF bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara Bank Indonesia dengan para mitra kerja dalam pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah.

## BOKS 6

Gambar 3. Prosesi Opening Ceremony MBF (2025)



Kegiatan MBF dibuka oleh Walikota Malang (Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M.) dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur (Bapak M. Noor Nugroho). Adapun kegiatan MBF 2025 mencakup kegiatan pengembangan UMKM dan ekonomi syariah, literasi masyarakat, dan perlombaan/*fun activities*. Kegiatan pengembangan UMKM dan ekonomi syariah mencakup: *Talkshow* terkait *Digital Marketing*, strategi akselerasi UMKM *go Ekspor*, Ekosistem Halal, Wakaf, maupun literasi keuangan seperti investasi pintar, bedah buku maupun sosialisasi CBP. Selain itu juga dilakukan *Business Matching* Pembiayaan, ataupun beberapa ajang perlombaan/*fun activities*, yakni: 1) Lomba karya desain dan *fashion show* tingkat SMK; 2) Lomba kreasi makanan halal, yang dirancang untuk mendorong penganeekaragaman pangan yang halal dan sehat; 3) Lomba menggambar CBP, sebagai bagian dari *Road to FERBI*; 4) Lomba *e-sport*; 5) Lomba wirasaha muda syariah; 6) *Talkshow Beauty in Halal Way*; 7) Fun Zumba; serta 8) *Bankers Idol*.

Rangkaian kegiatan *Road to KKI* ditutup dengan pelaksanaan **Java Coffee and Flavour Festival (JCF) di Surabaya, 23-25 Agustus 2025**. Acara yang diadakan di Kawasan Kota Lama Surabaya mengusung tema "*Crafting Futures Through Local Flavors*". Adapun JCF merupakan sebuah kebaruan dari pelaksanaan *Java Coffee Culture* (JCC) yang telah dilaksanakan sejak 2022. Saat ini, JCF tidak hanya berfokus pada komoditas kopi, namun turut menjadi etalase komoditas potensial ekspor lainnya, yaitu cokelat, dan rempah.

Pada penutupan acara JCF, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyampaikan

perlunya mengeksplorasi potensi komoditas kopi, cokelat, dan rempah di tengah terbukanya pasar global. Jawa Timur merupakan produsen utama kopi Jawa, yang mencapai 48% dari total produksi kopi Jawa. Lebih lanjut, Jawa Timur turut menjadi pusat perdagangan dan pintu ekspor dari wilayah lain seiring peran krusialnya sebagai Gerbang Baru Nusantara. Pada kesempatan yang sama, dilakukan juga *launching QRIS Tap* sebagai bentuk upaya memberikan kemudahan dan kecepatan proses pembayaran digital, yang memungkinkan pengguna tidak harus memindai *QR Code* saat bertransaksi.

Gambar 4. Kegiatan Semarak JCF 2025



Selama 3 (tiga) hari penyelenggaraan, setidaknya telah dilakukan 20 (dua puluh) kegiatan meliputi *Business Matching*, *Showcasing* UMKM, *Talkshow*, *Workshop*, *Competition*, *Fashionpreneur*, *Fashion Show*, dan Semarak JCF, serta melibatkan lebih dari 60 UMKM Kopi, Cokelat, dan Rempah binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia se- Jawa, dan UMKM binaan Pemerintah Kota Surabaya. Kehadiran pengunjung mencapai lebih dari 31 ribu pengunjung, dan total nilai transaksi pada *Business Matching* mencapai Rp107 miliar, baik dari Perdagangan maupun Pembiayaan.

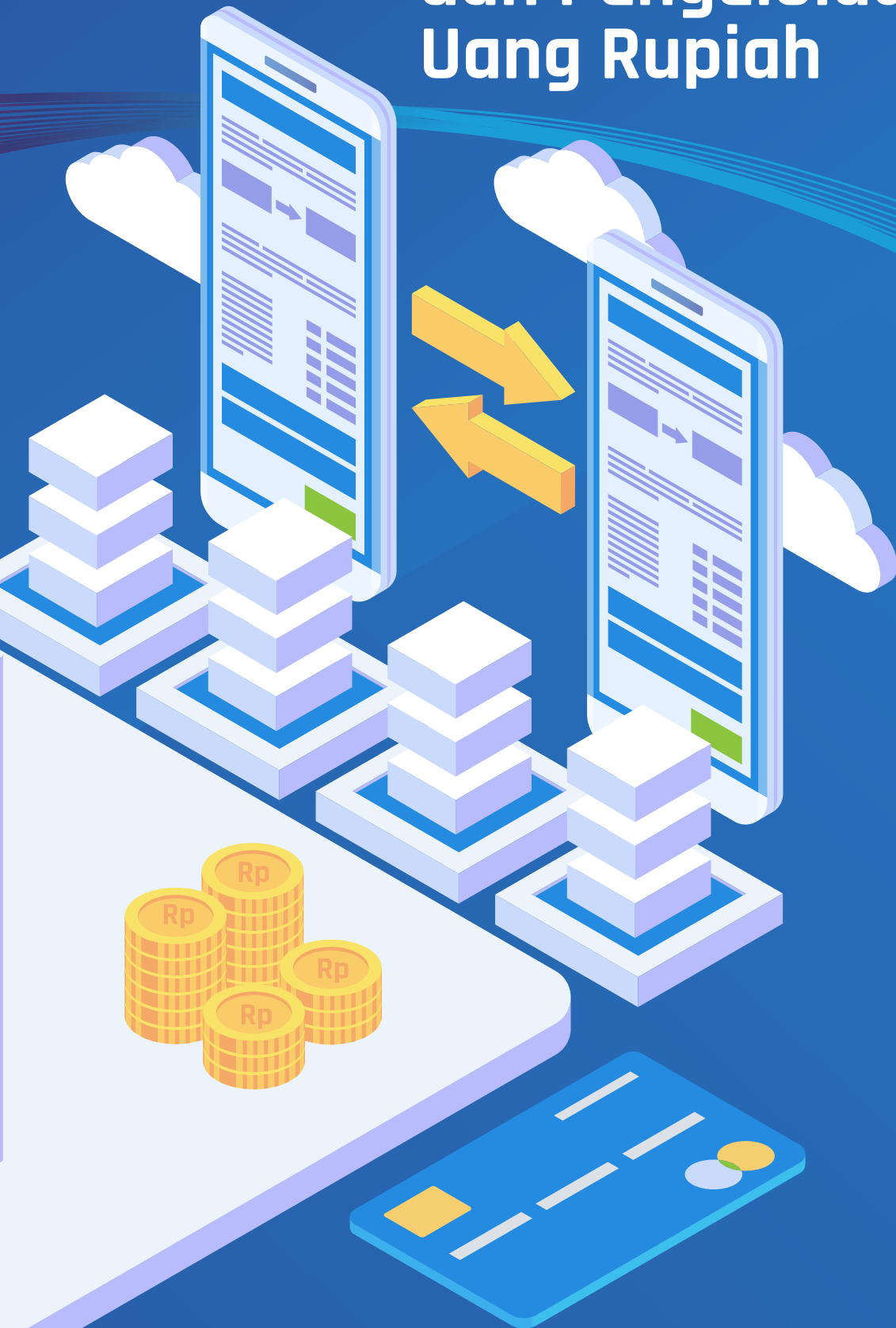
## BOKS 6

Melalui *Road to KKI 2025*, Bank Indonesia akan terus berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah dan seluruh pihak terutama dalam mengembangkan UMKM yang lebih siap untuk bersaing dalam kancah global, mendukung program promosi wisata, serta berkontribusi aktif dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.



BAB V

# Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah



## 5.1. Kondisi Umum

Pada triwulan II 2025, aktivitas sistem pembayaran termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya seiring normalisasi konsumsi pasca momen Imlek, Nyepi, Ramadhan, dan HBKN Idulfitri. Permintaan uang tunai menurun, tecermin dari pergeseran posisi dari *net-outflow* pada triwulan sebelumnya menjadi *net-inflow*. Selaras dengan perlambatan konsumsi rumah tangga, transaksi tunai maupun nontunai mengalami penurunan, termasuk penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE), serta transaksi *e-commerce* yang melambat. Meskipun demikian, penggunaan kartu kredit dalam APMK meningkat di tengah pertumbuhan kredit yang melambat pada triwulan laporan.

Sementara itu, di tengah kinerja sistem pembayaran melalui transfer RTGS dan BI-FAST secara nominal mengalami kontraksi, rata-rata nilai per transaksinya meningkat dibanding triwulan sebelumnya (Tabel 5.1). Kondisi ini menunjukkan adanya perlambatan konsumsi secara agregat, namun juga sejalan dengan akselerasi aktivitas ekonomi pada sektor utama, khususnya pada LU industri pengolahan dan perdagangan. Transaksi perdagangan valuta asing di Jawa Timur tercatat mengalami peningkatan seiring perbaikan kinerja LU Akomodasi serta Makan dan Minum yang didorong oleh lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara pada musim liburan dan penyelenggaraan sejumlah *event* berskala nasional dan internasional di Jawa Timur pada periode laporan, antara lain Traditional Music International Festival, Malang *Flower Carnival*, Festival Nasional Reog, dan Eksotika Bromo, yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Selain itu, volume transaksi QRIS di Jawa Timur tercatat meningkat signifikan pada periode laporan, mencerminkan percepatan adopsi pembayaran digital di masyarakat, baik oleh pelaku usaha maupun konsumen. Peningkatan ini didorong oleh kemudahan transaksi, perluasan jaringan *merchant*, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem pembayaran nontunai, dan selaras dengan akselerasi aktivitas ekonomi, khususnya di sektor perdagangan, jasa, dan UMKM.

Bank Indonesia terus berinovasi dalam mengadaptasi teknologi untuk layanan keuangan, salah satunya melalui pengembangan QRIS<sup>28</sup> Tap dan perluasan ETPD melalui Elektronifikasi Bantuan Sosial Nontunai (BSNT). Pada triwulan II 2025, proses penyaluran BSNT tumbuh melambat akibat peralihan skema dari tunai menjadi nontunai yang memerlukan waktu. Meski demikian, proporsi penyaluran nontunai tetap mendominasi, sejalan dengan kebijakan elektronifikasi bantuan sosial yang terus didorong pemerintah.

Ke depan, jika seluruh penerima telah memiliki rekening nontunai, penyaluran bantuan akan semakin mudah, sehingga komitmen pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan dapat lebih optimal terwujud. Lebih lanjut, Bank Indonesia juga selalu menggalakkan kampanye nasional Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah yang disinergikan dengan berbagai mitra strategis untuk menjaga integritas Rupiah.

## 5.2. Perkembangan Sistem Pembayaran di Jawa Timur

### 5.2.1. Sistem Pembayaran Tunai

#### 5.2.1.1. Aliran Uang Masuk/Keluar (*Cash Inflow /Outflow*)

Pada triwulan II 2025, peredaran uang kartal di Jawa Timur tercatat mengalami *net inflow* seiring normalisasi kebutuhan uang pasca momen Imlek, Nyepi, Ramadhan, dan HBKN Idulfitri pada triwulan sebelumnya. Pada periode laporan, Jawa Timur mencatat *net inflow* sebesar Rp16,39 triliun, berbanding terbalik dengan kondisi triwulan sebelumnya yang mencatat *net outflow* sebesar Rp2,93 triliun. Kondisi ini mencerminkan berkurangnya kebutuhan uang tunai masyarakat untuk bertransaksi, terutama pasca momen Ramadhan dan HBKN Idulfitri (Grafik 5.1).

Tabel 5.1 Perkembangan Sistem Pembayaran Triwulan II 2025

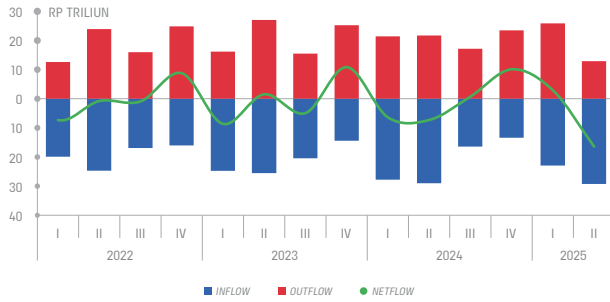
PEMBAYARAN NON-TUNAI	Nominal (Rp Triliun)				Volume (Juta Trx)				Rata-rata Nilai/Transaksi (Rp Triliun/Juta Trx)	
	I-2025	II-2025	YOY I-25 (%)	YOY II-25 (%)	I-2025	II-2025	YOY I-25 (%)	YOY II-25 (%)	I-2025	II-2025
SKNBI	48,15	43,54	(7,10)	(9,32)	0,71	0,66	(8,54)	(11,28)	67,53	65,88
BI-RTGS	362,66	349,64	6,07	(7,27)	0,12	0,10	8,41	(6,78)	3.072,56	3.592,81
APMK	269,89	262,69	3,50	1,35	226,22	222,92	(5,91)	(5,83)	1,19	1,18
UE	17,20	16,50	9,78	4,28	185,46	190,12	11,34	9,95	0,09	0,09
QRIS	26,05	31,65	227,18	157,91	269,39	779,58	272,30	547,56	0,10	0,04
BI-Fast	494,09	493,89	35,74	20,99	187,60	186,64	41,46	24,98	2,63	2,65
KUPVA	2,38	2,42	8,84	10,42						

Sumber: Bank Indonesia (diolah)

28. QRIS Tap yaitu sistem pembayaran nirsentuh berbasis teknologi Near-Field Communication (NFC) yang memungkinkan pengguna menyelesaikan transaksi hanya dengan mendekatkan ponsel, tanpa perlu memindai kode QR secara manual. Proses ini berlangsung sangat cepat sehingga ideal digunakan pada situasi dengan kerumunan atau antrian panjang, seperti di transportasi umum, rumah sakit, maupun area ritel modern. Perluasan ETPD juga mencakup Elektronifikasi Bantuan Sosial Nontunai (BSNT) untuk penyaluran Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH).

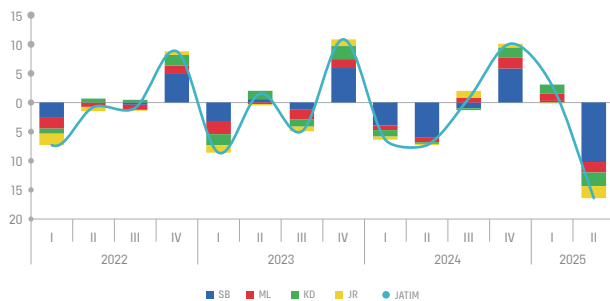
Kondisi *net-inflow* secara spasial terjadi di semua KPwBI di Jawa Timur utamanya KPwBI Provinsi Jawa Timur. *Net-inflow* di BI Jatim berkontribusi sebesar Rp10,21 triliun atau 62,26% terhadap total *net-inflow* di Jawa Timur, diikuti oleh BI Jember, BI Kediri, dan BI Malang dengan kontribusi masing-masing 12,56%, 14,28%, dan 10,89% (Grafik 5.2).

**Grafik 5.1 Perkembangan Inflow-Outflow Uang Kartal**



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

**Grafik 5.2 Kondisi Perkembangan Inflow-Outflow Secara Spasial**



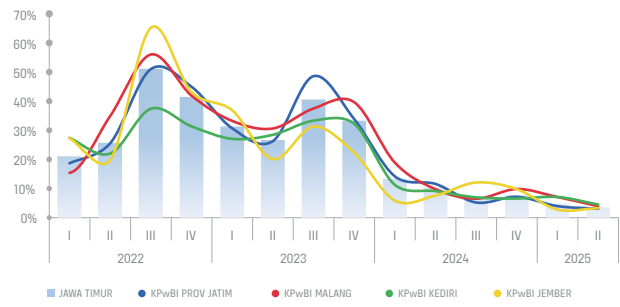
Sumber: Bank Indonesia (diolah)

### 5.2.1.2. Uang Tidak Layak Edar (UTLE)

**Proporsi pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) di Jawa Timur terus menurun pada triwulan II 2025, meskipun jumlah uang yang masuk (*cash-inflow*) meningkat.** Sepanjang periode laporan, Pemusnahan UTLE senilai Rp1,03 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, dari total uang masuk sebesar Rp29,28 triliun (Grafik 5.3).

Bank Indonesia juga gencar meningkatkan kesadaran publik dalam merawat dan menggunakan Rupiah secara bijak melalui kampanye nasional **Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah**. Edukasi ini dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai saluran dan kegiatan. Selama tahun 2025, berbagai kegiatan dilakukan oleh Bank Indonesia Jawa Timur secara terstruktur untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain *Training of Trainers (ToT) CBP Rupiah* bagi guru, mahasiswa, dan pelaku industri perbankan guna memperluas jejaring edukator Rupiah; penyelenggaraan Festival Rupiah Berdaulat dan Amazing Rupiah Festival (ARFest) yang

**Grafik 5.3 Perkembangan Rasio UTLE terhadap Inflow Jawa Timur**



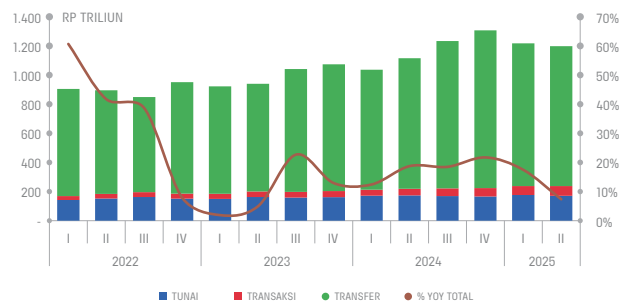
Sumber: Bank Indonesia (diolah)

menampilkan pameran sejarah Rupiah, lomba konten kreatif, dan edukasi interaktif bagi generasi muda; Ekspedisi Rupiah Berdaulat ke daerah 3T yang mencakup edukasi pengenalan uang asli dan layanan penukaran uang tidak layak edar; serta sinergi dengan perbankan untuk meningkatkan pemahaman nasabah perbankan mengenai pentingnya merawat dan menggunakan Rupiah secara bijak. Melalui rangkaian kegiatan ini, Bank Indonesia Jatim berupaya memperkuat literasi, kebanggaan, dan kepedulian masyarakat terhadap Rupiah sekaligus menjaga kualitas uang yang beredar.

### 5.2.2. Sistem Pembayaran

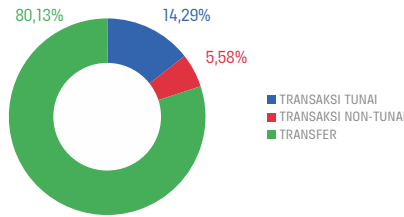
**Kinerja transaksi sistem pembayaran di Jawa Timur pada triwulan II 2025 tetap terjaga dan tumbuh positif.** Kinerja transaksi sistem pembayaran tumbuh melambat sebesar 7,35% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 17,45% (yoy) (Grafik 5.4). Transaksi sistem pembayaran di Jawa Timur pada triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp1.197,91 triliun, terdiri dari transaksi tunai sebesar Rp171,205 miliar yang dilakukan melalui tarik/setor tunai melalui APMK dan UE, transaksi nontunai sebesar Rp66,825 miliar yang dilakukan untuk pembayaran/pembelian secara nontunai melalui QRIS, UE, dan APMK, serta sistem transfer sebesar Rp959,879 miliar yang dilakukan melalui BI-FAST, UE, APMK, RTGS, dan SKNBI. Struktur sistem pembayaran di Jawa Timur didominasi oleh sistem transfer dengan kontribusi 80,13% (Grafik 5.5).

**Grafik 5.4 Total Transaksi Sistem Pembayaran di Jawa Timur**



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.5 Komposisi Sistem Pembayaran Jawa Timur Triwulan II 2025

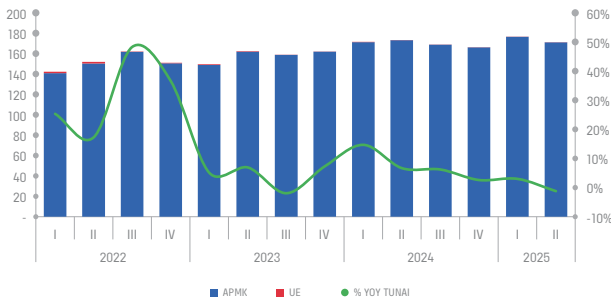


Sumber: Bank Indonesia (dialah)

### 5.2.2.1. Transaksi Sistem Pembayaran Tunai

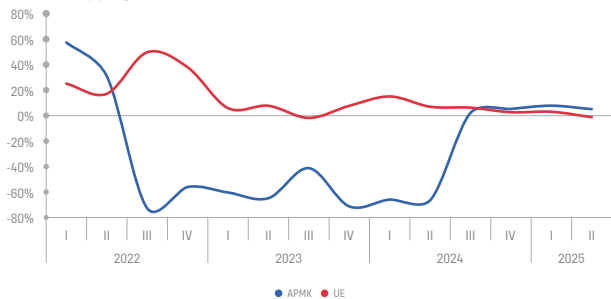
**Aktivitas tarik dan setor tunai melalui APMK dan UE berkontraksi seiring dengan perlambatan konsumsi RT.** Pada triwulan II 2025, transaksi tarik dan setor tunai menggunakan APMK dan UE sebesar Rp171,21 triliun, berkontraksi menjadi 1,23% (yoy) lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,00% (yoy) (Grafik 5.6). Lebih lanjut, kontraksi transaksi tunai dipengaruhi oleh menurunnya pertumbuhan pada komponen UE, sementara transaksi tarik/setor tunai yang dilakukan melalui APMK masih menunjukkan pertumbuhan positif (Grafik 5.7).

Grafik 5.6 Transaksi Sistem Pembayaran Jawa Timur Melalui Tarik/Setor Tunai



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.7 Pertumbuhan Transaksi Sistem Pembayaran Tunai melalui APMK dan UE



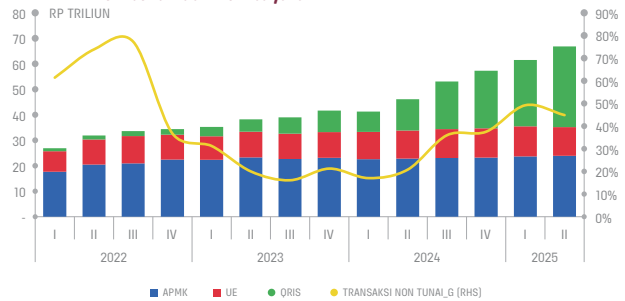
Sumber : Bank Indonesia

### 5.2.2.2. Transaksi Sistem Pembayaran Non Tunai

**Kinerja transaksi sistem pembayaran nontunai tercatat melambat namun tetap tinggi pada triwulan laporan.** Secara nominal, pertumbuhan transaksi nontunai melambat dari sebesar 49,20% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi sebesar 44,85% (yoy). Pelambatan ini terutama dipengaruhi oleh pelambatan pertumbuhan transaksi pembayaran dan pembelian menggunakan APMK dan QRIS. Transaksi non tunai APMK tercatat tumbuh sebesar 4,75% (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 4,88% (yoy). Transaksi non tunai QRIS tercatat tumbuh sebesar 157,91% (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 227,18% (yoy). Pertumbuhan transaksi non tunai menggunakan UE juga melambat, namun masih mencatat tren positif. Transaksi non tunai UE tercatat tumbuh sebesar 2,05% (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 10,21% (yoy).

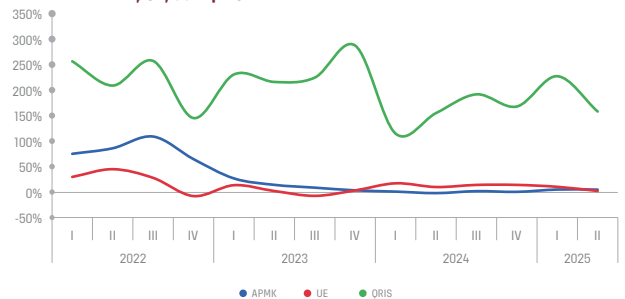
Aktivitas transfer dana melalui sistem pembayaran tumbuh melambat pada triwulan laporan. Transaksi sistem pembayaran kategori transfer melambat dengan pertumbuhan 7,07% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 18,87% (yoy) (Grafik 5.10). Pelambatan ini terutama disebabkan oleh melambatnya kinerja BI-FAST yang menyumbang 51,45% dari total transaksi transfer. Selain itu, kontraksi pada kinerja RTGS dan SKNBI turut memperdalam penurunan transaksi pada sistem transfer secara keseluruhan (Grafik 5.11).

Grafik 5.8 Transaksi Sistem Pembayaran Nontunai di Jawa Timur Untuk Pembelian dan Pembayaran



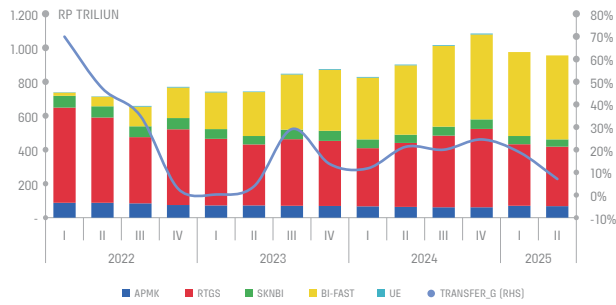
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.9 Pertumbuhan Transaksi Sistem Pembayaran Non Tunai melalui APMK, UE, dan QRIS



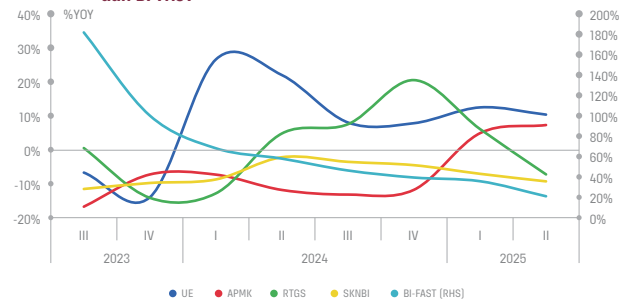
Sumber : Bank Indonesia

**Grafik 5.10 Transaksi Sistem Pembayaran melalui Transfer**



Sumber : Bank Indonesia

**Grafik 5.11 Pertumbuhan Transaksi Transfer melalui APMK, UE, SKNBI, RTGS, dan BI-FAST**



Sumber : Bank Indonesia

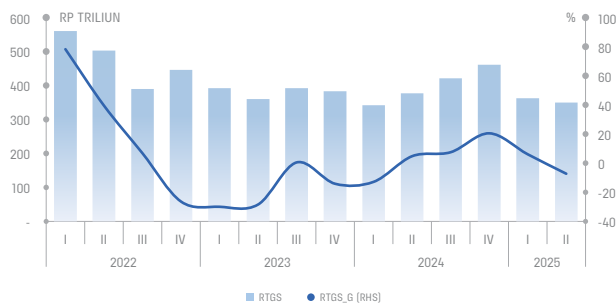
### 5.2.2.1 Transaksi Melalui Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)

Transaksi RTGS di Jawa Timur sepanjang triwulan II 2025 tumbuh menurun dibandingkan tahun sebelumnya merepresentasikan kondisi konsumsi secara agregat yang juga mengalami pelambatan. Total nominal transaksi BI-RTGS di wilayah Jawa Timur pada triwulan II 2025 sebesar Rp349,64 triliun, terkontraksi sebesar 7,27% (yoy) dibanding triwulan lalu yang tumbuh 6,07% (yoy) atau Rp362,66 triliun (Grafik 5.12). Meskipun demikian, rata-rata nilai per transaksi RTGS meningkat dibandingkan triwulan lalu didorong oleh peningkatan aktivitas dunia usaha utamanya pada sektor perdagangan dan kegiatan ekspor impor di Jawa Timur pada periode laporan. Jika pada triwulan sebelumnya rata-rata nilai

transaksi RTGS tercatat sebesar Rp3,07 miliar per warkat, maka pada triwulan laporan meningkat menjadi Rp3,59 miliar per warkat (Grafik 5.13).

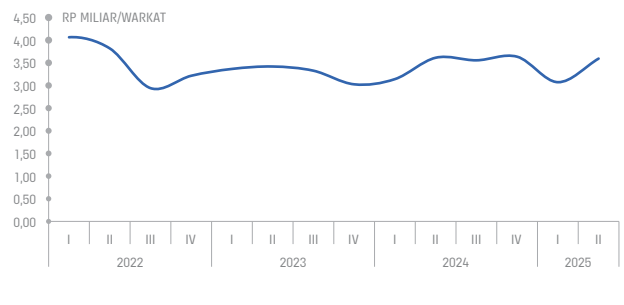
Secara spasial, penurunan kinerja RTGS di Jawa Timur didominasi oleh wilayah Surabaya dan Malang yang menyumbang lebih dari 90% total transaksi RTGS di provinsi ini (Grafik 5.14). Meskipun demikian, perlambatan yang lebih dalam dapat tertahan oleh peningkatan kinerja di wilayah Kediri dan Jember, meskipun kontribusinya relatif kecil yaitu sebesar 7,08% (Grafik 5.15).

**Grafik 5.12 Perkembangan Nominal RTGS Jawa Timur**



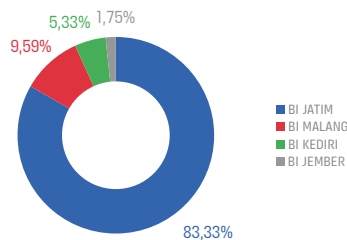
Sumber : Bank Indonesia

**Grafik 5.13 Perkembangan Rata-rata Transaksi RTGS Jawa Timur**



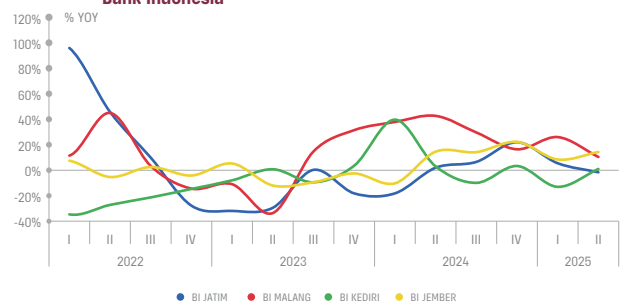
Sumber : Bank Indonesia

**Grafik 5.14 Komposisi Kinerja RTGS Jawa Timur**



Sumber : Bank Indonesia

**Grafik 5.15 Pertumbuhan Transaksi BI-RTGS Per Wilayah Kantor Bank Indonesia**



Sumber : Bank Indonesia

### 5.2.2.2 Transaksi Melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Transaksi kliring di Jawa Timur pada triwulan II 2025 mengalami kontraksi lebih dalam dibanding triwulan sebelumnya. Nilai total kliring triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp43,54 triliun atau terkontraksi lebih dalam sebesar 9,32% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 7,10% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 5.16). Dari sisi volume, jumlah warkat turun dari 713 ribu menjadi 661 ribu. Pelemahan ini terjadi pada kedua jenis kliring, baik kliring kredit maupun kliring debit, yang mencerminkan pergeseran preferensi masyarakat ke kanal pembayaran lain. Penurunan signifikan tersebut diindikasikan terkait dengan meningkatnya adopsi BI-FAST pada transaksi sistem pembayaran non tunai di Jawa Timur.

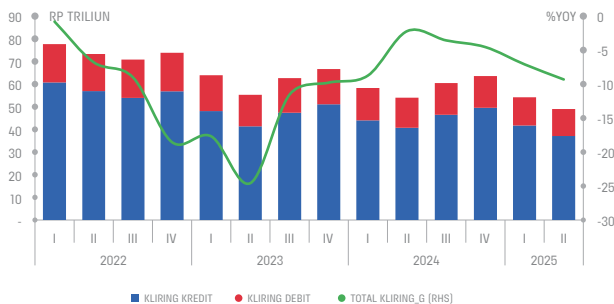
Bank Indonesia terus mengupayakan efisiensi proses pertukaran warkat debit (cek dan bilyet giro) melalui transformasi digital. Sejalan dengan tren penurunan penggunaan warkat debit secara nasional, pada tanggal 1 Maret 2024 Bank Indonesia meluncurkan dan mengaktifasi Aplikasi Pertukaran Warkat Debit Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (PWD SKNBI) di wilayah kliring Surabaya yang melibatkan 79 [tujuh puluh sembilan] bank peserta. Aplikasi berbasis web ini dapat diakses melalui perangkat ponsel dan dilengkapi fitur pelaporan serta presensi petugas secara digital, sehingga meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi dibandingkan sistem sebelumnya yang mengandalkan mesin

reader sorter berbiaya tinggi. Implementasi PWD SKNBI di KPwBI Provinsi Jawa Timur bertujuan menjaga keandalan layanan sistem pembayaran berbasis *paper based* sekaligus mendorong efisiensi operasional. Pada triwulan II 2025, transaksi kliring di Jawa Timur didominasi oleh KPwBI Provinsi Jawa Timur dengan pangsa 76,60%, didukung keberadaan enam Koordinator Pertukaran Warkat Debit (KPWD) dan pusat-pusat industri di wilayah kerjanya, sedangkan kontribusi terendah tercatat di KPwBI Jember sebesar 4,93%. Meski mengalami penurunan, layanan kliring warkat tetap relevan untuk mendukung transaksi dengan fitur pembayaran tunda dan Daftar Hitam Nasional (DHN) (Grafik 5.17).

### 5.2.2.3 Transaksi Melalui Bank Indonesia - Fast Payment (BI-FAST)

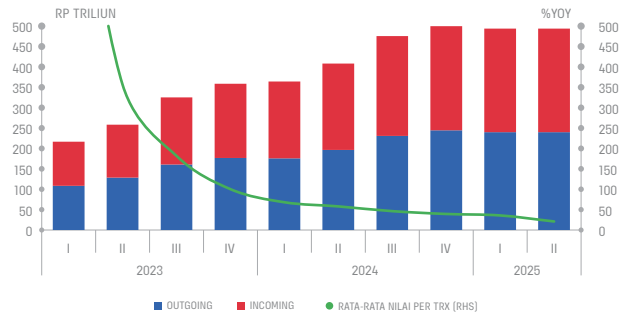
Aktivitas sistem pembayaran menggunakan BI-FAST termoderasi, namun rata-rata nilai per transaksi meningkat. Pada triwulan II 2025, total nominal BI-FAST di Jawa Timur tercatat sebesar Rp493,89 triliun atau tumbuh sebesar 20,99% (yoy) sedikit melambat dibandingkan capaian transaksi triwulan lalu yang tumbuh 35,74% (yoy) atau Rp494,09 triliun (Grafik 5.18). Meskipun demikian, pertumbuhan adopsi BI Fast tercatat masih di atas 20% yang menunjukkan tingkat akseptansi implementasi BI-FAST di Jawa Timur masih terus berlanjut. Selain itu, rata-rata nilai per transaksi BI-FAST dibandingkan triwulan lalu meningkat, dari sebelumnya sebesar Rp2,63 Juta/transaksi menjadi Rp2,65 Juta/transaksi pada triwulan laporan (Grafik 5.19).

Grafik 5.16 Perkembangan Kliring Jawa Timur



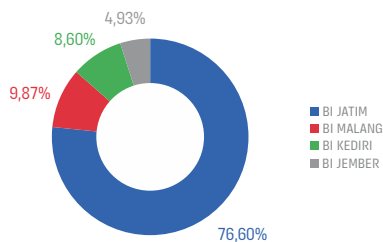
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.18 Perkembangan Transaksi BI-Fast di Jawa Timur



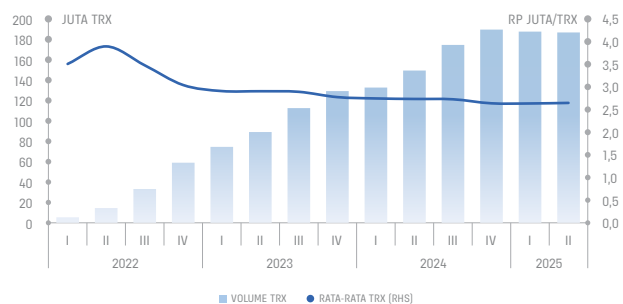
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.17 Transaksi Kliring Spasial Jawa Timur



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.19 Perkembangan Transaksi BI-Fast di Jawa Timur



Sumber : Bank Indonesia

BI-FAST merupakan alat pembayaran yang mendukung Sistem Pembayaran Nasional Modern dan Inklusif. BI-FAST menjadi sistem pembayaran penerus modern dari SKNBI yang menawarkan *real-time settlement* pada level nasabah dan bank serta layanan operasional sepanjang 24/7. Dengan keunggulan seperti sistem deteksi *fraud*, dukungan AML/CFT, *proxy address* alias untuk transfer praktis, serta akses instrumen dan kanal pembayaran yang komprehensif, BI-FAST mencerminkan upaya menjaga sistem yang cepat, aman, fleksibel, komprehensif, dan praktis. Pada tanggal 21 Desember 2024, BI-FAST memperluas kapabilitasnya dengan menambahkan tiga layanan utama (*Bulk Credit Transfer*, *Request for Payment*, dan *Direct Debit*) sehingga semakin inklusif dan efektif dalam mengakomodasi kebutuhan berbagai segmen, dari pembayaran massal, penagihan digital, hingga penagihan otomatis. Sementara itu, SKNBI difokuskan sebagai infrastruktur khusus untuk pemrosesan bilyet giro berbasis kertas dalam sistem pembayaran tradisional.

### 5.2.2.4 Transaksi Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)

**Transaksi menggunakan APMK pada triwulan II 2025 sedikit melambat sejalan dengan perlambatan pada konsumsi.** Pada triwulan II 2025, total nominal transaksi melalui APMK tercatat sebesar Rp262,69 triliun, tumbuh sebesar 1,35% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp269,89 triliun atau tumbuh 3,50% (Grafik 5.20). Berdasarkan

penggunaan, perlambatan kinerja APMK pada triwulan laporan utamanya dipengaruhi oleh aktivitas tarik setor tunai menggunakan kartu debit yang berkontraksi sebesar 1,23% (yoy) dengan kontribusi 67,59%, mencerminkan kebutuhan uang tunai masyarakat dalam berbelanja (Grafik 5.22). Di sisi lain, transaksi kartu kredit tumbuh sebesar 4,63% (yoy) meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,39% (yoy) sejalan dengan penyaluran kredit yang tumbuh positif (Grafik 5.20).

### Penggunaan instrumen kartu debit/ATM dan penyediaan mesin ATM menurun, sementara penggunaan kartu kredit periode laporan meningkat.

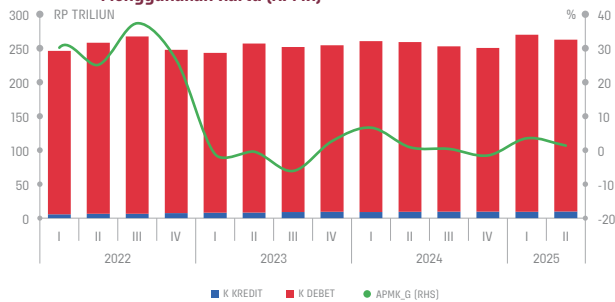
Pada triwulan II 2025, total kepemilikan kartu kredit dan kartu debit/ATM masing-masing mencapai 2,18 juta kartu dan 45,37 juta kartu (Grafik 5.21). Peningkatan penggunaan kartu kredit tecermin dari kinerja kredit RT utamanya pada golongan kredit multiguna yang masih tumbuh positif. Di sisi lain, jumlah mesin ATM di Jawa Timur pada triwulan II 2025 menurun menjadi 10.127 unit dari 10.138 unit pada awal tahun. Jika dibandingkan dengan luas wilayah Jawa Timur, rasio ketersediaan ATM saat ini mencapai 1 : 4,73 km<sup>2</sup>.

### 5.2.2.5 Transaksi Uang Elektronik (UE)

#### Pertumbuhan nominal transaksi menggunakan UE pada triwulan II 2025 melambat sejalan dengan perlambatan konsumsi RT.

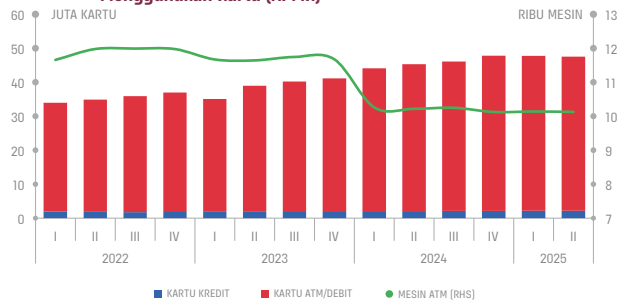
Pada triwulan II 2025, nominal transaksi UE tercatat sebesar Rp16,49 triliun, tumbuh melambat sebesar 4,28% (yoy)

**Grafik 5.20 Perkembangan Transaksi Melalui Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)**



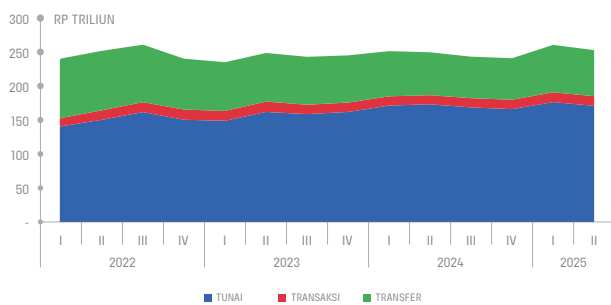
Sumber : Bank Indonesia (diolah)

**Grafik 5.21 Perkembangan Jumlah Instrumen Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)**



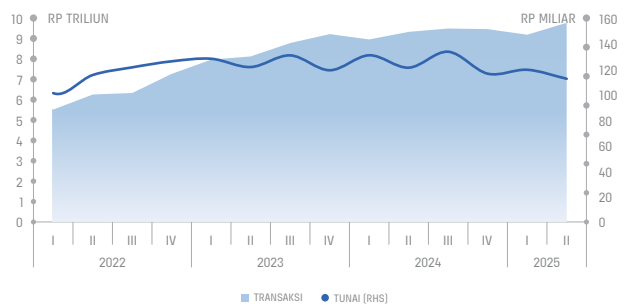
Sumber : Bank Indonesia (diolah)

**Grafik 5.22 Penggunaan Kartu ATM/Debit**



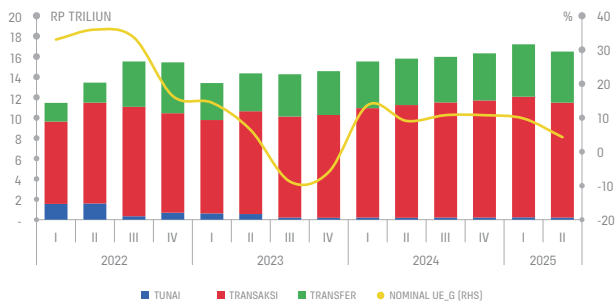
Sumber : Bank Indonesia (diolah)

**Grafik 5.23 Penggunaan Kartu Kredit**



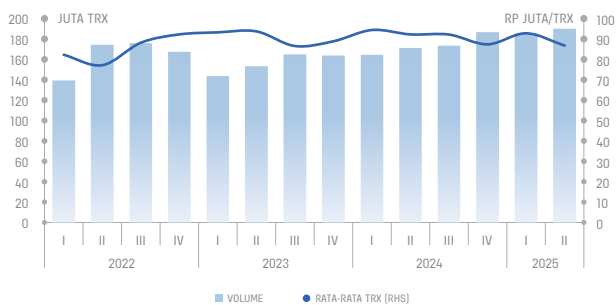
Sumber : Bank Indonesia (diolah)

**Grafik 5. 24 Perkembangan Transaksi Uang Elektronik**



Sumber : Bank Indonesia (diolah)

**Grafik 5. 25 Perkembangan Volume Uang Elektronik**



Sumber : Bank Indonesia (diolah)

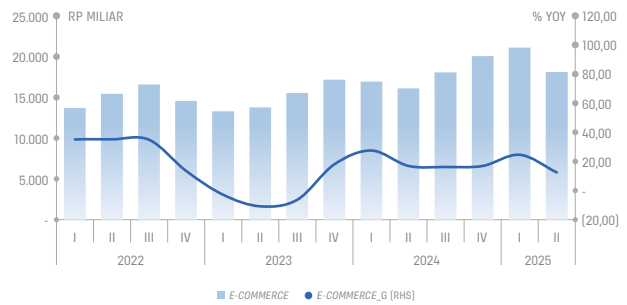
dibandingkan periode triwulan sebelumnya yang sebesar Rp17,21 triliun atau 9,78% (yoy), seiring dengan melambatnya konsumsi RT (Grafik 5.24). Meski demikian, volume transaksi tercatat lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang menyebabkan nilai rata-rata transaksi UE menurun dari sebesar Rp92,77 ribu per transaksi menjadi sebesar Rp86,77 ribu per transaksi (Grafik 5.25).

Pertumbuhan penggunaan uang elektronik (UE) relatif stagnan seiring dengan semakin beragamnya metode pembayaran yang tersedia. Konsumen kini memiliki lebih banyak alternatif, termasuk penggunaan *virtual account single use* dalam transaksi *e-commerce* yang dinilai lebih sesuai untuk nominal transaksi besar dibandingkan uang elektronik berbasis *chip*, sekaligus memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi.

### 5.2.2.6 Transaksi E-Commerce

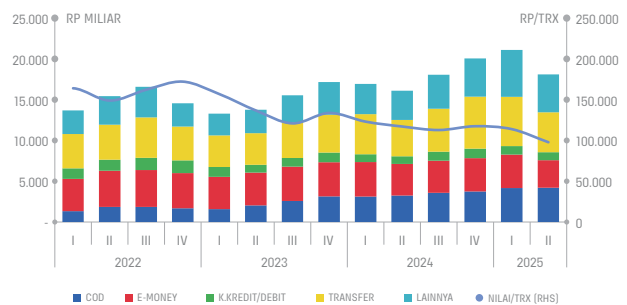
Pertumbuhan transaksi *e-commerce* di Jawa Timur pada triwulan II 2025 melambat, sejalan dengan perlambatan kinerja konsumsi rumah tangga. Data yang digunakan bersumber dari beberapa *marketplace* terbesar di Indonesia sehingga belum sepenuhnya mencerminkan keseluruhan industri *e-commerce*. Meskipun demikian, pergerakan data tersebut dapat menjadi indikasi perkembangan transaksi *e-commerce* akan tetapi tidak serta merta mewakili populasi. Pada triwulan laporan, nominal transaksi *e-commerce* tercatat sebesar

**Grafik 5. 26 Perkembangan Transaksi E-Commerce**



Sumber: 3 (tiga) e-commerce lokal terbesar (diolah)

**Grafik 5. 27 Transaksi E-commerce berdasarkan Jenis Pembayaran**



Sumber: 3 (tiga) e-commerce lokal terbesar (diolah)

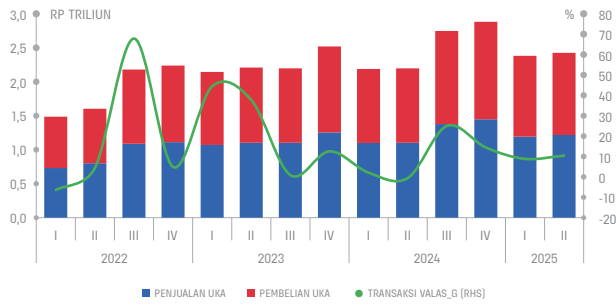
Rp18.09 triliun atau tumbuh 12,45% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 24,57% atau Rp21,09 triliun (Grafik 5.26). Lebih lanjut, nilai rata-rata *e-commerce* per transaksi juga tercatat lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya dari Rp113,86 ribu per transaksi menjadi Rp97,81 ribu per transaksi (Grafik 5.27). Pada triwulan laporan, komposisi transaksi *e-commerce* berdasarkan metode pembayaran adalah COD sebesar 23,24%, uang elektronik/*e-money* sebesar 18,71%, kartu kredit/debit sebesar 5,30%, dan transfer bank sebesar 27,07%.

**Lebih lanjut, berdasarkan kategori pembayaran, nilai transaksi menggunakan Cash on Delivery (COD) menunjukkan tren peningkatan dari waktu ke waktu.** Pola ini mencerminkan strategi baru *e-commerce* untuk memperluas adopsi di wilayah yang belum terjangkau atau bagi konsumen yang baru pertama kali mencoba belanja *online*. COD menjadi pilihan bagi konsumen yang tidak memiliki rekening bank atau kartu kredit, maupun yang belum terbiasa dengan pembayaran digital. Dengan sistem ini, pembayaran dilakukan setelah barang diterima, sehingga konsumen merasa lebih aman dari risiko penipuan atau produk yang tidak sesuai harapan.

### 5.2.2.7 Transaksi Valuta Asing (Valas)

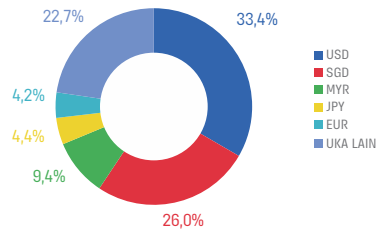
Transaksi Uang Kertas Asing (UKA) di Jawa Timur pada triwulan II 2025 mencatat peningkatan seiring dengan membaiknya arus kunjungan wisatawan mancanegara

**Grafik 5.28 Perkembangan UKA di Jawa Timur**



Sumber : Bank Indonesia (diolah)

**Grafik 5.29 Komposisi Penjualan & Pembelian UKA Berdasarkan Mata Uang**



Sumber : Bank Indonesia (diolah)

[wisman]. Nilai transaksi valas tercatat sebesar Rp2,42 triliun atau tumbuh 10,42% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 8,84% (yoy) senilai Rp2,38 triliun (Grafik 5.28). Perkembangan tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah wisman yang mencapai 92.301 orang atau tumbuh 8,23% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 10,64% (yoy) atau sejumlah 58.209 orang, serta peningkatan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang yang mencapai 50,29%. Peningkatan kunjungan wisman didorong oleh penyelenggaraan berbagai event berskala nasional dan internasional di Jawa Timur pada periode laporan, seperti *Traditional of Music International Festival*, *Malang Flower Carnival*, Festival Nasional Reog, dan Eksotika Bromo yang menjadi daya tarik utama bagi wisman.

**Transaksi valuta asing di Jawa Timur pada triwulan II 2025 kembali didominasi oleh mata uang USD, SGD, dan MYR.** Dari sisi komposisi mata uang, transaksi valas di Jawa Timur baik penjualan maupun pembelian UKA didominasi oleh USD, diikuti oleh SGD dan MYR dengan kontribusi masing-masing 33,4%, 26,0%, dan 9,4% terhadap total transaksi (Grafik 5.29).

### 5.3. Upaya Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

#### 5.3.1. Penanganan Uang Palsu

KPwBI Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan instansi terkait dalam melaksanakan berbagai upaya penanggulangan peredaran uang palsu, baik secara preventif, preemptif, maupun represif. Hingga triwulan II 2025, langkah preventif dan preemptif dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi keaslian uang Rupiah, baik secara langsung melalui program CBP Rupiah maupun publikasi di media massa dan media sosial. Sementara itu, langkah represif melibatkan koordinasi dengan BOTASUPAL (Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu) dalam pemberantasan peredaran uang palsu di Indonesia, bekerja sama dengan berbagai instansi seperti Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, dan Badan Intelijen Negara di Jawa Timur. Khusus di Jawa Timur, kerja sama dengan Polda Jatim, sebagai salah satu unsur BOTASUPAL, dituangkan dalam kesepahaman terkait penanganan dugaan tindak pidana di sektor sistem pembayaran dan penggunaan uang Rupiah.

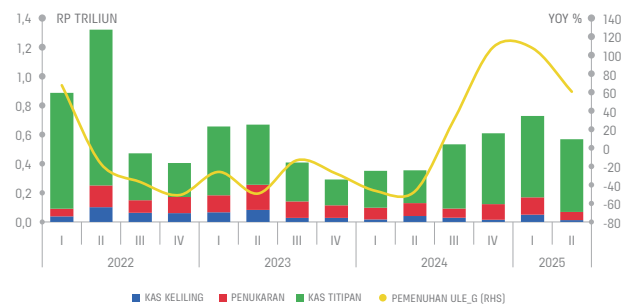
#### 5.3.2. Penyediaan Uang Rupiah

Penyediaan Uang Rupiah pada triwulan II 2025 menurun sejalan dengan berakhirnya puncak pemenuhan ULE pada momen Ramadhan. Pemenuhan Uang Rupiah Layak Edar (ULE) sepanjang triwulan laporan tercatat sebesar Rp568,40 miliar, termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp728,11 miliar. Lebih lanjut, pertumbuhan pemenuhan ULE pada periode laporan juga masih lebih rendah dibandingkan triwulan lalu, dari 107,5% (yoy) menjadi 60,5% (yoy) (Grafik 5.30). Berdasarkan jenisnya, pemenuhan ULE di Jawa Timur dilakukan melalui aktivitas Kas Titipan sebesar 87,97% dan penukaran uang 9,81%. Adapaun secara spasial, 94,57% ULE diedarkan di wilayah Surabaya dan sekitarnya seiring perannya sebagai pusat keuangan Jawa Timur (Grafik 5.31).

**Penyediaan ULE pada triwulan laporan melambat yang didorong oleh terkontraksinya aktivitas penukaran uang dan kas keliling, namun tertahan oleh pertumbuhan positif aktivitas kas titipan.**

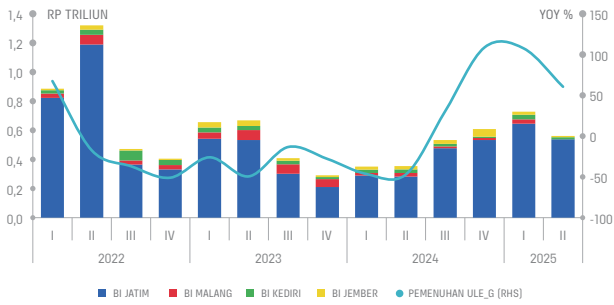
Aktivitas penukaran uang terkontraksi sebesar 37,3% (yoy) atau sebesar Rp55,74 miliar dibandingkan triwulan I 2025 yang

**Grafik 5.30 Nominal Pemenuhan ULE Berdasarkan Jenis**



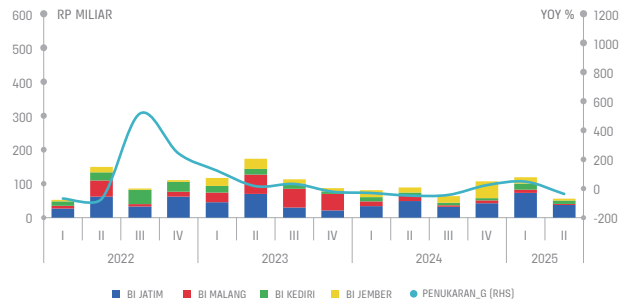
Sumber : Bank Indonesia (diolah)

**Grafik 5.31 Pemenuhan ULE Secara Spasial**



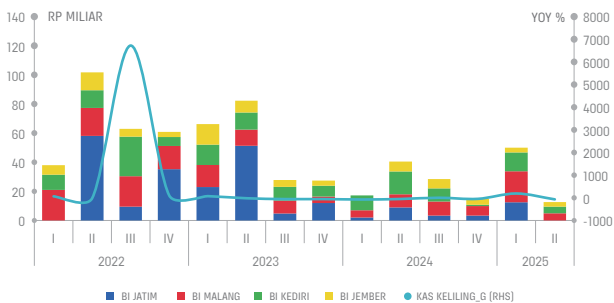
Sumber : Bank Indonesia (diolah)

**Grafik 5.32 Nominal Transaksi Penukaran**



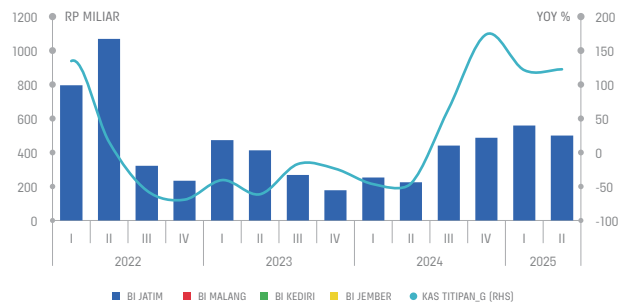
Sumber : Bank Indonesia (diolah)

**Grafik 5.33 Aktivitas Kas Keliling Jawa Timur**



Sumber : Bank Indonesia (diolah)

**Grafik 5.34 Nominal Transaksi Kas Titipan**



Sumber : Bank Indonesia (diolah)

tumbuh sebesar 47,2% (yoy) atau senilai Rp119,04 miliar (Grafik 5.32). Aktivitas Kas Keliling juga mengalami perlambatan pada triwulan II 2025 sebesar -68,7% (yoy) atau sebesar Rp12,66 miliar setelah pada triwulan lalu tumbuh sebesar 190,8% (yoy) atau sebesar Rp50,04 miliar (Grafik 5.33). Sementara itu, pertumbuhan aktivitas kas titipan pada triwulan II 2025 mengalami peningkatan menjadi 122,4% (yoy) atau sebesar Rp500 miliar setelah triwulan lalu tumbuh 121,2% (yoy) atau sebesar Rp559,03 miliar (Grafik 5.34).

### 5.3.3. Pengembangan Layanan Keuangan Nontunai

#### 5.3.3.1 Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)

Bank Indonesia terus berinovasi dalam meningkatkan layanan keuangan nontunai melalui QRIS untuk memenuhi kebutuhan transaksi yang cepat dan masif. QRIS kini berkembang menjadi sistem pembayaran terpadu yang mencakup pembayaran, transfer, tarik dan setor tunai, hingga QRIS Cross-Border untuk transaksi internasional dan dapat diakses melalui berbagai aplikasi seperti *e-wallet*, *mobile banking*, atau uang elektronik berbasis server. Keunggulannya, satu QR Code dapat menerima pembayaran dari berbagai sumber, menjadikannya cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Sebagai bagian dari rangkaian Pekan QRIS Nasional 2025, KPwBI Malang menggelar QRIS Tap<sup>29</sup> Experience di kawasan Kayutangan Heritage, Malang, pada tanggal 12 Agustus 2025 untuk memperkenalkan fitur ini

kepada masyarakat. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan kecepatan, kemudahan, dan efisiensi pembayaran, sekaligus mengoptimalkan kinerja ETPD di Jawa Timur.

**Kinerja transaksi QRIS pada triwulan II 2025 masih tumbuh positif meski mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan perlambatan konsumsi.** Nominal transaksi QRIS pada triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp31,65 triliun atau tumbuh 157,9% (yoy) (Grafik 5.35). Lebih lanjut, rata-rata nilai per transaksi menurun dari Rp96,71 ribu pada triwulan lalu menjadi Rp40,60 ribu (Grafik 5.36). Hal tersebut mencerminkan pergeseran preferensi masyarakat untuk memanfaatkan QRIS pada transaksi bernominal kecil, khususnya yang dilakukan pelaku usaha mikro dan kecil, sehingga turut memperkuat inklusivitas digitalisasi pembayaran.

**Pertumbuhan jumlah merchant QRIS di Jawa Timur tetap melanjutkan tren positif.** Pada Triwulan II 2025, jumlah merchant QRIS di Jawa Timur kembali meningkat sebesar 24,34% (yoy) menjadi 4,66 juta merchant setelah pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 4,51 juta merchant atau dengan pertumbuhan 25,01% (yoy) (Grafik 5.37). Peningkatan jumlah merchant QRIS ini didorong oleh intensifikasi promosi QRIS serta ekspansi PJP untuk mencapai target akuisisi merchant dan peningkatan volume penjualan, yang rata-rata ditargetkan tumbuh di atas 20% (yoy). Dengan jumlah tersebut, Jawa Timur

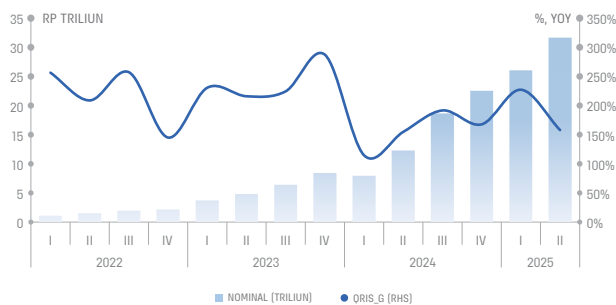
29. Sebagai pengembangan terbaru, pada tanggal 14 Maret 2025 Bank Indonesia meluncurkan QRIS Tap, sistem pembayaran nirsentuh berbasis teknologi Near-Field Communication (NFC) yang memungkinkan pengguna menyelesaikan transaksi hanya dengan mendekatkan ponsel ke terminal, tanpa perlu memindai kode QR secara manual. Prosesnya berlangsung kurang dari 0,3 detik, sehingga ideal untuk situasi dengan kerumunan atau antrian panjang seperti transportasi umum, rumah sakit, maupun area ritel modern.

menjadi provinsi dengan jumlah *merchant* QRIS terbesar ketiga di Indonesia, setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Berdasarkan skala usaha, *merchant* QRIS di Jawa Timur masih didominasi oleh Usaha Mikro dengan pangsa 65,12%. Secara spasial, mayoritas *merchant* QRIS di Jawa Timur masih terkonsentrasi di Kota Surabaya (pangsa 27,5%), diikuti oleh Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo dengan pangsa masing-masing 12,1% dan 8,3%, sejalan dengan tingginya jumlah UMKM yang memanfaatkan QRIS di wilayah tersebut (Grafik 5.38).

**Peningkatan transaksi menggunakan QRIS juga didorong oleh bertambahnya jumlah pengguna/user QRIS<sup>30</sup> di Jawa Timur.** Hingga Triwulan II 2025, total pengguna QRIS mencapai 8,61 juta, dengan penambahan pengguna yang tumbuh 18,4% (yoy)

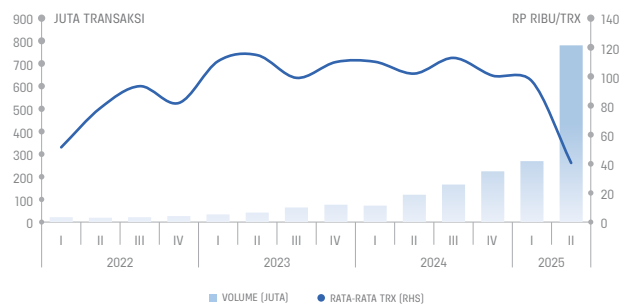
dibanding triwulan sebelumnya yang berjumlah 8,48 juta pengguna atau dengan pertumbuhan 25,4% (yoy) (Grafik 5.39). Pertumbuhan ini didorong oleh gencarnya sosialisasi dan promosi penggunaan QRIS di seluruh Jawa Timur. Upaya tersebut melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah melalui implementasi QRIS pada Bus Trans Jatim, kerja sama dengan perbankan, institusi pendidikan (kampus/sekolah), serta promosi pembayaran menggunakan QRIS bersama pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur. Lebih lanjut, pengguna QRIS di Surabaya berkontribusi 66,1% terhadap total pengguna QRIS di Jawa Timur, dilanjutkan oleh Kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya dengan kontribusi masing-masing 5,8% dan 4,8% (Grafik 5.40).

**Grafik 5.35 Perkembangan Nominal Transaksi QRIS**



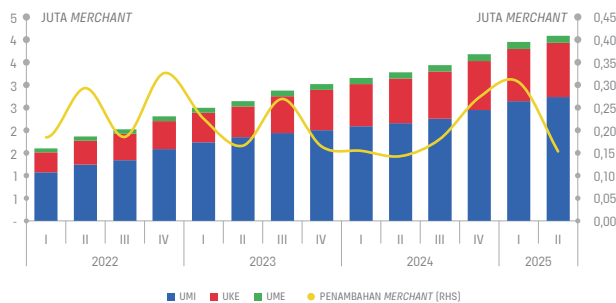
Sumber : Bank Indonesia (diolah)

**Grafik 5.36 Perkembangan Volume Transaksi QRIS**



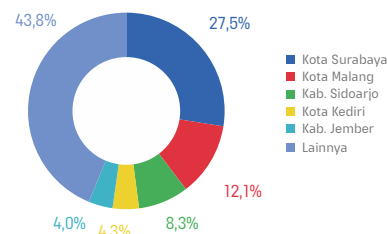
Sumber : Bank Indonesia (diolah)

**Grafik 5.37 Perkembangan Merchant QRIS per Skala Usaha**



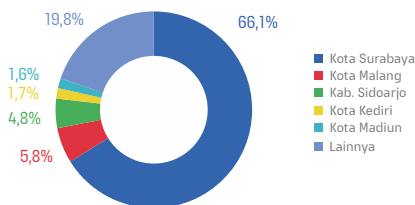
Sumber : Bank Indonesia (diolah)

**Grafik 5.38 Merchant QRIS Spasial di Jawa Timur**



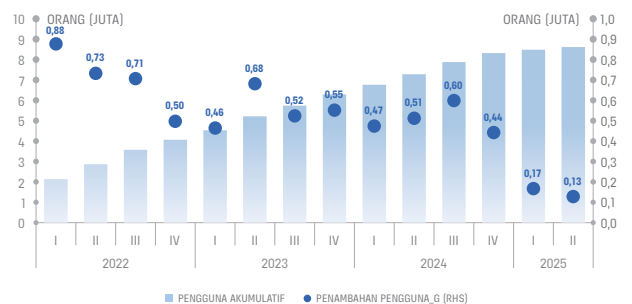
Sumber : Bank Indonesia (diolah)

**Grafik 5.39 Pengguna QRIS Spasial Jawa Timur**



Sumber : Bank Indonesia (diolah)

**Grafik 5.40 Perkembangan Pengguna QRIS**



Sumber : Bank Indonesia (diolah)

30. Pengguna/user QRIS merupakan pihak yang memiliki aplikasi untuk mendukung pembayaran dengan cara memindai QRIS

### 5.3.3.2 Elektronifikasi Bantuan Sosial Nontunai

**Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT)** merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial, sekaligus mendorong inklusi keuangan melalui pemanfaatan sistem pembayaran non tunai. BSNT mencakup penyaluran Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH). Penetapan periode penyaluran, penunjukan pihak penyalur, serta pembagian mekanisme di setiap kabupaten/kota mengikuti kebijakan Kementerian Sosial selaku pemilik program berdasarkan pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Elektronifikasi BSNT diharapkan dapat mempercepat proses distribusi bantuan, mengurangi potensi kebocoran, dan memudahkan pemantauan penyaluran.

disalurkan secara non tunai, sehingga bantuan yang awalnya disalurkan melalui PT Pos secara bertahap dialihkan ke Bank Himbara. Jumlah dana yang disalurkan untuk Program sembako pada triwulan laporan sebesar Rp1,32 triliun, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang penyalurannya sebesar Rp1,77 triliun (penyaluran secara tunai sebesar Rp0,21 triliun dan secara nontunai sebesar Rp1,56 triliun) (Grafik 5.42). Secara spasial, Kab. Bangkalan, Kab. Banyuwangi, dan Kab. Blitar menjadi daerah dengan penyaluran Pogram Sembako yang tertinggi sepanjang triwulan II 2025 dengan nilai penyaluran masing-masing Rp105,69 miliar, Rp70,48 miliar, dan Rp65.31 miliar secara berurutan (Grafik 5.43).

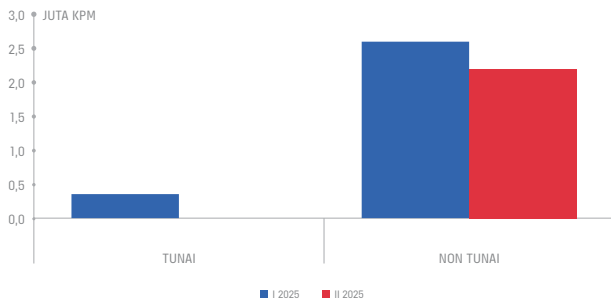
#### a. Penyaluran Program Sembako

Penyaluran Program Sembako di Jawa Timur pada triwulan II 2025 lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan penurunan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada tahun 2025, penyaluran Program Sembako dilakukan dengan dua mekanisme, (1) Secara non tunai melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang meliputi BRI, BNI, dan Bank Mandiri; (2) Secara tunai melalui PT Pos Indonesia. Pada triwulan I 2025, jumlah penerima KPM sebanyak 2,95 juta KPM, sementara pada triwulan laporan turun menjadi 2,19 juta KPM (Grafik 5.41). Pada triwulan II 2025, penyaluran Program Sembako hanya

#### b. Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH)

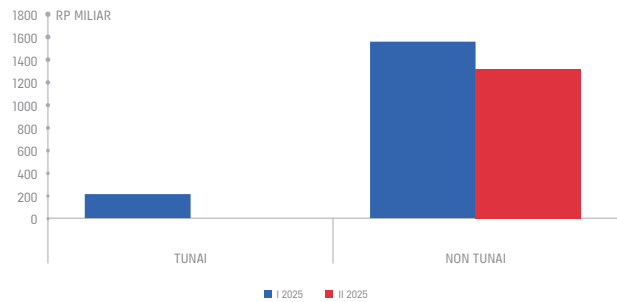
Penyaluran PKH pada triwulan II 2025 tercatat lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya seiring adanya pemutakhiran data dan transisi menuju sistem penyaluran nontunai sesuai Perpres No. 63 tahun 2017. Pada triwulan II 2025, jumlah KPM penerima PKH tercatat 1,275 juta, dengan nilai total penyaluran sebesar Rp945,73 miliar, mengalami penurunan dibandingkan triwulan I 2025 yang mencapai Rp1,119 triliun untuk 1,502 juta KPM (Grafik 5.44 & Grafik 5.45). Kendala teknis pada triwulan laporan terutama terkait pembukaan rekening kolektif (burekol) untuk penerima baru, pembuatan kartu ATM/KKS,

Grafik 5. 41 Penerima Program Sembako di Jawa Timur



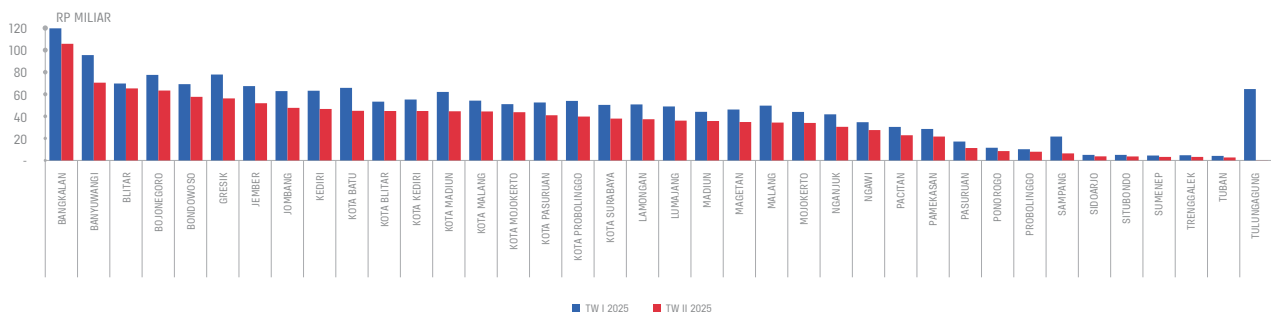
Sumber: Himbara dan Kemenko PM (dialah)

Grafik 5. 42 Penyaluran Program Sembako di Jawa Timur



Sumber: Himbara dan Kemenko PM (dialah)

Grafik 5. 43 Perkembangan Penyaluran Program Sembako Spasial Jawa Timur

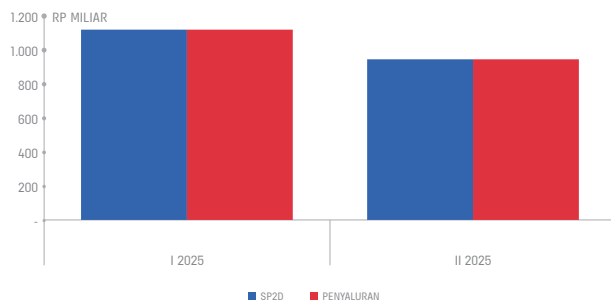


Sumber: Himbara dan Kemenko PM (dialah)

hingga pengiriman ke para penerima manfaat (KPM) yang membutuhkan waktu. Meski terjadi keterlambatan, Kemensos tetap berkomitmen memastikan seluruh bantuan tersalurkan, termasuk memastikan penerima bansos triwulan II 2025 tetap menerima bantuannya setelah proses pembukaan rekening selesai. Pemerintah terus berkoordinasi dengan pihak bank maupun Kantor Pos untuk mempercepat proses penyaluran. Secara spasial, penyaluran PKH pada triwulan ini terlaksana di Kab. Malang, sementara daerah dengan penyaluran terendah terjadi di Kab. Banyuwangi (Gambar 5.46).

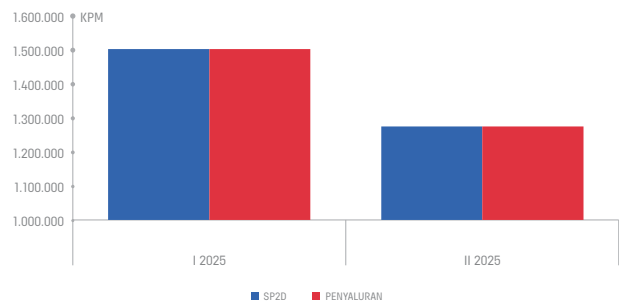
Secara keseluruhan, penyaluran BSNT di Jawa Timur pada triwulan II 2025 mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah KPM maupun nominal bantuan, terutama pada Program Sembako nontunai. Meski demikian, proporsi penyaluran nontunai tetap mendominasi, sejalan dengan kebijakan elektrifikasi bantuan sosial yang terus didorong pemerintah. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan dalam penyaluran bantuan sosial, sekaligus menegaskan arah pengembangan program ke depan.

**Grafik 5. 44 Jumlah Penerima Program PKH di Jawa Timur**



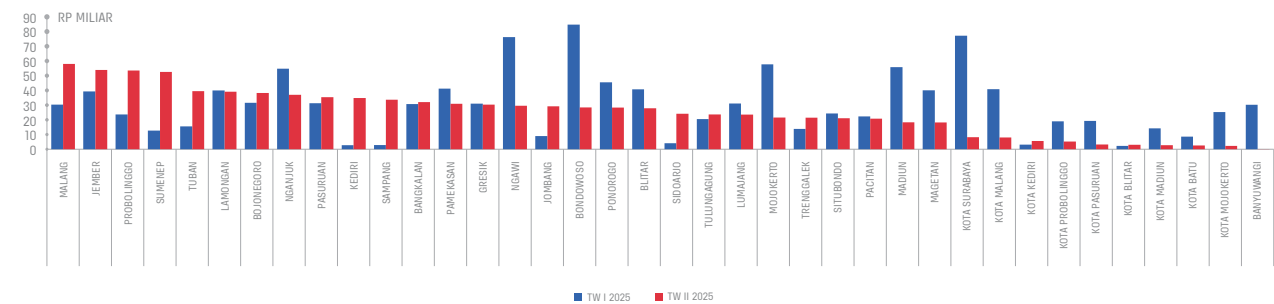
Sumber: Himbara dan Kemenko PM (diolah)

**Grafik 5. 45 Penyaluran Program PKH di Jawa Timur**



Sumber: Himbara dan Kemenko PM (diolah)

**Grafik 5. 46 Penyaluran Program PKH Spasial di Jawa Timur**



Sumber: Himbara dan Kemenko PM (diolah)



BAB VI

# Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan



## 6.1. Gambaran Umum

**Kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada Maret 2025 terpantau meningkat dibandingkan September 2024 dan Maret 2024.** Peningkatan kesejahteraan masyarakat tecermin dari penurunan jumlah penduduk pra-sejahtera di Jawa Timur pada Maret 2025 dibandingkan September 2024 dan Maret 2024 yang diiringi dengan penurunan tingkat kesenjangan ekonomi. Perbaikan tingkat kesejahteraan didukung oleh pertumbuhan ekonomi Jawa Timur hingga triwulan II 2025 yang tumbuh positif, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2025 dibandingkan Agustus 2024 dan Februari 2024, serta konsumsi rumah tangga yang tumbuh meningkat pada triwulan I 2025. Inflasi IHK Jawa Timur pada triwulan I dan II 2025 terjaga di sasaran inflasi nasional  $2,5\% \pm 1\%$  sehingga daya beli masyarakat terjaga. Lebih lanjut, perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur turut didukung oleh adanya program peningkatan kesejahteraan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

**Kesejahteraan masyarakat pedesaan mengalami perbaikan seiring dengan kenaikan harga gabah, peningkatan produksi tebu di tengah peningkatan harga gula, peningkatan permintaan kopi, serta kenaikan penerimaan ternak besar dan kecil yang berimplikasi pada meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan laporan.** NTP meningkat dari 111,61 pada triwulan I 2025 menjadi 112,39 pada triwulan II 2025. Hal tersebut ditopang oleh peningkatan harga gabah di tingkat petani seiring mulai berkurangnya produksi pasca panen raya di triwulan I 2025 dan April 2025. Lebih lanjut, peningkatan produksi tebu yang diiringi kenaikan rata-rata harga gula, peningkatan permintaan kopi, serta peningkatan indeks harga yang diterima ternak besar dan kecil memicu peningkatan NTP pada triwulan laporan. Peningkatan NTP yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan NTP pada tanaman hortikultura dan perikanan. Penurunan NTP tanaman hortikultura terutama terjadi pada penurunan harga bawang merah dan cabai rawit. Sementara lebih rendahnya NTP perikanan seiring penurunan indeks harga perikanan tangkap dan budidaya.

**Kondisi ketenagakerjaan Jawa Timur pada Februari 2025 meningkat dibandingkan Februari 2024 dan Agustus 2024.** Peningkatan kondisi ketenagakerjaan tersebut tecermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) disertai peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Perbaikan tersebut secara umum ditopang oleh pertumbuhan positif dan terjaganya ekonomi Jawa Timur seiring permintaan domestik dan global yang tetap kuat.

**Pada triwulan II 2025, kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur terpantau tetap kuat, terutama pada LU Konstruksi, Transportasi Pergudangan, Informasi Komunikasi, dan Real Estate.** Berdasarkan Survei Kondisi Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia Jawa Timur, penyerapan tenaga kerja meningkat di sektor Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, serta Real Estate. Kenaikan ini sejalan dengan

pertumbuhan positif PDRB di sektor-sektor tersebut pada triwulan II 2025. Penerapan teknologi dan peningkatan kualitas SDM turut mendorong produktivitas, khususnya di sektor Informasi dan Komunikasi serta Real Estate. Peningkatan kualitas pendidikan, serta transisi kualitas tenaga kerja ke sektor formal dan sektor dengan nilai tambah yang lebih tinggi menjadi tantangan utama dalam upaya peningkatan ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Jawa Timur.

## 6.2. Ketenagakerjaan

### 6.2.1. Perkembangan Ketenagakerjaan Jawa Timur

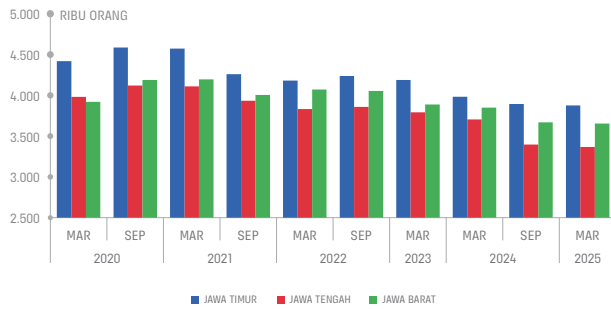
**Tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada Maret 2025 membaik dibandingkan September 2024 dan Maret 2024<sup>31</sup>.** Perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat pada Maret 2025 tecermin dari penurunan jumlah penduduk pra-sejahtera dari 3,89 juta jiwa (9,56% dari total penduduk) pada September 2024 dan 3,90 juta jiwa (9,79% dari total penduduk) pada Maret 2024 menjadi 3,88 juta jiwa (9,50% dari total penduduk) pada Maret 2025 (Grafik 6.1 – 6.2). Perbaikan tingkat kesejahteraan didukung oleh pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan I 2025 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,00% (yoy). Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2025 dibandingkan Agustus 2024 dan Februari 2024, serta konsumsi rumah tangga yang tumbuh meningkat pada triwulan I 2025 turut menunjang perbaikan kesejahteraan Jawa Timur pada Maret 2025. Lebih lanjut, inflasi IHK Jawa Timur pada triwulan I dan II 2025 terjaga di sasaran inflasi nasional  $2,5\% \pm 1\%$  sehingga daya beli masyarakat terjaga<sup>32</sup>. Hal tersebut menyokong perbaikan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

**Peningkatan tingkat kesejahteraan di Jawa Timur yang tecermin dari penurunan jumlah penduduk pra-sejahtera turut didukung oleh realisasi program peningkatan kesejahteraan.** Beberapa program peningkatan kesejahteraan (pengentasan kemiskinan) yang dilakukan di Jawa Timur tahun 2025, meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) Plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), Pembiayaan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin, KANTISTAS (Pendidikan Gratis Berkualitas melalui BPOPP), Jatim Puspa (Pemberdayaan Usaha Perempuan), Program Kredit Sejahtera (Prokesra), dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). Selain itu, juga terdapat beberapa program untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan ekstrem, seperti program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), jambanisasi dan elektrifikasi untuk perbaikan kondisi permukiman.

31. Data terkini yang disampaikan oleh BPS Provinsi Jawa Timur pada 25 Juli 2025.

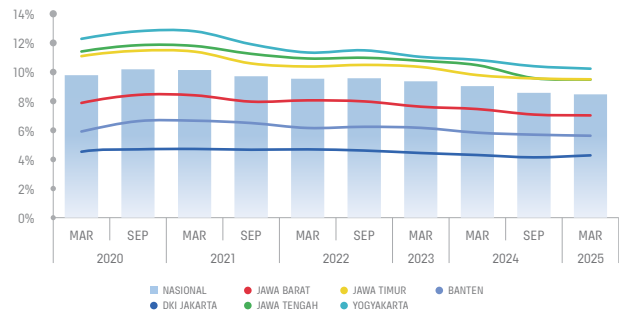
32. Inflasi IHK Jawa Timur pada triwulan I dan II 2025 tercatat 0,77% dan 2,02% (yoy), terjaga pada sasaran inflasi nasional  $2,5\% \pm 1\%$  (yoy).

**Grafik 6.1 Jumlah Penduduk Pra-Sejahtera Provinsi di Wilayah Jawa**



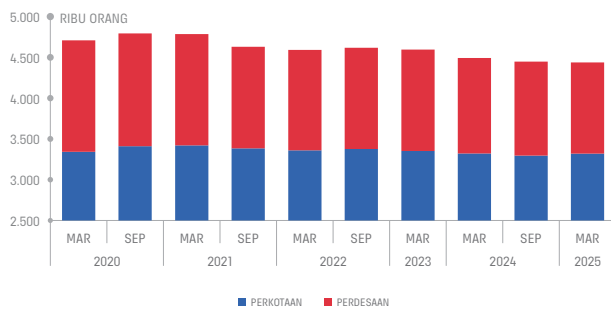
Sumber : BPS Jatim (diolah)

**Grafik 6.2 Persentase Penduduk Pra-Sejahtera Provinsi di Wilayah Jawa**



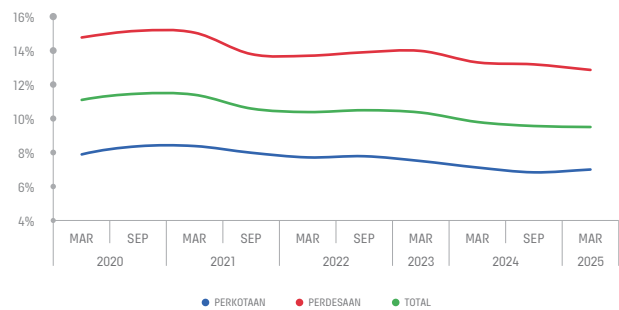
Sumber : BPS Jatim (diolah)

**Grafik 6.3 Jumlah Penduduk Pra-Sejahtera Desa dan Kota**



Sumber : BPS Jatim (diolah)

**Grafik 6.4 Persentase Penduduk Pra-Sejahtera Desa dan Kota**



Sumber : BPS Jatim (diolah)

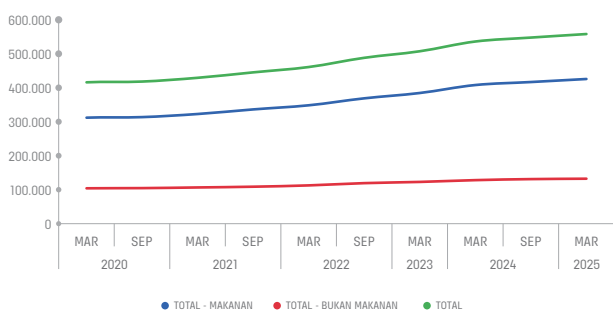
Tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur di wilayah pedesaan pada Maret 2025 meningkat dibandingkan periode Agustus 2024 dan Maret 2024, sementara tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah perkotaan pada Maret 2025 meningkat dibandingkan Maret 2024. Pada Maret 2025, jumlah penduduk pra-sejahtera yang tinggal di perkotaan sebanyak 1,64 juta jiwa (7,00% dari total penduduk di perkotaan), lebih tinggi dibandingkan pada Agustus 2024 (1,59 juta jiwa atau 6,83% dari total penduduk di perkotaan), namun lebih rendah dibandingkan Maret 2024 (1,64 juta jiwa atau 7,12% dari total penduduk di perkotaan). Perbaikan tingkat kesejahteraan Jawa Timur di wilayah perkotaan didorong oleh pertumbuhan LU Industri Pengolahan, Transportasi Pergudangan, Akomodasi Makan Minum, dan Informasi Komunikasi Jawa Timur pada triwulan I 2025, serta penurunan tingkat pengangguran pada periode Februari 2025 dibandingkan Agustus 2024 dan Februari 2024. Sementara itu, jumlah penduduk pra-sejahtera yang tinggal di pedesaan turut menurun dari 2,34 juta jiwa (13,30% dari total penduduk di pedesaan) pada Maret 2024 dan 2,30 juta jiwa (13,19% dari total penduduk di pedesaan) pada September 2024, turun menjadi 2,23 juta jiwa (12,86% dari total penduduk di pedesaan) pada Februari 2025. Hal tersebut ditunjang oleh peningkatan kinerja LU Pertanian pada triwulan I 2025 dan penyaluran bantuan sosial dan realisasi program peningkatan kesejahteraan (pengentasan kemiskinan) di Jawa Timur (Grafik 6.3 – 6.4).

Pada semester II 2025 (September 2025), tingkat kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur diperkirakan membaik dibandingkan semester I 2025 (Maret 2025). Potensi peningkatan kesejahteraan terindikasi dari optimisme Indeks Ekspektasi Penghasilan 6 bulan yang akan datang dan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja 6 bulan yang akan datang berdasarkan SK Bank Indonesia di Jawa Timur<sup>33</sup>. Hal tersebut sejalan dengan potensi daya beli masyarakat yang tetap kuat, tingkat inflasi yang diperkirakan tetap terjaga, serta prakiraan peningkatan kinerja manufaktur dan investasi pada semester II 2025. Selain itu, potensi produksi padi seiring dengan adanya masa tanam dan panen gadu pada triwulan III 2025 turut menunjang perbaikan kesejahteraan masyarakat pada semester II 2025.

**Komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok pra-sejahtera turut menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat.** Upaya peningkatan kesejahteraan (penanggulangan kemiskinan) di Jawa Timur terus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, baik melalui kebijakan makro ekonomi maupun intervensi program. Intervensi program penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur diupayakan melalui program Jatim Satya (Jawa Timur Sejahtera dan Mulia). Program-program tersebut antara lain meliputi; (i) program pemenuhan kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran; (ii) program peningkatan

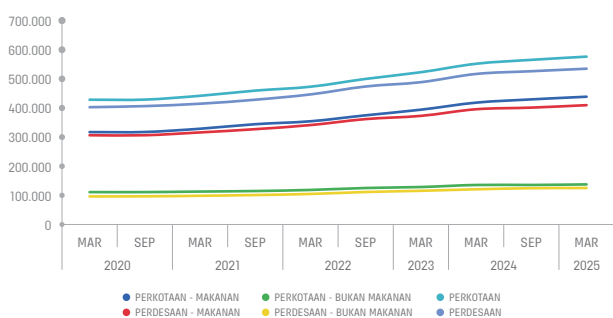
33. Indeks Ekspektasi Penghasilan 6 bulan yang akan datang dan indeks Ketersediaan Lapangan Usaha 6 bulan yang akan datang di Jawa Timur optimis melanjutkan perbaikan (prakiraan angka Maret 2025) masing-masing tercatat sebesar 150,76 dan 148,08 (>100).

**Grafik 6.5 Garis Kemiskinan Makanan dan Nonmakanan**



Sumber : BPS Jatim (diolah)

**Grafik 6.6 Garis Kemiskinan Makanan dan Nonmakanan Desa dan Kota**



Sumber : BPS Jatim (diolah)

pendapatan masyarakat; serta (iii) program untuk mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan. Program pemenuhan kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur berupa program PKH plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), pembiayaan kesehatan untuk masyarakat miskin (Biasesmaskin), pendidikan gratis berkualitas (KANTISTAS) melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP). Beberapa program yang dilaksanakan untuk upaya peningkatan pendapatan masyarakat meliputi program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra), Program Kredit Sejahtera (Prokesra), bantuan permodalan untuk bumdesa, bantuan usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan bantuan usaha untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga melaksanakan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang bekerja sama dengan Dinas PU Bina Marga, Kodam V/Brawijaya dan Lantamal V, program jambanisasi, serta program elektrifikasi guna untuk mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan di Jawa Timur.

34. Garis kemiskinan merupakan harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan non-pangan esensial, seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya. Proporsi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) mencapai 76,29% dari total Garis Kemiskinan. Semakin tinggi nilai komoditas pembentuk GK berimplikasi pada tekanan inflasi yang semakin tinggi.

Kesejahteraan masyarakat Jawa Timur terindikasi meningkat menurunnya jumlah penduduk pra-sejahtera pada periode Maret 2025 dibandingkan September 2024 di tengah peningkatan Garis Kemiskinan (GK)<sup>34</sup>. Garis Kemiskinan Jawa Timur meningkat dari Rp547.751 per kapita/bulan pada September 2024 menjadi Rp558.029 per kapita/bulan pada Maret 2025 (Grafik 6.5 – 6.6). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk di Jawa Timur yang mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan bukan makanan dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

Indikator kesenjangan ekonomi pada Maret 2025 menunjukkan adanya penurunan dibandingkan September 2024 dan Maret 2024. Hal tersebut tecermin dari penurunan Rasio Gini, dari 0,387 pada Maret 2024 dan 0,373 pada September 2024, turun menjadi 0,369 pada Maret 2025. Rasio Gini di perkotaan mengalami penurunan dibandingkan periode September 2024 dan Maret 2024. Sementara itu, Rasio Gini di wilayah pedesaan pada Maret 2025 lebih baik dibandingkan September 2024, namun sedikit lebih tinggi dibandingkan Maret 2024 (Tabel 6.1).

**Tabel 6.1 Rasio Gini Jawa Timur**

TAHUN	GINI RATIO		
	KOTA	DESA	KOTA+DESA
Maret 2018	0,387	0,327	0,379
Sept 2018	0,375	0,322	0,371
Maret 2019	0,379	0,318	0,370
Sept 2019	0,374	0,314	0,364
Maret 2020	0,377	0,316	0,366
Sept 2020	0,373	0,318	0,364
Maret 2021	0,387	0,324	0,374
Sept 2021	0,379	0,319	0,364
Maret 2022	0,388	0,323	0,371
Sept 2022	0,381	0,322	0,365
Mar 2023	0,404	0,337	0,387
Mar 2024	0,387	0,325	0,372
Sep 2024	0,388	0,332	0,373
Mar 2025	0,383	0,326	0,369

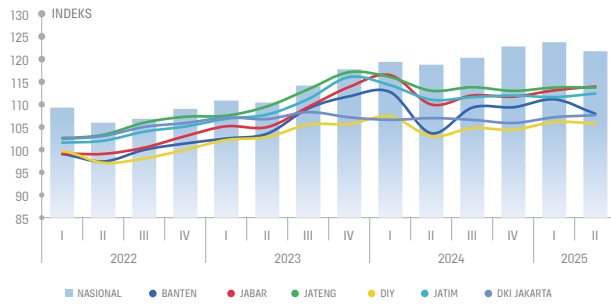
Sumber : BPS Jawa Timur (diolah)

## 6.3. Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan

### 6.3.1. Kesejahteraan Petani

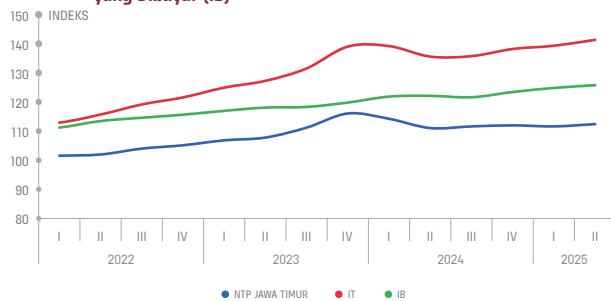
Tingkat kesejahteraan petani di Jawa Timur pada triwulan II 2025 terjaga dan membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Tingkat kesejahteraan petani di Jawa Timur pada triwulan II 2025 yang direpresentasikan oleh Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 112,39, sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2025 yang tercatat sebesar 111,61 lebih dikarenakan adanya kenaikan harga gabah seiring penurunan produksi padi di akhir triwulan II 2025, peningkatan produksi tebu di tengah peningkatan harga gula, peningkatan permintaan kopi, serta

**Grafik 6.7 Perbandingan Nilai Tukar Petani Provinsi di Jawa**



Sumber : BPS (diolah)

**Grafik 6.8 NTP Jawa Timur, Indeks yang Diterima (IT) dan Indeks Harga yang Dibayar (IB)**

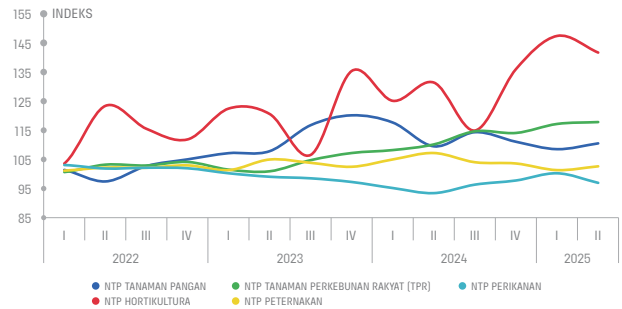


Sumber : BPS (diolah)

kenaikan penerimaan ternak besar dan kecil. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan riil petani karena peningkatan harga dan beberapa hasil panen. NTP Jawa Timur pada triwulan ini berada pada posisi ketiga tertinggi di Jawa setelah Jawa Barat (113,94) dan Jawa Tengah (113,72) [Grafik 6.7].

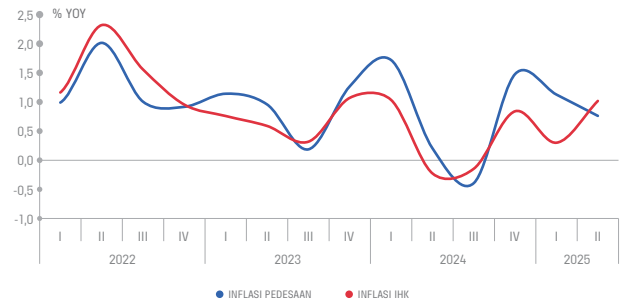
**Berdasarkan sub sektornya, kenaikan NTP di Jawa Timur terjadi pada sub sektor Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan Rakyat, dan Peternakan (Tabel 6.2).** NTP sub sektor Tanaman Pangan meningkat sebesar 1,84% (qtoq) terutama disokong oleh peningkatan harga gabah kering panen (GKP) pada Juni 2025 dibandingkan Desember 2024, yaitu dari Rp6.773 per kg menjadi Rp6.961 per kg. Peningkatan harga gabah di tingkat petani seiring dengan penurunan produksi pasca panen raya di triwulan I 2025 dan April 2025. Peningkatan harga gabah juga dipicu oleh adanya persaingan antar penggilingan besar. Peningkatan NTP sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,54% (qtoq) terindikasi didukung oleh peningkatan komoditas tebu yang diiringi dengan kenaikan rata - rata harga gula pasir dan peningkatan permintaan kopi dengan kualitas panen yang baik, sehingga meningkatkan indeks yang diterima petani pada triwulan laporan. NTP sub sektor Peternakan juga mengalami kenaikan sebesar 1,28% (qtoq). Peningkatan NTP sub sektor Peternakan sejalan dengan peningkatan indeks harga yang diterima ternak besar dan kecil, terutama sapi, kambing, dan domba seiring dengan peningkatan permintaan pada momen HBKN Iduladha 2025.

**Grafik 6.9 NTP Sub Sektor Pertanian Jawa Timur**



Sumber : BPS Jatim (diolah)

**Grafik 6.10 Inflasi Pedesaan Jawa Timur**



Sumber : BPS Jatim (diolah)

Sementara itu, penurunan NTP sub sektor Tanaman Hortikultura sejalan dengan peningkatan indeks harga bawang merah dan cabai rawit pada triwulan II 2025 dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan produksi bawang merah dan cabai rawit menyebabkan penurunan indeks harga pada komoditas tersebut. Selain itu, permintaan pasca momen Ramadhan dan HBKN Idulfitri turut berdampak pada lebih rendahnya indeks yang diterima petani. Lebih lanjut, peningkatan NTP sektor Perikanan terutama karena penurunan harga ikan tangkap maupun budidaya sejalan dengan peningkatan produksi komoditas perikanan tangkap dan perikanan budidaya seperti udang, nila, mujair, cakalang, dan cumi-cumi [Grafik 6.9].

**Nilai konsumsi petani pada triwulan II 2025 meningkat (inflasi), namun lebih rendah dibandingkan triwulan I 2024.** Hal tersebut tecermin dari inflasi pedesaan pada triwulan II 2025 yang mencapai 0,76% (qtoq), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang inflasi sebesar 1,13% (qtoq). Peningkatan indeks harga yang diterima petani terutama terjadi pada komoditas tanaman pangan, tanaman perkebunan rakyat, dan peternakan. Namun, indeks harga yang dibayarkan petani tanaman hortikultura meningkat lebih tinggi dibandingkan indeks yang diterima [Grafik 6.10].

Tabel 6.2 NTP Sub Sektor Pertanian Jawa Timur

KETERANGAN	I 2025	II 2025	PERUBAHAN (%)
<b>TANAMAN PANGAN</b>			
IT	137,45	141,16	2,70%
IB	126,66	127,73	0,84%
NTP - P	108,52	110,51	1,84%
<b>HORTIKULTURA</b>			
IT	182,49	176,79	-3,12%
IB	123,81	124,78	0,78%
NTP - H	147,40	141,68	-3,88%
<b>TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT</b>			
IT	144,17	146,01	1,28%
IB	123,04	123,93	0,72%
NTP - Pr	117,18	117,82	0,54%

Sumber : BPS Jatim (diolah)

KETERANGAN	I 2025	II 2025	PERUBAHAN (%)
<b>PETERNAKAN</b>			
IT	123,64	125,95	1,87%
IB	122,01	122,72	0,58%
NTP - Pt	101,33	102,63	1,28%
<b>PERIKANAN</b>			
IT	121,00	117,73	-2,70%
IB	120,71	121,43	0,60%
NTP - Pi	100,24	96,95	-3,28%
<b>GABUNGAN/ JAWA TIMUR</b>			
IT	139,30	141,33	1,46%
IB	124,81	125,76	0,76%
NTP - JT	111,61	112,39	0,70%

### 6.3.2 Kesejahteraan Nelayan

Tingkat kesejahteraan nelayan di Jawa Timur pada triwulan II 2025 sedikit tertahan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2025, Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jawa Timur sebesar 96,96 lebih rendah dibandingkan triwulan I 2025 yang sebesar 100,49. Lebih rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan lebih dikarenakan peningkatan produksi perikanan tangkap maupun budidaya, sehingga secara pendapatan riil petani masih mengalami peningkatan. Di kawasan Jawa, NTN Jawa Timur berada pada posisi kelima atau terakhir (Grafik 6.11).

Berdasarkan komponennya, penurunan NTN di Jawa Timur disebabkan oleh penurunan indeks harga yang diterima nelayan (IT) di tengah peningkatan indeks harga yang dibayar (IB) nelayan. Indeks harga yang diterima nelayan (IT) mengalami penurunan sebesar -3,08% (qtq) dari triwulan sebelumnya sejalan dengan lebih rendahnya indeks harga pada komoditas ikan tangkap laut maupun perairan umum. Penurunan indeks harga terjadi pada udang, ikan kembung, ikan tuna, ikan cakalang, ikan bawal, ikan belanak, ikan kakap merah, ikan kakap putih, ikan kerisi, ikan cakalang, ikan kerapu, ikan nila, ikan selar, ikan kuniran, dan cumi-cumi. Sementara itu, indeks

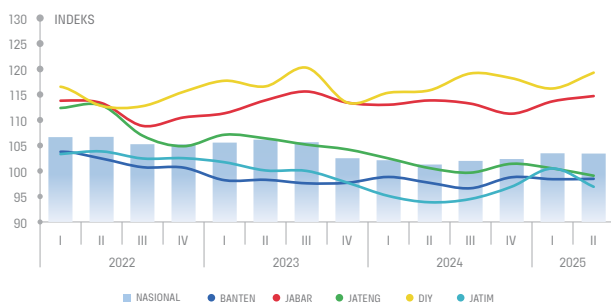
harga yang dibayar nelayan (IB) mengalami peningkatan dari 120,83 pada triwulan IV 2024 menjadi 122,95 pada triwulan II 2025 atau naik sebesar 0,51% (qtq) (Grafik 6.12). Peningkatan IB nelayan dipengaruhi oleh peningkatan biaya konsumsi RT nelayan, terutama pada komponen makanan minuman.

### 6.3.3 Kesejahteraan Peternak

Pada triwulan II 2025, tingkat kesejahteraan peternak di Jawa Timur melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Nilai Tukar Peternak (NT Peternak) Jawa Timur pada triwulan II 2025 sebesar 102,63 lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2025 yang sebesar 101,33. Di kawasan Jawa, Nilai Tukar Peternak Jawa Timur berada pada posisi kedua setelah Jawa Barat (102,65) (Grafik 6.13).

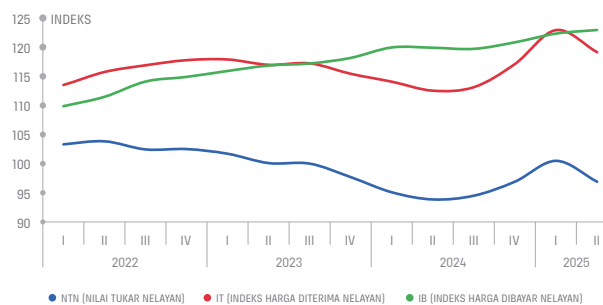
Berdasarkan komponennya, lebih tingginya NT Peternak di Jawa Timur didukung oleh peningkatan indeks harga yang diterima peternak (IT) yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan indeks harga yang dibayar (IB) peternak. IT peternak tercatat sebesar 125,95 atau meningkat sebesar 1,87% (qtq) dari triwulan

Grafik 6.11 Perbandingan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Provinsi di Jawa



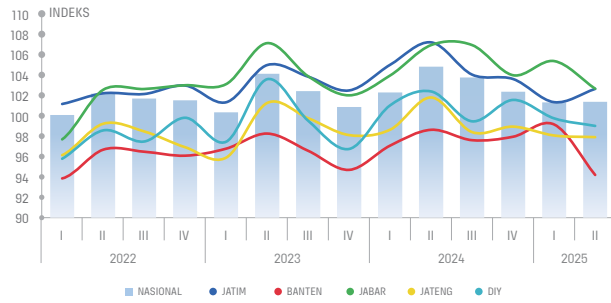
Sumber : BPS Jatim (diolah)

Grafik 6.12 NTN, IT dan IB Nelayan Jawa Timur



Sumber : BPS Jatim (diolah)

**Grafik 6.13 Perbandingan Nilai Tukar Peternak (NTPt) Provinsi di Jawa**



Sumber : BPS Jatim (diolah)

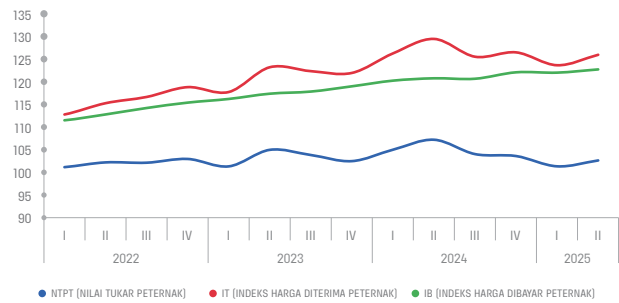
sebelumnya seiring dengan peningkatan indeks harga yang diterima ternak besar dan ternak kecil, seperti sapi, kambing, dan domba. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan permintaan sapi, kambing, dan domba untuk kebutuhan kurban pada momen HBKN Iduladha di akhir triwulan II 2025. Peningkatan indeks harga yang diterima peternak yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan indeks harga hasil ternak, seperti daging dan telur ayam ras pasca peningkatan permintaan pada momen Ramadhan dan menjelang HBKN Idulfitri. Lebih lanjut, IB peternak juga mengalami peningkatan yang lebih terbatas dari 122,01 pada triwulan I 2025 menjadi 122,72 pada triwulan II 2025 atau sedikit meningkat sebesar 0,68% (qtq) (Grafik 6.14). Peningkatan IB peternak tersebut seiring dengan kenaikan biaya untuk pengeluaran konsumsi, terutama komponen makanan minuman.

## 6.4. Ketenagakerjaan

### 6.4.1. Perkembangan Ketenagakerjaan Jawa Timur

**Kondisi ketenagakerjaan Jawa Timur pada Februari 2025 secara struktural mengalami peningkatan dibandingkan Februari 2024.** Perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur tercermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang diiringi dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Februari 2025 dibandingkan dengan Februari 2024. TPT Jawa Timur tercatat sebesar 3,61% pada Februari 2025, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 3,74% (Tabel 6.3). Penurunan TPT ini didorong oleh meningkatnya jumlah pekerja paruh waktu dan setengah menganggur, yang mencerminkan bertambahnya kebutuhan tenaga kerja di sektor pertanian, serta meningkatnya aktivitas ekonomi pada LU Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Kemasyarakatan (khususnya Jasa Kesehatan), LU Transportasi dan Pergudangan, seiring dengan tumbuhnya konsumsi rumah tangga pada triwulan laporan. Lebih lanjut, TPT pada Februari 2025 juga tercatat lebih rendah dibandingkan Agustus 2024 yang sebesar 3,74%. Penurunan ini sebagian besar ditopang oleh bertambahnya tenaga kerja informal. Selain itu, peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor perdagangan juga turut berkontribusi terhadap penurunan TPT, yang berkaitan dengan naiknya permintaan tenaga kerja

**Grafik 6.14 NT Peternak, IT dan IB Peternak Jawa Timur**



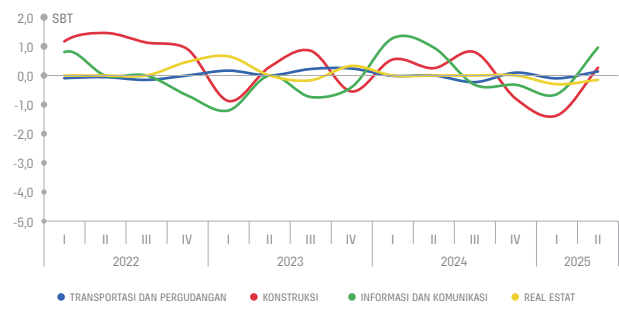
Sumber : BPS Jatim (diolah)

musiman selama bulan Ramadhan dan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri. Meskipun demikian, secara sektoral, lonjakan konsumsi masyarakat pada periode tersebut lebih terkonsentrasi pada sektor jasa makanan dan minuman serta transportasi.

**Sementara itu, TPAK Jawa Timur pada Februari 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan Agustus 2024 dan Februari 2024.**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jawa Timur pada Februari 2025 tercatat sebesar 74,24%, lebih tinggi dibandingkan Agustus 2024 dan Februari 2024 yang masing-masing sebesar 73,46% dan 73,02% (Tabel 6.3). Secara umum, peningkatan TPAK mencerminkan bertambahnya proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif dalam pasar tenaga kerja. Kenaikan ini utamanya didorong oleh meningkatnya jumlah angkatan kerja terampil dan berpendidikan yang tengah mencari pekerjaan, khususnya dari kelompok berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ke atas. Lebih lanjut, tingginya jumlah pencari kerja dari kalangan berpendidikan tinggi pada Februari 2025 relatif lebih mampu diserap oleh pasar tenaga kerja dibandingkan Februari 2024, yang tercermin dari meningkatnya jumlah pekerja penuh waktu dibandingkan pekerja paruh waktu. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Agustus 2024, peningkatan TPAK pada Februari 2025 sebagian besar ditopang oleh bertambahnya jumlah angkatan kerja yang bekerja secara paruh waktu dan setengah menganggur.

**Grafik 6.15 Kondisi Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha**



Sumber: SKDU Bank Indonesia

**Tabel 6.3 Kondisi Ketenagakerjaan Jawa Timur (juta orang)**

KEGIATAN	2022		2023		2024		2025
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>23,04</b>	<b>22,87</b>	<b>23,42</b>	<b>23,87</b>	<b>24,14</b>	<b>24,38</b>	<b>24,75</b>
Bekerja Penuh	13,68	14,31	14,54	15,27	14,62	15,50	15,02
Bekerja Paruh Waktu	6,52	6,06	6,44	6,13	7,02	6,21	7,18
Bekerja Setengah Pengangguran	1,73	1,25	1,43	1,30	1,59	1,65	1,66
Penganggur	1,11	1,26	1,01	1,17	0,90	1,02	0,89
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)</b>	<b>70,98%</b>	<b>71,23%</b>	<b>71,50%</b>	<b>72,56%</b>	<b>73,02%</b>	<b>73,46%</b>	<b>74,24%</b>
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</b>	<b>4,82%</b>	<b>5,49%</b>	<b>4,33%</b>	<b>4,88%</b>	<b>3,74%</b>	<b>4,18%</b>	<b>3,61%</b>
<b>Rasio Ketergantungan</b>	<b>42,21%</b>		<b>43,44%</b>		<b>43,87%</b>		<b>44,30%</b>

Sumber : BPS Jawa Timur (diolah)

**Tabel 6.4 Perbandingan Kinerja Penyerapan Tenaga Kerja dan Nilai Tambah Lapangan Usaha**

LAPANGAN USAHA	Tenaga Kerja (Feb 2025)		PDRB ADHB (Tw II 2025)		Nilai Tambah (PDRB/Tenaga Kerja)
	Jumlah (Juta)	Pangsa	Nominal (Rp. Triliun)	Pangsa	
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7,39	30,97%	50,16	9,85%	6,79
<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>0,10</b>	<b>0,42%</b>	<b>18,39</b>	<b>3,61%</b>	<b>183,88</b>
<b>Industri Pengolahan</b>	<b>3,36</b>	<b>14,08%</b>	<b>155,07</b>	<b>30,44%</b>	<b>46,15</b>
Pengadaan Listrik	0,07	0,29%	1,66	0,33%	23,66
Pengadaan Air, Pengelolaan Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,46%	0,48	0,09%	4,39
Konstruksi	1,56	6,54%	46,35	9,10%	29,71
Perdagangan Besar dan Eceran	4,69	19,66%	94,34	18,52%	20,12
Transportasi dan Pergudangan	0,77	3,23%	17,87	3,51%	23,21
Akomodasi dan Makan Minum	1,88	7,88%	29,51	5,79%	15,70
<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>0,19</b>	<b>0,80%</b>	<b>36,02</b>	<b>7,07%</b>	<b>189,58</b>
<b>Jasa Keuangan</b>	<b>0,22</b>	<b>0,92%</b>	<b>11,83</b>	<b>2,32%</b>	<b>53,76</b>
<b>Real Estate</b>	<b>0,05</b>	<b>0,21%</b>	<b>8,67</b>	<b>1,70%</b>	<b>173,38</b>
Jasa Perusahaan	0,36	1,51%	4,23	0,83%	11,75
Administrasi Pemerintahan	0,56	2,35%	9,70	1,90%	17,31
Jasa Pendidikan	1,09	4,57%	13,51	2,65%	12,39
Jasa Kesehatan	0,41	1,72%	3,78	0,74%	9,22
Jasa Lainnya	1,05	4,40%	7,90	1,55%	7,52
<b>TOTAL</b>	<b>23,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>509,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>21,35</b>

Sumber : BPS Jatim (diolah)

**Nilai tambah penyerapan tenaga kerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB relatif terbatas karena produktivitas terhadap PDRB yang relatif rendah.** Rendahnya produktivitas LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menjadi penyerap tenaga kerja tertinggi berdampak pada rendahnya pendapatan per pekerja di LU tersebut. Sebaliknya, LU Industri Pengolahan, LU Pertambangan, LU Informasi dan Komunikasi, LU Jasa Keuangan, dan LU *Real Estate* yang menyerap 14,08%, 0,42%, 0,80%, 0,92%, dan 0,21% tenaga kerja berkontribusi 45,14% terhadap PDRB Jawa Timur. Penggunaan teknologi dan kualitas tenaga kerja yang lebih tinggi pada LU Industri Pengolahan, LU Pertambangan, LU Informasi dan Komunikasi, LU Jasa Keuangan, dan LU *Real Estate* ditengarai menjadi salah satu faktor pendorong produktivitas pada LU tersebut (Tabel 6.4). Sebaliknya, rendahnya pendidikan pada

LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, LU Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah, serta pada LU Jasa Lainnya juga menunjukkan kebutuhan tenaga terampil yang relatif rendah.

**Pada triwulan II 2025, kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur tercatat tetap kuat, terutama pada LU Konstruksi, Transportasi Pergudangan, Informasi Komunikasi, dan Real Estate.** Berdasarkan Survei Kondisi Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia Jawa Timur, peningkatan penyerapan tenaga kerja terjadi pada LU Konstruksi, Transportasi Pergudangan, Informasi Komunikasi, dan *Real Estate*. Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyerapan tenaga kerja pada LU Konstruksi, Transportasi Pergudangan, Informasi Komunikasi, dan *Real Estate* pada triwulan II 2025 masing – masing tercatat sebesar -0,46%, 0,76%, -0,08%, dan 0,72% (SBT), lebih tinggi dibandingkan

triwulan sebelumnya sebesar -0,66%, 0,05%, -0,16%, dan 0,43% (SBT) (Grafik 6.15). Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejalan dengan meningkatnya kinerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada LU Konstruksi, Transportasi Pergudangan, dan *Real Estate*, serta LU Informasi dan Komunikasi yang mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan II tahun 2025. Lebih lanjut, pengaplikasian teknologi dan lebih tingginya kualitas tenaga kerja pada LU Informasi dan Komunikasi dan *Real Estate* menjadi salah satu faktor pendorong produktivitas pada LU tersebut (Tabel 6.4). Peningkatan kualitas pendidikan, serta transisi kualitas tenaga kerja ke sektor formal dan sektor dengan nilai tambah yang lebih tinggi menjadi tantangan utama dalam upaya peningkatan ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Jawa Timur.

**BOKS 7**

**Strategi Integrasi untuk Daya Saing Ekonomi:  
Sinergi Industri Padat Modal & Padat Karya di Jawa Timur**

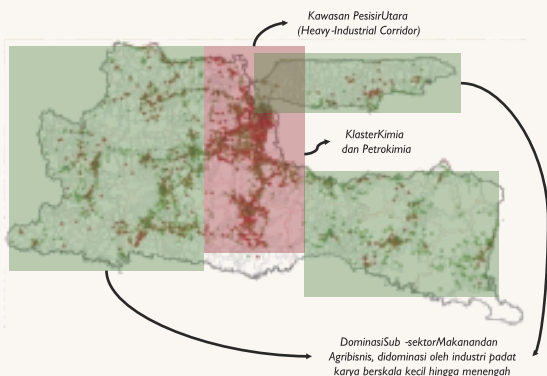
Provinsi Jawa Timur menempati posisi strategis sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional dengan kontribusi sekitar 14,44% terhadap PDB Indonesia pada Triwulan II 2025. Pada periode tersebut, ekonomi Jawa Timur tumbuh sebesar 5,23% dibandingkan Triwulan II 2024 (yoy). Kinerja ini didukung oleh sektor industri pengolahan yang tetap menjadi tulang punggung, menyumbang sekitar 30,44% terhadap total PDRB Jawa Timur mencatat pertumbuhan 7,39% yoy dan memiliki pangsa terbesar kedua sebesar 19,30% dari PDB industri pengolahan nasional (ADHB). Struktur industri provinsi ini mencakup kombinasi industri padat modal (*capital-intensive*) yang mengandalkan teknologi dan investasi besar, serta industri padat karya (*labor-intensive*) yang menyerap tenaga kerja masif. Secara historis, industri padat karya mendominasi, didorong surplus tenaga kerja Jawa Timur, namun tren investasi terkini mulai mengarah ke sektor padat modal seperti pertambangan, infrastruktur transportasi, dan logistik. Meskipun keduanya punya peran vital bagi perekonomian, perkembangan industri padat karya dan padat modal masih perlu disinergikan. Hal ini berisiko menciptakan pertumbuhan terfragmentasi dan kesenjangan wilayah. Perlu sinergi yang seimbang antara industri padat modal dan padat karya untuk mendukung penciptaan lapangan kerja sekaligus meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inovasi, selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.

Upaya menemukan titik temu antara industri padat karya dan padat modal tersebut membutuhkan pemetaan yang komprehensif berbasis data, seperti yang ditunjukkan dalam paper karya finalis *East Java*

*Economic Forum* (EJAVEC) 2025 yang berjudul “*The Secret Behind East Java/s Industrial Boom: Capital Meets Labour*” menggabungkan pendekatan analisis spasial, *big data*, dan *machine learning* untuk memetakan konsentrasi serta persebaran industri padat modal dan padat karya di Jawa Timur. Data yang digunakan mencakup lokasi industri, jarak ke fasilitas logistik (pelabuhan, bandara, jalan tol), intensitas aktivitas ekonomi malam dengan *Night Time Light* (NTL), dan kepadatan *Point of Interest* (POI).

**Distribusi industri manufaktur Jawa Timur menunjukkan pola spasial dan sektoral yang cukup berbeda antara koridor pesisir utara dengan daerah tengah maupun daerah selatan.** Kawasan Pesisir Utara Jawa Timur menjadi pusat manufaktur terbesar dengan konsentrasi industri tinggi di Sidoarjo (1.190 unit), Gresik (715 unit), Pasuruan dan Probolinggo (masing-masing 546 unit), didominasi subsektor makanan, karet, plastik, dan kimia, didukung kawasan industri terpadu, pelabuhan, dan jaringan logistik multimoda koridor utara Trans-Jawa. Subsektor makanan menduduki posisi terbesar dengan 1.608 unit usaha, mencerminkan kuatnya rantai nilai agribisnis dari hulu hingga hilir, sedangkan industri kimia dan barang galian bukan logam (masing-masing 416 dan 398 unit) terkonsentrasi di Gresik, Pasuruan, dan Probolinggo, menjadikan kawasan ini motor penggerak manufaktur berat. Di sisi lain, wilayah agropolitan dan *hinterland* seperti Jember (152 unit), Banyuwangi (48 unit), dan Blitar (85 unit) lebih mengandalkan industri agro, sedangkan Ngawi, Magetan, dan Pacitan memiliki basis manufaktur terbatas.

**Gambar 1. Persebaran Industri Padat Karya dan Padat Modal Jawa Timur**



**Gambar 2. Persebaran Fasilitas Logistik di Provinsi Jawa Timur**



**BOKS 7**

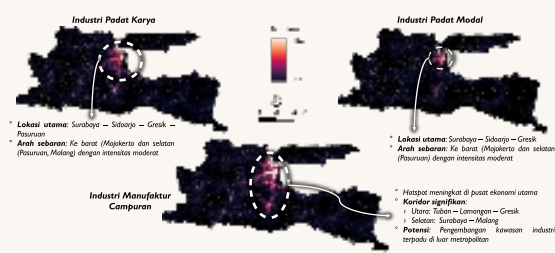
Struktur industri ini membentuk ketimpangan spasial, yaitu koridor utara berperan sebagai kontributor utama PDRB manufaktur dan ekspor nonmigas, sementara selatan, timur, dan barat membutuhkan penguatan rantai pasok agrikultur dan industri ringan. Berdasarkan klasifikasi Kemenperin 2013, Surabaya dan Sidoarjo didominasi industri padat karya meski padat modal juga signifikan, sedangkan Gresik, Pasuruan, dan Mojokerto menampilkan keseimbangan keduanya. Kota-kota seperti Malang, Jombang, dan Tulungagung masih mengandalkan industri padat karya skala kecil-menengah, sementara *hinterland* seperti Bondowoso, Lumajang, Pacitan, dan Sampang menghadapi keterbatasan modal dan kapasitas produksi. Peta komposisi menunjukkan klaster terbesar terpusat di Gerbangkertosusila dan sepanjang jalur logistik utama, sedangkan pinggiran masih bergantung pada industri padat karya skala kecil.

Analisis spasial industri manufaktur di Jawa Timur menunjukkan bahwa kawasan metropolitan Surabaya–Sidoarjo memiliki konsentrasi aktivitas tertinggi, ditandai oleh jumlah unit industri terbesar, intensitas *Night Time Light* (NTL) tertinggi, kepadatan *Point of Interest* (POI), serta akses logistik dalam radius kurang dari 3 km, menjadikannya pusat utama produksi dan distribusi. Sedangkan Gresik, Pasuruan, dan Mojokerto menunjukkan keseimbangan antara industri padat modal dan padat karya, adapun kota sekunder seperti Malang, Madiun, dan Jember menjadi hub penting bagi industri padat karya. Di luar itu, wilayah *hinterland* seperti Bondowoso, Lumajang, Pacitan, dan Sampang masih tertinggal karena infrastruktur terbatas dan jarak logistik >7 km. Lebih lanjut pemetaan menggunakan metode *Kernel Density Estimation* (KDE) menunjukkan bahwa industri padat modal banyak terkonsentrasi di koridor utara, sementara industri

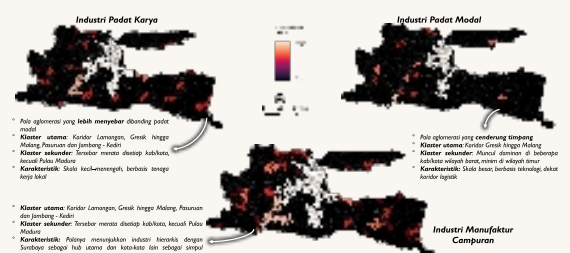
padat karya lebih menyebar hingga ke wilayah agraris. Ketika kedua jenis industri ini digabungkan, terlihat terbentuknya jalur strategis seperti Tuban–Lamongan–Gresik dan Surabaya–Malang. Pola ini memberikan gambaran yang jelas bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan zonasi, memperkuat jaringan logistik, dan mengembangkan kawasan industri terpadu yang mampu mengoptimalkan kekuatan kedua jenis industri tersebut, sehingga pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dapat lebih merata.

Analisis klasterisasi industri mengidentifikasi pola sebaran spasial dan hubungan antar pusat industri padat modal dan padat karya di Jawa Timur menggunakan DBSCAN dengan parameter radius jarak sebesar 5 km. Terdapat pola aglomerasi multipolar, yakni kawasan metropolitan timur laut terutama koridor Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik menjadi pusat utama industri padat modal, sementara industri padat karya tersebar lebih luas ke kota sekunder seperti Malang, Madiun, Jombang, Kediri, dan Tulungagung, serta muncul klaster kecil di wilayah agraris seperti Banyuwangi dan Bondowoso. Peta gabungan menunjukkan keterkaitan spasial yang membentuk jaringan hierarkis. Surabaya berperan sebagai hub utama, sedangkan kota dan kabupaten lain menjadi simpul sekunder yang terhubung melalui koridor lintas wilayah, termasuk Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Blitar dan Madiun, Ngawi, Bojonegoro. Pola ini menegaskan pergeseran dari aglomerasi terpusat ke jaringan industri terintegrasi, memperkuat temuan bahwa sinergi antara industri padat modal dan padat karya, dengan dukungan sistem logistik terpadu, menjadi kunci menciptakan efisiensi sekaligus memperluas penciptaan lapangan kerja di seluruh Jawa Timur.

**Gambar 3. Intensitas Kepadatan Industri dengan KDE**

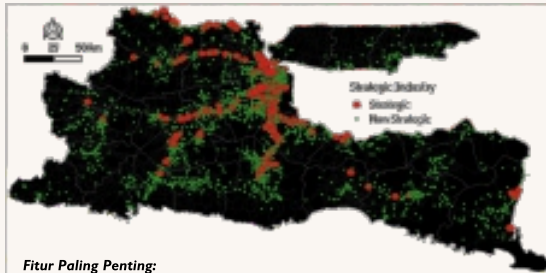


**Gambar 4. DBSCAN Klasterisasi Aglomerasi Industri**



**BOKS 7**

**Gambar 5. Persebaran Hasil Permodelan Industri Strategis dan Non Strategis di Provinsi Jawa Timur**



**Fitur Paling Penting:**

• Analisis feature importance dari kedua model menunjukkan bahwa akses dan jaringan logistik (akses & titik logistik) adalah faktor paling krusial yang menentukan kestrategisan suatu industri.

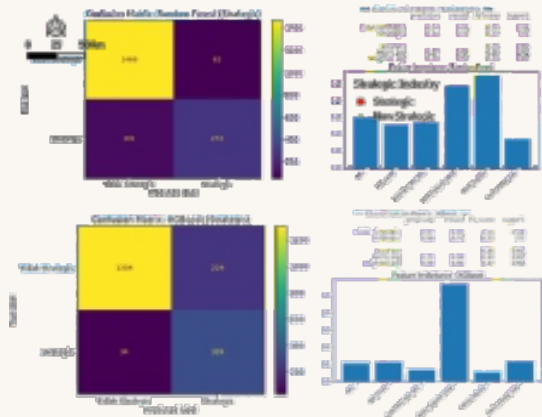
Analisis *machine learning* terhadap kestrategisan kawasan industri manufaktur di Jawa Timur menunjukkan bahwa faktor logistik adalah kunci utama penentu daya saing suatu lokasi industri. Penelitian ini menggunakan data *night time light* (NTL) untuk menggambarkan aktivitas industri padat modal, jumlah titik aktivitas atau *point of interest* (POI) untuk industri padat karya, serta menggabungkan keduanya dengan data rasio modal wilayah dan jarak ke infrastruktur logistik. Dari 6.334 titik industri yang dianalisis, model *Random Forest* memberikan hasil paling seimbang dengan akurasi tinggi (91%) dan presisi yang baik (81%), sedangkan *XGBoost* lebih unggul untuk mendeteksi sebanyak mungkin lokasi strategis dengan tingkat ketepatan tangkapan (*recall*) yang sangat tinggi (91%). Kesimpulannya, kemudahan akses ke jalur dan fasilitas logistik terbukti jauh lebih berpengaruh daripada hanya

melihat jenis industrinya. Artinya, memperkuat konektivitas logistik bukan hanya akan mempercepat aliran barang, tetapi juga mempererat hubungan antara industri padat modal dan padat karya, yang pada akhirnya mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

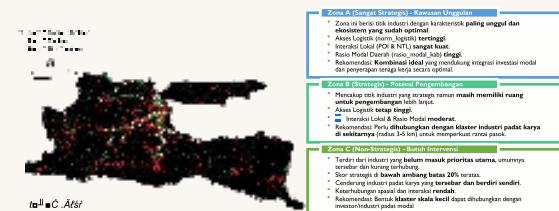
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, secara umum analisis spasial mendalam menunjukkan keterkaitan fungsional dan jaringan logistik yang tidak terlihat dari data statistik konvensional, sehingga menghasilkan peta zonasi yang dapat diaplikasikan untuk perencanaan industri manufaktur ke depan. Rekomendasi yang diusulkan antara lain:

1. **Penetapan zona prioritas industri hasil pemodelan berbasis *machine learning* (Random Forest & XGBoost) menghasilkan tiga klasifikasi zona industri. Zona A (sangat strategis) dengan keunggulan akses logistik, interaksi ekonomi tinggi, serta rasio modal besar yang menjadi lokomotif industri; Zona B (strategis) dengan potensi berkembang melalui kedekatan dengan kluster padat karya; dan Zona C (non-strategis) yang umumnya terdiri dari industri padat karya tersebar dan membutuhkan penguatan melalui pembentukan kluster kecil dan integrasi dengan investor atau industri padat modal antara lain penguatan UMKM dan tenaga kerja lokal. Fokus kebijakan diarahkan pada optimalisasi Zona A, akselerasi Zona B, dan pembenahan Zona C agar seluruh ekosistem industri lebih terhubung.**

**Gambar 6. Confusion Matrix, Classification Report dan Feature Importance dari Model XGBoost**



**Gambar 7. Penetapan Zona Prioritas Industri**

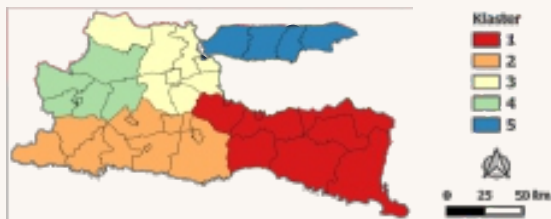


2. Analisis klusterisasi menghasilkan lima kluster pengembangan industri manufaktur Jawa Timur dengan strategi berbeda yang memerlukan diferensiasi strategi kluster memperkuat daya saing lokal sekaligus integrasi regional:

**BOKS 7**

- a. **Klaster 1 (Agro-primer: Banyuwangi, Jember, Probolinggo):** 26% padat modal, 74% padat karya. Fokus insentif pajak, kemitraan B2B, dan hibah R&D.
- b. **Klaster 2 (Selatan: Blitar, Kediri, Malang):** 39% padat modal, 61% padat karya. Rekomendasi pembangunan CFS/Dry Port serta pelatihan *workforce 4.0*.
- c. **Klaster 3 (Pusat Industri: Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Tuban):** 40% padat modal, 60% padat karya. Dirancang sebagai *Zero Emission Hub* dengan insentif FDI dan investasi multimoda.
- d. **Klaster 4 (Penyangga: Bojonegoro, Madiun, Ngawi):** 41% padat modal, 59% padat karya. Fokus UMKM melalui *co-operative hubs*, sertifikasi, dan *e-commerce*.
- e. **Klaster 5 (Madura: Bangkalan, Sumenep):** 37% padat modal, 63% padat karya. Perlu reaktivasi agro-industri, *cold storage*, dan peningkatan pelabuhan.

**Gambar 8. Klasterisasi Pengembangan Sinergi Industri Manufaktur**



3. Rekomendasi klasterisasi industri manufaktur Jawa Timur terdapat strategi penguatan aksesibilitas dan jaringan logistik untuk sinergi yang diklasifikasikan pada 3 (tiga) kerangka utama antara lain:
  - a. Koridor Logistik Campuran: menghubungkan Klaster 3 (*heavy-industrial*) dengan Klaster 1 (agro-hulu) dan Klaster 2 (jasa-logistik).
  - b. Fasilitas Bersama: *outbound logistics center* & *cold storage* di Pasuruan dan Kediri untuk menekan biaya distribusi dan memperkuat rantai pasok.
  - c. Transportasi Industri: *shuttle bus* dari *hinterland* (Jember, Blitar, Madiun, Madura) ke pusat industri (Surabaya–Gresik), memperluas akses tenaga kerja dan retensi pekerja.

**Gambar 9. Penguatan Aksesibilitas & Jaringan Logistik**



4. Hanya 49,2% industri berada dalam kawasan RTRWP, dengan tingkat kepatuhan industri padat modal (58,1%) lebih tinggi dibanding padat karya (42,8%) sehingga Integrasi tata ruang memperkuat efisiensi logistik, keberlanjutan lingkungan, serta pemerataan pembangunan industri:
  - a. *Mixed-Use Industrial Park*: menggabungkan padat modal & padat karya dalam satu kawasan dengan insentif lokasi dan lahan sewa murah.
  - b. *Green Buffer Zone*: sebagai penyangga ekologi sekaligus pusat pelatihan SDM, inkubator UMKM, dan ruang transfer teknologi.
  - c. Insentif Kepatuhan: berupa perizinan cepat, utilitas preferensial, dan dukungan infrastruktur lokal, terutama bagi daerah dengan kepatuhan rendah (misalnya Magetan 0%).



BAB VII

# Prospek Perekonomian Daerah



## 7.1. Prospek Ekonomi Jawa Timur Tahun 2025

**Ketidakpastian perekonomian global kembali meningkat pasca pengumuman kenaikan tarif efektif resiprokal Amerika Serikat (AS) ke beberapa negara maju dan berkembang yang direncanakan mulai berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2025.**

Perkembangan ini mengakibatkan rekalkulasi prospek pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2025. Sejalan dengan *World Economic Outlook* (WEO), Bank Indonesia memprakirakan ekonomi global pada tahun 2025 tumbuh 3,0% (yoy) pada tahun 2025, lebih rendah dari sebelumnya sebesar 3,2% (yoy) pada tahun 2024. Pelambatan pertumbuhan ekonomi terbesar terjadi di AS dan Tiongkok sejalan dengan melemahnya permintaan domestik dan ekspor di kedua negara tersebut. Sementara itu pergeseran aliran modal keluar AS ke Eropa dan negara berkembang, serta komoditas yang dianggap aman seperti emas, terus berlanjut sejalan dengan meningkatnya risiko ekonomi AS, termasuk risiko fiskal.

Di sisi lain, beberapa negara dan kawasan seperti Eropa, Jepang, India, serta Amerika Latin pada tahun 2025 masih tumbuh positif sejalan dengan perbaikan ekonomi di negaranya, ataupun adanya aliran modal dari AS, penyesuaian strategis dan peluang ekonomi baru yang muncul dari fragmentasi rantai pasok global. Perekonomian Eropa dan Jepang yang diuntungkan dari relokasi rantai pasok global yang beralih dari Tiongkok ke negara-negara yang lebih stabil secara politik dan ekonomi. Kinerja ekonomi ASEAN-5 diprakirakan mengalami perlambatan yang disebabkan kenaikan tarif perdagangan global yang berpotensi mengurangi arus perdagangan dan investasi lintas negara. Meskipun kinerja ekonomi tetap tumbuh di atas rata-rata dunia, pelambatan ini menunjukkan ketergantungan ASEAN-5 pada stabilitas eksternal dan perlunya memperkuat permintaan domestik sebagai penopang pertumbuhan di tengah pengetatan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi.

**Tabel 7. 1 Prospek Perekonomian Dunia**

SEKTOR	2023	2024	2025*
<b>Dunia</b>	<b>3,3</b>	<b>3,2</b>	<b>3,0</b>
<b>Negara Maju</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>
Amerika Serikat	2,9	2,8	2,1
Kawasan Eropa	0,4	0,9	0,9
Jepang	1,5	0,1	0,8
<b>Negara Berkembang</b>	<b>4,4</b>	<b>4,3</b>	<b>3,9</b>
Tiongkok	5,2	5,0	4,3
India	7,7	6,5	6,6
ASEAN-5	4,0	4,6	4,3
Amerika Latin	2,4	2,4	2,0
Negara Berkembang Eropa	3,3	3,4	2,1
Timur Tengah & Asia Tengah	2,0	2,4	3,5

Sumber: IMF World Economic Outlook. \*Proyeksi Bank Indonesia

**Kinerja ekonomi Indonesia pada 2025 diprakirakan tetap terjaga, dengan pertumbuhan berada pada kisaran 4,6–5,4% (yoy).** Dari sisi pengeluaran, investasi diproyeksikan meningkat, terutama pada investasi nonbangunan, sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendukung iklim investasi melalui reformasi struktural, insentif fiskal, dan percepatan proyek strategis nasional, khususnya di sektor transportasi. Ekspor diperkirakan tumbuh, ditopang oleh produk berbasis sumber daya alam dan manufaktur, seiring meningkatnya permintaan mitra dagang utama dan penguatan hilirisasi. Impor juga diproyeksikan tumbuh, sejalan dengan moderasi aktivitas produksi dan konsumsi domestik serta adaptasi pelaku usaha terhadap ketidakpastian pasar global. Sementara itu, konsumsi swasta diperkirakan tetap solid. Dari sisi lapangan usaha (LU), LU pertanian diprakirakan tetap tumbuh ditopang oleh kinerja subsektor perkebunan, peningkatan produktivitas, pemanfaatan teknologi pertanian modern, dan program pemerintah seperti subsidi pupuk serta ketahanan pangan nasional. LU Industri Pengolahan diprakirakan meningkat seiring keberlanjutan hilirisasi, peningkatan kapasitas produksi, dan substitusi impor melalui pengembangan industri bernilai tambah tinggi. Lebih lanjut, LU Perdagangan diprakirakan juga tetap tumbuh solid yang ditopang ekspektasi relaksasi tarif perdagangan dan stabilnya struktur tarif mitra dagang Luar Negeri pasca penerapan tarif AS pada Agustus 2025, serta terjaganya perdagangan domestik.

**Sejalan dengan ekonomi nasional, perekonomian Jawa Timur pada tahun 2025 diprakirakan tetap tumbuh positif yang ditopang oleh permintaan domestik dan eksternal, dengan tingkat inflasi yang terkendali pada kisaran target.** Kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2025 diprakirakan tumbuh pada kisaran 4,7% - 5,5% (yoy). Dari sisi pengeluaran, kinerja ekonomi Jawa Timur diprakirakan didukung oleh tetap terjaganya konsumsi RT, dan pertumbuhan investasi, serta ekspor yang lebih solid. Dari sisi LU, kinerja LU Pertanian pada tahun 2025 diprakirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 sejalan dengan prospek cuaca yang lebih mendukung produksi pangan. Lebih lanjut, kinerja LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan di Jawa Timur pada tahun 2025 diprakirakan tetap tumbuh positif. Dari sisi eksternal, prospek perbaikan perekonomian beberapa mitra dagang utama Jawa Timur, khususnya Kawasan Eropa dan Jepang, diperkirakan juga dapat mendukung kinerja ekspor Jawa Timur dan menjaga tingkat optimisme dunia usaha terhadap perekonomian di Jawa Timur. Hal tersebut diprakirakan selain menjadi faktor pendorong kinerja ekspor LN, juga akan mendorong investasi nonbangunan di Jawa Timur pada tahun 2025.

### 7.1.1. Sisi Pengeluaran

#### Konsumsi Swasta (Konsumsi RT dan Konsumsi LNPRT)

**Konsumsi swasta Jawa Timur pada tahun 2025 diperkirakan tetap kuat ditopang oleh prospek tetap kuatnya kinerja konsumsi Rumah Tangga dan konsumsi LNPRT.** Konsumsi RT diperkirakan tetap relatif kuat dan stabil didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat seiring kenaikan upah, inflasi yang diperkirakan terkendali, keberlanjutan paket kebijakan strategis dari Pemerintah terutama program perlindungan sosial, serta potensi perbaikan pendapatan masyarakat kelompok pekerja formal terutama di sektor industri, perdagangan, dan jasa seiring dengan prospek peningkatan permintaan eksternal, serta berlanjutnya proyek-proyek strategis. Kendati demikian, kinerja konsumsi LNPRT pada tahun 2025 diperkirakan termoderasi seiring normalisasi pascaperiode politik pada tahun 2024. Prakiraan solidnya konsumsi swasta terindikasi dari Indeks Ekspektasi Konsumsi (IEK) – SK Bank Indonesia di Jawa Timur triwulan I dan triwulan II 2025 yakni masing-masing sebesar 143,4 dan 137,07 lebih tinggi dibandingkan rata-rata IKE – SK Bank Indonesia di Jawa Timur pada tahun 2024 yang sebesar 128,4. Peningkatan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan yang meningkat disebabkan oleh peningkatan ekspektasi konsumen pada kegiatan usaha dan ketersediaan lapangan kerja ke depan. Perkembangan hingga triwulan II 2025 menunjukkan kinerja yang sejalan dengan proyeksi yang terlihat dari akumulasi konsumsi RT dan LNPRT Jawa Timur pada triwulan II 2025 yang tumbuh kuat masing-masing sebesar 4,85% (yoy) dan 6,42% (yoy).

#### Investasi

**Investasi Jawa Timur diperkirakan tumbuh kuat sejalan dengan prospek peningkatan realisasi penanaman modal pada tahun 2025, terutama ditopang oleh peningkatan investasi bangunan dan investasi nonbangunan.** Investasi di Jawa Timur tumbuh didorong oleh prospek pembangunan dan pengembangan KI dan KEK yang lebih tinggi, di tengah berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan proyek sesuai Perpres Nomor 80 Tahun 2019 untuk proyek pengembangan konektivitas dan layanan transportasi seperti infrastruktur jalan dan jembatan, kereta, sektor kawasan, bendungan, bandara udara, air bersih, sanitasi hingga energi turut mendukung percepatan pertumbuhan investasi di Jawa Timur. Selain itu, berlanjutnya berbagai kebijakan pemerintah seperti program 3 (tiga) juta rumah, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), pengembangan rumah subsidi dan rusunawa, serta kebijakan pelonggaran rasio *Loan to Value* (LTV) dan masih berlanjutnya pembebasan PPN DTP sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 120 tahun 2023 diperkirakan turut mendorong peningkatan investasi bangunan di Jawa Timur. Lebih lanjut, pembangunan proyek-proyek strategis swasta yang bernilai besar khususnya terkait

hilirisasi mineral dan tambang antara lain pengembangan biofuel di Bojonegoro, pembangunan pabrik kimia dan pengolahan logam di Gresik, serta ekspansi kilang minyak di Tuban yang diperkirakan turut menjadi katalis penguatan investasi nonbangunan di Jawa Timur tahun 2025. Sejalan dengan itu, **Forum Investasi Jawa Timur memiliki peran yang semakin strategis sebagai katalis penguatan arus investasi, melalui fasilitasi promosi peluang investasi,** penguatan jejaring regional hingga internasional, serta percepatan penyelesaian hambatan perizinan. Dengan mengedepankan **kolaborasi, inovasi, dan sinergi** antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, peran Forum tersebut dapat memperkuat daya tarik investasi Jawa Timur di mata investor domestik maupun global, sekaligus menjadi akselerator penting dalam mendorong realisasi investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ke depan secara berkelanjutan.

#### Ekspor dan Impor

**Sejalan dengan prospek ekonomi global, kinerja ekspor dan impor Jawa Timur pada 2025 diperkirakan tetap solid.** Berdasarkan *World Economic Outlook* (WEO) Juli 2025, perekonomian negara mitra dagang utama Jawa Timur, seperti Jepang dan kawasan Eropa, diproyeksikan tumbuh positif masing-masing sebesar 0,7% dan 1,0% (yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024 yang masing-masing sebesar 0,2% dan 0,9% (yoy). Meskipun pertumbuhan ekonomi AS dan Tiongkok diperkirakan melambat serta implementasi tarif resiprokal AS (termasuk penerapan tarif 19% untuk barang Indonesia) berpotensi menahan permintaan eksternal dan meningkatkan *landed cost* barang ekspor di pasar AS, kinerja ekspor Jawa Timur diperkirakan tetap terjaga melalui optimalisasi strategi diversifikasi pasar, termasuk ke kawasan ASEAN/RCEP, India, Timur Tengah, dan sebagian negara Uni Eropa. Diversifikasi ini menjadi penopang daya saing produk unggulan Jawa Timur, seperti tekstil/apparel, furnitur/kayu olahan, karet, elektronik ringan, dan hasil perikanan.

Sementara impor diperkirakan tetap tumbuh didorong oleh kebutuhan pasokan bahan baku dan barang modal untuk mendukung aktivitas industri pengolahan berorientasi ekspor, serta pemenuhan konsumsi domestik. Permintaan impor juga ditopang oleh berlanjutnya realisasi proyek investasi, baik PMA maupun PMDN, khususnya di sektor manufaktur, kimia, logam, energi, dan infrastruktur. Meskipun moderasi permintaan global dan penyesuaian harga komoditas dunia berpotensi menahan laju impor, penguatan perdagangan antarwilayah dan diversifikasi mitra dagang diperkirakan mampu menjaga aliran pasokan barang dari luar negeri.

Di sisi lain, di tengah berlanjutnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik yang masih berlangsung serta potensi penurunan suku bunga bank sentral Amerika Serikat pada semester II 2025, permintaan emas global pada tahun 2025

diprakirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yang berimplikasi pada kenaikan harga emas dunia. Berdasarkan data Bloomberg per Juli 2025, harga emas dunia telah naik 27,20% sejak awal tahun, mencapai USD3.385/t.oz. Sepanjang tahun 2025, harga emas diprakirakan berada pada kisaran USD3.700/t.oz atau meningkat sekitar 27,1% (yoy) dibandingkan posisi akhir Desember 2024 sebesar USD2.661/t.oz. Sebagai salah satu komoditas ekspor utama Jawa Timur, peningkatan permintaan emas global tersebut berpotensi menjaga kinerja ekspor luar negeri Jawa Timur tetap kuat pada tahun 2025.

Secara keseluruhan net ekspor diprakirakan tetap tumbuh, didukung oleh optimisme peningkatan produksi katoda tembaga dari Smelter Gresik yang akan mendorong kinerja ekspor lebih tinggi dibandingkan impor pada semester II 2025. Dari sisi domestik, perdagangan antarwilayah juga diprakirakan tumbuh positif sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperluas pasar dan memperkuat konektivitas perdagangan melalui misi dagang ke berbagai daerah mitra utama. Selanjutnya, mempertimbangkan masih tingginya kebutuhan impor bahan baku untuk industri pengolahan berorientasi ekspor serta pemenuhan kebutuhan sektor domestik, impor luar negeri Jawa Timur pada tahun 2025 diprakirakan tetap kuat.

### 7.1.2. Sisi Lapangan Usaha

#### LU Industri Pengolahan

**Kinerja LU Industri Pengolahan di Jawa Timur diprakirakan tetap terjaga yang ditopang oleh prospek peningkatan investasi dan net ekspor serta masih terjaganya permintaan domestik pada tahun 2025.** Hal tersebut sejalan dengan optimisme rencana ekspansi pelaku usaha di sektor makanan minuman, perhiasan dan olahan komoditas unggulan yang ditopang oleh perbaikan keyakinan konsumen serta permintaan pasar global dan regional. Lebih lanjut, konsumsi RT yang diprakirakan tetap terjaga seiring dengan potensi peningkatan mobilitas dan daya beli masyarakat, serta terjaganya tingkat inflasi diprakirakan akan menopang permintaan barang manufaktur di pasar domestik. Akselerasi implementasi program hilirisasi industri, diversifikasi produk ekspor, dan prospek ekspor yang lebih baik juga menjadi faktor pendorong penyerapan *output* yang pada akhirnya mendorong peningkatan utilisasi kapasitas industri di Jawa Timur pada tahun 2025. Dari sisi eksternal, perbaikan efisiensi impor bahan baku dan penurunan harga energi diprakirakan turut menjadi faktor yang menjaga daya saing produksi industri pengolahan Jawa Timur.

#### LU Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

**Kinerja Lapangan Usaha (LU) Perdagangan di Jawa Timur pada tahun 2025 diprakirakan tetap tumbuh positif seiring dengan prospek terjaganya konsumsi rumah tangga (RT) dan**

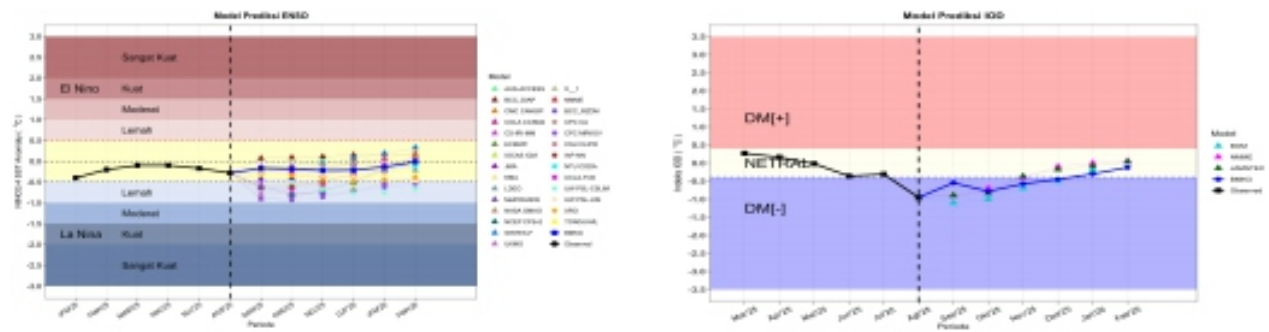
#### **peningkatan permintaan dari mitra dagang utama Jawa Timur.**

Dari sisi domestik, konsumsi RT diprakirakan tetap solid ditopang oleh terjaganya daya beli masyarakat sejalan dengan potensi peningkatan pendapatan pekerja formal, inflasi yang diprakirakan tetap terkendali dalam sasaran, serta keberlanjutan program perlindungan sosial Pemerintah. Perkembangan tersebut diprakirakan menjadi katalis positif bagi perdagangan eceran, khususnya pada kelompok makanan-minuman, sandang, serta barang konsumsi lainnya. Dari sisi eksternal, kinerja perdagangan Jawa Timur diproyeksikan memperoleh dukungan dari perbaikan ekonomi negara mitra dagang utama, khususnya Tiongkok, Jepang, kawasan Eropa, dan ASEAN-5, yang meskipun mengalami moderasi pertumbuhan global, masih menunjukkan kinerja positif. Stabilitas permintaan dari negara-negara tersebut, didukung upaya diversifikasi pasar ekspor, akan memperkuat daya tahan perdagangan Jawa Timur di tengah dinamika perekonomian global. Secara sektoral, ekspor ke kawasan ASEAN-5 diprakirakan meningkat terutama untuk komoditas makanan minuman dan komponen penunjang otomotif sejalan dengan membaiknya aktivitas manufaktur di kawasan tersebut. Sementara itu, ekspor perhiasan/emas Jawa Timur diprakirakan turut meningkat, didorong oleh tingginya permintaan sebagai aset lindung nilai (*safe haven*) di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Dengan perkembangan tersebut, LU Perdagangan di Jawa Timur pada tahun 2025 diproyeksikan tetap tumbuh positif dan berperan sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi regional.

#### LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

**Kinerja LU Pertanian di Jawa Timur diprakirakan membaik pada tahun 2025** yang didukung oleh prospek cuaca yang lebih stabil dan mendukung optimasi produksi tanaman pangan. Hal ini terindikasi dari proyeksi indeks ENSO BMKG Indonesia yang memprediksi kondisi La Nina lemah yang secara gradual akan beralih menuju fase netral dan berlanjut hingga akhir tahun 2025 (Grafik 7.1). Lebih lanjut, dukungan pemerintah daerah Jawa Timur terhadap infrastruktur pertanian sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 bersama dengan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular 2025-2045 yang mendorong penguatan ketahanan pangan, pemanfaatan input berkelanjutan, serta pengurangan *food loss and waste*, dan implementasi Permentan Nomor 3 Tahun 2025 terkait petunjuk teknis pengelolaan DAK Nonfisik Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025 yang menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pendampingan komprehensif dan penguatan layanan teknis pertanian guna mendukung upaya peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan daerah secara sistematis. Selain itu, produksi peternakan, khususnya telur, daging sapi dan susu sapi di Jawa Timur diprakirakan semakin baik pada tahun 2025

Grafik 7. 1 Prediksi El Nino/La Nina 2025



Sumber: BMKG, Februari 2025

sejalan dengan optimalnya vaksinasi PMK dan *Lumpy Skin Disease* (LSD) diprakirakan menjadi faktor yang mengakselerasi peningkatan produktivitas pertanian provinsi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional dan mendukung pada ketahanan pangan regional.

### LU Konstruksi

Kinerja LU Konstruksi pada tahun 2025 diprakirakan tumbuh positif sejalan dengan berlanjutnya proyek-proyek infrastruktur strategis Pemerintah dan swasta. LU Konstruksi untuk keseluruhan tahun 2025 diprakirakan tetap tumbuh positif sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional di Jawa Timur, termasuk proyek-proyek infrastruktur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.80/2019 yang telah diperbarui dengan Perpres No.12/2025 serta proyek-proyek swasta korporasi dan rumah tangga sejalan dengan potensi perbaikan permintaan domestik di Jawa Timur. Beberapa proyek strategis di Jawa Timur yang tercantum dalam PSN baru ini antara lain pembangunan pabrik soda ash dan hilirisasi nikel, timah, bauksit, dan tembaga. Lebih lanjut, sejumlah proyek strategis di Jawa Timur, termasuk pabrik foil tembaga, pabrik kimia, ekspansi kilang minyak di Tuban, serta proyek hilirisasi mineral dari PSN, berlokasi di kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus. Pengembangan infrastruktur pendukung seperti tol akses kawasan industri, pelabuhan, jalan, jembatan, fasilitas energi, perumahan pekerja, dan sarana logistik menjadi katalis bagi investasi swasta, sekaligus turut menopang positifnya pertumbuhan LU Konstruksi Jawa Timur. Berlanjutnya kebijakan PPN DTP sebagaimana PMK Nomor 120 Tahun 2023 diprakirakan turut mendorong peningkatan konstruksi rumah tapak. Kendati demikian, prospek perlambatan ekonomi global secara umum diprakirakan menahan kinerja LU Konstruksi yang lebih tinggi. Investor domestik dan asing diprakirakan bersikap *wait and see* dalam melakukan investasi termasuk di bidang konstruksi akibat eskalasi ketidakpastian global. Selain itu, Terbatasnya anggaran dari Pemerintah Pusat untuk membiayai proyek-proyek percepatan pembangunan ekonomi yang dibiayai melalui APBN diperkirakan juga akan menghambat laju pertumbuhan LU konstruksi pada tahun 2025.

### LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun 2025 diprakirakan tetap tumbuh kuat sejalan dengan penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan pengembangan kawasan wisata, inflasi yang terkendali, potensi perbaikan pendapatan masyarakat yang bergerak di industri berorientasi ekspor, serta meningkatnya keyakinan konsumen dalam mendorong peningkatan mobilitas dan daya beli masyarakat. Berdasarkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, *event* pariwisata Jawa Timur pada tahun 2025 akan lebih banyak dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat 11 (sebelas) *event* Jawa Timur yang masuk Kharisma Event Nasional (KEN) 2025 yang merupakan jumlah terbanyak dibandingkan provinsi lain di Indonesia. *Event* Jawa Timur yang dipromosikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yaitu (i) Festival Rujak Uleg Surabaya, (ii) Festival Nasional Reog Ponorogo dan Grebeg Suro, (iii) Eksotika Bromo, (iv) Tong Tong Night Market Malang, (v) Festival Musik Tong-Tong Sumenep, (vi) Ngawi Batik Fashion, (vii) Segoro Topeng Kaliwungu Lumajang, (viii) Festival RontheK Pacitan, (ix) Jember *Fashion* Carnival (JFC), (x) Banyuwangi Ethno Carnival, (xi) Festival Gandrung Sewu. Lebih lanjut, kegiatan tersebut juga melibatkan festival ekonomi kreatif sebagai ajang promosi dan kolaborasi antar pelaku kreatif seperti kuliner, kriya, *fashion*, film, dan ekowisata berbasis budaya. Hal tersebut diprakirakan akan mendorong tetap kuatnya kinerja penyediaan akomodasi dan makan minum di daerah wisata Jawa Timur. Perkembangan hingga triwulan II 2025 menunjukkan kinerja yang sejalan dengan proyeksi. LU Akomodasi dan Makan Minum Jawa Timur pada triwulan II 2025 tumbuh kuat di tingkat 8,38% (yoy). Di sisi lain, kebijakan Pemerintah Pusat terkait pembatasan belanja non-prioritas dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 diprakirakan menjadi faktor penahan akselerasi peningkatan kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum khususnya untuk kegiatan *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE) nasional dan internasional di Jawa Timur.

## 7.2. Prospek Inflasi Jawa Timur Tahun 2025

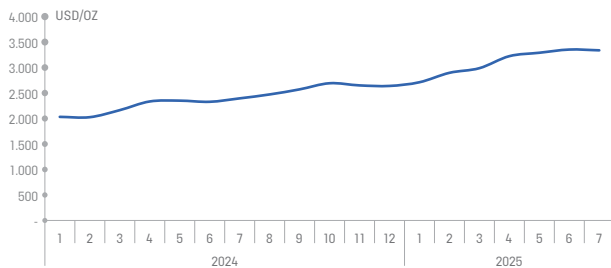
Sejalan dengan proyeksi sasaran nasional, inflasi Jawa Timur pada 2025 diperkirakan berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5%±1% (yoy). Proyeksi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor fundamental dari sisi penawaran maupun permintaan, antara lain (i) potensi *imported inflation* seiring proyeksi kenaikan harga komoditas nonenergi seperti emas dan pupuk; (ii) penyesuaian harga di tingkat nasional, termasuk Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, dan Harga Jual Eceran (HJE) minimum rokok; serta (iii) kebijakan penyesuaian harga di tingkat provinsi, seperti penyesuaian harga LPG 3 kg.

Namun, risiko kenaikan lebih lanjut diperkirakan dapat teredam oleh beberapa faktor, meliputi: (i) penguatan produktivitas pangan didukung cuaca yang lebih kondusif dan berbagai dukungan program strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan; (ii) harga energi domestik yang relatif stabil didorong tren harga energi global yang moderat cenderung menurun; dan (iii) koordinasi erat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur, termasuk implementasi program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Dari sisi penawaran, potensi risiko *imported inflation* perlu diantisipasi khususnya pada komoditas non-energi (Grafik 7.2 dan Grafik 7.3). Harga komoditas global emas dan pupuk diperkirakan meningkat secara rerata pada tahun 2025

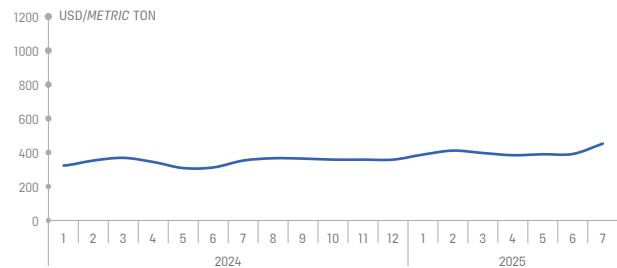
dibandingkan tahun 2024. Peningkatan harga emas global utamanya dipengaruhi oleh masih tingginya ketidakpastian global, pasca pengumuman kenaikan tarif efektif resipikal AS ke beberapa negara maju dan berkembang. Selain itu, tren pergeseran aliran modal keluar dari AS ke Eropa dan negara berkembang serta komoditas *safe haven*, termasuk emas semakin mendorong kenaikan harga emas global yang kemudian ditransmisi pada harga komoditas emas perhiasan domestik. Adapun peningkatan harga pupuk dunia terjadi seiring solidnya permintaan yang di dorong oleh kebutuhan pangan global di tengah tantangan disrupsi pasokan seperti pembatasan ekspor dari Tiongkok untuk pupuk nitrogen. Selain itu, penerapan sanksi dan tarif turut menambah mendorong harga pupuk dunia, antara lain (i) Penerapan sanksi Uni Eropa untuk pasokan Fosfat dari Belarusia yang merupakan salah satu negara produsen utama; (ii) penerapan tarif oleh Uni Eropa untuk gas alam dari Rusia. Ke depan, masuknya kapasitas produksi baru di Asia Timur dan Timur Tengah pada 2026 diproyeksikan meredakan harga, namun risiko kenaikan tetap ada dalam hal terjadi kenaikan harga energi dan pembatasan ekspor lanjutan. Peningkatan harga dimaksud perlu diwaspadai dampaknya terhadap peningkatan inflasi pada (i) kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, (ii) kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau; serta (iii) Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. Perkembangan dinamika faktor eksternal,

Grafik 7.2 Harga Emas Dunia



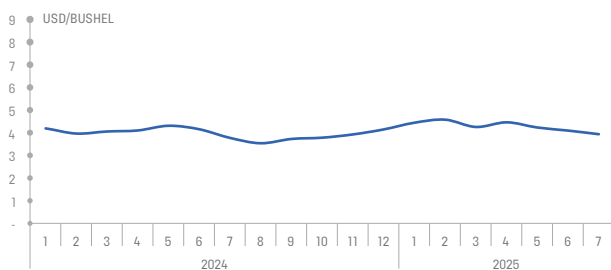
Sumber : Bloomberg (Diolah)

Grafik 7.3 Harga Pupuk Dunia



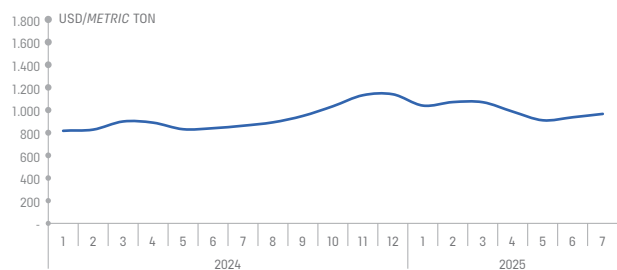
Sumber : Bloomberg (Diolah)

Grafik 7.4 Harga Jagung Dunia



Sumber : Bloomberg (Diolah)

Grafik 7.5 Harga Minyak Kelapa Sawit Dunia



Sumber : Bloomberg (Diolah)

khususnya konflik geopolitik seperti kepastian implementasi kebijakan resiprokal AS serta kebijakan retaliasi negara lain seperti Tiongkok, tetap perlu diwaspadai sebagai salah satu sumber risiko pendorong inflasi yang dapat ditransmisikan melalui jalur harga komoditas maupun nilai tukar. Sementara itu, rerata harga komoditas non-energi lain seperti jagung dan minyak sawit di tahun 2025 diperkirakan cenderung stabil dibandingkan tahun 2024 (Grafik 7.4 s.d Grafik 7.5).

**Selain itu, penyesuaian kebijakan kenaikan harga di level nasional dan domestik masih berpotensi mendorong inflasi lanjutan hingga akhir tahun 2025.** Kebijakan kenaikan (i) Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah menjadi 6.500/kg yang efektif pada tanggal 15 Januari 2025, (ii) Harga Jual Eceran Rokok Terendah (HJE) yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025, serta (iii) harga gas LPG 3kg naik sebesar Rp2.000 menjadi Rp18.000 yang efektif pada tanggal 15 Januari 2025 diperkirakan mendorong inflasi pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau; Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran; serta Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar.

**Dari sisi permintaan, terdapat beberapa faktor yang berpotensi mendorong kenaikan inflasi.** Pertama, prakiraan kenaikan harga komoditas global non-energi (khususnya emas) turut berpotensi mendorong ekspektasi bagi konsumen sehingga meningkatkan permintaan, di tengah masih tingginya ketegangan geopolitik. Kedua, peningkatan mobilitas dan permintaan pada momen libur sekolah yang terjadi pada Juni – Agustus 2025 berpotensi mendorong inflasi pada triwulan III 2025 yang pada gilirannya akan mendorong inflasi tahunan 2025. Ketiga, potensi peningkatan permintaan komoditas pangan dan hortikultura baik di Jawa Timur maupun nasional seiring pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Terkait dengan pemenuhan permintaan MBG, Pemerintah Daerah Jawa Timur memprakirakan pasokan komoditas pendukung akan tetap mencukupi untuk Jawa Timur didukung implementasi program prioritas Pemerintah yang mendorong produktivitas pangan. Keempat, kenaikan harga sewa/kontrak rumah dan pendidikan yang secara historis meningkat secara tahunan.

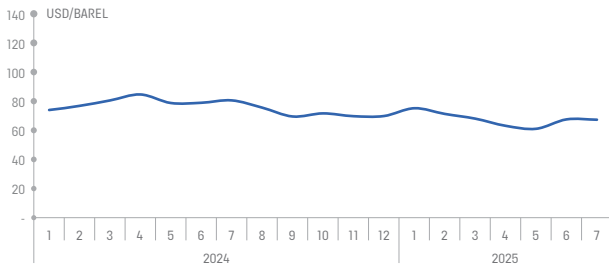
**Adapun beberapa faktor yang diperkirakan dapat menahan inflasi yang lebih tinggi, di antaranya yaitu prakiraan produksi komoditas pangan khususnya pertanian yang kuat seiring cuaca yang lebih mendukung dibandingkan tahun sebelumnya.** Kondisi cuaca yang mendukung produksi komoditas pangan khususnya padi selama periode panen raya di triwulan I tahun 2025 mampu mendorong produksi beras sehingga mendukung tertahannya laju inflasi yang lebih tinggi pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri. Namun demikian, kenaikan harga gabah di tingkat penggilingan pasca periode panen raya patut menjadi perhatian karena berpotensi menyebabkan cost push inflation terhadap komoditas beras, meski hingga saat ini belum terdapat penyesuaian HET Beras Medium maupun Premium.

**Berdasarkan prakiraan iklim berbagai lembaga pusat iklim dunia, kondisi iklim hingga akhir tahun 2025 minim anomali. Indeks El Niño–Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Ocean Dipole (IOD) menunjukkan kondisi netral yang mengindikasikan bahwa tidak ada pengaruh iklim global yang signifikan, sehingga pola curah hujan, suhu, dan angin cenderung ditentukan oleh faktor cuaca regional dan musiman lainnya (Gambar 7.1).** Lebih lanjut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi curah hujan Indonesia pada bulan September cenderung moderat kemudian secara gradual meningkat hingga bulan November (Gambar 7.2). Adapun wilayah Jawa Timur mayoritas diprediksi akan mengalami curah hujan rendah pada bulan Agustus - September seiring musim kemarau yang datang lebih lambat dibandingkan pola tahun-tahun sebelumnya dan selanjutnya pada bulan Oktober mulai mengalami curah hujan moderat (Gambar 7.3). Hal ini diperkirakan mendukung produksi komoditas hortikultura yang dapat secara langsung mendukung terkendalinya inflasi kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau serta Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran pada tahun 2025. Memasuki bulan Oktober dan November, mayoritas wilayah Jawa Timur diperkirakan relatif aman dari potensi banjir, sebagaimana prakiraan BMKG (Gambar 7.4).

**Sehubungan dengan prakiraan cuaca tersebut, komoditas pangan dan hortikultura pertanian diperkirakan tetap surplus untuk memenuhi kebutuhan Jawa Timur tahun 2025.** Berdasarkan prakiraan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, produksi komoditas pangan dan hortikultura secara umum pada tahun 2025 meningkat khususnya padi dan aneka cabai didukung kondisi iklim dan cuaca yang baik serta berbagai program strategis Pemerintah yang berfokus pada peningkatan produktivitas sektor pertanian. Beberapa program penguatan produktivitas yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur a.l. (i) pemberian bantuan alsintan modern, saprodi, dan pelatihan; (ii) pengaturan pola produksi guna menjaga ketersediaan pasokan, (iii) percepatan olah tanah dan tanam dengan mengoptimalkan pompa, dan (iii) Pemantauan Ketersediaan Stok Pangan *Early Warning System* (EWS) Pola Produksi.

**Pada komoditas pangan peternakan, prognosa produksi daging sapi, daging ayam, dan telur ayam juga diperkirakan tetap surplus untuk memenuhi kebutuhan Jawa Timur (termasuk pemenuhan pasokan untuk program Makan Bergizi Gratis) tahun 2025.** Beberapa program prioritas Dinas Peternakan (Disnak) Provinsi Jawa Timur yang dilakukan untuk memperkuat produktivitas peternakan antara lain (i) peningkatan kelahiran sapi (potong dan perah) melalui penyediaan dan distribusi sarana inseminasi buatan serta perbaikan pakan; (ii) pengolahan dan pemasaran hasil peternakan melalui penguatan teknologi (termasuk *cold storage*); (iii) optimalisasi perbibitan pakan dan budidaya yang baik; (iv) penjaminan kesehatan hewan melalui pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular; (v) peningkatan kualitas produk

**Grafik 7. 6 Harga Minyak Dunia (WTI)**



Sumber : Bloomberg (Diolah)

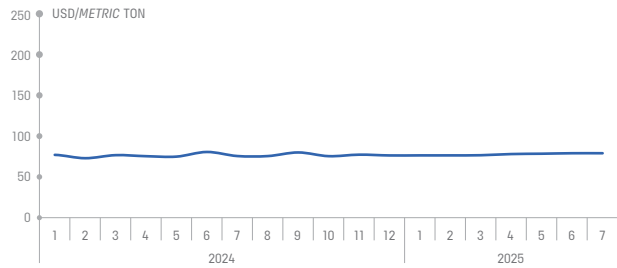
hewan melalui sertifikasi dan standardisasi; (vi) pengembangan kawasan agropolitan ternak; serta (vii) pemberian bantuan alsintan.

**Harga komoditas energi global, khususnya minyak dunia dan batubara juga diperkirakan stabil cenderung menurun hingga akhir tahun 2025 (Grafik 7.6 dan Grafik 7.7)** didukung produksi yang solid di tengah permintaan dunia yang berpotensi cenderung menurun seiring penerapan berbagai hambatan perdagangan dunia, khususnya penerapan tarif resiprokal AS. Kondisi dinamika harga kedua komoditas energi dunia tersebut akan tertransmisi pada harga komoditas energi domestik dan diperkirakan turut mendukung terkendalinya inflasi pada kelompok Transportasi serta kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar hingga akhir tahun 2025.

Dalam memastikan inflasi tahun 2025 tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional di tengah berbagai tantangan dan risiko, Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama seluruh 38 TPID Kab/Kota se-Jawa Timur akan secara konsisten menjaga stabilitas harga dan terus memperkuat koordinasi kebijakan baik dengan Pemerintah pusat maupun Pemerintah kota/kabupaten. Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilakukan oleh TPID dan TPID disertai upaya ekstra sinergi pengendalian inflasi pangan termasuk Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang diinisiasi oleh Bank Indonesia. Sinergi akan dilakukan melalui penguatan implementasi program utama dalam kerangka kerja pengendalian inflasi Jawa Timur tahun 2025, yang dikategorikan dalam pilar 4K yaitu:

1. Keterjangkauan harga: (i) Intensifikasi Operasi Pasar dan (ii) Optimalisasi dan Perluasan Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK).
2. Ketersediaan pasokan: Peningkatan produktivitas (*on-farm/off-farm*) antara lain melalui (i) bantuan sarpras, (ii) bimbingan teknis terkait pemanfaatan saprodi unggul, alsintan modern, serta *good agricultural practice*, (iii) penguatan kelembagaan antara lain melalui pengembangan korporasi petani didukung ekosistem

**Grafik 7. 7 Harga Batu Bara Dunia**



Sumber : Bloomberg (Diolah)

*end-to-end* yang terintegrasi serta sinergi *pentahelix*, serta (iv) penguatan peran BUMD Pangan dalam mendukung konsistensi pasokan dan distribusi.

3. Kelancaran distribusi: (i) penguatan dan perluasan kerjasama intra provinsi dan antardaerah, (ii) fasilitasi distribusi komoditas, (iii) subsidi ongkos angkut, (iv) penguatan konektivitas transportasi publik Jawa Timur, dan (v) percepatan revitalisasi maupun pembangunan jalur transportasi.
4. Komunikasi efektif: (i) koordinasi pusat-daerah, (ii) peningkatan kualitas digitalisasi data, serta (iii) pengendalian ekspektasi inflasi.

Selain melanjutkan program utama yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 baik pada level Provinsi maupun Kabupaten/Kota, terdapat beberapa inovasi langkah pengendalian inflasi yang akan dilakukan meliputi perluasan cakupan operasi pasar (OP) bahan pangan di seluruh Kabupaten/Kota Jawa Timur melalui kehadiran EPIK keliling serta replikasi model bisnis korporasi petani eksisting. Kehadiran EPIK keliling diharapkan mampu mendukung perluasan distribusi pasokan komoditas pangan terjangkau di wilayah Jawa Timur, khususnya yang sedang mengalami permasalahan pasokan. Adapun penciptaan korporasi petani baru di wilayah lain melalui replikasi model bisnis korporasi petani eksisting diharapkan dapat mempercepat upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan petani melalui upaya korporatisasi di wilayah Jawa Timur.

Koordinasi kebijakan antara pusat dan daerah utamanya akan ditujukan sebagai upaya mitigasi risiko inflasi yang bersifat *volatile* dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau akibat ketergantungan produksi terhadap faktor cuaca dan distribusi pasokan yang merata. Selain itu, koordinasi juga ditujukan dalam rangka pembaharuan peta jalan TPID Jawa Timur serta mitigasi dampak penetapan tarif dan berbagai kebijakan Pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan komoditas dalam kelompok Transportasi dan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar.

Melalui berbagai sinergi pengendalian inflasi yang dilakukan secara terkoordinasi dan konsisten, serta didukung oleh faktor-faktor fundamental yang cukup kondusif, inflasi Jawa Timur pada tahun 2025 diperkirakan berada dalam rentang sasaran 2,5%±1% (yoy). Namun demikian, kewaspadaan terhadap berbagai faktor risiko, baik yang bersumber dari domestik maupun global, tetap perlu dicermati untuk memastikan tercapainya target inflasi yang telah ditetapkan.

**Tabel 7. 2 Faktor Pendorong dan Penahan Inflasi Jawa Timur 2025**

**Faktor Pendorong Inflasi Tahun 2025**

Kenaikan harga komoditas non-energi global (khususnya emas) yang diperkirakan masih berlanjut sejalan dengan ketidakpastian global berpotensi mendorong <i>imported inflation</i> .
Penetapan kebijakan domestik, seperti HPP gabah, dsb, berpotensi meningkatkan ekspektasi inflasi sejumlah komoditas.
Potensi penyesuaian tarif di daerah yang tertahan pada tahun-tahun sebelumnya, seperti harga LPG, dsb.

**Faktor Penahan Inflasi Tahun 2025**

Cuaca yang lebih mendukung pada tahun 2025 dibandingkan 2024 mendorong penguatan kinerja produksi sektor pertanian.
Dukungan program prioritas Pemerintah yang berfokus pada penguatan produktivitas sektor pertanian (swasembada pangan) serta Intensifikasi program GNPIP dan penguatan program dalam kerangka pengendalian inflasi Jawa Timur secara konsisten dan efektif.
Harga komoditas energi global yang diperkirakan stabil cenderung menurun.

**BOKS 8**

**Menjembatani Wilayah, Mendorong Ekonomi: Pengaruh Jalan Tol Trans Jawa terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur**

**Pengembangan infrastruktur strategis, khususnya Jalan Tol, menjadi katalis penting dalam memperkuat konektivitas antarwilayah, mendorong efisiensi arus barang dan jasa, serta meningkatkan daya saing perekonomian nasional.** Sejalan dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029 yang menekankan percepatan transformasi ekonomi berbasis pemerataan dan produktivitas, keberadaan jalan tol tidak hanya memperlancar distribusi logistik, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

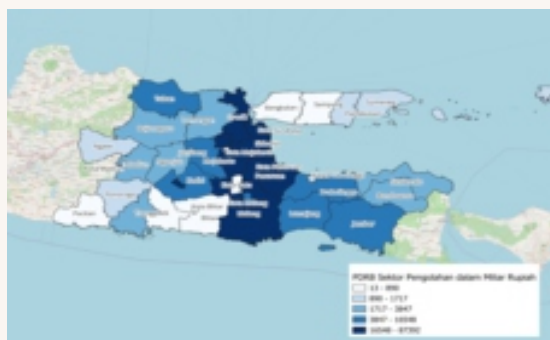
**Tol Trans Jawa sebagai motor penggerak ekonomi nasional.** Ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional sekaligus pendorong utama aktivitas ekonomi dengan membuka akses pasar, mempercepat distribusi logistik, dan mempermudah mobilitas. Infrastruktur ini mendorong perdagangan, industri, UMKM, investasi, serta kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Sejalan dengan peran tersebut, urgensi pembangunan jalan tol semakin mengemuka sebagai instrumen vital untuk mewujudkan visi pembangunan ekonomi regional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pembangunan jalan tol kembali menjadi fokus utama karena perannya yang krusial dalam strategi pembangunan ekonomi regional. Dalam RPJMN 2024–2029, pengembangan kawasan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi baru memerlukan konektivitas efisien agar tidak terisolasi. Jalan tol berfungsi sebagai perantara *spillover* yang memungkinkan efek rambatan ekonomi menjangkau wilayah sekitar, sehingga menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan industrialisasi dan pemerataan manfaat pembangunan. Pemerintah merencanakan

pembangunan 5.000 km jalan tol baru melalui 47 Proyek Strategis Nasional (PSN) (data Kementerian PUPR 2023) untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, mempercepat distribusi logistik dan memperluas akses pasar, sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Saat ini, Indonesia telah memiliki 2.893 km jaringan jalan tol yang tersebar di lima pulau besar, menurut data Gaikindo - 2023. Jaringan ini menjadi tulang punggung mobilitas nasional yang menghubungkan kota-kota besar di kawasan industri, pelabuhan serta pusat ekonomi lainnya.

Di Pulau Jawa, yang menyumbang 57,04% PDRB nasional (data BPS 2025), 1.782 km jalan tol berperan sebagai tulang punggung mobilitas barang dan manusia, serta memberi efek positif bagi pertumbuhan wilayah sekitarnya. Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai pilar kedua ekonomi Jawa, menyumbang 25,11% PDRB Pulau Jawa (data Bappeda Jatim Triwulan I 2025) dan menjadi pusat industri, perdagangan, serta logistik ke wilayah timur Indonesia. Meskipun sebagian ruas utama telah beroperasi, konektivitas di selatan Jawa Timur masih terbatas, sehingga pengembangan jalan tol baru menjadi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di kabupaten/kota.

Sejak digulirkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), pembangunan Tol Trans Jawa di Jawa Timur telah mengalami kemajuan signifikan dan menjadi tulang punggung konektivitas regional. Hingga 2025, total panjang tol di Jawa Timur mencapai sekitar 530 km, menghubungkan kota-kota utama seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, dan Banyuwangi. Beberapa ruas tol, termasuk Kertosono–Mojokerto, Pandaan–Malang, Pasuruan–Probolinggo dan Gempol–Pasuruan, telah beroperasi dan memberikan kemudahan mobilitas bagi masyarakat serta mempercepat distribusi logistik. Selain itu, tol ini terintegrasi dengan kawasan industri, pelabuhan, pusat logistik dan destinasi wisata, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, investasi, serta penguatan UMKM lokal. Sementara itu Tol Kediri–Tulungagung merupakan kelanjutan dari proyek Jalan Tol Kertosono–Kediri yang masuk bagian kawasan Gresik–Bangkalan–Mojokerto– Surabaya–Sidoarjo– Lamongan, kawasan Bromo–Tengger– Semeru, serta

**Gambar 1. Persebaran PDRB Sektor Manufaktur di Jawa Timur Tahun 2023 dalam Jutaan Rupiah (Athillah AI, Muh Ilham P & Ayu Putri P – 2025)**



## BOKS 7

kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Rencana pembangunan tol ini terdiri dari dua segmen utama, yaitu akses Bandara Dhoho Kediri dan ruas utama Kediri-Mojo-Tulungagung. Rencananya, jalan tol ini akan dibangun dengan konfigurasi 2x2 lajur (dua lajur untuk masing-masing arah) serta empat simpang susun yang terletak di Bulawen, Kediri, Mojo dan Tulungagung. Adapun rencana pembangunan tol Kediri-Tulungagung sepanjang 30 km dengan nilai investasi Rp 4 s/d 5 triliun dengan posisi saat ini masih menunggu kelanjutan realisasi proyek tol Kertosono-Kediri yang saat ini masih berada dalam tahap pembebasan lahan yang dilakukan oleh Kementerian PU dengan menggunakan skema pembayaran langsung oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) saat ini mencapai progress 65%. Disisi lain, tol yang membentang dari Merak di ujung barat Pulau Jawa hingga Probolinggo di Jawa Timur sepanjang ±1.167 km, menjadi salah satu infrastruktur strategis nasional yang membawa dampak signifikan bagi perekonomian Jawa Timur. Dari total panjang tersebut, ruas yang melintasi Jawa Timur mencapai ±341 km, menghubungkan perbatasan Jawa Tengah di Ngawi hingga Probolinggo di ujung timur jalur pantura.

**Dengan adanya Jalan Tol Trans Jawa, berbagai wilayah di Jawa Timur kini mengalami peningkatan konektivitas dan kemudahan mobilitas.** Hal ini menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi dan distribusi logistik yang lebih efisien. Pertumbuhan investasi di Jawa Timur terdorong oleh percepatan akses ke kawasan industri dan pelabuhan utama. Konektivitas yang lebih efisien menjadi daya tarik bagi investor di sektor manufaktur, logistik, dan properti. Data BKPM Semester I 2025 mencatat peningkatan investasi sekitar 10% dibanding 2024, dengan konsentrasi tertinggi di sekitar gerbang tol, khususnya Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan tol berperan sebagai katalis bagi pengembangan pusat-pusat ekonomi baru di wilayah tersebut. Sejak sebagian tol beroperasi, waktu tempuh Surabaya-Jakarta berkurang dari 12-15 jam menjadi 8-9 jam, sementara Surabaya - Madiun turun dari ±5 jam menjadi ±3 jam. Efisiensi perjalanan ini memperlancar distribusi barang dan mobilitas tenaga kerja. Data BPS Jawa Timur 2023 mencatat arus logistik melalui tol meningkat 17,8% dibanding 2019, menunjukkan intensitas distribusi barang yang semakin tinggi. Menurut Kementerian PUPR, kehadiran Tol Trans Jawa menurunkan biaya logistik rata-rata sebesar 20 - 25% untuk sektor transportasi darat.

**Gambar 2. Kabupaten Kota Jawa Timur yang dilewati Jalan Tol (Athillah Al, Muh Ilham P & Ayu Putri P - 2025)**



**Keberadaan jalan tol mendorong pertumbuhan industri dan menyerap tenaga kerja di Jawa Timur. Pada sektor pertanian dan perikanan di Jawa Timur** sangat bergantung pada pengiriman cepat untuk mendapatkan keuntungan signifikan; misalnya, pengiriman sayuran dari Malang ke Jakarta kini bisa dilakukan *overnight*, mengurangi risiko kerusakan hingga 30%. Selain meningkatkan efisiensi logistik ketersediaan tol juga memperkuat daya tarik investasi, mendorong pertumbuhan kawasan industri di Jawa Timur. Dinas Penanaman Modal dan PTSP mencatat nilai realisasi investasi di wilayah sekitar akses tol, seperti Nganjuk dan Jombang tumbuh 12,4% dibandingkan sebelum tol beroperasi, sementara kawasan industri seperti Ngawi Industrial Park dan Jombang Industrial Estate mulai berkembang pesat, menyerap banyak tenaga kerja baru.

**Jalan tol mendukung pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal.** Perubahan positif juga dirasakan oleh UMKM dan ekonomi lokal yang mendapat dorongan melalui kemudahan distribusi produk dan perluasan akses pasar. *Rest area* tol berperan sebagai etalase produk lokal menurut Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur (2023), lebih dari 320 UMKM terlibat di 18 *rest area* di wilayah Jawa Timur, dengan total omzet gabungan mencapai ±Rp45 miliar per tahun. Produk yang ditawarkan mencakup makanan olahan, kerajinan tangan dan produk pertanian segar.

**Peran jalan tol Trans Jawa dalam meningkatkan pariwisata dan aktivitas ekonomi Jawa Timur.** Di sektor wisata jalan tol Trans Jawa membuka akses lebih mudah ke berbagai destinasi wisata di Jawa Timur, mendorong pertumbuhan kunjungan wisatawan dan peningkatan



## BOKS 7

**Tabel 2. Tabel Regresi Difference-in-Differences Hubungan Antara Jalan Tol Trans Jawa terhadap Produktivitas Tingkat Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur pada Periode 2011 – 2023 (Athillah AI, Muh Ilham P & Ayu Putri P – 2025)**

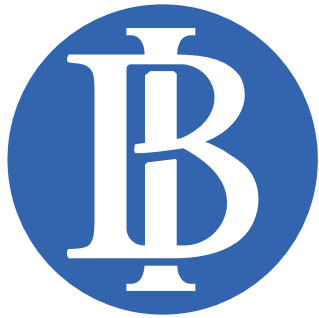
Variabel	in Prdrv Total	in Prdrv Manuf	in Prdrv Transport	in Prdrv Akomodasi
post d0 15 pintu	0,0497*** (0,0134)	0,0352 (0,0716)	0,422*** (0,113)	-0,174** (0,801)
in gov exp	0,134*** (0,0393)	0,0936 (0,0841)	0,222 (0,208)	0,0964 (0,134)
pet working age	-0,0180 (0,409)	2,419 (2,309)	8,853*** (2,503)	-2,325 (2,625)
in years school	-0,318*** (0,113)	-0,0883 (0,622)	-1,392 (0,998)	-2,170*** (0,518)
in pipolation	-0,328 (0,331)	2,130 (1,674)	-6,420** (2,400)	5,171*** (1,296)
pet jasa	-0,175*** (0,0290)	-0,00848 (0,0415)	0,489*** (0,869)	0,0594 (0,0591)
IPM	0,0486*** (0,00668)	-0,0125 (0,0230)	0,465*** (0,0549)	-0,181*** (0,0321)
in destiny	-0,000203 (0,00744)	0,0745** (0,0363)	-0,172*** (0,0487)	0,152*** (0,0714)
in inflasi	-0,0176* (0,00899)	0,0624** (0,0300)	-0,708*** (0,0424)	0,458*** (0,0486)
covid	-0,0089 (0,0109)	0,0612 (0,076)	-0,437*** (0,0788)	0,0244*** (0,0693)
constant	-5,526 (0,014)	-32,32 (22,18)	49,61 (29,84)	-60,35*** (16,23)
kabkot FE	yes	yes	yes	yes
observations	360	360	360	360
R-Squad	0,866	0,127	0,849	0,709
Number of kode kabkot	30	30	30	30

Robust standart errors in parentheses  
\*\*\*p<0,01, \*\*p<0,05, \*p<0,1

Dari hasil penelitiannya diusulkan untuk memaksimalkan dampak jalan tol Trans Jawa secara inklusif, diperlukan tiga langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan konektivitas *last-mile* melalui perbaikan jalan penghubung ke gerbang tol.
2. Mengintegrasikan pembangunan fisik dengan pengembangan SDM dan adopsi teknologi sesuai kebutuhan industri di koridor tol.

3. Menerapkan perencanaan berbasis potensi lokal yang selaras dengan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga tol berfungsi sebagai penggerak ekonomi wilayah, bukan hanya sekadar jalur transportasi.



# Lampiran

## Lampiran 1. Wilayah Kerja Bank Indonesia di Jawa Timur

Wilayah Kerja	Area
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur *)	Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang	Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri	Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Madiun, Kabupaten Kediri, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pacitan.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember	Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi

\*) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur pada prinsipnya mewilayahi seluruh Jawa Timur dan melaksanakan fungsi koordinasi terhadap Kantor Perwakilan BI Malang, BI Kediri dan BI Jember.

# Daftar Istilah

## **Administered price**

Harga barang yang diatur oleh pemerintah, misalnya harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik.

## **APBD**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan setujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

## **BI 7 Days Reverse Repo Rate**

Suku bunga referensi kebijakan moneter dan ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur setiap bulannya.

## **BI-RTGS**

Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, yang merupakan suatu penyelesaian kewajiban bayar-membayar [*settlement*] yang dilakukan secara *on-line* atau seketika untuk setiap instruksi transfer dana.

## **Bobot Inflasi**

Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.

## **Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka (deposito).

## **Ekspor dan Impor**

Dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar provinsi.

## **Financing to Deposit Ratio (FDR) atau Loan to Deposit Ratio (LDR)**

Rasio pembiayaan atau kredit terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank, baik dalam Rupiah dan valas. Terminologi FDR untuk bank syariah, sedangkan LDR untuk bank konvensional.

## **Imported inflation**

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu inflasi yang berasal dari pengaruh perkembangan harga di luar negeri (eksternal).

## **Indeks Ekspektasi Konsumen**

Salah satu pembentuk IKK, indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang dengan skala 1 – 100.

## **Indeks Kondisi Ekonomi**

Salah satu pembentuk IKK, indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dengan skala 1 – 100.

## **Indeks Keyakinan Konsumen (Consumer Confidence)**

Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang dengan skala 1 – 100.

## **Inflasi IHK**

Kenaikan harga barang dan jasa dalam satu periode yang diukur dengan perubahan indeks harga konsumen (IHK), yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.

## **Inflasi Inti**

Inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen *volatile foods* dan *administered prices*.

## **Inflow**

Uang yang diedarkan aliran masuk uang kartal ke Bank Indonesia.

## **Investasi**

Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi.

## **Kredit**

Penyediaan uang atau tagihan yang sejenis, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

- Pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *note purchase agreement* (NPA)
- Pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.

## **Loan to Deposit Ratio (LDR) atau Financing to Deposit Ratio (FDR)**

Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. Terminologi FDR untuk bank syariah, sedangkan LDR untuk bank konvensional.

## **Loan to Funding Ratio (LFR)**

Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga dan surat berharga yang diterbitkan bank.

## **Liaison**

Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.

## **mtm**

*Month to month*. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

## **Net Inflow**

Uang yang diedarkan *inflow* lebih besar dari *outflow*.

## **Non Performing Financing (NPF) atau Non Performing Loan (NPL)**

Rasio pembiayaan atau kredit macet terhadap total penyaluran pembiayaan atau kredit oleh bank, baik dalam rupiah dan valas, Terminologi NPF dan pembiayaan untuk bank syariah, sedangkan NPL dan kredit untuk bank konvensional. Kriteria NPF atau NPL adalah (1) kurang lancar, (2) diragukan dan (3) macet.

## **Omzet**

Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.

## **Outflow**

Aliran keluar uang kartal dari Bank Indonesia.

**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

**qta**

*Quarter to quarter*. Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.

**Real Time Gross Settlement (RTGS)**

Sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika.

**Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)**

Sistem pertukaran data keuangan elektronik dan/atau warkat antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

**Volatile Food**

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu khususnya komoditas bahan makanan.

**yoy**

*Year on year*. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA  
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Pahlawan No.105 Surabaya Jawa Timur

Telp. +6231 3520011, Fax. +6231 3520025

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

